



LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Daerah Kota Cimahi

audited
2023



WALI KOTA CIMAHI

Cimahi, 17 Mei 2024

Nomor : 90.04/1487/BPKAD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Surat Representasi
Manajemen**

Yth. Kepala BPK-RI
Perwakilan Jawa Barat
Jl. Muhamad Toha No.164 Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 31 Desember 2023, Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Operasional per 31 Desember 2023, Laporan Arus Kas 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

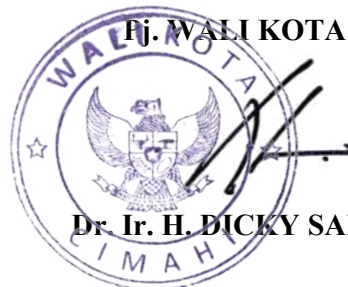
Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.



WALI KOTA CIMAHI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun, berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, posisi kas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cimahi, 17 Mei 2024

P. WALI KOTA CIMAHI,



Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Pernyataan Tanggung Jawab	
Laporan Realisasi Anggaran	
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Arus Kas	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI	6
2.1 Visi dan Misi Kota Cimahi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi	9
2.3 Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022	31
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	47
3.1 Kebijakan Akuntansi	47
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	76
4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	76
4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	95
4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca	96
4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	148
4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	168
4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	173
BAB V PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	176
5.1 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (<i>Subsequent Event</i>)	176
5.2 Profil Entitas	176
5.3 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2022	178
5.4 Hubungan dengan DPRD, BPK serta Forkopimda	182
5.5 Pengaruh <i>Stakeholder</i> (pemegang kepentingan): DPRD	183

5.6	Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan	183
5.7	Alamat Kantor	183
BAB VI	PENUTUP	184

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2023	10
2.2 Indeks Gini Ratio	14
2.3 Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2023	16
2.4 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023	17
2.5 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023	17
2.6 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur dalam APBD Tahun Anggaran 2023	18
2.7 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pengawasan dalam APBD Tahun Anggaran 2023	19
2.8 Rincian Perubahan Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023	20
2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023	23
2.10 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023	25
2.11 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023	31
2.12 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	32
2.13 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023	37
2.14 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2023	37
2.15 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2023	38
2.16 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023	39
2.17 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023	39

Tabel		Hal
2.18	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Pangan Tahun Anggaran 2023	40
2.19	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023	40
2.20	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023	41
2.21	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2023	41
2.22	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun Anggaran 2023	42
2.23	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Tahun Anggaran 2023	43
2.24	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola BPKAD Tahun Anggaran 2023	43
2.25	Pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023	46
4.1	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	78
4.2	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023	79
4.3	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023	79
4.4	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023	80
4.5	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023	81
4.6	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023	82
4.7	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023	82
4.8	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023	83
4.9	Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023	83
4.10	Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023	84
4.11	Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023	85
4.12	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023	85
4.13	Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2023	86
4.14	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023	86

Tabel	Hal
4.15 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023	87
4.16 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023	87
4.17 Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023	88
4.18 Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023	90
4.19 Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023	90
4.20 Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023	91
4.21 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023	91
4.22 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	92
4.23 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023	93
4.24 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023	93
4.25 Defisit Tahun Anggaran 2023	93
4.26 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	94
4.27 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	94
4.28 Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023	95
4.29 Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023	95
4.30 Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	96
4.31 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023	96
4.32 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023	97
4.33 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023	97
4.34 Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2023	98
4.35 Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2023	98
4.36 Rincian Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2023	98
4.37 Saldo Kas di BLUD Air Minum Tahun Anggaran 2023	99
4.38 Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2023	99
4.39 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2023	99
4.40 Saldo Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2023	100
4.41 Saldo Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023	101
4.42 Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023	101

Tabel	Hal
4.43 Rincian Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023	101
4.44 Mutasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023	102
4.45 Rincian Potensi Denda Pajak Tahun Anggaran 2023	102
4.46 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023	103
4.47 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023	103
4.48 Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023	103
4.49 Rincian Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023	103
4.50 Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023	104
4.51 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023	104
4.52 Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023	105
4.53 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023	105
4.54 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023	106
4.55 Rincian Saldo Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Belum Disalurkan Tahun Anggaran 2023	106
4.56 Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2023	106
4.57 Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2023	107
4.58 Mutasi Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2023	107
4.59 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2023	107
4.60 Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023	107
4.61 Rincian Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023	108
4.62 Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru Tahun Anggaran 2023	108
4.63 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023	109
4.64 Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2023	110
4.65 Rincian Saldo Persediaan OPD Tahun Anggaran 2023	110
4.66 Rincian Saldo Persediaan Berdasarkan Jenis Tahun Anggaran 2023	111
4.67 Saldo Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023	112
4.68 Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023	113
4.69 Penyetoran Pokok Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023	113
4.70 Rincian Sisa Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023	114
4.71 Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023	115

Tabel	Hal
4.72 Rincian Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023	115
4.73 Realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk	115
4.74 Rincian Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	116
4.75 Rincian Sisa Modal yang Disertakan pada PD. Jati Mandiri	116
4.76 Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri Tahun 2023 <i>Unaudited</i>	118
4.77 Saldo Aset Tetap Tahun Anggaran 2023	119
4.78 Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023	120
4.79 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023	121
4.80 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023	122
4.81 Konfirmasi Kepala BPN Kota Cimahi atas Status Jalan	123
4.82 Rincian Kondisi Lahan Hasil Penelitian Fisik	126
4.83 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023	132
4.84 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023	134
4.85 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun Anggaran 2023	135
4.86 Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang Berada diatas Tanah TNI	136
4.87 Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang Kembali ke Pemerintah Daerah Kota Cimahi	137
4.88 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023	139
4.89 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2023	140
4.90 Rincian Saldo Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023	142
4.91 Rincian Aset Tidak Berwujud Berupa <i>Software</i> Tahun Anggaran 2023	142
4.92 Rincian Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2023	143
4.93 Rincian Izin Retribusi yang Masa Tagihnya Kadaluwarsa pada Tahun 2013	144
4.94 Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023	145
4.95 Saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2023	145
4.96 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023	146
4.97 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023	147
4.98 Saldo Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023	147
4.99 Saldo Ekuitas Tahun Anggaran 2023	148
4.100 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2023	150

Tabel	Hal
4.101 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2023	150
4.102 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2023	150
4.103 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2023	151
4.104 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Tahun Anggaran 2023	152
4.105 Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2023	153
4.106 Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2023	153
4.107 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Tahun Anggaran 2023	153
4.108 Dana Alokasi Umum – LO Tahun Anggaran 2023	154
4.109 Dana Alokasi Khusus – LO Tahun Anggaran 2023	154
4.110 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO Tahun Anggaran 2023	154
4.111 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2023	155
4.112 Bantuan Keuangan Provinsi - LO Tahun Anggaran 2023	155
4.113 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun Anggaran 2023	155
4.114 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023	156
4.115 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023	157
4.116 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2023	158
4.117 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023	160
4.118 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023	160
4.119 Rincian Beban Bunga Tahun Anggaran 2023	161
4.120 Beban Subsidi Tahun Anggaran 2023	161
4.121 Beban Hibah Tahun Anggaran 2023	162
4.122 Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023	162
4.123 Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2023	162
4.124 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023	163
4.125 Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023	165
4.126 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023	165
4.127 Beban Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023	166
4.128 Beban Lain-Lain Tahun Anggaran 2023	166
4.129 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023	167

Tabel	Hal	
4.130	Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2023	168
4.131	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023	168
4.132	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023	169
4.133	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023	169
4.134	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023	170
4.135	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023	170
4.136	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023	170
4.137	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023	171
4.138	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023	171
4.139	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggarna 2023	171
4.140	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023	172
4.141	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023	172
4.142	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023	173
5.1	Daftar SKPD Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2023	179
5.2	Alamat Kantor SKPD Kota Cimahi	183

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Indeks Pembangunan Manusia	11
2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	11
2.3 Angka Kemiskinan	12
2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	13
2.5 Angka Inflasi	15
5.1 Peta Administrasi Kota Cimahi	177

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023
Lampiran 2	Daftar Piutang Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran 3	Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2023
Lampiran 4	Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023
Lampiran 5	Biaya Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2023
Lampiran 6	Piutang Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2023
Lampiran 7a	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Per 31 Desember 2023
Lampiran 7b	Rekapitulasi Piutang Dan Penyisihan BLUD Air Minum Per 31 Desember 2023
Lampiran 8	Saldo Akhir Persediaan Per 31 Desember 2023
Lampiran 9	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah PD. Jati Mandiri Per 31 Desember 2023
Lampiran 10	Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023
Lampiran 11a	Rekapitulasi Laporan Aset Tetap BOS Tahun 2023
Lampiran 11b	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Pada Jalan Lingkungan Tahun 2023
Lampiran 12	Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023
Lampiran 13	Daftar Aset Tidak Berwujud Tahun 2023
Lampiran 14	Rekapitulasi Aset Lain Lain Tahun 2023
Lampiran 15	Utang Belanja Per 31 Desember 2023
Lampiran 16	Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan Dan Pembangunan (Retensi) Per 31 Desember 2023
Lampiran 17	Utang RSUD Cibabat Kepada Rekanan Per 31 Desember 2023
Lampiran 18	Rincian Utang KJP Dan KDN Per 31 Desember 2023

Lampiran 19	Penjelasan Mutasi Penyesuaian Pendapatan LRA - Pendapatan LO Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023
Lampiran 20	Penjelasan Mutasi Penyesuaian Belanja – Beban Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023
Lampiran 21	Rincian Beban Jasa Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023
Lampiran 22	Rincian Perhitungan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
(LRA)**



WALI KOTA CIMAHI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	193.265.398.170,00	210.047.163.097,00	108,68	193.890.140.403,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	12.033.217.745,00	12.952.863.977,00	107,64	11.294.079.342,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	100,00	11.022.613.597,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	190.550.952.906,00	190.990.650.318,00	100,23	178.469.886.228,53
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	407.477.197.230,00	425.618.305.801,00	104,45	394.676.719.570,53
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	60.444.852.156,00	55.785.582.168,00	92,29	54.229.638.467,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	32.960.972.812,00	26.716.968.211,00	81,06	36.604.255.359,00
	Dana Alokasi Umum	553.056.036.000,00	553.049.730.500,00	100,00	519.937.401.610,00
	Dana Alokasi Khusus	175.568.107.431,00	170.482.635.757,00	97,10	161.287.016.436,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	822.029.968.399,00	806.034.916.636,00	98,05	772.058.311.872,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	-	-	-	5.528.168.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	5.528.168.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	154.233.436.377,00	145.938.307.278,00	94,62	146.414.475.669,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	21.446.376.579,00	21.241.493.000,00	99,04	12.360.600.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	175.679.812.956,00	167.179.800.278,00	95,16	158.775.075.669,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	997.709.781.355,00	973.214.716.914,00	97,54	936.361.555.541,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.405.186.978.585,00	1.398.833.022.715,00	99,55	1.331.038.275.111,53
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	690.816.358.202,00	642.933.272.638,00	93,07	658.940.382.015,00
	Belanja Barang	720.335.671.235,00	666.384.924.873,00	92,51	588.254.398.560,17
	Belanja Bunga	500.000.000,00	170.419.912,00	34,08	234.672.144,00
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	54.870.529.600,00	54.633.767.129,00	99,57	39.388.772.249,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.419.805.534,00	4.148.320.000,00	93,86	3.133.871.600,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.470.942.364.571,00	1.368.270.704.552,00	93,02	1.289.952.096.568,17
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	4.148.782.770,00	3.754.393.256,00	90,49	171.269.485,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	46.908.675.774,00	42.675.735.899,00	90,98	22.831.957.980,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	46.477.173.465,00	44.380.998.889,00	95,49	40.246.977.335,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.652.516.154,00	36.473.543.179,00	89,72	16.911.640.321,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.982.215.730,00	2.959.285.645,00	99,23	1.408.197.523,00
	Belanja Aset Lainnya	915.633.052,00	758.289.070,00	82,82	-
	Jumlah Belanja Modal	142.084.996.945,00	131.002.245.938,00	92,20	81.570.042.644,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	11.128.006.211,00	3.006.837.758,00	27,02	6.050.171.068,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	11.128.006.211,00	3.006.837.758,00	27,02	6.050.171.068,00
	JUMLAH BELANJA	1.624.155.367.727,00	1.502.279.788.248,00	92,50	1.377.572.310.280,17

(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	100.000.000,00
	Jumlah Transfer	-	-	-	100.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.624.155.367.727,00	1.502.279.788.248,00	92,50	1.377.672.310.280,17
	SURPLUS / DEFISIT	(218.968.389.142,00)	(103.446.765.533,00)	47,24	(46.634.035.168,64)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	100,00	308.665.364.620,64
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	100,00	308.665.364.620,64
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	9.777.623.090,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	32.429.809.000,00	30.855.508.220,00	95,15	10.633.131.310,00
	PEMBIAYAAN NETO	218.968.389.142,00	220.542.689.922,00	100,72	298.032.233.310,64
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	117.095.924.389,00		251.398.198.142,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN
LEBIH (LPSAL)**



WALI KOTA CIMAHI

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64
3	Subtotal (1-2)	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLpa/SiKPA)	117.095.924.389,00	251.398.198.142,00
5	Subtotal (3+4)	117.095.924.389,00	251.398.198.142,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahunan Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	117.095.924.389,00	251.398.198.142,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



P. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

NERACA



WALI KOTA CIMAHI
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	105.005.699.466,00	233.273.390.848,00
	Kas di RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	155.655.636,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	200,00	800.000,00
	Kas BLUD	11.781.362.523,00	17.614.806.592,00
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas Di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	308.862.200,00	353.545.066,00
	Kas Lainnya	583.400,00	579.952.960,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	138.164.438.365,00	134.678.166.819,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(71.384.856.693,64)	(58.882.194.046,77)
	Piutang Pajak Netto	66.779.581.671,37	75.795.972.772,23
	Piutang Retribusi	3.420.632.935,00	3.105.262.342,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.832.016.740,00)	(2.365.899.654,50)
	Piutang Retribusi Netto	588.616.195,00	739.362.687,50
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.615.642.548,00	7.704.535.252,00
	Belanja Dibayar Dimuka	4.129.990.558,29	3.934.019.971,57
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	165.220.416,43	217.551.668,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(165.220.416,43)	(217.551.668,00)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-
	Piutang Lainnya	19.113.841.793,63	8.139.297.204,17
	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.670.679.549,29)	(1.497.446.423,69)
	Piutang Lainnya Netto	17.443.162.244,34	6.641.850.780,48
	Persediaan	28.475.235.097,35	28.649.727.503,26
	Jumlah Aset Lancar	240.128.736.103,34	375.443.620.069,04
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	55.898.592,00	52.770.586,00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	55.898.592,00	52.770.586,00
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	70.302.688.408,00	78.105.263.630,50
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	70.302.688.408,00	78.105.263.630,50
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	70.358.587.000,00	78.158.034.216,50
3	ASET TETAP		
	Tanah	1.101.608.259.390,60	1.022.360.336.284,00
	Peralatan dan Mesin	745.398.421.910,57	671.637.270.027,82
	Gedung dan Bangunan	950.061.492.540,88	807.092.567.588,52
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	927.006.876.221,49	806.294.757.832,59
	Aset Tetap Lainnya	74.249.906.662,47	71.698.455.667,47
	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.927.884.766,00	229.627.190.875,36
	Akumulasi Penyusutan	(1.383.428.508.398,33)	(1.237.866.506.093,70)
	Jumlah Aset Tetap	2.417.824.333.093,67	2.370.844.072.182,06

No.	Uraian	2023	2022
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	30.000.000.000,00	-
	Jumlah Dana Cadangan	30.000.000.000,00	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Aset Tak Berwujud	12.748.806.419,90	11.492.709.779,90
	Akumulasi Amortisasi	(10.810.640.260,53)	(9.452.681.527,40)
	Aset Tak Berwujud Netto	1.938.166.159,38	2.040.028.252,50
	Aset Lain-Lain	147.699.273.210,20	136.915.695.665,23
	Jumlah Aset Lainnya	152.985.784.369,57	142.304.068.917,73
	JUMLAH ASET	2.911.297.440.566,59	2.966.749.795.385,33
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	583.400,00	125.000,00
	Utang Bunga	61.632.238,01	92.533.016,65
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	855.508.220,00	855.508.220,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	1.706.337.515,06	330.272.010,00
	Utang Belanja	2.316.428.153,00	3.373.424.947,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	25.834.888.425,00	11.315.101.409,72
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	30.775.377.951,07	15.966.964.603,37
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	855.508.218,70	1.711.016.438,70
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	855.508.218,70	1.711.016.438,70
	JUMLAH KEWAJIBAN	31.630.886.169,77	17.677.981.042,07
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.879.666.554.396,81	2.949.071.814.343,26
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.911.297.440.566,59	2.966.749.795.385,33

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


PI. WALI KOTA CIMAHI
Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

LAPORAN OPERASIONAL (LO)



WALI KOTA CIMAHI

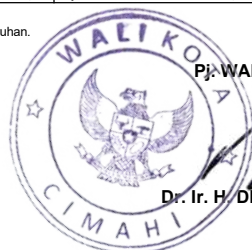
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 213.533.434.643,00	Rp 199.763.900.648,00	Rp 13.769.533.995,00	6,89
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 13.267.627.070,00	Rp 12.124.254.267,00	Rp 1.143.372.803,00	9,43
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 11.627.628.409,00	Rp 11.022.613.597,00	Rp 605.014.812,00	5,49
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 200.653.676.660,00	Rp 177.314.540.170,94	Rp 23.339.136.489,06	13,16
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 439.082.366.782,00	Rp 400.225.308.682,94	Rp 38.857.058.099,06	9,71
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 61.665.229.000,00	Rp 59.967.035.635,00	Rp 1.698.193.365,00	2,83
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp 38.980.064.000,00	Rp 39.358.275.570,00	Rp (378.211.570,00)	-0,96
	Dana Alokasi Umum	Rp 553.049.730.500,00	Rp 519.937.401.610,00	Rp 33.112.328.890,00	6,37
	Dana Alokasi Khusus	Rp 170.482.635.757,00	Rp 161.287.016.436,00	Rp 9.195.619.321,00	5,70
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 824.177.659.257,00	Rp 780.549.729.251,00	Rp 43.627.930.006,00	5,59
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	DID	Rp -	Rp 5.528.168.000,00	Rp (5.528.168.000,00)	-100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp 5.528.168.000,00	Rp (5.528.168.000,00)	-100,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 143.849.414.574,00	Rp 144.324.705.350,00	Rp (475.290.776,00)	-0,33
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 21.241.493.000,00	Rp 12.360.600.000,00	Rp 8.880.893.000,00	71,85
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 165.090.907.574,00	Rp 156.685.305.350,00	Rp 8.405.602.224,00	5,36
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 989.268.566.831,00	Rp 942.763.202.601,00	Rp 46.505.364.230,00	4,93
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 12.297.943.942,63	Rp 13.205.048.800,00	Rp (907.104.857,37)	-6,87
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 12.297.943.942,63	Rp 13.205.048.800,00	Rp (907.104.857,37)	-6,87
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.440.648.877.555,63	Rp 1.356.193.560.083,94	Rp 84.455.317.471,69	6,23
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 643.002.415.638,00	Rp 659.094.670.643,00	Rp (16.092.255.005,00)	-2,44
	Beban Persediaan	Rp 255.716.742.218,47	Rp 211.229.068.528,36	Rp 44.487.673.690,11	21,06
	Beban Jasa	Rp 364.755.609.359,28	Rp 329.546.472.884,75	Rp 35.209.136.474,53	10,68
	Beban Pemeliharaan	Rp 26.587.355.167,00	Rp 19.810.776.950,00	Rp 6.776.578.217,00	34,21
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 48.122.616.250,00	Rp 37.958.799.139,00	Rp 10.163.817.111,00	26,78
	Beban Bunga	Rp 139.519.133,36	Rp 198.166.004,18	Rp (58.646.870,82)	-29,59
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
	Beban Hibah	Rp 50.649.381.829,00	Rp 38.597.225.649,00	Rp 12.052.156.180,00	31,23
	Beban Bantuan Sosial	Rp 4.148.320.000,00	Rp 3.133.871.600,00	Rp 1.014.448.400,00	32,37
	Beban Penyusutan	Rp 118.515.829.397,90	Rp 98.614.552.341,66	Rp 19.901.277.056,24	20,18
	Beban Amortisasi	Rp 1.357.958.733,13	Rp 1.223.417.655,01	Rp 134.541.078,12	11,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 13.275.554.031,84	Rp 13.231.653.056,71	Rp 43.900.975,12	0,33
	Beban Transfer	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp (100.000.000,00)	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 1.526.271.301.757,97	Rp 1.412.738.674.451,67	Rp 113.532.627.306,30	8,04
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-Rp 85.622.424.202,34	-Rp 56.545.114.367,73		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 52.360.837.006,86	-Rp 15.036.205.911,30	Rp 67.397.042.918,16	-448,23
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp 52.360.837.006,86	-Rp 15.036.205.911,30	Rp 67.397.042.918,16	-448,23
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-Rp 33.261.587.195,48	-Rp 71.581.320.279,03	Rp 38.319.733.083,55	-53,53
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp 1.626.517.480,00	Rp 5.570.083.787,00	Rp (3.943.566.307,00)	-70,80
	POS LUAR BIASA	-Rp 1.626.517.480,00	-Rp 5.570.083.787,00	Rp 3.943.566.307,00	-70,80
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-Rp 34.888.104.675,48	-Rp 77.151.404.066,03	Rp 42.263.299.390,55	-54,78

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Pj. WALI KOTA CIMAHI

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

LAPORAN ARUS KAS

(LAK)



WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	210.047.163.097,00	193.890.140.403,00
4	Penerimaan Retribusi daerah	12.952.863.977,00	11.294.079.342,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.022.613.597,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	190.671.489.141,00	177.617.892.290,53
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	55.785.582.168,00	54.229.638.467,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.716.968.211,00	36.604.255.359,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	553.049.730.500,00	519.937.401.610,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	170.482.635.757,00	161.287.016.436,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	5.528.168.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	145.938.307.278,00	146.414.475.669,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	21.241.493.000,00	12.360.600.000,00
16	Penerimaan Hibah	-	-
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Dana BOS	-	-
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas	1.398.513.861.538,00	1.330.186.281.173,53
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	642.933.272.638,00	658.940.382.015,00
23	Pembayaran Barang	666.384.924.873,00	588.254.398.560,17
24	Pembayaran Bunga	170.419.912,00	234.672.144,00
25	Pembayaran Subsidi	-	-
26	Pembayaran Hibah	54.633.767.129,00	39.388.772.249,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	4.148.320.000,00	3.133.871.600,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	100.000.000,00
29	Pembayaran Tak Terduga	3.006.837.758,00	6.050.171.068,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
34	Jumlah Arus Keluar Kas	1.371.277.542.310,00	1.296.102.267.636,17
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	27.236.319.228,00	34.084.013.537,36
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan		
39	Penjualan atas Tanah		
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	80.997.100,00	809.394.038,00
41	Penjualan atas Gedung dan bangunan	200.389.200,00	32.941.100,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
43	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
44	Penjualan atas Aset Lainnya	37.774.877,00	9.658.800,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
47	Jumlah Arus Masuk Kas	319.161.177,00	851.993.938,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	
50	Perolehan Tanah	3.754.393.256,00	171.269.485,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	42.675.735.899,00	22.831.957.980,00
52	Perolehan Gedung dan bangunan	44.380.998.889,00	40.246.977.335,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.473.543.179,00	16.911.640.321,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.959.285.645,00	1.408.197.523,00
55	Perolehan Aset Lainnya	758.289.070,00	-

No.	Uraian	2023	2022
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	9.777.623.090,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
58	Jumlah Arus Keluar Kas	161.002.245.938,00	91.347.665.734,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(160.683.084.761,00)	(90.495.671.796,00)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
61	Arus Masuk Kas		
62	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
63	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
64	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
66	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
67	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
71	Penarikan Kembali Investasi Daerah - Dana Bergulir		
72	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
73	Arus Keluar Kas		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
80	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
81	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
82	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
84	Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	855.508.220,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)	(855.508.220,00)
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
87	Arus Masuk Kas		
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	97.468.281.455,17	87.773.363.792,14
89	Jumlah Arus Masuk Kas	97.468.281.455,17	87.773.363.792,14
90	Arus Keluar kas		
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	97.467.823.055,17	87.821.515.387,14
92	Jumlah Arus Keluar Kas	97.467.823.055,17	87.821.515.387,14
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	458.400,00	(48.151.595,00)
94	Kenaikan/Penurunan Kas	(134.301.815.353,00)	(57.315.318.073,64)
95	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	251.398.323.142,00	308.713.641.215,64
96	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	117.096.507.789,00	251.398.323.142,00
97	Saldo Akhir Kas	117.096.507.789,00	251.398.323.142,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



PJ. WALI KOTA CIMAHI,
Dr. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
(LPE)**



WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

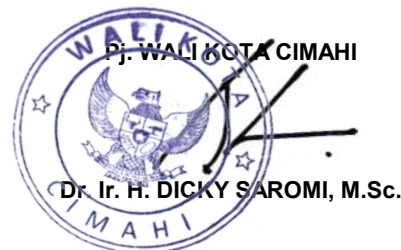
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	2.949.071.814.343,26	2.916.024.217.594,05
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(34.888.104.675,48)	(77.151.404.066,03)
3	RK PPKD	-	-
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	0,39
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(116.271.009,17)	(687.988.078,24)
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	(60.087.009,00)
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	192.364.436,00	(20.920.936,00)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	66.499.000,00	17.471.159.667,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	(5.000.000,00)
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	- Penyisihan Piutang	185.872.425,44	1.041.345.213,18
	- Akumulasi Penyusutan	(27.046.172.906,73)	92.624.323.886,92
	- Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	340.844,00
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	(7.799.447.216,50)	(164.172.773,00)
14	EKUITAS AKHIR	2.879.666.554.396,81	2.949.071.814.343,26

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pj. WALI KOTA CIMAHI

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi selama 1 (satu) periode pelaporan dan bertujuan untuk :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara lengkap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 295);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 299).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

- 2.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi
- 2.3. Kebijakan Keuangan dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2022

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab V Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
 - 5.1 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*subsequent event*)
 - 5.2 Profil Entitas
 - 5.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 5.4 Hubungan dengan DPRD, BPK, dan Forkopimda
 - 5.5 Pengaruh *Stakeholder*: DPRD
 - 5.6 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan
 - 5.7 Alamat Kantor
- Bab VI Penutup

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

2.1 VISI DAN MISI KOTA CIMAHI.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun 2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, periode tahun 2021-2025 adalah “Tahap Pencapaian”. Tahap Pencapaian dimaksudkan untuk pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi tentunya harus tetap mengacu pada Tahap Pencapaian yang dimaksud dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada masa transisi ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan **Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.**

Pada tahap ini pemerintah daerah berupaya untuk memelihara kondisi masyarakat Cimahi yang sejahtera dengan mempertahankan keunggulan dan potensi daerah yang telah dimiliki masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi diharapkan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023–2026 berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal. Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005- 2025 yaitu :

“ CIMAHI KOTA CERDAS “

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari **Creative**

yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi “**CIMAH KOTA CERDAS**” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kota Cimahi dalam RPJPD ditandai dengan :

1. Aspek Sumberdaya manusia

Ditunjukkan dengan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023–2026 mampu bersaing dan memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2. Aspek Ekonomi

Ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, kemitraan yang saling menguntungkan baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional, serta kontribusi sektor industri, jasa dan perdagangan yang semakin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Aspek Pemerintahan

Ditunjukkan dengan kondisi demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial, penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang telah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. Aspek Sosial Budaya

Ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis.

5. Aspek lingkungan hidup

Ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

(*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestarinya pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar generasi.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya

saing yang lebih baik.

Misi Empat : Mewujudkan Kesenjangan Pembangunan yang Berkeadilan

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

Misi Lima :Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada : pertama, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; kedua, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta ketiga, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4(empat) tahun. Pernyataan tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. RPD Tahun 2023-2026 Kota Cimahi memuat 7 (Tujuh) Tujuan Kota dan 28 (Dua puluh Delapan) Sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (impact). Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun

nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi. Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana.

Penetapan ketujuh indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023–2026 yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan trend data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

2.2.1 Kebijakan Keuangan Dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023

2.2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi dan Capaian Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2023

Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyesuaian arah pembangunan antara pusat dan daerah. Konstelasi arah pembangunan nasional, menuntut Kota Cimahi untuk bisa terlibat aktif dalam menyelaraskan prospek pembangunan yang senada dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Adapun Kota Cimahi menuangkan arah pembangunannya dalam dokumen ini yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Perubahan, dengan mencantumkan perkiraan target dari Indikator Makro Ekonomi untuk tahun 2023, yaitu sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Target Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2023

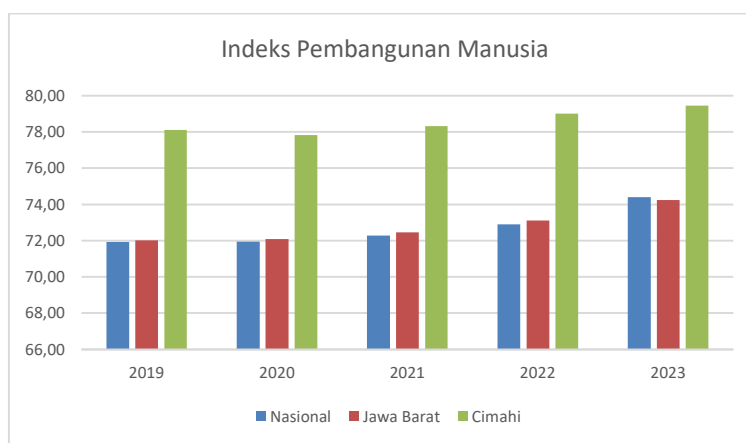
No	Indikator Makro	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,22
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,63
3	Presentase Penduduk Miskin	%	5,35
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	12,61
5	Indeks Gini	Poin	0,409

No	Indikator Makro	Satuan	Target
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi. Pada tahun 2023, IPM Kota Cimahi telah mencapai 79,69 yang sudah mencapai kategori tinggi. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka IPM Kota Cimahi pada kurun waktu tahun 2019-2023 selalu berada diatas angka IPM Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPM tahun 2023 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Tahun 2023 menunjukkan IPM Cimahi mencapai 79,69 sementara IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 74,24 dan 74,39. Perbandingan IPM Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan nasional disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah sebesar 1,40%, angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang angkanya sebesar 1,07%. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut:



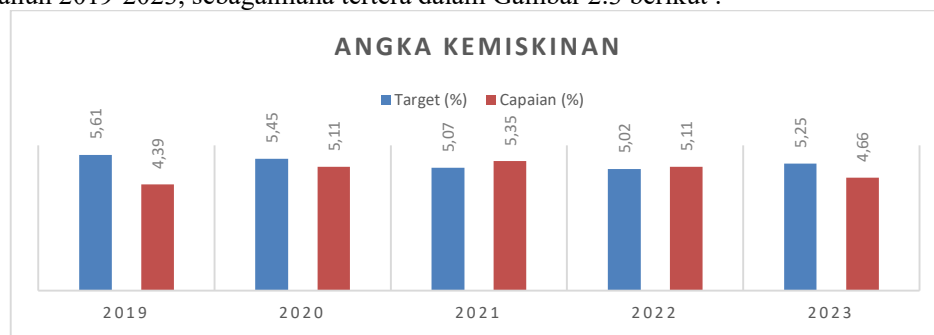
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Tren kenaikan laju pertumbuhan pendudukan dapat merupakan kontribusi dari keberhasilan program Keluarga Berencana. Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur PUS. Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

c. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren naik turun selama periode Tahun 2019-2023, sebagaimana tertera dalam Gambar 2.3 berikut :



Gambar 2.3 Angka Kemiskinan

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

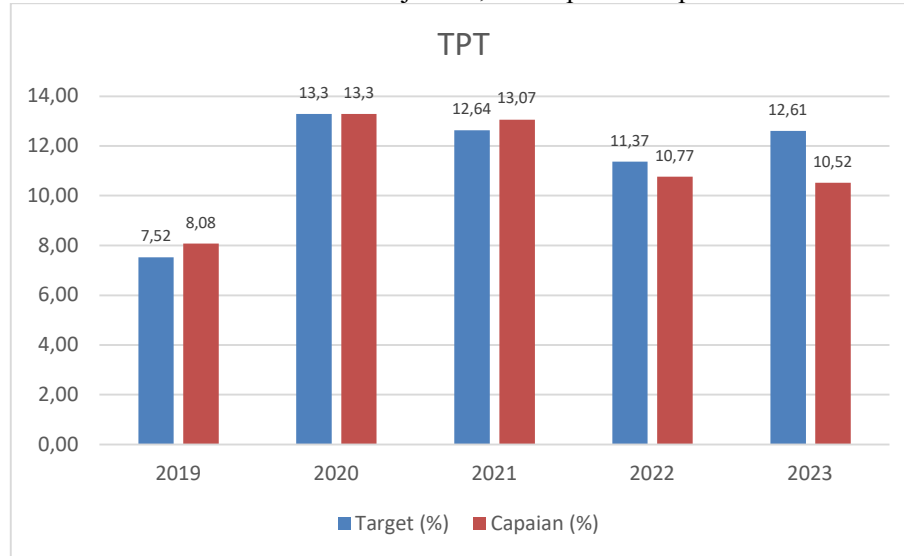
Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Cimahi terus mengalami perbaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dimana baik jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada periode tersebut, namun kondisi ini melemah pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan presentase penduduk miskin tersebut disinyalir karena pandemi COVID 19 yang mengakibatkan dampak ekonomi dan dampak sosial dan kembali menguat pada Tahun 2022 dan 2023.

Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di Tahun 2023 adalah:

1. Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kota Cimahi dalam menyusun *Roadmap* Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem:
 - a. Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Dalam Rangka Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Ekstrem (Dinsos, Setda) dengan total anggaran Rp50.030.491.384,00.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Ekstrem (Disdagkoperin, Disnaker, DPMPSTP, P2KBP3A, Kecamatan Dan Kelurahan, Dispangtan) dengan total anggaran Rp3.371.530.550,00.
 - c. Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar Dalam Rangka Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan (DISDIK, DINKES, DPU, DPKP, DLH) dengan total anggaran sebesar Rp29.909.291.478.
 - d. Meningkatkan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp2.366.550.011,00.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berkorelasi dengan tingkat kemiskinan, TPT di Kota Cimahi pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 memiliki tren yang naik turun, pada Tahun 2019 – 2020 TPT di Kota Cimahi mengalami peningkatan. Bahkan Pada Tahun 2020 TPT Cimahi terjadi peningkatan yang signifikan angkanya menjadi 13,30%, yang akhirnya dapat diturunkan kembali di tahun 2021 menjadi 13,07% , Tahun 2022 turun menjadi 10,77 dan berhasil diturunkan kembali di Tahun 2023 menjadi 10,52% seperti terdapat dalam Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan TPT selama Tahun 2023 adalah dengan :

1. Melakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi terhadap 825 Pencari Kerja;
2. Melakukan Pelatihan Berbasis Perluasan Kesempatan Kerja;
3. Kerja Lokal) dengan 1.593 Pencari Kerja;
4. Melakukan Pembinaan LPK (Lembaga Pelatihan dan Keterampilan) dan BKK (Bursa Kerja Khusus) dengan 27 LPK dan 24 BKK;
5. Melakukan Pelayanan AK/1 (angkatan Kerja 1/ Kartu Kuning) kepada Pencari Kerja dengan 1.875 Pencari Kerja;
6. Melakukan Sosialisasi Aplikasi Ketenagakerjaan (Sidakeptri Mobile);
7. Melakukan Kegiatan *Job Fair*.

e. Gini Ratio dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi selama periode Tahun 2019-2023 terlihat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. *Gini ratio* Kota Cimahi pada tahun 2019 sebesar 0,43 merupakan indeks tertinggi bila dibandingkan dengan *gini ratio* Provinsi Jawa Barat ataupun *gini ratio* kabupaten/kota di Bandung Raya. Pada tahun 2020 turun signifikan menjadi 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada Tahun 2019 yang mencapai 7,85% tidak didukung dengan pemerataan pendapatan sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya *gini ratio* naik cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 0,42 dan di tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi berkontraksi -2,26%. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kelompok yang tadinya menikmati pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 kembali terdampak oleh pandemi Covid-19 dan sekaligus memberikan bukti bahwa Program

Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid- 19 dianggap relatif berhasil.

Pada tahun 2022 *gini ratio* Kota Cimahi Kembali turun menjadi menjadi 0,41 dan turun 0,02 poin menjadi 0,39 ditahun 2023 dimana pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi naik cukup signifikan menjadi 5,92% dan di Tahun 2023 turun menjadi 5,19% seperti terdapat dalam Tabel 2.2. Hal ini kembali memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Cimahi belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan ekonomi di masa yang akan datang perlu mendapat perhatian khusus lagi agar kesenjangan dan kemiskinan yang ada dapat diperbaiki dan tertangani.

Tabel 2.2 Indeks *Gini Ratio*

Tahun	Indeks <i>Gini</i>		LPE	
	Target	Capaian	Target (%)	Capaian (%)
2019	0,40	0,36	5,66	6,84
2020	0,39	0,38	3,07	2,26
2021	0,39	0,42	3,69	4,19
2022	0,38	0,41	5,11	5,92
2023	0,409	0,39	5,45	5,19

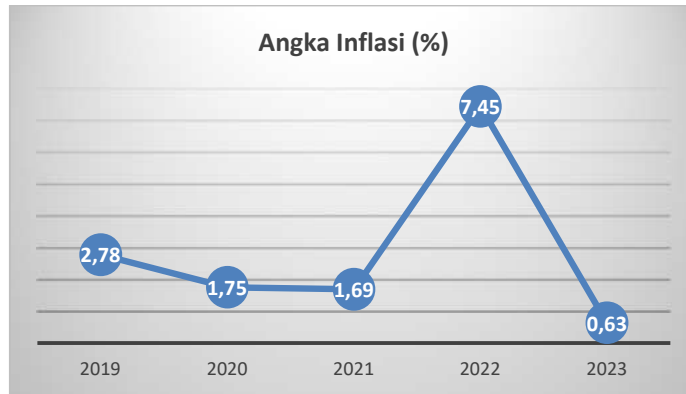
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

f. Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Terjadinya inflasi diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan arus masuk dan keluar uang maupun barang sehingga inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan turunnya nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat dan investasi menurun sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Cimahi **tidak melakukan penghitungan inflasi tersendiri tetapi mengikuti angka inflasi Kota Bandung**, dengan berasumsi bahwa kondisi Kota Cimahi tidak terlalu berbeda dengan Kota Bandung.

Berdasarkan data BPS dalam Provinsi Jawa Barat dalam Angka Tahun 2024, pada Tahun 2023 angka inflasi Kota Bandung yang menjadi acuan nilai inflasi Kota Cimahi adalah sebesar 0,63%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai inflasi Kota Cimahi di Tahun 2022 merupakan nilai tertinggi sebagaimana terdapat dalam Gambar 2.5. Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi *Covid-19* di tahun 2020 dilanjutkan dengan pengaruh perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan inflasi untuk perekonomian Dunia dan Nasional mendorong laju inflasi di Jawa Barat, Kota Bandung dan juga di Kota Cimahi.



Gambar 2.5 Angka Inflasi
Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan dampak inflasi selama Tahun 2023 adalah dengan :

1. Melaksanakan operasi pasar murah

5 kegiatan Operasi Pasar dengan pemberian subsidi untuk beras SPHP, bekerjasama dengan Bank Indonesia, BULOG dan Bank BJB. Setiap OPM disalurkan 30 Ton Beras dengan Subsidi Rp2000 per kg.

2. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah

Dilaksanakan sebanyak 24 kali bekerjasama dengan Kelompok Tani, BULOG, Samsat Kota Cimahi, Kodim 0609 dan para distributor.

3. Pendistribusian Minyak Kita

1 kegiatan bekerjasama dengan HIPMI Kota Cimahi.

4. Melaksanakan High Level Meeting

Dilaksanakan 1 kali Bersama TPID dan Formkopimda Kota Cimahi.

5. Monitoring Pemantauan Harga dan Stock Bapokting

Dilaksanakan 24 kali untuk memonitoring 33 bahan pokok di pasar tradisional maupun modern.

6. Monitoring Satgas Pangan

7 kali kegiatan dilaksanakan oleh Tim Satgas Pangan Kota Cimahi untuk memonitoring 15 bahan pokok di pasar tradisional dan modern.

7. Membuat Surat Edaran

Dilaksanakan 2 kali terkait kebijakan pengendalian inflasi menjelang HKBN dan Nataru.

8. Melaksanakan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Tahap 1: 37.761 KPM; Tahap 2: 35.970 KPM dan Tahap 3: 35.970 KPM.

9. Melaksanakan Bazaar Murah

5 kali pelaksanaan bazar di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dalam rangka memeriahkan acara-acara di Kota Cimahi.

10. Penyaluran Beras Sejahtera Daerah (RASTRADA)

Dilaksanakan 2 kali dan disalurkan kepada warga rawan pangan sebagai pengganti Rastrada bulan Okt-Nov Tahun 2022. Telah disalurkan Rastrada pada 1.414 KPM di Tahap 1, sebanyak 1.401 KPM di Tahap 2, dan 1.388 KPM di Tahap 3.

11. Melaksanakan Capacity Building

6 kali pelaksanaan untuk peningkatan wawasan TPPID Kota Cimahi dengan menghadirkan Narasumber dari Provinsi, BI, BPS, dan juga kunjungan ke Kab. Garut, Kab. Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

12. Kerjasama Antar Daerah

Penandatanganan KAD Bersama Kabupaten Garut.

13. Kerjasama Antara Paguyuban Pasar Atas Kota Cimahi dengan Kelompok Tani Tricipta

2 kali pengiriman cabai merah dan bawang merah, dengan subsidi transportasi dari DKPP Provinsi Jawa Barat.

14. Gerakan Menanam Cabe

Dilaksanakan 2 kali dengan kegiatan pertama memberikan bantuan bibit pohon cabe kepada KWT dan Kelompok Tani. Kegiatan kedua bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan bantuan 5.000 pohon cabe untuk kelompok tani Nyalindung Kelurahan Citeureup.

15. Rapat-Rapat Koordinasi

Dilaksanakan setiap hari senin bersama dengan Rapat Koordinasi TPID dan juga rapat koordinasi teknis membahas hal-hal teknis yang harus segera dilakukan.

g. Capaian Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2023

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur indikator makro ekonomi, maka realisasi/pencapaian Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2023 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Indikator Makro Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,22	79,69
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,63	1,40
3	Angka Kemiskinan	%	5,25	4,66
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	12,61	10,52
5	Indeks Gini	Poin	0,409	0,39
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45	5,19
7	Inflasi	%	-	0,63

Sumber: BPS Kota Cimahi, diolah.

2.2.2 Kebijakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 (*Mandatory Spending*)

Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara konsisten dan berkesinambungan menganggarkan fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Anggaran fungsi pendidikan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023

No	Komponen Perhitungan	2023	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	Rp 377.909.784.746,00	Rp 416.445.388.499,00
	1) Belanja Operasi	Rp 350.486.156.138,00	Rp 387.789.272.677,00
	a) belanja pegawai	Rp 246.765.125.440,00	Rp 286.511.483.830,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp 75.987.325.164,00	Rp 74.964.971.447,00
	c) belanja hibah	Rp 23.313.900.000,00	Rp 22.110.565.800,00
	d) belanja bantuan sosial	Rp 4.419.805.534,00	Rp 4.202.251.600,00
	2) Belanja Modal	Rp 27.423.628.608,00	Rp 28.656.115.822,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	Rp 1.928.595.764,00	Rp 1.326.673.600,00
	1) Belanja Operasi	Rp 1.771.103.764,00	Rp 1.251.673.600,00
	a) belanja pegawai	-	-
	b) belanja barang dan jasa	Rp 1.571.103.764,00	Rp 1.251.673.600,00
	c) belanja hibah	Rp 200.000.000,00	
	d) belanja bantuan sosial	-	
	2) Belanja Modal	Rp 157.492.000,00	Rp 75.000.000,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	Rp 835.378.600,00	Rp 605.563.200,00
	1) Belanja Operasi	Rp 524.931.400,00	Rp 490.564.200,00
	a) belanja pegawai	-	
	b) belanja barang dan jasa	Rp 524.931.400,00	Rp 490.564.200,00
	c) belanja hibah	-	
	d) belanja bantuan sosial	-	
	2) Belanja Modal	Rp 310.447.200,00	Rp 114.999.000,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 28.118.405.955,00	Rp 40.468.351.734,00
	1) Belanja Operasi	Rp 21.133.483.185,00	Rp 28.495.191.634,00
	a) belanja pegawai	Rp 4.483.994.121,00	Rp 4.681.699.455,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp 11.049.489.064,00	Rp 9.813.492.179,00
	c) belanja hibah	Rp 5.600.000.000,00	Rp 14.000.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial	-	-
	2) Belanja Modal	Rp 6.984.922.770,00	Rp 11.973.160.100,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan,	-	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp 408.792.165.065,00	Rp 458.845.977.033,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp 1.615.121.561.613,00	Rp 1.614.782.803.477,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,31%	28,42%

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Fungsi Kesehatan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah seperti terdapat dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023

No	Komponen Perhitungan	2023	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:	Rp 357.582.079.981,00	Rp 396.451.823.507,00
	1) Belanja Operasi	Rp 343.328.231.868,00	Rp 383.777.888.079,00

No	Komponen Perhitungan	2023	2022
	a) belanja pegawai	Rp 158.731.694.891,00	Rp 176.032.297.564,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp 184.096.536.977,00	Rp 207.245.590.515,00
	c) belanja hibah	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial		
	2) Belanja Modal	Rp 14.253.848.113,00	Rp 12.673.935.428,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	Rp -	Rp -
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp 357.582.079.981,00	Rp 396.451.823.507,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp 1.615.121.561.613,00	Rp 1.614.782.803.477,00
4.	Gaji ASN	Rp 319.643.672.499,00	Rp 346.571.522.368,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp 1.295.477.889.114,00	Rp 1.268.211.281.109,00
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	27,60%	31,26%

3. Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum dapat mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur dalam APBD
Tahun Anggaran 2023

No	Komponen Perhitungan	2023	2022
1	Total Belanja Daerah	Rp 1.615.121.561.613	Rp 1.614.782.803.477
2	Dana Transfer Umum		
	DAU	-	Rp 519.937.401.610
	DBH	-	Rp 71.850.980.000
3	Pengurang		
	DBHCHT	-	Rp 4.155.501.000
	Dana Reboisasi	-	
	ADD	-	
4	Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	Rp 1.615.121.561.613	Rp 587.632.880.610
5	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% X Selisih)	Rp 646.048.624.645	Rp 1.027.149.922.867

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	Jumlah
1	a) Belanja Modal	Rp 142.084.996.945	Rp 104.854.879.110
	1) Tanah	Rp 4.148.782.770	Rp 7.039.408.898
	2) Peralatan dan Mesin	Rp 46.908.675.774	Rp 26.716.547.465
	3) Bangunan dan Gedung	Rp 46.477.173.465	Rp 51.020.087.498
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	Rp 40.652.516.154	Rp 18.398.135.549
	5) Aset tetap lainnya	Rp 2.982.215.730	Rp 1.680.699.700
	6) Aset lainnya	Rp 915.633.052	Rp -
	b) Belanja pemeliharaan	Rp 120.666.540.367	Rp 33.210.714.556
2	a) Belanja Hibah	-	Rp 40.262.512.250
	b) Belanja Bantuan Sosial	Rp 4.057.437.000	Rp 4.202.251.600
	c) Belanja Bantuan Keuangan	-	Rp 100.000.000
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	Rp 266.808.974.312	Rp 182.630.357.516
4	% Belanja Infrastruktur Daerah	41,30%	17,78%

4. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan

pembinaan dan pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah. Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan dalam APBD
Tahun Anggaran 2023

No.	Komponen perhitungan	2023	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja pada Inspektorat	Rp 13.812.018.899,00	Rp 12.175.290.436,00
	1) Belanja Operasi	Rp 13.220.068.089,00	Rp 11.836.997.436,00
	a) belanja pegawai	Rp 8.686.280.682,00	Rp 9.695.507.736,00
	b) belanja barang dan jasa	Rp 4.533.787.407,00	Rp 2.141.489.700,00
	c) belanja hibah		
	d) belanja bantuan sosial	Rp -	Rp -
	2) Belanja Modal	Rp 591.950.810,00	Rp 338.293.000,00
2.	Alokasi APIP	Rp 13.812.018.899,00	Rp 12.175.290.436,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp 1.615.121.561.613,00	Rp 1.614.782.803.477,00
4.	Rasio APIP	0,86%	0,75%

2.2.3 Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023

Dalam melakukan perubahan struktur anggaran APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kemudian mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa perubahan terhadap struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Dasar untuk melakukan perubahan struktur anggaran APBD ini pada dasarnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun dikecualikan dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat tersebut menghendaki harus adanya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 50% (lima puluh) persen. Di samping itu, perubahan tersebut juga dilakukan secara teknis dengan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, Gubernur, Bupati/Wali Kota memiliki tanggung jawab serta otoritas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terhadap perubahan anggaran APBD.

Di Tahun 2023 Pemerintah Kota Cimahi mengalami realokasi APBD sehingga harus melakukan perubahan perda/perwal dengan rincian seperti terdapat dalam Tabel 2.9 dengan rincian perubahan mata anggaran sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.8 Rincian Perubahan Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
1	Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	7 Tahun 2022	29 Desember 2022	
2	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	57 Tahun 2022	29 Desember 2022	
3	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	3 Tahun 2023	28 Februari 2023	1. Terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
				2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
4	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	9 Tahun 2023	11 Mei 2023	1. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.14.3/1483/SJ, tanggal 10 Maret 2023, Hal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023
				2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.192-Dinkes/2023 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular Polio Di Daerah Provinsi Jawa Barat, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.0/Menkes/110/2023 tentang Tarif Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
5	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	14 Tahun 2023	21 Juli 2023	Adanya kemendesakan pada Dinas Perhubungan dan DPKP
6	Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	4 Tahun 2023	26 Oktober 2023	

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
7	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	20 Tahun 2023	26 Oktober 2023	
8	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	22 Tahun 2023	5 Desember 2023	1. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Kota Cimahi mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
				2. Ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan antara lain pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

**Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi
terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)					
		APBD 2023	PARSIAL 1	PARSIAL 2	PARSIAL 3	PERUBAHAN APBD 2023	PARSIAL 4
		(29 Desember 2022)	(28 Februari 2023)	(11 Mei 2023)	(21 Juni 2023)	(26 Oktober 2023)	(5 Desember 2023)
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.628.784.304,00	377.628.784.304,00	377.628.784.304,00	377.628.784.304,00	407.477.197.230,00	407.477.197.230,00
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266,00	180.651.551.266,00	180.651.551.266,00	180.651.551.266,00	193.265.398.170,00	193.265.398.170,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145,00	13.164.349.145,00	13.164.349.145,00	13.164.349.145,00	12.033.217.745,00	12.033.217.745,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893,00	174.421.683.893,00	174.421.683.893,00	174.421.683.893,00	190.550.952.906,00	190.550.952.906,00
4.2	Pendapatan Transfer	953.023.142.796,00	969.350.144.796,00	969.350.144.796,00	969.350.144.796,00	992.590.406.776,00	997.709.781.355,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000,00	808.237.173.000,00	808.237.173.000,00	808.237.173.000,00	822.029.968.399,00	822.029.968.399,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796,00	161.112.971.796,00	161.112.971.796,00	161.112.971.796,00	170.560.438.377,00	175.679.812.956,00
	Jumlah Pendapatan	1.330.651.927.100,00	1.346.978.929.100,00	1.346.978.929.100,00	1.346.978.929.100,00	1.400.067.604.006,00	1.405.186.978.585,00
5.	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI	1.365.418.336.132,00	1.373.745.338.132,00	1.374.175.838.132,00	1.377.354.485.632,00	1.465.513.590.592,00	1.470.942.364.571,00
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773,00	692.276.037.773,00	692.276.037.773,00	692.276.037.773,00	690.816.358.202,00	690.816.358.202,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375,00	641.210.551.375,00	641.641.051.375,00	644.819.698.875,00	714.906.897.256,00	720.335.671.235,00
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450,00	35.953.643.450,00	35.953.643.450,00	35.953.643.450,00	54.870.529.600,00	54.870.529.600,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534,00	3.805.105.534,00	3.805.105.534,00	3.805.105.534,00	4.419.805.534,00	4.419.805.534,00
5.2	BELANJA MODAL	102.710.944.283,00	110.710.944.283,00	110.710.944.283,00	115.101.244.283,00	142.084.996.945,00	142.084.996.945,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770,00	3.848.782.770,00	3.848.782.770,00	3.848.782.770,00	4.148.782.770,00	4.148.782.770,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539,00	31.358.957.539,00	31.358.957.539,00	31.358.957.539,00	46.908.675.774,00	46.908.675.774,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489,00	45.072.382.489,00	45.072.382.489,00	45.072.382.489,00	46.477.173.465,00	46.477.173.465,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575,00	28.545.848.575,00	28.545.848.575,00	32.936.148.575,00	40.652.516.154,00	40.652.516.154,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410,00	1.633.961.410,00	1.633.961.410,00	1.633.961.410,00	2.982.215.730,00	2.982.215.730,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500,00	251.011.500,00	251.011.500,00	251.011.500,00	915.633.052,00	915.633.052,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	24.569.500.000,00	17.000.552.500,00	11.437.405.611,00	11.128.006.211,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	24.569.500.000,00	17.000.552.500,00	11.437.405.611,00	11.128.006.211,00
	Jumlah Belanja	1.493.129.280.415,00	1.509.456.282.415,00	1.509.456.282.415,00	1.509.456.282.415,00	1.619.035.993.148,00	1.624.155.367.727,00
	Surplus/Defisit	(162.477.353.315,00)	(162.477.353.315,00)	(162.477.353.315,00)	(162.477.353.315,00)	(218.968.389.142,00)	(218.968.389.142,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)					
		APBD 2023	PARSIAL 1	PARSIAL 2	PARSIAL 3	PERUBAHAN APBD 2023	PARSIAL 4
		(29 Desember 2022)	(28 Februari 2023)	(11 Mei 2023)	(21 Juni 2023)	(26 Oktober 2023)	(5 Desember 2023)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00
	Pembiayaan Netto	162.477.353.315,00	162.477.353.315,00	162.477.353.315,00	162.477.353.315,00	218.968.389.142,00	218.968.389.142,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.10 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023 (APBD 2023 Ditetapkan 29 Desember 2023)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.628.784.304,00
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	953.023.142.796,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796,00
	Jumlah Pendapatan	1.330.651.927.100,00
5	BELANJA	
5,1	BELANJA OPERASI	1.365.418.336.132,00
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375,00
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534,00
5,2	BELANJA MODAL	102.710.944.283,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.493.129.280.415,00
	Total Surplus/(Defisit)	(162.477.353.315,00)
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	194.907.162.315,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.429.809.000,00
	Pembiayaan Netto	162.477.353.315,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Tabel 2.10 Penjelasan Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023 (APBD Parsial 1 Ditetapkan 28 Februari 2023)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.628.784.304,00	377.628.784.304,00	-	0,00%
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266,00	180.651.551.266,00	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145,00	13.164.349.145,00	-	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893,00	174.421.683.893,00	-	0,00%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	953.023.142.796,00	969.350.144.796,00	16.327.002.000,00	1,71%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000,00	808.237.173.000,00	-	0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796,00	161.112.971.796,00	16.327.002.000,00	11,28%
	Jumlah Pendapatan	1.330.651.927.100,00	1.346.978.929.100,00	16.327.002.000,00	1,23%
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	1.365.418.336.132,00	1.373.745.338.132,00	8.327.002.000,00	0,61%
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773,00	692.276.037.773,00	124.720.000,00	0,02%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375,00	641.210.551.375,00	8.202.282.000,00	1,30%
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450,00	35.953.643.450,00	-	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534,00	3.805.105.534,00	-	0,00%
5,2	BELANJA MODAL	102.710.944.283,00	110.710.944.283,00	8.000.000.000,00	7,79%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770,00	3.848.782.770,00	-	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539,00	31.358.957.539,00	8.000.000.000,00	34,25%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489,00	45.072.382.489,00	-	0,00%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575,00	28.545.848.575,00	-	0,00%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410,00	1.633.961.410,00	-	0,00%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500,00	251.011.500,00	-	0,00%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	0,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	0,00%
	Jumlah Belanja	1.493.129.280.415,00	1.509.456.282.415,00	16.327.002.000,00	1,09%
	Total Surplus/(Defisit)	(162.477.353.315,00)	(162.477.353.315,00)	-	0,00%
6	PEM BIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	-	0,00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	-	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	-	0,00%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	162.477.353.315,00	162.477.353.315,00	-	0,00%
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-		

Tabel 2.10 Penjabaran Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023 (APBD Parsial 2 Ditetapkan 11 Mei 2023)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.628.784.304,00	377.628.784.304,00	-	0,00%
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266,00	180.651.551.266,00	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145,00	13.164.349.145,00	-	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893,00	174.421.683.893,00	-	0,00%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	953.023.142.796,00	969.350.144.796,00	16.327.002.000,00	1,71%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000,00	808.237.173.000,00	-	0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796,00	161.112.971.796,00	16.327.002.000,00	11,28%
	Jumlah Pendapatan	1.330.651.927.100,00	1.346.978.929.100,00	16.327.002.000,00	1,23%
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	1.365.418.336.132,00	1.374.175.838.132,00	8.757.502.000,00	0,64%
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773,00	692.276.037.773,00	124.720.000,00	0,02%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375,00	641.641.051.375,00	8.632.782.000,00	1,36%
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450,00	35.953.643.450,00	-	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534,00	3.805.105.534,00	-	0,00%
5,2	BELANJA MODAL	102.710.944.283,00	110.710.944.283,00	8.000.000.000,00	7,79%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770,00	3.848.782.770,00	-	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539,00	31.358.957.539,00	8.000.000.000,00	34,25%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489,00	45.072.382.489,00	-	0,00%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575,00	28.545.848.575,00	-	0,00%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410,00	1.633.961.410,00	-	0,00%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500,00	251.011.500,00	-	0,00%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	24.569.500.000,00	(430.500.000,00)	1,72%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	24.569.500.000,00	(430.500.000,00)	1,72%
	Jumlah Belanja	1.493.129.280.415,00	1.509.456.282.415,00	16.327.002.000,00	1,09%
	Total Surplus/(Defisit)	(162.477.353.315,00)	(162.477.353.315,00)	-	0,00%
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	-	0,00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	-	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	-	0,00%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	162.477.353.315,00	162.477.353.315,00	-	0,00%
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	0,00%

Tabel 2.10 Penjabaran Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada
Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023
(APBD Parsial 3 Ditetapkan 21 Juni 2023)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.628.784.304,00	377.628.784.304,00	-	0,00%
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266,00	180.651.551.266,00	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145,00	13.164.349.145,00	-	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893,00	174.421.683.893,00	-	0,00%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	953.023.142.796,00	969.350.144.796,00	16.327.002.000,00	1,71%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000,00	808.237.173.000,00	-	0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796,00	161.112.971.796,00	16.327.002.000,00	11,28%
	Jumlah Pendapatan	1.330.651.927.100,00	1.346.978.929.100,00	16.327.002.000,00	1,23%
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	1.365.418.336.132,00	1.374.175.838.132,00	8.757.502.000,00	0,64%
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773,00	692.276.037.773,00	124.720.000,00	0,02%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375,00	641.641.051.375,00	8.632.782.000,00	1,36%
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450,00	35.953.643.450,00	-	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534,00	3.805.105.534,00	-	0,00%
5,2	BELANJA MODAL	102.710.944.283,00	110.710.944.283,00	8.000.000.000,00	7,79%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770,00	3.848.782.770,00	-	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539,00	31.358.957.539,00	8.000.000.000,00	34,25%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489,00	45.072.382.489,00	-	0,00%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575,00	28.545.848.575,00	-	0,00%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410,00	1.633.961.410,00	-	0,00%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500,00	251.011.500,00	-	0,00%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	24.569.500.000,00	(430.500.000,00)	1,72%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	24.569.500.000,00	(430.500.000,00)	1,72%
	Jumlah Belanja	1.493.129.280.415,00	1.509.456.282.415,00	16.327.002.000,00	1,09%
	Total Surplus/(Defisit)	(162.477.353.315,00)	(162.477.353.315,00)	-	0,00%
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	-	0,00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	-	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	194.907.162.315,00	194.907.162.315,00	-	0,00%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	162.477.353.315,00	162.477.353.315,00	-	0,00%
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	0,00%

**Tabel 2.10 Penjabaran Tabel 2.10 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada
Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023
(APBD Perubahan 2023 Ditetapkan 26 Oktober 2023)**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.628.784.304,00	407.477.197.230,00	29.848.412.926,00	7,90%
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266,00	193.265.398.170,00	12.613.846.904,00	6,98%
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145,00	12.033.217.745,00	(1.131.131.400,00)	-8,59%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	11.627.628.409,00	2.236.428.409,00	23,81%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893,00	190.550.952.906,00	16.129.269.013,00	9,25%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	953.023.142.796,00	992.590.406.776,00	39.567.263.980,00	4,15%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000,00	822.029.968.399,00	13.792.795.399,00	1,71%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796,00	170.560.438.377,00	25.774.468.581,00	17,80%
	Jumlah Pendapatan	1.330.651.927.100,00	1.400.067.604.006,00	69.415.676.906,00	5,22%
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	1.365.418.336.132,00	1.465.513.590.592,00	100.095.254.460,00	7,33%
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773,00	690.816.358.202,00	(1.334.959.571,00)	-0,19%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375,00	714.906.897.256,00	81.898.627.881,00	12,94%
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450,00	54.870.529.600,00	18.916.886.150,00	52,61%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534,00	4.419.805.534,00	614.700.000,00	16,15%
5,2	BELANJA MODAL	102.710.944.283,00	142.084.996.945,00	39.374.052.662,00	38,33%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770,00	4.148.782.770,00	300.000.000,00	7,79%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539,00	46.908.675.774,00	23.549.718.235,00	100,82%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489,00	46.477.173.465,00	1.404.790.976,00	3,12%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575,00	40.652.516.154,00	12.106.667.579,00	42,41%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410,00	2.982.215.730,00	1.348.254.320,00	82,51%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500,00	915.633.052,00	664.621.552,00	264,78%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	11.437.405.611,00	(13.562.594.389,00)	54,25%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	11.437.405.611,00	(13.562.594.389,00)	54,25%
	Jumlah Belanja	1.493.129.280.415,00	1.619.035.993.148,00	125.906.712.733,00	8,43%
	Total Surplus/(Defisit)	(162.477.353.315,00)	(218.968.389.142,00)	(56.491.035.827,00)	34,77%
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	56.491.035.827,00	28,98%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	56.491.035.827,00	28,98%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	56.491.035.827,00	28,98%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	162.477.353.315,00	218.968.389.142,00	56.491.035.827,00	34,77%
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	

Tabel 2.10 Penjabaran Tabel 2.9 Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Realokasi APBD Tahun Anggaran 2023 (APBD Parsial 4 Ditetapkan 5 Desember 2023)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	407.477.197.230,00	407.477.197.230,00	-	0,00%
4.1.01	Pajak Daerah	193.265.398.170,00	193.265.398.170,00	-	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	12.033.217.745,00	12.033.217.745,00	-	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	190.550.952.906,00	190.550.952.906,00	-	0,00%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	992.590.406.776,00	997.709.781.355,00	5.119.374.579,00	0,52%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	822.029.968.399,00	822.029.968.399,00	-	0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.560.438.377,00	175.679.812.956,00	5.119.374.579,00	3,00%
	Jumlah Pendapatan	1.400.067.604.006,00	1.405.186.978.585,00	5.119.374.579,00	0,37%
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	1.465.513.590.592,00	1.470.942.364.571,00	5.428.773.979,00	0,37%
5.1.01	Belanja Pegawai	690.816.358.202,00	690.816.358.202,00	-	0,00%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	714.906.897.256,00	720.335.671.235,00	5.428.773.979,00	0,76%
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	54.870.529.600,00	54.870.529.600,00	-	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.419.805.534,00	4.419.805.534,00	-	0,00%
5,2	BELANJA MODAL	142.084.996.945,00	142.084.996.945,00	-	0,00%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.148.782.770,00	4.148.782.770,00	-	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.908.675.774,00	46.908.675.774,00	-	0,00%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.477.173.465,00	46.477.173.465,00	-	0,00%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.652.516.154,00	40.652.516.154,00	-	0,00%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.982.215.730,00	2.982.215.730,00	-	0,00%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	915.633.052,00	915.633.052,00	-	0,00%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.437.405.611,00	11.128.006.211,00	(309.399.400,00)	2,71%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.437.405.611,00	11.128.006.211,00	(309.399.400,00)	2,71%
	Jumlah Belanja	1.619.035.993.148,00	1.624.155.367.727,00	5.119.374.579,00	0,32%
	Total Surplus/(Defisit)	(218.968.389.142,00)	(218.968.389.142,00)	-	0,00%
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	-	0,00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	-	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	-	0,00%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.429.809.000,00	32.429.809.000,00	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	218.968.389.142,00	218.968.389.142,00	-	0,00%
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeana	-	-	-	

2.3 Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022

2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mulai digulirkan pemerintah sejak tahun 1983 merupakan satu tonggak sejarah monumental perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih efektif dari sistem perpajakan sebelumnya. Sistem *self assessment*, sebagai sistem yang dianut dalam undang-undang perpajakan saat ini didesain berlandaskan pada kepercayaan dan kesadaran setiap Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sistem yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa ini selalu menarik untuk terus dikaji demi suksesnya pelaksanaan sistem perpajakan dalam mengamankan penerimaan daerah pada khususnya dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada masa kini merupakan pilar utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan bangsa serta negara sebagaimana telah disepakati bersama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan perpajakan selalu menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dari sisi psikologis, misalnya diketahui bahwa pada umumnya tidak mudah mendapatkan seseorang yang dengan sukarela membayar pajak. Hal ini dapat dimengerti karena pajak akan mengurangi jumlah penghasilan yang dapat dibelanjakannya. Namun demikian, harus disadari pula bahwa untuk keberlangsungan pembangunan daerah, pajak rela tidak rela harus dibayar oleh mereka yang sudah mempunyai penghasilan melampaui batasan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Semua itu dimaksudkan agar pundi-pundi APBD tetap terisi untuk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan demi kepentingan bersama. Di negara kita ini kegiatan pembangunan akan berjalan lancar apabila pemerintah dapat mendukung tujuan tersebut.

2.3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.405.186.978.585,00 dengan realisasi sebesar Rp1.398.833.023.915,00 atau 99,55% dari target, sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

No	Dinas/Instansi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	472.365.755.697,00	464.057.612.770,00	98,24
2	Dinas Kesehatan	20.942.271.420,00	21.516.760.339,00	102,74
3	RSU Daerah Cibabat	145.000.000.000,00	149.918.888.476,00	103,39
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8.237.921.335,00	9.453.370.554,00	114,75
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30
6	Dinas Tenaga Kerja	350.000.000,00	-	-
7	Dinas Pangan Dan Pertanian	307.520.000,00	371.486.250,00	120,80
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.675.000.000,00	3.233.347.664,00	120,87

No	Dinas/Instansi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Dinas Perhubungan	1.581.550.000,00	1.613.719.700,00	102,03
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97
11	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	1.781.440.123,00	1.981.997.592,00	111,26
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48
13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	750.070.520.010,00	744.773.859.257,00	99,29
	JUMLAH	1.405.186.978.585,00	1.398.833.022.715,00	99,55

Secara khusus realisasi pendapatan dari masing-masing dinas/instansi penghasil sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp472.365.755.697,00 dengan realisasi sebesar Rp464.057.613.970,00 atau 98,24% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2023 berada di bawah *cash budget* sebesar 1,76% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah	472.365.755.697,00	464.057.612.770,00	98,24
Pendapatan Asli Daerah	224.726.494.352,00	235.616.755.113,00	104,85
Pendapatan Pajak Daerah	193.265.398.170,00	210.047.163.097,00	108,68
Pajak Hotel	410.652.716,00	496.217.756,00	120,84
Pajak Hotel	181.382.222,00	167.879.191,00	92,56
Pajak Gubuk Pariwisata	6.116.148,00	8.985.510,00	146,91
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	223.154.346,00	319.353.055,00	143,11
Pajak Restoran	24.951.164.757,00	25.426.661.921,00	101,91
Pajak Restoran dan Sejenisnya	24.926.164.757,00	-	-
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	25.389.133.830,00	-
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	25.000.000,00	37.528.091,00	150,11

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Hiburan	300.000.000,00	359.013.252,00	119,67
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	26.256.797,00	15.795.000,00	60,16
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	273.743.203,00	343.218.252,00	125,38
Pajak Reklame	4.125.214.200,00	4.418.639.600,00	107,11
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	1.910.570.323,00	2.450.955.900,00	128,28
Reklame Kain	385.232.844,00	166.042.800,00	43,10
Reklame Melekat/Stiker	1.823.465.133,00	1.750.993.500,00	96,03
Reklame Berjalan	5.945.900,00	50.647.400,00	851,80
Pajak Penerangan Jalan	41.269.473.535,00	42.284.388.475,00	102,46
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	41.259.379.675,00	42.271.188.187,00	102,45
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.093.860,00	13.200.288,00	130,78
Pajak Parkir	1.043.751.000,00	1.098.042.476,00	105,20
Pajak Parkir	1.043.751.000,00	1.098.042.476,00	105,20
Pajak Air tanah	19.351.951.648,00	23.335.953.825,00	120,59
Pajak Air tanah	19.351.951.648,00	23.335.953.825,00	120,59
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	59.952.343.410,00	63.183.375.956,00	105,39
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	59.952.343.410,00	63.183.375.956,00	105,39
BPHTB-Pemindahan Hak	41.860.846.904,00	49.444.869.836,00	118,12
BPHTB-Pemindahan Hak	41.860.846.904,00	49.444.869.836,00	118,12
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	100,00

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	19.833.467.773,00	13.941.963.607,00	70,30
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	213.429.477,00	319.161.177,00	149,54
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	80.997.100,00	-
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	175.654.600,00	200.389.200,00	114,08
Penjualan Aset Lainnya	37.774.877,00	37.774.877,00	100,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.033.343.126,00	2.119.384.539,00	35,13
Hasil Sewa BMD	-	-	-
Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	6.033.343.126,00	2.119.384.539,00	35,13
Penerimaan Jasa Giro	6.000.000.000,00	6.005.169.523,00	100,09
Jasa Giro Kas Daerah	6.000.000.000,00	5.594.217.814,00	93,24
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	340.364.862,00	-
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	70.586.847,00	-
Pendapatan Bunga	453.020.463,00	905.231.226,00	199,82
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	453.020.463,00	905.231.226,00	199,82
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.182.722.697,00	1.155.159.504,00	97,67
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.182.722.697,00		
Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	-	1.155.159.504,00	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.699.677,00	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.699.677,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	33.091.276,00	89.892.787,00	271,65

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	33.091.276,00	89.892.787,00	271,65
Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.163.562.386,00	2.578.650.376,00	49,94
Pendapatan Denda Pajak Hotel	5.896.794,00	7.823.190,00	132,67
Pendapatan Denda Pajak Restoran	100.924.140,00	68.742.728,00	68,11
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	80.670,00	145.905,00	180,87
Pendapatan Denda Pajak Reklame	55.963.740,00	42.945.420,00	76,74
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	15.540,00	15.540,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.279.767,00	4.151.133,00	78,62
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	25.861.792,00	20.306.580,00	78,52
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.969.539.943,00	2.434.519.880,00	48,99
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-	-
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	702.140.682,00	599.957.132,00	85,45
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	701.205.462,00	599.021.912,00	85,43
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	511.071,00	511.071,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	424.149,00	424.149,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional			
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	46.907.666,00	46.907.666,00	100,00
Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	46.907.666,00	46.907.666,00	100,00

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	100.000.000,00	-
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	100.000.000,00	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.250.000,00	20.750.000,00	395,24
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.250.000,00	20.750.000,00	395,24
PENDAPATAN TRANSFER	247.639.261.345,00	228.440.857.657,00	92,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	93.405.824.968,00	82.502.550.379,00	88,33
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	93.405.824.968,00	82.502.550.379,00	88,33
Dana Bagi Hasil Pajak	60.444.852.156,00	55.785.582.168,00	92,29
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.362.981.136,00	3.339.222.814,00	141,31
DBH PPh Pasal 21	48.170.886.533,00	37.449.121.375,00	77,74
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	1.572.458.926,00	6.474.835.135,00	411,76
DBH Dana Cukai Hasil Tembakau	8.338.525.561,00	8.522.402.844,00	102,21
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	32.960.972.812,00	26.716.968.211,00	81,06
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	8.762.861.526,00	5.586.835.977,00	63,76
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	(835.839.141,00)	1.269.887.063,00	-151,93
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landermt	23.295.890.749,00	16.999.281.811,00	72,97
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	(280.368.443,00)	347.792.599,00	-124,05
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.042.274.455,00	1.068.283.550,00	102,50
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	976.153.666,00	1.444.887.211,00	148,02
Transfer Pemerintah Provinsi	154.233.436.377,00	145.938.307.278,00	94,62
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	154.233.436.377,00	145.938.307.278,00	94,62
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	54.296.132.138,00	53.143.114.515,00	97,88

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.533.582.780,00	27.227.206.860,00	92,19
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.987.142.263,00	32.913.764.812,00	94,07
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	203.458.000,00	188.750.300,00	92,77
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.213.121.196,00	32.465.470.791,00	92,20

2. Dinas Kesehatan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp20.942.271.420,00 dengan realisasi sebesar Rp21.516.760.339,00 atau 102,74% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2023 berada di atas *cash budget* sebesar 2,74% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<u>Pendapatan</u>	20.942.271.420,00	21.516.760.339,00	102,74
<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	20.942.271.420,00	21.516.760.339,00	102,74
Lain-lain PAD yang Sah	20.942.271.420,00	21.516.760.339,00	102,74
Pendapatan BLUD	20.942.271.420,00	21.516.760.339,00	102,74

3. RSUD Cibabat

Target pendapatan daerah dari Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Cibabat) sebesar Rp145.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp149.918.888.476,00 atau 103,39% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2023 berada di atas *cash budget* sebesar 3,39% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<u>Pendapatan</u>	145.000.000.000,00	149.918.888.476,00	103,39
<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	145.000.000.000,00	149.918.888.476,00	103,39
Lain-lain PAD yang Sah	145.000.000.000,00	149.918.888.476,00	103,39
Pendapatan Dari BLUD	145.000.000.000,00	149.918.888.476,00	103,39

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp8.237.921.335,00 dengan realisasi sebesar Rp9.453.370.554,00 atau 114,75% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2023 berada di atas *cash budget* sebesar 14,75% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	8.237.921.335,00	9.453.370.554,00	114,75
Pendapatan Asli Daerah	8.237.921.335,00	9.453.370.554,00	114,75
Pendapatan Retribusi Daerah	3.466.899.145,00	3.848.764.750,00	111,01
Retribusi Jasa Umum	300.000.000,00	416.282.250,00	138,76
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	150.000.000,00	183.061.250,00	122,04
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	96.000.000,00	179.240.000,00	186,71
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	54.000.000,00	53.981.000,00	99,96
Retribusi Jasa Usaha	3.166.899.145,00	3.432.482.500,00	108,39
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.166.899.145,00	3.432.482.500,00	108,39
Lain-lain PAD yang Sah	4.771.022.190,00	5.604.605.804,00	117,47
Pendapatan Denda Retribusi.	5.031.550,00	14.262.290,00	283,46
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	5.031.550,00	14.262.290,00	283,46
Pendapatan Dari BLUD	4.765.990.640,00	5.590.343.514,00	117,30
Pendapatan dari BLUD	4.765.990.640,00	5.590.343.514,00	117,30

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Target pendapatan daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp125.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp137.874.000,00 atau 110,30% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2023 berada di atas *cash budget* sebesar 10,30% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30
Pendapatan Asli Daerah	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30
Pendapatan Retribusi Daerah	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30
Retribusi Jasa Umum	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30

6. Dinas Tenaga Kerja

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp350.000.000,00 dan tidak ada realisasi sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	350.000.000,00	-	-
Pendapatan Asli Daerah	350.000.000,00	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	350.000.000,00	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00	-	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	350.000.000,00	-	-

7. Dinas Pangan dan Pertanian

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp307.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp307.520.000,00 atau 120,80% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2023 berada di atas *cash budget* sebesar 20,80% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	307.520.000,00	371.486.250,00	120,80
Pendapatan Asli Daerah	307.520.000,00	371.486.250,00	120,80
Pendapatan Retribusi Daerah	307.520.000,00	371.486.250,00	120,80
Retribusi Jasa Usaha	307.520.000,00	371.486.250,00	120,80
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	262.520.000,00	325.970.000,00	124,17
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	45.000.000,00	45.516.250,00	101,15

8. Dinas Lingkungan Hidup

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.675.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.233.347.664,00 atau 120,87% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2023 berada di atas *cash budget* sebesar 20,87% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	2.675.000.000,00	3.233.347.664,00	120,87
Pendapatan Asli Daerah	2.675.000.000,00	3.233.347.664,00	120,87
Pendapatan Retribusi Daerah	2.675.000.000,00	3.233.347.664,00	120,87
Retribusi Jasa Umum	2.100.000.000,00	2.398.713.164,00	114,22
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.100.000.000,00	2.398.713.164,00	114,22
Retribusi Jasa Usaha	575.000.000,00	834.634.500,00	145,15
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	575.000.000,00	834.634.500,00	145,15

9. Dinas Perhubungan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp1.581.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.613.719.700,00 atau 102,03% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2023 di atas *cash budget* sebesar 2,03% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.581.550.000,00	1.613.719.700,00	102,03
Pendapatan Asli Daerah	1.581.550.000,00	1.613.719.700,00	102,03
Pendapatan Retribusi Daerah	1.581.550.000,00	1.613.719.700,00	102,03
Retribusi Jasa Umum	1.350.000.000,00	1.359.730.700,00	100,72
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	800.000.000,00	819.787.000,00	102,47
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.000.000,00	539.943.700,00	98,17
Retribusi Jasa Usaha	220.000.000,00	239.889.000,00	109,04
Retribusi Terminal	220.000.000,00	239.889.000,00	109,04
Retribusi Perizinan Tertentu	11.550.000,00	14.100.000,00	122,08
Retribusi Izin Trayek / Izin Usaha Angkutan Umum	11.550.000,00	14.100.000,00	122,08

10. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp451.387.406,00 atau 128,97% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2023 di atas *cash budget* sebesar 28,97% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97
Pendapatan Asli Daerah	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97
Pendapatan Retribusi Daerah	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97
Retribusi Jasa Umum	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97
Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97

11. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian. Perdagangan dan Pertanian sebesar Rp1.781.440.123,00 dengan realisasi sebesar Rp1.981.997.592,00 atau 111,26% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2023 berada di atas *cash budget* sebesar 11,26% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.781.440.123,00	1.981.997.592,00	111,26
Pendapatan Asli Daerah	1.781.440.123,00	1.981.997.592,00	111,26
Pendapatan Retribusi Daerah	1.777.248.600,00	1.973.565.500,00	111,05
Retribusi Jasa Umum	160.000.000,00	1.180.434.850,00	737,77
Retribusi Pelayanan Pasar	-	1.012.875.350,00	-
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	160.000.000,00	167.559.500,00	104,72
Retribusi Jasa Usaha	1.617.248.600,00	793.130.650,00	49,04
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	650.000.000,00	726.297.250,00	111,74
Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan	967.248.600,00	66.833.400,00	6,91
Lain-lain PAD yang Sah	4.191.523,00	8.432.092,00	201,17
Pendapatan Denda Retribusi.	4.191.523,00	8.432.092,00	201,17
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	4.191.523,00	8.432.092,00	201,17

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Target pendapatan daerah yang dikelola Kantor Pelayanan Perizinan Tertentu sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.322.718.707,00 atau 94,48% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2023 berada di bawah *cash budget* sebesar 5,52% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48
Pendapatan Asli Daerah	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48
Pendapatan Retribusi Daerah	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48
Retribusi Perizinan Tertentu	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48

13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp750.070.520.010 dengan realisasi sebesar Rp744.773.859.257 atau 99,29% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2023 berada di bawah *cash budget* sebesar 0,71% sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	750.070.520.010	744.773.859.257	99,29
Pendapatan Transfer	750.070.520.010	744.773.859.257	99,29
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	728.624.143.431	723.532.366.257	99,30
Dana Alokasi Umum	553.056.036.000	553.049.730.500	100,00
Dana Alokasi Umum.	553.056.036.000	553.049.730.500	100,00
Dana Alokasi Khusus	175.568.107.431	170.482.635.757	97,10
Dana Alokasi Khusus Fisik	14.085.517.000	13.481.150.654	95,71
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	161.482.590.431	157.001.485.103	97,23
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-
DID	-	-	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Transfer Pemerintah Provinsi	21.446.376.579,00	21.241.493.000,00	99,04
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	21.446.376.579,00	21.241.493.000,00	99,04
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	21.446.376.579,00	21.241.493.000,00	99,04

Mekanisme Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS, Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Kesetaraan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) dari Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Bendahara Sekolah/Lembaga sehingga tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi. Pengakuan Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 adalah berdasarkan kepada PMK Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

2.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 295), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 299).

2.3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2023 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.624.155.367.727,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.502.279.788.248.00 atau 92,50%. Belanja daerah dimaksud dipergunakan untuk:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.470.942.364.571,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.368.270.704.552,00 atau 93,02% terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp690.816.358.202,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp642.933.924.873,00 atau 93,07%;

b. Belanja Barang

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp720.335.671.235,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp666.384.924.873,00 atau 92,51%;

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar

Rp170.419.912,00 atau 34,08%;

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp54.870.529.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp54.633.767.129,00 atau 99,57%

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp4.419.805.534,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.148.320.000,00 atau 93,86%;

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp142.084.996.945,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp131.002.245.938,00 atau 92,20%;

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp11.128.006.211,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.006.837.758,00 atau 27,02%.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp0,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%

2.3.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja.

Apabila terjadi surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu. Pinjaman daerah dan/atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp218.968.389.142,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp220.542.689.922,00 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp251.398.198.142,00 dan telah direalisasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp251.398.198.142,00 atau 100,00%;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp32.429.809.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp30.855.508.220,00 atau 95,15%. Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 100,00% dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21%.

2.3.4 Analisis Efisiensi

Dalam melaksanakan kinerja kegiatan suatu organisasi perlu diukur dalam suatu ukuran analisis antara pendapatan dan belanja anggaran. Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut ini:

Tabel 2.25 Pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Pendapatan			
1	Pendapatan Asli Daerah	407.477.197.230,00	425.618.305.801,00	104,45
2	Pendapatan Transfer	997.709.781.355,00	973.214.716.914,00	97,54
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.405.186.978.585,00	1.398.833.022.715,00	99,55
B	Belanja			
1	Belanja Operasi	1.470.942.364.571,00	1.368.270.704.552,00	93,02
2	Belanja Modal	142.084.996.945,00	131.002.245.938,00	92,19
3	Belanja Tak Terduga	11.128.006.211,00	3.006.837.758,00	27,02
	Jumlah Belanja	1.624.155.367.727,00	1.502.279.788.248,00	92,50
C	Transfer			
1	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Transfer	0,00	0,00	0,00
D	Surplus/defisit	(218.968.389.142,00)	(103.446.765.533,00)	47,24

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

Basis akuntansi yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan Kota Cimahi adalah Basis AkruaI untuk Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas pelaporan yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus tahun anggaran.
5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu pelaporan.
2. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, Transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

Menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ruang lingkupnya meliputi terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual;

Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi :

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

2. Penyajian Laporan Keuangan;

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
- b. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
- c. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;

- a. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya.
- c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer;
 - 4) Surplus atau defisit-LRA;
 - 5) Penerimaan pembiayaan;
 - 6) Pengeluaran pembiayaan;
 - 7) Pembiayaan neto; dan
 - 8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

4. Neraca;

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. Biaya dibayar di muka;
- f. investasi jangka panjang;
- g. aset tetap;
- h. aset lainnya;
- i. kewajiban jangka pendek;
- j. kewajiban jangka panjang;
- k. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

5. Laporan Arus Kas;

- a. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- b. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- c. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

6. Laporan Operasional;

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit entitas pemerintah dan seluruh entitas akuntansi.

Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional). dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk *melengkapi* pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan;

- a. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman. Laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- b. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

8. Akuntansi Pendapatan Perpajakan;

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini otoritas perpajakan di daerah dalam menjaga terlaksananya pemungutan pajak daerah secara tertib administrasi berhak juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan.
3. Pada pemerintah daerah sanksi perpajakan merupakan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.
4. Pendapatan Pajak Daerah-LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.
5. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
6. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assessment system diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.
8. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan self assessment system antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah.
9. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assessment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
10. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan official assessment system antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.
11. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
12. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:
 - a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment.
 - b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk official assessment.

14. Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
15. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

9. Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan;

1. Pendapatan nonperpajakan dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
2. Pendapatan Non Perpajakan -LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Pendapatan perizinan;

1. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Atas izin yang diberikan pemerintah yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.
3. Pengakuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan pemberian izin merupakan layanan yang berkelanjutan serta tidak terdapat sumber daya ekonomi yang dikeluarkan pemerintah selama periode berlakunya izin.

Pendapatan Pemberian Layanan

1. Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
3. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
 - a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; yang terkait akan diperoleh entitas;
 - b. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - c. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

1. Pendapatan nonperpajakan-LO diakui pada saat bagian dari hak pemerintah daerah atas pemanfaatan/pengambilan SDA dimaksud ditetapkan.

Pendapatan Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividen*) diakui pada saat diperoleh.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
3. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

1. Pendapatan nonperpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset nonkeuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
2. Pengakuan pendapatan dari kerja sama pemanfaatan dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian antara entitas dengan pihak ketiga. Apabila pendapatan dari kerja sama pemanfaatan tersebut diterima untuk masa yang lebih dari satu periode akuntansi, maka dilakukan penyesuaian pendapatan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) tergantung dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.
3. Bentuk pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna serta kerja sama penyediaan infrastruktur.
4. Pengakuan pendapatan sewa dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian sewa melewati jangka waktu satu tahun, maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak entitas yang bersangkutan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) sesuai dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

1. Pendapatan nonperpajakan lainnya antara lain dapat berasal dari keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang.
2. Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pendapatan yang berasal dari

bunga/jasa perbankan diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat kas diterima oleh entitas.

3. Untuk pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

Pendapatan perizinan;

1. Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya.
2. Pemerintah selaku pemberi izin dapat memberikan batas waktu kepada penerima izin maupun tidak memberikan batas waktu.

Pendapatan Pemberian Layanan

1. Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

1. Terhadap pendapatan operasional yang berasal dari pemanfaatan/pengambilan SDA berdasar unitnya, jumlah pendapatannya dinilai sebesar jumlah SDA yang diambil/dimanfaatkan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal tarif dan penetapan dengan mata uang asing, jumlah pendapatan dicatat dengan mengkonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal penetapan.
3. Dalam hal penyeteroran baru dilakukan kemudian masih dalam batas waktu yang diperkenankan dan terdapat perubahan kurs, jumlah pendapatan operasional adalah sebesar jumlah setoran sekaligus untuk koreksi atas pencatatan sebelumnya.

Pendapatan Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi yang dimiliki oleh entitas.
2. Hasil investasi jangka pendek yang berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (cash dividend) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Pendapatan dari investasi jangka panjang penyertaan modal pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas disamping dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut juga akan mengurangi ekuitas entitas pada penyertaan tersebut.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

1. Pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan sewa dinilai sebesar yang menjadi hak entitas pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan operasional yang berasal dari kerja sama pemanfaatan, dinilai sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

1. Pendapatan operasional yang berasal dari keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dikurangi dengan nilai buku aset yang dijual atau diserahkan.
2. Pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan pemerintah dinilai sebesar nilai penetapan.
3. Untuk pendapatan bunga/jasa perbankan dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui sebesar yang telah diterima oleh entitas.
4. Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan/pelanggaran hukum dinilai sebesar penetapan putusan.
5. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang, dinilai sebesar nilai utang yang dihapuskan oleh pemberi pinjaman. Bisa terjadi penghapusan utang dapat berasal dari usaha yang melebihi satu periode, namun mengingat prinsip keandalan, pendapatan dari penghapusan utang ini diakui sebesar nilai penghapusan pada tahun berkenaan.

10. Akuntansi Pendapatan Operasional Transfer;

1. Pendapatan Operasional Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Operasional Transfer LRA diakui pada saat :
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pendapatan Operasional Transfer - LO diakui, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.
4. Alokasi pendapatan transfer merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
5. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan.
6. Apabila informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur setelah entitas penerima menerbitkan laporan keuangan, maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
7. Ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Contohnya dana BOS dan dana desa.
8. Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Cimahi diakui sebagai pendapatan. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah Kota Cimahi.
9. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.
10. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
11. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
12. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
13. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.
14. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.
15. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah

melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

11. Akuntansi Hibah;

1. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
 - b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
 - c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
 - d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
3. Pendapatan hibah - LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan Pendapatan yang diterima pada RKUD, yaitu:
 - a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
5. Pendapatan hibah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
6. Pengakuan pendapatan hibah – LO terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.
7. Pendapatan hibah – LO disajikan di Laporan Operasional.
8. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
 - c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

9. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Perangkat Daerah dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan Hibah-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Perangkat Daerah penerima.
10. Belanja hibah – LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Belanja hibah – LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
12. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
13. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
14. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
15. Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
16. Beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.
17. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
18. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
19. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
20. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.
21. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah.
22. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

12. Akuntansi Bantuan Sosial;

1. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini :
 - a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah.
 - b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.

- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan bencana.
 - d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
 - e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
2. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 3. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
 4. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.
 5. Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.
 6. Beban diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset;
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 7. Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.
 8. Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.
 9. Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.
 10. Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat.

11. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur.
12. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.
13. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.
14. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.
15. Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila entitas pemerintah belum menyalurkan bantuan sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya masa mendatang.

13. Akuntansi Piutang;

- 1) Untuk piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah diakui pada saat:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan ; dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke instansi terkait. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- 3) Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan penghitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 4) Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Apabila sampai dengan tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Retribusi Daerah (STRD).

- 5) STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 6) Piutang yang berdasarkan perikatan harus memenuhi kriteria untuk diakui sebagai piutang :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 7) Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah, perorangan, BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.
- 8) Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di Rekening Kas Umum daerah. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- 9) Piutang yang timbul dari penjualan pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.
- 10) Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran misalnya penjualan kendaraan dinas. Pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
- 11) Piutang atas dasar kemitraan timbul apabila terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya.
- 12) Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang pada umumnya untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, misalnya penyewaan tanah dan alat-alat milik pemerintah daerah. Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa pada setiap akhir periode akuntansi maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.
- 13) Pengakuan piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut :

a) Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat;

Piutang Dana bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah.

b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);

Piutang DAU diakui apabila pada saat akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke daerah, yaitu sebesar jumlah perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah apabila Pemerintah Pusat mengakuinya dan menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Apabila pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d) Piutang Transfer Lainnya;

Selain Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK, pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain, misalnya Dana Penyesuaian. Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran untuk transfer lainnya, yaitu pertama, pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan dan kedua, pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu. Apabila penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan sampai dengan akhir tahun anggaran, Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi piutang bagi pemerintah daerah. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, maka timbulnya piutang pada saat persyaratan sudah dipenuhi tetapi pembayarannya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

e) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitive telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah

yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi pemerintah daerah.

- 14) Pengakuan untuk piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) tergantung dari penyelesaian kasusnya, yaitu sebagai berikut :
- a) Apabila penyelesaian TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan, maka piutang diakui pada saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) sudah diterbitkan.
 - b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh pengadilan.

14. Akuntansi Persediaan;

Persediaan diakui :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 3) Pendapatan pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset.

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Periodik. Penilaian Persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

15. Akuntansi Investasi;

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas pelaporan perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas pelaporan akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan maka pengakuan menggunakan nilai estimasi yang layak.

16. Akuntansi Aset Tetap;

Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut dapat diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini dipenuhi:

- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Penyusutan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional dan dihitung setiap akhir periode.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (Straight Line Method) tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran dimaksud dalam paragraf 120 harus memenuhi batas minimum kapitalisasi biaya (capitalization threshold).

Batasan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan ditentukan dengan pedoman kapitalisasi barang daerah yang akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Perbaikan aset tetap meliputi:

- a) Renovasi;
- b) Restorasi; atau
- c) Overhaul.

17. Akuntansi Kerugian Daerah;

- 1) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:
 - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
 - c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.
- 4) Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.
- 5) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:
 - a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang TGR Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat

- berwenang.
- c. Pengakuan Beban
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 6) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:
- a. Entitas yang mengalami kerugian daerah.
 - 1) Pengakuan Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - 2) Pengakuan atas kekurangan aset
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - b. Entitas yang berhak menerima
 - 1) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah
Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada putusan pengadilan.
 - 2) Pengakuan Pendapatan LRA
Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian Negara/daerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah.
 - 3) Pengakuan Pendapatan LO
Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada putusan pengadilan.
- 7) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena adalah bendahara:
- a. Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
 - b. kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
 - c. kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
- 8) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :
- a. Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
 - b. Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus

dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.

- 9) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian karena putusan pengadilan sebagai berikut:
- Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
 - Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
 - Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas daerah.

18. Akuntansi Aset Tidak Berwujud

- Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

a. Dapat Diidentifikasi

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

- Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.
- Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset satu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan.

Aset tak berwujud diakui pada saat:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengeluaran Setelah Perolehan

1. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah aset tak berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai aset tak berwujud dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian aset tak berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam aset tak berwujud dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tak berwujud. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.
2. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tak berwujud dimaksud.
3. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi *software*;
 - b. Meningkatkan efisiensi *software*.
4. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
5. Aset tak berwujud disajikan sebesar:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import, pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan untuk aset tak berwujud yang diperoleh dengan pembelian, kerjasama atau pengembangan internal;
 - b. Nilai wajar, apabila diperoleh dari pertukaran atau donasi/hibah.
 - c. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh

pemerintah kota Cimahi adalah metode garis lurus, dilakukan setiap akhir periode dan masa manfaat sebagai berikut :

No	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
1	Lisensi, franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya	Sesuai masa berlaku/ perjanjian yang ditetapkan pemberi hak seperti Ditjen HAKI dll.
2	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 (lima) Tahun
3	<i>Software</i> Komputer	4 (empat) Tahun

6. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut:

$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$

- Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
 - Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

- Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
- Penghapusan Aset tak berwujud harus diungkapkan dalam CaLK.

19. Akuntansi Kewajiban;

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat laporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

20. Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa- Pemberi Konsesi;

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- (a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi Konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- (a) disediakan oleh mitra, yang:
 - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- (b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

- b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana sebagai hasil reklasifikasi.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.

21. Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- c) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

22. Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) kesalahan yang tidak berulang;
 - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Restitusi pendapatan akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 - 6) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
 - 7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
 - 9) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset dan akun ekuitas dana.
 - 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
 - 11) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana.
 - 12) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

23. Penyajian Laporan Keuangan BLUD

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

24. Laporan Keuangan Konsolidasian.

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 295), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 299).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Kode Rekening dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aset dan/atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima dan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan pada LRA diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Realisasi pendapatan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.398.833.022.715,00 atau mencapai 99,55% dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2023 sebesar Rp1.405.186.978.585,00. Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibandingkan anggarannya. Walaupun realisasi Pendapatan Transfer lebih kecil dibandingkan anggarannya.

2. Belanja

Belanja adalah penurunan aset dan/atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui dalam Tahun Anggaran berjalan dan pada akhir Tahun Anggaran.

Pengeluaran belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya;
- c. Belanja Tak Terduga.

Realisasi belanja periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.502.279.788.248,00 atau mencapai 92,50% dari anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp1.624.155.367.727,00

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan pengembalian belanja) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp0,00.

4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan kas yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran kas yaitu Pembayaran Pokok Utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.;
- c. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.;

Realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp220.542.689.922,00 atau 100,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.968.389.142,00. Penerimaan pembiayaan

Rp251.398.198.142,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan Rp251.398.198.142,00 terdiri dari dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp251.398.198.142,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30.855.508.220,00 atau 95,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.429.809.000,00 merupakan pembayaran pokok pinjaman ke Bank Dunia sebesar Rp855.508.220,00.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp425.618.305.801,00 atau mencapai 104,45% dari target anggaran sebesar Rp407.477.197.230,00.

4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp210.047.163.097,00 atau mencapai 108,68% dari target anggaran sebesar Rp193.265.398.170,00 terdiri dari:

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Hotel	410.652.716,00	496.217.756,00	120,84	300.018.582,00
Pajak Restoran	24.951.164.757,00	25.426.661.921,00	101,91	23.132.936.631,00
Pajak Hiburan	300.000.000,00	359.013.252,00	119,67	461.850.519,00
Pajak Reklame	4.125.214.200,00	4.418.639.600,00	107,11	2.988.440.000,00
Pajak Penerangan Jalan	41.269.473.535,00	42.284.388.475,00	102,46	41.170.519.697,00
Pajak Parkir.	1.043.751.000,00	1.098.042.476,00	105,20	1.128.146.604,00
Pajak Air tanah	19.351.951.648,00	23.335.953.825,00	120,59	15.724.487.391,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	59.952.343.410,00	63.183.375.956,00	105,39	57.936.562.461,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	41.860.846.904,00	49.444.869.836,00	118,12	51.047.178.518,00
Jumlah	193.265.398.170,00	Rp210.047.163.097,00	108,68	193.890.140.403,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp210.047.163.097,00 atau 108,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp193.265.398.170,00. Hal ini dikarenakan pengaruh kebijakan pemerintah pusat yang mulai melonggarkan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi pun mulai menggeliat kembali. Pencapaian realisasi pendapatan yang sangat signifikan yaitu dari Pajak Hotel sebesar Rp496.217.756,00 atau sebesar 120,84% dari target sebesar Rp410.652.716,00. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan atau

pemungutan pajak daerah serta melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah.

4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.952.863.977,00 atau mencapai 107,64% dari target anggaran sebesar Rp12.033.217.745,00 terdiri dari:

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	4.385.000.000,00	5.941.872.370,00	135,50	5.599.810.867,00
Retribusi Jasa Usaha	5.886.667.745,00	5.674.172.900,00	96,39	4.948.015.725,00
Retribusi Perijinan Tertentu	1.761.550.000,00	1.336.818.707,00	75,89	746.252.750,00
Jumlah	12.033.217.745,00	12.952.863.977,00	107,64	11.294.079.342,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Daerah	12.033.217.745,00	12.952.863.977,00	107,64	11.294.079.342,00
Retribusi Jasa Umum	4.385.000.000,00	5.941.872.370,00	135,50	5.599.810.867,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.100.000.000,00	2.396.163.164,00	114,10	2.181.745.406,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	150.000.000,00	183.061.250,00	122,04	126.737.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	800.000.000,00	819.787.000,00	102,47	771.883.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	-	1.012.875.350,00	-	924.793.700,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.000.000,00	539.943.700,00	98,17	579.679.100,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30	115.297.500,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	96.000.000,00	179.240.000,00	186,71	195.110.000,00
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	54.000.000,00	53.981.000,00	99,96	44.081.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	160.000.000,00	167.559.500,00	104,72	190.233.500,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97	470.250.161,00
Retribusi Jasa Usaha	5.886.667.745,00	5.674.172.900,00	96,39	4.948.015.725,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.654.419.145,00	5.321.934.250,00	114,34	4.649.606.225,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Pasar Grosir	967.248.600,00	66.833.400,00	6,91	-
Retribusi Terminal	220.000.000,00	239.889.000,00	109,04	256.477.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	45.000.000,00	45.516.250,00	101,15	41.932.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.761.550.000,00	1.336.818.707,00	75,89	746.252.750,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	10.553.450,00
Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	11.550.000,00	14.100.000,00	122,08	12.750.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	350.000.000,00	-	-	-
Retribusi Persetujuan Bangunan	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48	722.949.300,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp12.952.863.977,00 atau 107,64% di atas target yang dianggarkan sebesar Rp12.033.217.745,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.658.784.635,00 atau sebesar 14,69%.

Memperhatikan data tersebut di atas untuk terus meningkatkan pendapatan retribusi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang akan melakukan langkah- langkah antara lain:

1. Menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang akurat; dan
2. Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah.

4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.627.628.409,00 atau mencapai 100,00% dari target anggaran sebesar Rp11.627.628.409,00 terdiri dari:

Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	100,00	11.022.613.597,00
Jumlah	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	100,00	11.022.613.597,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp11.627.628.409,00 tersebut merupakan bagian dividen atas laba Tahun 2023 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 111.215.958 lembar saham pada PT Bank BJB.

4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp190.990.650.318,00 atau mencapai 100,23% dari target anggaran sebesar Rp190.550.952.906,00 terdiri dari:

Tabel 4.5 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	213.429.477,00	319.161.177,00	149,54	851.993.938,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.033.343.126,00	2.119.384.539,00	35,13	955.844.165,00
Jasa Giro	6.000.000.000,00	6.005.169.523,00	100,09	8.005.708.874,03
Pendapatan Bunga	453.020.463,00	905.231.226,00	199,82	798.069.058,45
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.182.722.697,00	1.155.159.504,00	97,67	3.411.390.499,00
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	-	1.699.677,00	-	60.001,05
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	33.091.276,00	89.892.787,00	271,65	46.526.247,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.163.562.386,00	2.578.650.376	49,94	1.936.634.909,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.223.073,00	22.694.382,00	246,06	16.759.312,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	96.660.750,00
Pendapatan dari Pengembalian	702.140.682,00	599.957.132,00	85,45	587.092.623,00
Pendapatan Dari BLUD	170.708.262.060,00	177.025.992.329,00	103,70	160.963.675.737,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	46.907.666,00	46.907.666,00	100,00	54.700.115,00
Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht)	-	100.000.000,00	-	739.520.000,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.250.000,00	20.750.000,00	395,24	5.250.000,00
Jumlah	190.550.952.906,00	190.990.650.318,00	100,23	178.469.886.228,53

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12,520,738,498.47 atau 7,01% dibandingkan dengan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2022. Kenaikan yang signifikan terjadi pada Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang mencapai 395,24% dari target yang dianggarkan dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah naik sebesar Rp15.500.000,00 atau 14,42% dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022. Terdapat juga realisasi Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah yang melampaui target diantaranya yaitu Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 149,54%, Jasa Giro 100,09%, Pendapatan Bunga 199,82%, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 271,65%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah 246,06%, Pendapatan Dari BLUD 103,70% dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 395,24%.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp973.214.716.914,00 atau 97,54% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp997.709.781.355,00.

Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	822.029.968.399,00	806.034.916.636,00	98,05	772.058.311.872
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	5.528.168.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	175.679.812.956,00	167.179.800.278,00	95,16	158.775.075.669
Jumlah	997.709.781.355,00	973.214.716.914,00	97,54	936.361.555.541

4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp806.034.916.636,00 atau 98,05% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp822.029.968.399,00.

4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.785.582.168,00 atau 92,29% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp60.444.852.156,00 terdiri dari:

Tabel 4.7 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.362.981.136,00	3.339.222.814,00	141,31	5.914.895.750,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	1.572.458.926,00	6.474.835.135,00	411,76	6.431.697.628,00
DBH PPh Pasal 21	48.170.886.533,00	37.449.121.375,00	77,74	36.131.033.101,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.338.525.561,00	8.522.402.844,00	102,21	5.752.011.988,00
Jumlah	60.444.852.156,00	55.785.582.168,00	92,29	54.229.638.467,00

Realisasi Pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai dengan PMK nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.716.968.211,0 atau 81,06% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp32.960.972.812,00 terdiri dari:

Tabel 4.8 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	8.762.861.526,00	5.586.835.977,00	63,76	6.486.579.939,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-835.839.141,00	1.269.887.063,00	-151,93	5.974.722.332,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	-280.368.443,00	347.792.599,00	-124,05	1.443.936.099,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.042.274.455,00	1.068.283.550,00	102,50	127.372.337,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	976.153.666,00	1.444.887.211,00	148,02	1.958.311.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	23.295.890.749,00	16.999.281.811,00	72,97	20.613.333.652,00
Jumlah	32.960.972.812,00	26.716.968.211,0	81,06	36.604.255.359,00

Realisasi Pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai dengan PMK nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023

4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp553.049.730.500,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp553.056.036.000,00 terdiri dari:

Tabel 4.9 Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	553.056.036.000,00	553.049.730.500,00	100,00	519.937.401.610,00

Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendapatkan penetapan Dana Alokasi Umum sebesar

Rp553.056.036.000,00. Realisasi yang diterima Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2023 sebesar Rp553.049.730.500,00 yang terdiri dari DAU *Block Grant* sebesar Rp465.462.818.500,00, Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp27.481.974.000,00, Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.000.000.000,00, Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan sebesar Rp 27.096.034.000,00, Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan sebesar Rp 22.708.904.000,00, dan Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp7.300.000.00,00.

4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp170.482.635.757,00 atau 97,10% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp175.568.107.431,00 terdiri dari:

Tabel 4.10 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	14.085.517.000,00	13.481.150.654,00	95,71	21.060.743.820,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	161.482.590.431,00	157.001.485.103,00	97,23	140.226.272.616,00
Jumlah	175.568.107.431,00	170.482.635.757,00	97,10	161.287.016.436,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik yang diterima sebesar Rp13.481.150.654,00 dialokasikan untuk kepentingan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Rp1.559.082.938,00
b. Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Rp2.411.720.456,00
c. Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Rp4.704.587.771,00
d. Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Rp509.666.889
e. Bidang Sanitasi-Reguler	Rp1.257.580.500,00
f. Bidang Sanitasi-Penugasan	Rp2.934.389.500,00
g. Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	Rp104.122.600,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima sebesar Rp157.001.485.103,00 dialokasikan untuk kepentingan sebagai berikut:

a. BOS Reguler	Rp67.952.155.122,00
b. BOS Kinerja	Rp1.865.000.000,00
c. TPG PNSD	Rp62.989.552.400,00
d. Tamsil Guru PNSD	Rp1.252.599.950,00
e. BOP PAUD	Rp5.838.510.000,00
f. BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp3.640.730.000,00
g. BOKKB-BOK	Rp1.876.374.198,00
h. BOKKB-Akreditasi Puskesmas	Rp8.020.967.500,00
i. PK2UMK	Rp284.840.000,00
j. Fasilitasi Penanaman Modal	Rp329.693.276,00
k. BOKB-KB	Rp2.798.983.157,00
l. Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp152.079.500,00

4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

4.1.2.2.1. Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 4.11 Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Insentif daerah (DID)	-	-	-	5.528.168.000
Jumlah	-	-	-	5.528.168.000

4.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp167.179.800.278,00 atau 95,16% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp175.679.812.956,00 terdiri dari:

4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp145.938.307.278,00 atau 94,62% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp154.233.436.377,00 terdiri dari:

Tabel 4.12 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	54.296.132.138,00	53.143.114.515,00	97,88	51.403.685.055,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.533.582.780,00	27.227.206.860,00	92,19	26.645.376.870,00
Bagi Hasil dr Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.987.142.263,00	32.913.764.812,00	94,07	37.013.677.805,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	203.458.000,00	188.750.300,00	92,77	215.164.900,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	35.213.121.196,00	32.465.470.791,00	92,20	31.136.571.039,00
Jumlah	154.233.436.377,00	145.938.307.278,00	94,62	146.414.475.669,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.834-BPKAD/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

4.1.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.241.493.000,00 atau 99,04% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp21.446.376.579,00 terdiri dari:

Tabel 4.13 Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	21.241.493.000,00	21.241.493.000,00	100,00	12.360.600.000,00
Bantuan Dari Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-
Jumlah	21.241.493.000,00	21.241.493.000,00	100,00	12.360.600.000,00

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Kota Cimahi.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023:

Tabel 4.14 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat :	-	-	-	-
<i>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</i>		-	-	-
Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak mendapatkan Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus.

4.1.4. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.368.270.704.552,00 atau mencapai 93,02% dari anggarannya sebesar Rp1.470.942.364.571,00 terdiri dari:

Tabel 4.15 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	690.816.358.202,00	642.933.272.638,00	93,07	658.940.382.015,00
Belanja Barang	720.335.671.235,00	666.384.924.873,00	92,51	588.254.398.560,17
Belanja Bunga	500.000.000,00	170.419.912,00	34,08	234.672.144,00
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	54.870.529.600,00	54.633.767.129,00	99,57	39.388.772.249,00
Belanja Bantuan Sosial	4.419.805.534,00	4.148.320.000,00	93,86	3.133.871.600,00
Jumlah	1.470.942.364.571,00	1.368.270.704.552,00	93,02	1.289.952.096.568,17

4.1.4.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp642.933.272.638,00 atau mencapai 93,07% dari anggarannya sebesar Rp690.816.358.202,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 46,99% terdiri dari:

Tabel 4.16 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	319.166.474.735,00	288.561.651.177,00	90,41	286.598.598.855,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	186.540.364.683,00	176.854.593.690,00	94,81	177.860.225.984,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.641.448.641,00	79.651.395.548,00	94,10	91.354.628.760,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	41.825.124.200,00	40.867.243.972,00	97,71	37.689.483.344,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	675.275.856,00	675.275.856,00	100,00	510.090.496,00
Belanja	732.000.000,00	692.000.000,00	94,54	732.000.000,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH				
Belanja Pegawai BLUD	57.235.670.087,00	55.631.112.395,00	97,20	64.195.354.576,00
JUMLAH	690.816.358.202,00	642.933.272.638,00	93,07	658.940.382.015,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 secara nominal meningkat sebesar Rp16.007.109.377,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022. Secara presentase penyerapan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 naik sebesar 6,35% menjadi 93,07% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Naiknya penyerapan anggaran tersebut terlihat signifikan pada realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp675.275.856,00 atau 100% dari belanja yang dianggarkan yaitu Rp675.275.856,00.

4.1.4.2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Belanja Barang adalah untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp666.384.924.873,00 atau 92,51% dari anggarannya sebesar Rp720.335.671.235,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 48,70%, terdiri dari:

Tabel 4.17 Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Bahan Pakai Habis	164.327.539.839,00	149.280.755.444,00	90,84	106.568.809.733,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	400.254.000,00	390.306.712,00	97,51	836.503.278,00
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Kantor	194.794.369.983,00	177.396.407.356,00	91,07	168.554.514.488,17
Belanja Premi Asuransi	49.116.841.005,00	41.655.151.068,00	84,81	43.394.308.646,00
Belanja Sewa Tanah	192.000.000,00	186.319.000,00	97,04	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.843.927.120,00	5.976.580.103,00	87,33	4.840.774.785,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.216.641.192,00	7.293.271.000,00	88,76	5.027.060.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	401.316.750,00	360.230.025,00	89,76	166.064.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.816.017.320,00	11.265.673.068,00	87,90	13.824.449.861,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.421.487.548,00	2.164.863.311,00	89,40	4.602.217.357,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	81.000.000,00	57.000.000,00	70,37	10.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9.833.068.000,00	9.121.089.059,00	92,76	4.682.857.652,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	622.734.637,00	565.081.494,00	90,74	0,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan Tanah	160.000.000,00	158.718.847,00	99,20	172.628.200,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.598.001.446,00	13.750.814.039,00	82,85	12.883.992.905,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.366.875.600,00	2.211.998.477	93,46	1.480.253.192,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	485.942.175,00	449.164.934,00	92,43	15.298.136.315,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	14.000.000,00	13.788.975,00	98,49	6.993.000,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.533.647.000,00	43.935.025.686,00	90,52	35.059.872.218,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak				
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.252.385.600,00	21.097.032.038,00	86,99	3.049.770.181,00
Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.733.642.500,00	6.444.232.955,00	95,70	3.928.196.144,00
Belanja Barang dan Jasa BOS				
Belanja Barang Dana BOS	49.731.614.668,00	49.193.032.725,00	98,92	46.539.291.483,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.392.364.852,00	123.418.388.557,00	101,67	117.327.704.622,00
	720.335.671.235,00	666.384.924.873,00	92,51	588.254.398.560,17

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp78.130.526.312,83 atau sebesar 13,28% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022. Namun, apabila melihat rincian belanja di atas masih ada realisasi belanja yang sangat rendah, yaitu penyerapan untuk Belanja Beasiswa Pendidikan PNS hanya Rp57.000.000,00 atau 70,37% dari anggarannya sebesar Rp81.000.000,00.

Dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp666.384.924.873,00 realisasi tertinggi per rincian objek Belanja Barang adalah untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp123.418.388.557,00 (101,67%), Belanja Barang Dana BOS Rp49.193.032.725,00 (98,82%) dan Belanja Pemeliharaan Tanah Rp158.718.847,00 (99,20%).

4.1.4.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Realisasi Belanja Bunga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp170.419.912,00 atau 34,08% dari anggarannya sebesar Rp500.000.000,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,01% terdiri dari:

Tabel 4.18 Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	500.000.000,00	170.419.912,00	34,08	234.672.144,00
- JT s.d Maret		92.533.017,00		129.039.157,00
- JT s.d September		77.886.895,00		105.632.987,00
Bunga Utang Pinjaman	500.000.000,00	170.419.912,00	34,08	234.672.144,00

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas Pembayaran bunga atas pinjaman ke Pemerintah Pusat sebesar Rp308.874.114,00 terdiri dari jatuh tempo bulan Maret 2023 Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp92.533.017,00 jatuh tempo bulan September 2023 Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp77.886.895,00.

Melihat masih banyaknya sisa anggaran yang tidak terserap, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bunga karena dengan utang yang sudah diketahui, baik secara nominal pokok maupun persentase bunga tahunan, seharusnya perhitungan proyeksi Belanja Bunga dapat lebih tepat. Dengan perhitungan yang lebih baik, maka kelebihan anggaran dapat diminimalisir dan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.4.4. Belanja Subsidi

Tidak ada Realisasi Belanja Subsidi pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023:

Tabel 4.19 Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Subsidi			-	-
Jumlah			-	-

4.1.4.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi, dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.633.767.129,00 atau 99,57% dari anggarannya sebesar Rp54.870.529.600,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 3,99% terdiri dari:

Tabel 4.20 Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	22.407.754.600,00	22.334.702.900,00	99,67	1.064.246.600,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16.423.970.000,00	16.347.934.278,00	99,54	22.767.683.364,00
Belanja Hibah Dana BOS	13.789.930.000,00	13.702.254.951,00	99,36	14.010.515.835,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.248.875.000,00	2.248.875.000,00	100,00	1.546.326.450,00
Jumlah	54.870.529.600,00	54.633.767.129,00	99,57	39.388.772.249,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dan Hibah kepada Pemerintah Pusat melalui sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Gedung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi diberikan kepada 7 (tujuh) Badan/Lembaga/Organisasi yang ada di Kota Cimahi. Selanjutnya, dalam belanja hibah juga terdapat sub rincian objek belanja hibah Dana BOS yang diterima oleh sekolah Swasta secara langsung dari KPPN. Selain itu, terdapat pula Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada 10 (sepuluh) Partai Politik yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diberikan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Rincian Penerima Hibah dapat dilihat di *lampiran 1*.

4.1.4.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.148.320.000,00 atau 93,86% dari anggarannya sebesar Rp4.419.805.534,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,30% terdiri dari:

Tabel 4.21 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.419.805.534,00	4.148.320.000,00	93,86	3.133.871.600,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-
Jumlah	4.419.805.534,00	4.148.320.000,00	93,86	3.133.871.600,00

Belanja Bantuan Sosial digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi untuk Bantuan Sosial Sumbangan Pembinaan Pendidikan Jenjang SD dan SMP tahun anggaran 2023.

Rincian Penerima Bantuan Sosial dapat dilihat di *Lampiran 1*.

4.1.5. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp131.002.245.938,00 atau mencapai 92,20% dari anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp142.084.996.945,00 terdiri dari:

Tabel 4.22 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tanah	4.148.782.770,00	3.754.393.256,00	90,49	171.269.485,00
Belanja Peralatan dan Mesin	46.908.675.774,00	42.675.735.899,00	90,98	22.831.957.980,00
Belanja Gedung dan Bangunan	46.477.173.465,00	44.380.998.889,00	95,49	40.246.977.335,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.652.516.154,00	36.473.543.179,00	89,72	16.911.640.321,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.982.215.730,00	2.959.285.645,00	99,23	1.420.437.523,00
Belanja Aset Lainnya	915.633.052,00	758.289.070,00	82,82	
Jumlah	142.084.996.945,00	131.002.245.938,00	92,20	81.570.042.644,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 secara nominal naik sebesar Rp49.432.203.294,00 dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022. Namun, secara presentase realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,41% dibandingkan Tahun 2022. Dari rincian belanja modal di atas dapat dilihat realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Cimahi masih sangat rendah dan terlihat signifikan pada Belanja Aset Lainnya yang penyerapannya hanya 82,82% dari nilai belanja yang dianggarkan sebesar Rp915.633.052,00.

Dari Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp131.002.245.938,00 realisasi tertinggi per rincian objek belanja modal adalah untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp14.665.110.303,00, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp14.665.110.303,00 yaitu untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah kemudian Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Olahraga dan Kesehatan.

4.1.6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 sebesar Rp3.006.837.758,00 atau mencapai 27,02% dari anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp11.128.006.211,00.

Tabel 4.23 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tak Terduga	11.128.006.211,00	3.006.837.758,00	27,02	6.050.171.068,00
Jumlah	11.128.006.211,00	3.006.837.758,00	27,02	6.050.171.068,00

Belanja tidak terduga sebesar Rp3.006.837.758,00 merupakan Belanja yang digunakan untuk penanganan keracunan pangan sebesar Rp617.332.200,00 pada Dinas Kesehatan, Belanja Darurat Sampah sebesar Rp2.258.926.836,00 serta Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2021 Rp130.578.722,00. Rincian Penggunaan BTT untuk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Total (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	2.258.926.836,00
2	Dinas Kesehatan	617.332.200,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	130.578.722,00
	Total	3.006.837.758,00

4.1.7. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

4.1.8. Surplus/(Defisit)

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun 2023 dianggarkan terjadi defisit sebesar Rp(218.968.389.142,00) sedangkan realisasinya mengalami defisit sebesar Rp(103.446.765.533,00)

Tabel 4.25 Defisit Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Surplus/(Defisit)	-218.968.389.142,00	-103.446.765.533,00	47,24	-46.634.035.168,64

Defisit anggaran sebesar Rp(103.446.765.533,00) terjadi karena pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.398.833.022.715,00 tidak dapat menutupi belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.502.279.788.248,00 sehingga defisit Rp(103.446.765.533,00) ditutupi oleh penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

4.1.9. Pembiayaan

4.1.9.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp251.398.198.142,00 yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun 2022 Rp251.398.198.142,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp251.398.198.142,00.

Tabel 4.26 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Penggunaan SiLPA	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	100,00	308.665.364.620,64
Penerimaan Dana Talangan RSUD dari Bank Mandiri	-	-	-	-
Jumlah	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	100,00	308.665.364.620,64

4.1.9.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.855.508.220,00 atau 95,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp32.429.809.000,00.

Tabel 4.27 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
Jumlah	32.429.809.000,00	30.855.508.220,00	95,15	855.508.220,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp30.855.508.220,00 yaitu terdiri dari pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan pemilihan kepada daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan dan pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007.

4.1.10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja (surplus/defisit) dengan penerimaan/pengeluaran pembiayaan (pembiayaan netto) selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA TA 2023 yaitu sebesar Rp117.095.924.389,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.28 Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Realisasi Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah	425.618.305.801,00	394.676.719.570,53
Pendapatan Transfer	973.214.716.914,00	936.361.555.541,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-
Jumlah Pendapatan (a)	1.398.833.022.715,00	1.331.038.275.111,53
Realisasi Belanja		
Belanja Operasi	1.368.270.704.552,00	1.289.952.096.568,17
Belanja Modal	131.002.245.938,00	81.570.042.644,00
Belanja Tak Terduga	3.006.837.758,00	6.050.171.068,00
Jumlah Belanja (b)	1.502.279.788.248,00	1.377.572.310.280,17
Transfer		
Bantuan Keuangan	0,00	100.000.000,00
Jumlah Transfer (c)	0,00	100.000.000,00
Surplus / (Defisit) (I)	(103.446.765.533,00)	(46.634.035.168,64)
Realisasi Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64
Pengeluaran Pembiayaan	30.855.508.220,00	10.633.131.310,00
Pembiayaan Netto (II)	220.542.689.922,00	298.032.233.310,64
SILPA Tahun 2023 (I) + (II)	117.095.924.389,00	251.398.198.142,00

4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel 4.29 Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023

	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	251.398.198.142,00	308.665.364.620,64
Subtotal	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	117.095.924.389,00	251.398.198.142,00
Subtotal	117.095.924.389,00	251.398.198.142,00
Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	117.095.924.389,00	251.398.198.142,00

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30 Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	105.005.699.466,00	233.273.390.848,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 tersebut terdiri dari:

Tabel 4.31 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2022

No	No. Rek.	Bank	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	0230270000025	BJB	105.005.699.466,00	233.273.390.848,00
2	00091.01.30.000230.1	BTN	-	-
3	7233333551	BSM	-	-
4	7233333446	BSM	-	-
Jumlah			105.005.699.466,00	233.273.390.848,00

Dari Kas di Kas Daerah tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Kas di Kas Daerah pada Bank BJB merupakan rekening yang dikelola oleh BUD yang digunakan untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Saldo Kas Daerah pada Bank BJB adalah sebesar Rp105.005.699.466,00. Di dalam Kas di Kas daerah tersebut terdapat koreksi sebesar 0,13 karena pembulatan Transaksi di Bank Jabar Banten;
- Kas pada Bank BTN rekening Giro Nomor: 0009101300002301 digunakan sebagai rekening penerimaan pajak ditutup pada Tahun 2022;
- Kas pada Bank Syariah Mandiri rekening Tabungan Mudharabah Nomor: 7233333551 ditutup pada Tahun 2022;
- Kas pada Bank Syariah Mandiri rekening Giro Wadiah Nomor: 7233333446 ditutup pada Tahun 2022;
- Pemerintah Kota Cimahi tidak mengeluarkan bilyet giro untuk memindahbukukan uang dari rekening Kas Daerah kepada rekening pihak yang menerima, tetapi menggunakan SP2D sebagai alat pembayaran;
- Di dalam Kas di Kas Daerah pada Bank BJB terdapat juga sisa Dana Transfer (*Earmark*) Per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.985.993.272,00 yang terdiri dari :
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan 83.660.314
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 5.575.722.346
 - Dana Insentif Daerah (DID) 3.961.047.772

4	Dana Alokasi Umum P3K	20.433.004.328
5	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	2.412.200.531
6	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	4.400.174.490
7	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	32.274.291
8	Dana Alokasi Umum Bidang Kelurahan	87.909.200
JUMLAH		36.985.993.272,00

4.3.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo seluruh kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	360.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	250.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0,00	155.045.636,00
Jumlah	0,00	155.655.636,00

4.3.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo seluruh kas yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	200,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	800.000,00
Jumlah	200,00	800.000,00

Kas Bendahara Penerimaan Rp200,00 merupakan setoran Retribusi Pelayanan Pasar yang dibayar oleh Wajib Retribusi melalui fasilitas QRIS ke Rekening Titipan Layanan Pasar Cimindi namun terjadi kekurangan ketika dilimpahkan oleh petugas Bank BJB ke Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga tidak tersetorkan ke Kas Daerah.

4.3.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang berada di Bendahara BLUD Kota Cimahi yang terdiri dari RSUD Cibabat, 13 (tiga belas) UPT Puskesmas, dan UPT Air Minum.

Tabel 4.34 Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
BLUD RSUD Cibabat	3.293.628.125,00	11.048.201.198,00
BLUD Air Minum	1.548.921.537,00	1.586.321.584,00
BLUD Puskesmas	6.938.812.861,00	4.980.283.810,00
Jumlah	11.781.362.523,00	17.614.806.592,00

- 1) Kas di RSUD Cibabat merupakan saldo kas di rekening RSUD Cibabat yang merupakan hasil dari kegiatan operasional RSUD dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional RSUD Cibabat, dan Saldo Giro Rupiah IDR-Gov. Saldo Kas di RSUD Cibabat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar:

Tabel 4.35 Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kas di RSUD Cibabat	3.293.628.125,00	11.048.201.198,00

Saldo Kas di RSUD Cibabat yang berada pada rekening nomor 00230030000609 a.n. RSUD Cibabat pada Bank Jabar Banten berasal dari pendapatan operasional rumah sakit sebesar Rp3.293.628.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.36 Rincian Saldo Kas di RSUD Cibabat Tahun Anggaran 2023

Penerimaan:		
Pendapatan Operasional TA 2022	149.918.888.476,00	
Jumlah (a)	149.918.888.476,00	
Belanja:		
TA 2022	157.673.461.549,00	
Ambang Batas TA 2022	-	
Jumlah (b)		157.673.461.549,00
Sisa Kas (c=a-b)		(7.754.573.073,00)
Saldo Tahun Lalu (d)		11.048.201.198,00
Pembualatan (e)		-
Total Kas di RSUD Cibabat TA 2022 (f=c+d+e)		3.293.628.125,00

- 2) Kas di BLUD Air Minum merupakan saldo kas di rekening BLUD Air Minum yang merupakan hasil dari kegiatan operasional BLUD Air Minum dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional BLUD Air Minum. Saldo Kas di BLUD Air Minum per 31 Desember 2022 adalah sebesar:

Tabel 4.37 Saldo Kas di BLUD Air Minum Tahun Anggaran 2023

Penerimaan:		
Pendapatan Operasional TA 2022	5.590.343.514,00	
Jumlah (a)	5.590.343.514,00	
Belanja:		
TA 2022	5.283.154.723,00	
Jumlah (b)		5.283.154.723,00
Sisa Kas (c=a-b)		307.188.791,00
Saldo Tahun Lalu (d)		1.586.321.584,00
Setoran SILPA ke Kas Daerah Tanggal 19 Mei 2023 (e)		344.588.838,00
Total Kas di BLUD Air Minum TA 2022 (f=c+d-e)		1.548.921.537,00

- 3) Kas di Bendahara BLUD Puskesmas merupakan saldo kas di rekening FKTP (Puskesmas) Kota Cimahi pada Bank BJB yang berasal dari Badan Penyelenggara Jasa Kesehatan (BPJS) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan saldo kas BOK di rekening FKTP (puskesmas) Kota Cimahi pada Bank BNI yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Saldo kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai:

Tabel 4.38 Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	6.938.812.861,00	4.980.283.810,00

Tabel 4.39 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2023

Saldo Kas Bank BJB				
No.	Nomor Rekening	BLUD Puskesmas	2023	2022
1	0059469843001	Bend Dana Kapitasi Cibeureum	717.718.496,00	653.831.868,00
2	0059470388001	Bend Dana Kapitasi Leuwigajah	183.936.768,00	219.198.674,00
3	0059474278001	Bend Dana Kapitasi Cigugur	192.348.965,00	405.174.115,00
4	0059475851001	Bend Dana Kapitasi Pasirkaliki	64.461.839,00	97.886.488,00
5	0059478494001	Bend Dana Kapitasi Cipageran	441.372.416,00	649.769.135,00
6	0059478117001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Tengah	350.137.367,00	549.321.706,00
7	0059478249001	Bend Dana Kapitasi Padasuka	281.077.341,00	562.613.342,00
8	0059479938001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Utara	511.688.324,00	777.410.861,00
9	0059490974001	Bend Dana Kapitasi Cibeber	162.097.636,00	286.324.090,00
10	0059535862001	Bend Dana Kapitasi Melong Tengah	7.396.219,00	42.832.928,00
11	0059547607001	Bend Dana Kapitasi Citeureup	161.995.341,00	246.122.104,00

Saldo Kas Bank BJB

No.	Nomor Rekening	BLUD Puskesmas	2023	2022
12	0059547879001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Selatan	180.187.075,00	140.373.172,00
13	0059574868001	Bend Dana Kapitasi Melong Asih	168.977.068,00	349.425.327,00
Jumlah			3.423.394.855,00	4.980.283.810,00

Saldo Kas BNI

No.	Nomor Rekening	BLUD Puskesmas	2023
1	1590029675	Bend BOK Cibeureum	215.225.370,00
2	1590029631	Bend BOK Leuwigajah	468.325.050,00
3	1590029619	Bend BOK Cigugur Tengah	220.684.691,00
4	1590029552	Bend BOK Pasirkaliki	122.413.619,00
5	1590029642	Bend BOK Cipageran	252.813.097,00
6	1590029596	Bend BOK Cimahi Tengah	241.079.739,00
7	1590029585	Bend BOK Padasuka	182.572.139,00
8	1590029686	Bend BOK Cimahi Utara	503.620.950,00
9	1590029563	Bend BOK Cibeber	222.512.665,00
10	1590029574	Bend BOK Melong Tengah	207.828.211,00
11	1590029653	Bend BOK Citeureup	193.583.975,00
12	1590029608	Bend BOK Cimahi Selatan	343.647.425,00
13	1590029620	Bend BOK Melong Asih	341.111.075,00
Jumlah			3.515.418.006,00

4.3.5. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Sisa dari Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Tabel 4.40 Saldo Kas Dana BOS Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kas Dana BOS	308.862.200,00	353.545.066,00
Rincian sebagai berikut :		
Pendapatan (a)		
Penerimaan Dana Bos TA 2022	56.114.900.171,00	52.237.540.478,00
Belanja (b)		
Pengeluaran Dana Bos TA 2022	56.159.583.037,00	53.647.413.850,00
Pengembalian Dana BOS		
Sisa Kas (c=a-b)	(44.682.866,00)	(1.409.873.372,00)
Pajak Yang belum Di setor (d)		
Pajak Yang Sudah Di setor (e)		
Saldo Tahun Lalu(f)	353.545.066,00	1.763.418.438,00
Total Kas Dana BOS TA 2022 (g=d+e+f)	308.862.200,00	353.545.066,00

4.3.6. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan keterlambatan pembayaran pajak (PFK) Dana BOS Tahun 2023 dari 2 Sekolah Dasar Negeri.

Tabel 4.41 Saldo Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023

No.	OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	579.827.960,00
2	Setoran PFK - Dana Bos	583.400,00	125.000,00
Jumlah		583.400,00	579.952.960,00

4.3.7. Piutang Pajak

Pajak merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas pajak daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak (WP). Saldo piutang pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar:

Tabel 4.42 Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang Pajak	138.164.438.365,00	134.678.166.819,00

Piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.164.438.365,00 tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2023, terdiri dari:

Tabel 4.43 Rincian Saldo Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Pajak	2023	2022
1	Pajak Hotel	20.001.265,00	15.284.880,00
2	Pajak Restoran	23.684.841,00	180.322.860,00
3	Pajak Reklame	885.838.535,00	934.057.835,00
4	Pajak Hiburan dan Tontonan	30.000,00	-
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	-	-
6	Pajak Parkir	1.232.600,00	290.800,00
7	Pajak Air Tanah	1.956.654.517,00	1.062.118.438,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	135.276.996.607,00	132.486.092.006,00
Jumlah		138.164.438.365,00	134.678.166.819,00

Saldo piutang pajak sebesar Rp138.164.438.365,00 tersebut berasal dari mutasi piutang pajak selama tahun 2023 yang meliputi:

Tabel 4.44 Mutasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2022	134.678.166.819,00
2	Penambahan:	
3	Penetapan SKPD tahun 2023	213.533.434.643,00
4	Jumlah Penambahan	<u>213.533.434.643,00</u>
5	Pengurangan:	
6	Pembayaran tahun 2023	210.047.163.097,00
7	Jumlah Pengurangan	<u>210.047.163.097,00</u>
8	Saldo Piutang per 31 Desember 2023 (8=1+ 4-7)	138.164.438.365,00

Rincian mutasi dapat dilihat pada *lampiran 2*.

Dalam Saldo Awal Piutang Pajak Rp138.164.438.365,00 terdapat piutang yang telah dihapuskan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 913/KEP.456-BAPPENDA/2021 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah Kadaluwarsa untuk Masa Pajak Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2021 Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp91.036.314.611,00, namun terdapat penyesuaian pembayaran atas piutang yang dihapuskan sebesar Rp1.140.949.154,00 sehingga jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dihapuskan Tahun 1994 sampai dengan 2012 per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.895.365.475,00. Penambahan Piutang Pajak merupakan ketetapan Tahun 2023 ditambah dengan hasil pelayanan di tahun berjalan (penambahan luas bumi dan atau bangunan) dengan jumlah seluruh penambahan ketetapan sebesar Rp213.533.434.643,00.

Saldo piutang pajak tersebut belum termasuk potensi denda pajak yang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yaitu sebesar Rp59.034.938.154,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.45 Rincian Potensi Denda Pajak Tahun Anggaran 2023

Piutang	Potensi Denda Pajak per 31 Desember 2022 (Rp)
Pajak Hotel	7.048.742,00
Pajak Restoran	5.843.740,00
Pajak Reklame	272.119.763,00
Pajak Parkir	-
Pajak Air Tanah	232.074.637,00
Pajak Bumi dan Bangunan	58.517.851.272,00
Jumlah	59.034.938.154,00

4.3.8. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 adalah:

Tabel 4.46 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak	71.384.856.693,64	58.882.194.046,77

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 besar (Rp71.384.856.693,64) dengan rincian:

Tabel 4.47 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023

Piutang	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2022 (Rp)
Pajak Hotel	1.495.069,93	1.471.488,00
Pajak Restoran	396.067,50	1.066.201,80
Pajak Reklame	277.825.716,00	186.457.470,50
Pajak Hiburan dan Tontonan	150,00	-
Pajak Penerangan Jalan	-	-
Pajak Parkir	6.163,00	18.155,00
Pajak Air Tanah	265.933.776,53	271.420.814,06
Pajak Bumi dan Bangunan	70.839.199.750,69	58.421.759.917,41
Jumlah	71.384.856.693,64	58.882.194.046,77

Rincian mutasi dapat dilihat pada *lampiran 3*.

4.3.9. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas retribusi daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Retribusi (WR). Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar:

Tabel 4.48 Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang Retribusi	3.420.632.935,00	3.105.262.342,00

Piutang retribusi tersebut terdiri dari:

Tabel 4.49 Rincian Saldo Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Piutang	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	222.010.917,00	108.286.824,00
2	Piutang retribusi Ijin Gangguan/Keramaian (HO)	51.898.211,00	51.898.211,00
3	Piutang retribusi Ijin Trayek	4.700.000,00	3.950.000,00
4	Piutang retribusi Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00

No.	Jenis Piutang	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5	Piutang Retribusi UPTD Laboratorium Lingkungan	27.737.500,00	45.812.500,00
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	68.973.525,00	84.531.525,00
7	Penyedia Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakan	-	33.416.700,00
8	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	3.044.172.782,00	2.751.245.682,00
9	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	-	24.980.900,00
	Jumlah	3.420.632.935,00	3.105.262.342,00

Rincian dapat dilihat pada *lampiran 4*.

Saldo piutang retribusi sebesar Rp3.420.632.935,00 tersebut berasal dari mutasi piutang retribusi selama Tahun 2023 yang meliputi:

Tabel 4.50 Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2022	3.105.262.342,00
2	Penambahan:	
3	Penetapan SKRD tahun 2022/23	7.159.052.356,00
4	Jumlah Penambahan	7.159.052.356,00
5	Pengurangan:	
6	Pembayaran tahun 2023	6.843.681.763,00
7	Jumlah Pengurangan	6.843.681.763,00
8	Saldo Piutang per 31 Desember 2023 (8 = 1+4-7)	3.420.632.935,00

Rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 4.51 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Penambahan Piutang Tahun 2023	Pengurangan Piutang Tahun 2023	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	108.286.824,00	1.436.442.800,00	1.322.718.707,00	222.010.917,00
2	Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	-	-	51.898.211,00
3	Izin Trayek (IT)	3.950.000,00	14.850.000,00	14.100.000,00	4.700.000,00
4	Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00
5	Laboratorium Lingkungan	45.812.500,00	818.502.500,00	836.577.500,00	27.737.500,00
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	84.531.525,00	710.739.250,00	726.297.250,00	68.973.525,00
7	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakan	33.416.700,00	33.416.700,00	66.833.400,00	-
8	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2.751.245.682,00	3.718.694.600,00	3.425.767.500,00	3.044.172.782,00
9	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	24.980.900,00	426.406.506,00	451.387.406,00	-

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Penambahan Piutang Tahun 2023	Pengurangan Piutang Tahun 2023	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
	Jumlah	3.105.262.342,00	7.159.052.356,00	6.843.681.763,00	3.420.632.935,00

4.3.10. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan taksiran nilai Piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Retribusi Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.832.016.740,00 dengan rincian:

Tabel 4.52 Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2022 (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	64.185.539,50	101.766.876,00
Retribusi Izin Gangguan /Keramaian (IG)	51.898.211,00	51.898.211,00
Retribusi Izin Trayek(IT)	3.504.500,00	3.245.000,00
Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00
Laboratorium Lingkungan	16.748.820,00	16.578.665,00
Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	46.460.925,00	62.262.525,00
Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	-	9.495.912,25
Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2.648.078.744,50	2.117.014.375,25
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	2.498.090,00
Jumlah	2.832.016.740,00	2.365.899.654,50

Rincian dapat dilihat pada *lampiran 4*.

4.3.11. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Tidak ada Saldo Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.53 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	-	-

4.3.12. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas bagi hasil daerah yang dicatat berdasarkan jumlah nilai definitif yang menjadi bagian Kota Cimahi dan telah ditetapkan dengan peraturan atau surat keputusan tetapi masih ada hak yang masih harus diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.54 Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang Bagi Hasil	5.615.642.548,00	7.704.535.252,00

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/Kep.116-Bapenda/2024 Tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2023 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rincian Saldo Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Belum Disalurkan Per 31 Desember 2023 adalah:

Tabel 4.55 Rincian Saldo Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Belum Disalurkan Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Bagi Hasil Pajak	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.751.826.270,00	2.317.152.540,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.063.195.650,00	1.204.696.200,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.787.619.228,00	1.530.273.536,00
4	Pajak Air Permukaan	13.001.400,00	12.737.150,00
5	Pajak Rokok	-	2.639.675.826,00
Jumlah		5.615.642.548,00	7.704.535.252,00

4.3.13. Belanja Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka timbul karena pembayaran atas sewa/asuransi yang dilakukan pada Tahun 2023 tetapi terdapat sisa periode/manfaat pada Tahun 2024. Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.56 Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Belanja Dibayar di Muka	4.129.990.558,29	3.934.019.971,57

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.129.990.558,29 tersebut merupakan biaya dibayar di muka atas asuransi gedung, asuransi kerugian, asuransi kendaraan bermotor, sewa bangunan gedung garasi/pool, sewa bangunan gudang, sewa tanah untuk jalan, sewa bangunan gedung kantor, sewa rumah dinas, sewa tanah untuk bangunan tempat kerja, dan sewa aset tidak berwujud. Rincian Biaya Dibayar di Muka dapat dilihat pada *lampiran 5*.

4.3.14. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi atas kasus kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset yang telah jatuh tempo sampai dengan Tahun 2023. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.57 Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	165.220.416,43	217.551.668,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp165.220.416,43 tersebut berasal dari mutasi selama Tahun 2023 yang meliputi:

Tabel 4.58 Mutasi Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kerugian keuangan daerah	126.353.748,43	159.884.500,00
Kerugian kehilangan aset daerah	38.866.668,00	57.667.168,00
Kerugian -Kelebihan Pembayaran Ke Pihak Ketiga	-	-
Jumlah	165.220.416,43	217.551.668,00
Penerimaan pembayaran	-	-
Koreksi	-	-
Saldo Tuntutan Ganti Rugi	165.220.416,43	217.551.668,00
Saldo Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari :		
Bagian lancar	165.220.416,43	217.551.668,00
Bagian jangka panjang	-	-
Jumlah	165.220.416,43	217.551.668,00

Jangka waktu Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang telah terlewati menyebabkan nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Disisihkan yaitu sebesar Rp165.220.416,43.

Tabel 4.59 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	165.220.416,43	217.551.668,00

Rincian kasus tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *lampiran 6*.

4.3.15. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah.Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.60 Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang Lainnya	19.113.841.793,63	8.139.297.204,17

Saldo piutang lainnya tersebut terdiri dari:

Tabel 4.61 Rincian Saldo Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Piutang	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	16.946.272.115,00	5.903.205.836,00
2	Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat	0,00	0,00
3	Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
4	Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	0,00	108.534.973,00
5	Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga PUPR	0,00	64.547.257,60
6	Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga Disdik	15.532.585,63	15.532.585,63
7	Piutang BLUD Air Minum	1.835.861.000,00	1.819.279.600,00
8	Piutang BLUD Puskesmas	0,00	2.000.000,00
9	Piutang Remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	2.059.426,94
10	Piutang Bunga Dana Cadangan	92.038.568,00	-
	Jumlah	19.113.841.793,63	8.139.297.204,17

Dari rincian Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Piutang Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.946.272.115,00 merupakan hak penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah seperti BPJS yang telah melakukan kerjasama dengan RSUD Cibabat terkait dengan penyediaan jasa kesehatan atas pelayanan kesehatan dari RSUD Cibabat (rincian dapat dilihat pada *Lampiran 7a*).
- Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru per 31 Desember 2023 sebesar Rp224.137.525,00 merupakan kekurangan setor atas kontribusi pengelolaan Pasar Antri Baru yang didasarkan atas perjanjian pengelolaan Pasar Antri Baru beserta fasilitas penunjangnya antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah Nomor 180/09 Perj-/2004 dan telah mengalami perubahan melalui addendum pertama Nomor 180/18b-perj/2007 antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Cimahi Persada terdiri atas :

Tabel 4.62 Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru Tahun Anggaran 2023

Jenis Piutang	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Piutang pajak parkir	26.480.000,00	26.480.000,00
Piutang retribusi pelayanan parkir	183.509.525,00	183.509.525,00
Piutang retribusi sub terminal	14.148.000,00	14.148.000,00
Jumlah	224.137.525,00	224.137.525,00

- Piutang atas Kontribusi Cimahi Mall, merupakan kontribusi dari Cimahi Mall selama Januari – Desember 2023 sebesar Rp0,00.
- Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga DPUPR sebesar Rp0,00 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan Tahun 2023 pada DPUPR yang harus dibayarkan ke kas daerah.
- Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga DISDIK sebesar Rp15.532.585,63 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan Tahun 2023 pada DISDIK yang harus dibayarkan ke kas daerah.

- f. Piutang BLUD Air Minum sebesar Rp1.835.861.000,00 merupakan Piutang Dari BLUD Air Minum yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 7b**).
- g. Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp0,00 merupakan Pengakuan Piutang Dinkes atas Klaim BPJS PKM Cibeureum.
- h. Piutang Remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp0,00 merupakan Piutang Jasa Giro yang berasal dari Remunerasi (Jasa Giro) TDF atas Dana Bagi Hasil Non Tunai yang terdapat pada Rekening TDF Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Nama **Rek Lain BI TDF TKD Kota Cimahi Nomor 519000329980** di Bank Indonesia.
- i. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 900/PKS 040/XII/BPKAD/2023 dan Nomor: 0041/PKS BJB.CIM/2023 tentang *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Cimahi Nomor 900/PKS.20/BPKAD/2023 dan 0013/PKS/BJB.CIM/2023 tentang Penempatan dan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Dalam Rangka Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 2024 Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Cimahi dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan, Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun 2023 membentuk dana cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk membiayai pemilihan kepala daerah di Tahun 2024. Dana Cadangan tersebut ditempatkan di Bank BJB Rekening 0133216782001 an. Rek. Dana Cadangan Pemkot Cimahi dan diinvestasikan dalam bentuk deposito harian pada bank yang sama. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengakui dan mencatat pendapatan atas Bunga Dana Cadangan dari tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai Piutang Dana Cadangan sebesar Rp92.038.568,00.

4.3.16. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.63 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023

Piutang Lainnya	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	204.342.390,87	70.642.371,48
Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat	0,00	0,00
Piutang atas pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	0,00	61.662.335,00
Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga	0,00	322.736,29

Piutang Lainnya	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2022 (Rp)
DPUPR		
Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga DISDIK	77.662,92	77.662,92
Piutang BLUD Air Minum	1.242.121.970,50	1.140.593.793,00
Piutang BLUD Puskesmas	0,00	10.000,00
Jumlah	1.670.679.549,29	1.497.446.423,69

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengatur bahwa penyisihan Piutang Lainnya dihitung berdasarkan progress dari keluarnya surat tagihan.

4.3.17. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi dan barang-barang, termasuk hewan ternak dan tanaman yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.64 Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Persediaan	28.475.235.097,35	28.649.727.503,26

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.475.235.097,35 tersebut terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, alat listrik, bahan makanan, obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan baku bangunan, alat KB, suku cadang dan bahan material. Saldo persediaan tersebut diakui sebesar biaya perolehan yang terakhir, kecuali untuk persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Cibabat telah disajikan dengan metode FIFO. Saldo persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran. Saldo persediaan sebesar per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.475.235.097,35 tersebut berada pada:

Tabel 4.65 Rincian Saldo Persediaan OPD Tahun Anggaran 2023

No	OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	832.500,00	61.477.416,00
2	Dinas Kesehatan	6.216.159.455,72	9.192.568.546,29
3	RSUD Cibabat	10.843.825.379,81	10.327.639.662,80
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.612.554.150,00	4.065.469.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	379.359.762,00	286.943.083,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	320.318.312,00	343.162.536,00
8	Dinas Sosial	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	-	-

No	OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	154.273.593,00	172.781.116,00
11	Dinas Pangan Dan Pertanian	842.049.837,00	664.630.862,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	262.358.550,00	198.844.440,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	186.856.180,00	779.414.335,89
14	Dinas Perhubungan	1.433.528.708,82	2.122.443.697,28
15	Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan Dan Perpustakaan	-	-
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	15.540.000,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	11.400.000,00	59.927.875,00
19	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	-	-
20	Sekretariat Daerah	161.753.412,00	280.662.637,00
21	Sekretariat DPRD	-	61.703.996,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3.310.000,00
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	330.000,00
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	26.804.900,00	11.500.000,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
26	Inspektorat Kota	1.899.881,00	1.378.300,00
27	Kecamatan Cimahi Utara	-	-
28	Kecamatan Cimahi Tengah	-	-
29	Kecamatan Cimahi Selatan	-	-
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik	21.260.476,00	-
	JUMLAH	28.475.235.097,35	28.649.727.503,26

Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

Rincian Persediaan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan jenis Persediaannya, sebagai berikut:

Tabel 4.66 Rincian Saldo Persediaan Berdasarkan Jenis Tahun Anggaran 2023

No	Persediaan	2023	2022
1	Alat Listrik	1.212.415.486,04	1.823.743.448,00
2	Alat Tulis Kantor	209.383.590,74	186.270.019,03
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.353.970.701,32	550.917.816,70
4	Bahan Bangunan dan Konstruksi	655.890.810,00	250.741.394,50
5	Bahan Cetak	1.096.462.906,82	1.579.355.488,28
6	Bahan Kimia	3.769.417.482,29	4.743.199.623,00
7	Bahan Komputer	47.134.090,00	532.679.580,01
8	Bahan Lainnya	2.151.121.784,71	3.871.063.767,69
9	Bahan/Bibit Tanaman	32.349.000,00	9.922.000,00
10	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	87.390.000,00	59.640.000,00
11	Benda Pos	6.952.500,00	7.223.000,00

No	Persediaan	2023	2022
12	Isi Tabung Gas	654.000,00	-
13	Kertas dan Cover	62.238.166,00	94.714.988,04
14	Natura	26.100.361,33	86.690.176,02
15	Obat	9.388.450.886,03	9.388.799.358,49
16	Obat-obatan Lainnya	88.316.937,00	10.276.238,00
17	Pakan	21.530.000,00	1.578.000,00
18	Perabot Kantor	157.692.226,08	289.396.841,50
19	Perlengkapan Dinas	9.765.000,00	-
20	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	910.034.571,00	969.981.670,00
21	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	7.096.539.200,00	4.065.549.000,00
22	Suku Cadang Alat Bengkel	5.610.600,00	-
23	Suku Cadang Alat Pertanian	622.000,00	-
24	Suku Cadang Lainnya	2.500.000,00	-
25	Suvenir/Cenderamata	82.692.798,00	127.985.094,00
JUMLAH		28.475.235.097,35	28.649.727.503,26

Dalam persediaan bibit ternak, terdapat benih pemberian yang dibudidayakan. Hasil dari budidaya benih tersebut dicatat terpisah oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat berupa alat-alat untuk perbaikan jalan masyarakat, logistik bencana dan rambu evakuasi, alat kontrasepsi dan beras. Adapun Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya antara lain bahan bangunan untuk rehabilitasi bangunan instansi vertikal seperti, Kejaksaan Negeri Cimahi, Pengadilan Negeri, Polres Cimahi, dan Gedung Pusat-Pusat Pendidikan Militer.

4.3.18. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang akan disalurkan kepada kelompok pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Cimahi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi mulai Rp2.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 per kelompok dengan jangka waktu maksimal pinjaman sebesar tiga tahun. Dana bergulir dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian dengan membentuk sebuah Tim Dana Bergulir. Saldo dana bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.67 Saldo Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dana Bergulir	55.898.592,00	52.770.586,00

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.898.592,00 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah pokok awal dana bergulir ditambah dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan dana bergulir di masyarakat yang diragukan akan tertagih. Berdasarkan Laporan Tim Pengelolaan Pengawasan dan Monitoring Dana Bergulir dan laporan dari Bagian Administrasi

Perekonomian Sekretariat Daerah dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pokok awal dana bergulir seluruhnya adalah sebesar Rp1.125.000.000,00 dan telah disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp1.087.500.000,00 yang disalurkan berdasarkan dua cara:
 - 1) Penyaluran dengan nilai Rp125.000.000,00 disalurkan kepada kelompok usaha. Pada Tahap I diberikan kepada 9 (sembilan) kelompok usaha dengan dengan nilai penyaluran sebesar Rp100.500.000,00 dengan nilai pengembalian (*revolving*) Tahap I sebesar Rp31.500.000,00. Sisa penyaluran dana Tahap I sebesar Rp24.500.000,00 dan pengembalian dari kelompok usaha sebesar Rp31.500.000,00 disalurkan kembali pada Tahap II kepada 4 (empat) kelompok usaha.
 - 2) Perjanjian Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor: 180/35.Perj/2009.407/CMI.PERJ/2009 dengan nilai Rp1.000.000.000,00. Dana tersebut disalurkan kepada 13 (tiga belas) koperasi/Baitul Mal Watamwil (BMT) sebesar Rp575.000.000,00 dan usaha mikro sebesar Rp387.500.000,00 yang tersebar di 15 (lima belas) kelurahan di Pemerintah Kota Cimahi.
- b. Perkembangan pengelolaan Dana Bergulir sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.68 Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)
Pokok dana bergulir	1.125.000.000,00
Penyaluran dana bergulir	(1.087.500.000,00)
Saldo dana bergulir	37.500.000,00
Pengembalian pokok pinjaman	777.060.786,00
Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(768.908.592,00)
Pokok dana bergulir yang ada dalam Tim Dana Bergulir	45.652.194,00
Pendapatan bunga dan jasa giro	156.265.049,00
Penyetoran pendapatan ke kas daerah	(142.637.019,00)
Biaya administrasi	(3.381.632,00)
Jumlah	55.898.592,00

Terdapat penyetoran pokok Dana Bergulir sebesar Rp3.016.672,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp389.998,00 yang dicatat sebagai penerimaan kembali investasi yang terdiri dari:

Tabel 4.69 Penyetoran Pokok Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tanggal	Nilai
1	Setoran A.n. Eni Rohaeni	1-Jan-23	566.672,00
2	Setoran A.n. Eni Rohaeni	2-Jan-23	350.000,00
3	Setoran A.n. Sukandar	3-Mar-23	1.650.000,00
4	Setoran A.n. Sukandar	13-Oct-23	450.000,00

No	Uraian	Tanggal	Nilai
	Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro		3.016.672
	Jumlah Setoran Pokok Koperasi		-
	Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro dan Koperasi		3.016.672,00
	Jumlah Setoran Bunga Pinjaman Usaha Mikro		-
	Jumlah Setoran Pokok dan Bunga Pinjaman		3.016.672,00

Saldo dana bergulir sebesar Rp55.898.592,00 seluruhnya berada pada rekening Bank BJB nomor 0008291470001 atas nama Tim Pengelola Dana Bergulir.

- c. Sisa dana bergulir yang masih ada di masyarakat adalah sebesar Rp310.439.217,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.70 Rincian Sisa Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Dana Bergulir yang disalurkan	1.087.500.000,00
Pengembalian pokok pinjaman s.d 2022	(774.044.111,00)
Sisa Dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2022	313.455.889,00
Pengembalian pokok pinjaman selama tahun 2023	(3.016.672,00)
Sisa dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2023	310.439.217,00

Seluruh sisa dana di masyarakat tersebut termasuk kategori macet sehingga keseluruhan nilai tersebut dilaporkan sebagai dana bergulir yang diragukan tertagih. Kemacetan tersebut dikarenakan:

- 1) Usaha yang dijalankan tidak dapat bersaing, pailit dan usaha tidak dilanjutkan lagi.
- 2) Penerima dana bergulir meninggal dunia atau pindah tempat tinggal dan alamat baru tidak dapat diketahui.

Terhadap dana yang masih berada di masyarakat tersebut, tetap dilakukan upaya penagihan dan sebagian dari penerima manfaat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pinjaman.

- d. Atas dasar kondisi tersebut, untuk nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah hanya dana yang ada pada rekening Tim Pengelola Dana Bergulir saja yaitu sebesar Rp55.898.592,00.

4.3.19. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi terhadap Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah yang merupakan investasi permanen atau investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.71 Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	70.302.688.408,00	78.105.263.630,50

Penyertaan modal tersebut terdiri dari:

Tabel 4.72 Rincian Saldo Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	2023(Rp)	2022 (Rp)
1	PT Bank BJB Tbk	35.777.623.090,00	35.777.623.090,00
2	PD Jati Mandiri	34.525.065.318,00	42.327.640.540,50
	Jumlah	70.302.688.408,00	78.105.263.630,50

Dari tabel penyertaan modal diatas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Pada tanggal 8 Juli 2010 Bank BJB mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kepemilikan saham Pemerintah Kota Cimahi setelah IPO sebesar 1.07% dengan jumlah lembar saham 104.000.000. Penyertaan modal pada PT Bank BJB Tbk per 31 Desember 2017 sebesar Rp26.000.000.000,00 merupakan nilai berdasarkan metode biaya karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi kurang dari 20%. Data realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.73 Realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk

Tahun	Nilai Penyertaan (Rp)	Saldo (Rp)
2002	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2003	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2004	5.000.000.000,00	11.000.000.000,00
2005	5.000.000.000,00	16.000.000.000,00
2006	2.500.000.000,00	18.500.000.000,00
2007	2.500.000.000,00	21.000.000.000,00
2008	2.500.000.000,00	23.500.000.000,00
2009	2.500.000.000,00	26.000.000.000,00
2022	9.777.623.090,00	35.777.623.090,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas BPD Jawa Barat dan Banten, Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 9 Maret 2022 menyertakan modal kepada Bank BJB dengan membeli 7.215.958 lembar saham dengan harga perlembar sebesar Rp1.355,00 senilai Rp9.777.623.090,00,-, dengan penyertaan modal tersebut jumlah saham yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah 104.000.000 Lembar Saham Seri A dan 7.215.958 Lembar Saham Seri B.

- Penyertaan modal pada PD Jati Mandiri per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.525.065.318,00 merupakan nilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi lebih dari 50%.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi ke PD Jati Mandiri sesuai Peraturan Daerah No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyertaan Modal

Daerah Pada PD Jati Mandiri adalah sebesar Rp51.351.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.74 Rincian Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri

No	TAHUN	PENYERTAAN MODAL (Rp)
1	2006	27.000.000.000,00
2	2007	15.000.000.000,00
3	2010	2.800.000.000,00
4	2011	4.000.000.000,00
5	2013	1.551.000.000,00
6	2014	1.000.000.000,00
JUMLAH		51.351.000.000,00

Sedangkan saldo rugi sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp9.023.359.459,50 dengan rincian per tahunnya sebagai berikut :

Tabel 4.75 Rincian Sisa Modal yang Disertakan pada PD Jati Mandiri

No	Tahun	Nama	Jumlah Penyertaan Modal s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Saldo Laba (Rugi) s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4+5</i>
1	2006	PD Jati Mandiri	27.000.000.000,00	.	27.000.000.000,00
2	2007	PD Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(83.543.057,00)	41.916.456.943,00
3	2008	PD Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(303.940.227,75)	41.696.059.772,25
4	2009	PD Jati Mandiri	42.000.000.000,00	5.848.661.350,15	47.848.661.350,15
5	2010	PD Jati Mandiri	44.800.000.000,00	4.198.313.359,98	48.998.313.359,98
6	2011	PD Jati Mandiri	48.800.000.000,00	1.825.475.045,52	50.625.475.045,52
7	2012	PD Jati Mandiri	48.800.000.000,00	(741.246.025,00)	48.058.753.975,00
8	2013	PD Jati Mandiri	50.351.000.000,00	(1.334.312.162,00)	49.016.687.838,00
9	2014	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(2.675.227.439,00)	48.675.772.561,00
10	2015	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(5.036.957.720,00)	46.314.042.280,00
11	2016	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(6.305.696.640,00)	45.045.303.360,00
12	2017	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(7.894.853.454,00)	43.456.146.546,00
13	2018	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.479.403.846,00)	42.871.596.154,00
14	2019	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.524.303.990,50)	42.826.696.009,50
15	2020	PD Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.690.655.813,50)	42.660.344.186,50
16	2021	PD Jati mandiri	51.351.000.000,00	(8.857.007.636,50)	42.493.992.363,50
17	2022	PD Jati mandiri	51.351.000.000,00	(9.023.359.459,50)	42.327.640.540,50
18	2023	PD Jati mandiri	51.351.000.000,00	(16.825.934.682,00)	34.525.065.318,00

Saldo Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri tersebut didasarkan laporan keuangan PD Jati Mandiri *audited* dan *unaudited*.

Perlu disampaikan bahwa kondisi PD Jati Mandiri Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) PD Jati Mandiri secara operasional telah berhenti disebabkan tidak memiliki modal usaha lagi akibat kerugian terus menerus.
- 2) Sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821/Kep.336.Admrek/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri Periode 2013-2017 disebutkan bahwa Direksi PD Jati Mandiri selesai per tanggal 16 Agustus 2017.
- 3) Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jati Mandiri sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.276.Admrek/2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri berakhir pada 22 Juli 2017.

Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Kota Cimahi melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dan Inspektorat telah berupaya :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung yang telah berpengalaman untuk menemukan solusi penyelesaian masalah perusahaan daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Melakukan upaya fasilitasi penyusunan kajian mengenai PD Jati Mandiri ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.
- 5) Melakukan Upaya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penarikan Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri.
- 6) Mengajukan Permohonan untuk melakukan audit PD Jati Mandiri ke BPKP Perwakilan Jawa Barat namun ditolak melalui Surat BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor S.4331/PW10/5/2018 tanggal 8 Desember 2017.
- 7) Melakukan permohonan untuk melakukan audit PD Jati Mandiri ke KAP Koesbandiah Beddy Samsi dan Setiasih namun ditolak karena sampai dengan Tahun 2017 PD Jati Mandiri sampai dengan 2016 telah diaudit oleh KAP lain.
- 8) Mengeluarkan Surat Wali Kota Cimahi Nomor 539/5105/admrek tentang Penghentian Aktivitas dan Permohonan Dokumen Pengelolaan Perusahaan Daerah Jati Mandiri termasuk Laporan Keuangan PD Jati Mandiri sebagai bahan audit.
- 9) Melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pengembalian aset PD Jati Mandiri ke Kota Cimahi.
- 10) Melakukan pembahasan permasalahan hukum terkait PD Jati Mandiri dengan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan mengajukan permohonan untuk dibuatkan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga legal opinion tersebut akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PD Jati Mandiri.

- 11) Melakukan Kajian terhadap Aspek Operasional, Aspek Keuangan dan Aspek Ketaatan terhadap Regulasi PD Jati Mandiri oleh KAP Jojo Sunarjo dan Rekan.
- 12) Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penutupan Perusahaan Daerah PD Jati Mandiri.
- 13) Menyusun dan membahas Peraturan Daerah tentang Penutupan Perusahaan Daerah PD Jati Mandiri bersama DPRD Kota Cimahi.
- 14) Diundangkannya Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kota Cimahi pada tanggal 07 Februari 2023.
- 15) Penyusunan laporan keuangan penutup oleh mantan direksi, dan dewan pengawas dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditentukan belum berhasil menyelesaikan laporan neraca tersebut sesuai peraturan perundang-undangan laporan keuangan penutup disusun oleh pemerintah daerah dengan dibantu oleh KAP Sabar dan Rekan dengan konfirmasi dari mantan direksi dan dewan pengawas.
- 16) Pj Wali Kota menerbitkan surat perintah nomor 539/3640/Ekosda tanggal 18 September 2023 tentang penyusunan neraca penutup dan penyusunan Raperwal kepada kepada pj Sekda, para asisten, Inspektorat, BPKAD, Bapelitbangda, Bagian Hukum dan Bagian Ekosda.
- 17) Pj Wali Kota menerbitkan surat perintah nomor 539/4366/Ekosda tanggal 09 November 2023 tentang penyusunan neraca penutup dan penyusunan Raperwal kepada kepada pj Sekda, para asisten, Inspektorat, BPKAD, Bapelitbangda, Bagian Hukum dan Bagian Ekosda.
- 18) Penyusunan Raperwal Dengan Bagian Hukum Setda Kota Cimahi Tentang Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri.

Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri Tahun 2023 *unaudited* adalah sebagai berikut: (rincian selengkapnya pada *lampiran 9*)

Tabel 4.76 Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri Tahun 2023 *Unaudited*

Laporan Rugi Laba Tahun 2023	
Pendapatan	-
Belanja	7.803.897.866,00
Rugi Tahun 2021	(7.803.897.866,00)
Neraca Tahun 2023	
Aset	38.775.311.498,00
Utang	4.250.246.180,00
Ekuitas	34.525.065.318,00

Dalam Aset senilai Rp38.775.311.498,00 terdapat Tanah senilai Rp38.773.988.854,00 yang masih dalam sengketa perdata, dengan uraian sebagai berikut :

Perkara Tata Usaha Negara Terkait Sertifikat Tanah Cibeureum antara Awong Hidjaja (Direktur Utama PT Adi Darma Bumi Indonesia) Melawan Kepala Kantor Pertanahan

Kota Cimahi, Perusahaan Daerah Jati Mandiri, Idris Ismail dkk

- 1) Perkara pada Tingkat Pertama No. 93/G/2011/PTUN-BDG, dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 2) Perkara pada Tingkat Banding No. 134/B/2012/PT.TUN.JKT dimenangkan oleh PD Jati Mandiri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Idris Ismail dkk;
- 3) Perkara pada Tingkat Kasasi Nomor 120 K/TUN/2013 dimenangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 4) Perkara Pada Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 5) Namun berdasarkan Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB Jo. Nomor : 76/Pdt.G/2004 PN.BB Jo. Nomor: 372/Pdt/2006/Pt.2006/PT.Bdg Jo. Nomor: 1686 K/ Pdt/2007. Tentang “NON EKSEKUTABEL ATAU TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI”. Maka Tanah tersebut kembali menjadi milik PD. Jati Mandiri di karenakan Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 yang dimenangkan oleh Awong Hidjaja itu sebatas membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi (sisi administrasi), bukan membatalkan kepemilikan karena hal tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 6) Berdasarkan Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Blb tanggal 1 Juli 2021 dan Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor: 716/Pdt/2022/PT.BDG tanggal 24 Januari 2023 memutuskan kembali memenangkan Perusahaan Daerah Jati Mandiri, Idris Ismail sebagai pemilik Tanah Cibereum.

4.3.20. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Cimahi dan pelayanan masyarakat. Saldo aset Tetap milik Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

4.77 Saldo Aset Tetap Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Aset Tetap	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tanah	1.101.608.259.390,60	1.022.360.336.284,00
2	Peralatan dan Mesin	745.398.421.910,57	671.637.270.027,82
3	Gedung dan Bangunan	950.061.492.540,88	807.092.567.588,52
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	927.006.876.221,49	806.294.757.832,59
5	Aset Tetap Lainnya	74.249.906.662,47	71.698.455.667,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.927.884.766,00	229.627.190.875,36
7	Akumulasi Penyusutan	(1.383.428.508.398,33)	(1.237.866.506.093,70)
	Jumlah	2.417.824.333.093,67	2.370.844.072.182,06

Rincian aset tetap dapat dilihat pada *lampiran 10*. Atas posisi aset tetap per 31 Desember 2023 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Mutasi aset tetap pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.78 Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan Tahun 2023 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2023 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp.)
Tanah	1.022.360.336.284,00	114.700.804.415,61	35.452.881.309,02	1.101.608.259.390,60
Peralatan dan Mesin	671.637.270.027,82	82.000.087.865,75	8.238.935.983,00	745.398.421.910,57
Gedung dan Bangunan	807.092.567.588,52	160.517.997.156,36	17.549.072.204,00	950.061.492.540,88
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	806.294.757.832,59	132.341.425.554,90	11.629.307.166,00	927.006.876.221,49
Aset Tetap Lainnya	71.698.455.667,47	2.994.655.645,00	443.204.650,00	74.249.906.662,47
Konstruksi Dalam Pengerjaan	229.627.190.875,36	91.339.603.640,05	318.038.909.749,41	2.927.884.766,00
JUMLAH	3.608.710.578.275,76	583.894.574.277,67	391.352.311.061,43	3.801.252.841.492,01

Dari tabel mutasi aset tetap di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- 1) Penambahan aset tetap selama tahun 2023 sebesar Rp583.894.574.277,67 dapat diuraikan sebagai berikut;
 - a) Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp 130.243.956.868,00 (termasuk Belanja BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.966.550.312,00 (*Lampiran 11a*))
 - b) Reklas antar KIB sebesar Rp 233.501.635.393,36
 - c) Reklas dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 510.052.873,00
 - d) Reklas dari belanja pemeliharaan Rp 206.780.593,00
 - e) Reklas dari belanja persediaan Rp36.950.000,00
 - f) Mutasi antar SKPD sebesar Rp 98.155.317.924,05
 - g) Reklas dari aset lainnya Rp13.336.138.626,51
 - h) Hibah sebesar Rp6.081.578.596,75
 - i) BTT sebesar Rp1.222.705.403,00
 - j) Fasos Fasum sebesar Rp100.401.959.000,00
 - k) Koreksi sebesar Rp197.499.000,00
- 2) Pengurangan aset tetap selama tahun 2023 sebesar Rp391.352.311.061,43 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Aset yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp3.667.899.872,00
 - b) Reklas Antar KIB sebesar Rp 233.501.635.393,36
 - c) Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp 1.038.331.460,00
 - d) Reklas ke pemeliharaan sebesar Rp0,00

- e) Reklas ke persediaan sebesar Rp900.602.714,00
- f) Mutasi antar SKPD sebesar Rp 98.155.317.924,05
- g) Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp124.780.650,00
- h) Mutasi ke Aset Lain-lain Rp38.449.348.178,02
- i) Rusak berat/Penghapusan sebesar Rp14.387.749.961,00
- j) Koreksi sebesar Rp476.399.909,00
- k) Hibah sebesar Rp650.245.000,00

Tabel 4.79 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023

Penambahan TA 2023	Belanja Modal	Reklas Antar KIB	Reklas dari Barang dan Jasa	Reklas dari Belanja Pemeliharaan	Reklas dari Belanja Persediaan	Mutasi Antar SKPD
Tanah	3.754.393.256,00	167.558.430,00	-	-	-	3.946.250.000,00
Peralatan dan Mesin	42.675.735.899,00	30.076.679.916,00	42.532.425,00	139.744.376,00	36.950.000,00	1.724.161.250,00
Gedung dan Bangunan	44.380.998.889,00	114.386.412.050,36	7.550.000,00	67.036.217,00	-	1.676.000.000,00
Jalan, irigasi & Jaringan	36.473.543.179,00	88.338.265.245,00	426.623.234,00	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.959.285.645,00	35.370.000,00	-	-	-	-
KDP	-	497.349.752,00	33.347.214,00	-	-	90.808.906.674,05
Total	130.243.956.868,00	233.501.635.393,36	510.052.873,00	206.780.593,00	36.950.000,00	98.155.317.924,05

Reklas dari Aset Lainnya	Hibah	BTT	Fasos/Fasum	Koreksi	Penambahan
7.538.543.729,61	-	-	99.294.059.000,00	-	114.700.804.415,61
-	6.081.578.596,75	1.222.705.403,00	-	-	82.000.087.865,75
-	-	-	-	-	160.517.997.156,36
5.797.594.896,90	-	-	1.107.900.000,00	197.499.000,00	132.341.425.554,90
-	-	-	-	-	2.994.655.645,00
-	-	-	-	-	91.339.603.640,05
13.336.138.626,51	6.081.578.596,75	1.222.705.403,00	100.401.959.000,00	197.499.000,00	583.894.574.277,67

Pengurangan TA 2023	Tidak Dikapitalisasi	Reklas Antar KIB	Reklas ke Barang dan Jasa	Reklas ke Pemeliharaan	Reklas ke Persediaan
Tanah	-	79.619.856,00	-	-	-
Peralatan dan Mesin	3.667.899.872,00	35.370.000,00	-	-	105.867.990,00
Gedung dan Bangunan	-	6.616.116.392,00	1.038.331.460,00	-	794.734.724,00
Jalan, irigasi & Jaringan	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	67.250.000,00	-	-	-
KDP	-	226.703.279.145,36	-	-	-
Total	3.667.899.872,00	233.501.635.393,36	1.038.331.460,00	-	900.602.714,00

Pengurangan TA 2023	Mutasi Antar SKPD	Reklas ke Aset Lainnya	Mutasi ke Aset Lain-lain	Rusak Berat / Penghapusan
Tanah	3.946.250.000,00	-	31.427.011.453,02	-
Peralatan dan Mesin	1.724.161.250,00	-	-	1.795.332.746,00
Gedung dan Bangunan	1.676.000.000,00	-	5.562.611.844,00	1.644.937.000,00
Jalan, irigasi & Jaringan	-	-	933.000.951,00	10.696.306.215,00
Aset Tetap Lainnya	-	124.780.650,00	-	251.174.000,00
KDP	90.808.906.674,05	-	526.723.930,00	-
Total	98.155.317.924,05	124.780.650,00	38.449.348.178,02	14.387.749.961,00

Pengurangan TA 2023	Koreksi	Hibah	Pengurangan
Tanah	-	-	35.452.881.309,02
Peralatan dan Mesin	260.059.125,00	650.245.000,00	8.238.935.983,00
Gedung dan Bangunan	216.340.784,00	-	17.549.072.204,00
Jalan, irigasi & Jaringan	-	-	11.629.307.166,00
Aset Tetap Lainnya	-	-	443.204.650,00
KDP	-	-	318.038.909.749,41
Total	476.399.909,00	650.245.000,00	391.352.311.061,43

A. Aset Tetap Tanah

Saldo aset tetap tanah milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.80 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan Tahun 2023 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2023 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp.)
Tanah	1.022.360.336.284,00	114.700.804.415,61	35.452.881.309,02	1.101.608.259.390,60

Transaksi penambahan aset tetap tanah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp114.700.804.415,61 sebagai berikut:

- Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp3.754.393.256,00
- Reklas antar KIB sebesar Rp167.558.430,0000
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.946.250.000,00
- Reklas dari Aset Lain-Lain sebesar Rp7.538.543.729,61
- Penerimaan Fasos/Fasum sebesar Rp 99.294.059.000,00

Transaksi Pengurangan aset tetap tanah selama tahun 2023 sebesar Rp35.452.881.309,02 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Mutasi ke aset lain-lain sebesar Rp31.427.011.453,02
- b) Reklas Antar KIB sebesar Rp79.619.856,00
- c) Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.946.250.000,00

Penjelasan mengenai mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut: Terdapat pengurangan yang signifikan pada aset tetap tanah dikarenakan pada tanggal 30 Juli 2020 Pemerintah Daerah Kota Cimahi menerima Surat Keterangan dari Kepala Zidam III/Siliwangi Nomor SK/03/VII/2020 tentang surat keterangan status jalan yang berada diwilayah Kota Cimahi. Dimana berdasarkan surat tersebut terdapat 17 ruas jalan di Kota Cimahi yang berada diatas tanah milik TNI.

Berdasarkan surat keterangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menindaklanjuti dengan:

- a. Meminta konfirmasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi untuk memastikan bahwa 17 ruas jalan tersebut memang milik TNI.
- b. Meminta konfirmasi kepada Pangdam III Siliwangi perihal :
 - 1) Permintaan surat pernyataan/keterangan dari Kodam III Siliwangi yang menyatakan bahwa ke 17 ruas jalan tersebut telah tercatat dalam Aset BMN Kodam III Siliwangi untuk menghindari double catat dalam pencatatan aset milik negara.
 - 2) Permintaan salinan sertifikat hak pakai atas penguasaan lahan ke 17 ruas jalan tersebut.

Berdasarkan jawaban konfirmasi Kepala BPN Kota Cimahi melalui Surat Kepala BPN Kota Cimahi Nomor: 1519/32.77.IP.02.01/IV/2023 Tanggal 14 April 2023 diperoleh informasi bahwa dari 17 ruas jalan hanya 10 ruas jalan yang termasuk dalam sertifikat tersebut.

Tabel 4.81 Konfirmasi Kepala BPN Kota Cimahi atas Status Jalan TNI

No.	NAMA JALAN (SK KAZIDAM III/Siliwangi Nomor SK/03/VII/2020)	LUAS TANAH (M2)	NILAI	KONFIRMASI BPN		
				KETERANGAN STATUS	LUAS TANAH (M2)	NILAI
1	Jl. SRIWIJAYA, Kecamatan Cimahi Tengah	13.855,00	11.698.970.000,00	Dalam Penguasaan TNI namun tidak termasuk dalam sertifikat	-	-
2	Jl. GEDUNG EMPAT, Kecamatan Cimahi Tengah	6.075,00	7.099.350.000,00		-	-
3	Jl. DUSTIRA, Kecamatan Cimahi Tengah	6.300,00	3.756.375.000,00		-	-
4	Jl.Poncol Kec.Cimahi Tengah			Tanah TNI	8.700,00	1.740.000.000,00
5	Jl. KALIDAM, Kecamatan Cimahi Tengah			Tanah TNI	6.885,00	9.743.390.000,00
6	Jl. PASAR KUMELI, Kecamatan Cimahi Tengah			Tanah TNI	9.000,00	4.878.000.000,00
7	Jl. TERUSAN KALIDAM, Kecamatan Cimahi Tengah	1.440,00	1.900.800.000,00	Tidak masuk dalam sertifikat TNI	-	-

No.	NAMA JALAN (SK KAZIDAM III/Siliwangi Nomor SK/03/VII/2020)	LUAS TANAH (M2)	NILAI	KONFIRMASI BPN		
				KETERANGAN STATUS	LUAS TANAH (M2)	NILAI
8	Jl. SIMPANG, Kecamatan Cimahi Tengah			Tanah TNI	2.345,00	1.847.860.000,00
9	Jl. Munajan			Tanah TNI	340,00	82.620.000,00
10	Jl. TAMAN KARTINI, Kecamatan Cimahi Tengah			Tanah TNI	1.840,00	1.159.250.000,00
11	Jl. SAM RATULANGI, Kecamatan Cimahi Tengah			Tanah TNI	4.542,00	3.410.900.000,00
12	Jl. Unjani	340,00	96.900.000,00	Tidak masuk dalam sertifikat TNI	-	-
13	Jl. SISINGAMANGARAJA, Kecamatan Cimahi Tengah			Tanah TNI	9.720,00	9.205.760.000,00
14	Jl. PASOPATI, Kecamatan Cimahi Tengah			Tanah TNI	3.600,00	1.775.700.000,00
15	Jl. Pojok Selatan			Tanah TNI	735,00	673.260.000,00
16	Jl. Lapangan Tembak	370,00	145.780.000,00	Tidak masuk dalam sertifikat TNI	-	-
JUMLAH TOTAL		28.380	24.698.175.000,00		47.707,00	34.516.740.000,00

Maka berdasarkan jawaban dari BPN tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian lebih lanjut kepada 6 bidang tanah seluas 28.380,00 m² senilai Rp24.698.175.000,00 dan terus berkoordinasi dengan dengan Kodam III Siliwangi untuk memastikan status tanah tersebut. Pemerintah Daerah Kota Cimahi masih mencatat 6 bidang tanah yang belum terbukti milik TNI dalam Aset Tetap Tanah dan KIB A sesuai dengan pedoman Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Aset Tetap Akrua yang menyatakan bahwa Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Melakukan proses penghapusan terhadap 10 bidang tanah seluas 47.707,00 m² senilai Rp34.516.740.000,00 yang telah terbukti terdaftar dalam sertifikat hak pakai TNI dan di reklas dari Aset Tetap Tanah ke Aset Lain-Lain tersaji di Laporan Keuangan TA 2022.

Setelah dilakukan Penelitian Fisik dan Administrasi Lahan pada hari Rabu, 6 September 2023, dengan menghadirkan perwakilan dari BPKAD Kota Cimahi, DPUPR Kota Cimahi, ATR BPN Kota Cimahi, Zidam III/Slw serta Denzibang I/III Bdg. Penelitian

lapangan ini menghasilkan Berita Acara yang menyajikan secara rinci status jalan kota yang berada di wilayah penguasaan TNI.

Adapun hasilnya secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 14 (empat belas) lahan jalan kota yang statusnya clean and clear masuk ke dalam sertifikat lahan TNI
2. Terdapat 3 (tiga) lahan jalan kota yang statusnya tidak masuk ke dalam sertifikat lahan TNI namun tercatat dalam buku 1 pendaftaran pertanahan lahan TNI. Akan dilakukan koordinasi lanjutan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan pihak TNI.
3. Terdapat 5 (lima) lahan jalan yang Sebagian masuk ke dalam sertifikat lahan TNI dan Sebagian lagi masuk ke dalam lahan umum.
4. Tim dari TNI merekomendasikan atas lahan yang sudah clean dan clear masuk ke dalam sertifikat lahan TNI untuk segera diajukan pinjam pakai lahan oleh Pemkot Cimahi.

Pada Tahun Anggaran 2023 setelah dilakukan pengecekan fisik kembali dengan melibatkan pihak TNI, ATR BPN dan Pemkot Cimahi. Terdata sebanyak 5 bidang yang dipastikan masuk ke sertifikat TNI senilai Rp.23.688.770.000,- dan sebanyak 4 bidang sebagian lahannya masuk ke sertifikat TNI senilai Rp.5.026.543.360,64,-.

Dari hasil pengecekan fisik tersebut diatas, ditemukan pula untuk 1 ruas jalan yaitu Jl. Sisingamangaraja yang semula diakui sebagai lahan milik TNI ternyata hanya sebagian saja. Sehingga ruas jalan sisa senilai Rp.4.826.845.638,- dimutasikan kembali ke KIB A dari Aset lain-lain.

Secara rinci kondisi lahan hasil penelitian fisik tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.82 Rincian Kondisi Lahan Hasil Penelitian Fisik

N o	NMUNI T	NMAS ET	TAH UN	NILAI PEROLEHAN	LUAST NH	TAHU N	Masih harus ditelusuri di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023 (tanah sebagian)		Reklas kembali dari Aset Lainnya ke KIB A di TA 2023		ALAM AT	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	11,698,970,000.00	13,855	2015	11,698,970,000.00		11,698,970,000.00					Jl. SRIWIJ AYA, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00005/Setiamanah
2	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	7,099,350,000.00	6,075	2015	7,099,350,000.00		7,099,350,000.00					Jl. GEDU NG EMPA T, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0007/Karangmekar
3	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Lain- lain	2016	3,756,375,000.00	6,300	2016	3,756,375,000.00							Jl. Dustira	
4	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	1,740,000,000.00	8,700	2015		1,740,000,000.00						jl.ponco l kec.cim ahi tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00010/Karangmekar

N o	NMUNI T	NMAS ET	TAH UN	NILAI PEROLEHAN	LUAST NH	TAHU N	Masih harus ditelusuri di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023 (tanah sebagian)		Reklas kembali dari Aset Lainnya ke KIB A di TA 2023		ALAM AT	KETERANGAN
5	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	1,900,800,000.00	1,440	2015	1,900,800,000.00		1,900,800,000.00					Jl. TERUS AN KALID AM, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0009 /Karangmekar
6	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Lain- lain	2016	96,900,000.00	340	2016	96,900,000.00		96,900,000.00					Jl. Unjani	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00035/Baros
7	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Lain- lain	2016	145,780,000.00	370	2016	145,780,000.00			100.076.000,-	254			Jl. Lapang Tembak	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00004/Setiamanah. anjang Jalan 0,370 km, terdiri dari 0,116 km, masuk kedalam jalan umum dan 0,254 km masuk dalam sertifikat lahan TNI, sesuai penunjukkan batas dilapangan.
8	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	9,743,390,000.00	6,885			9,743,390,000.00						Jl. KALID AM, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0008 /Karangmekar

N o	NMUNI T	NMAS ET	TAH UN	NILAI PEROLEHAN	LUAST NH	TAHU N	Masih harus ditelusuri di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023 (tanah sebagian)		Reklas kembali dari Aset Lainnya ke KIB A di TA 2023		ALAM AT	KETERANGAN
9	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	4,878,000,000.00	9,000			4,878,000,000.00						Jl. PASAR KUME LI, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0009 /Karangmekar
10	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	1,847,860,000.00	2,345			1,847,860,000.00						Jl. SIMPA NG, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 0007/Karangmekar
11	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Lain- lain	2016	82,620,000.00	340			82,620,000.00						Jl. Munaja n	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00003/Baros
12	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	1,159,250,000.00	1,840			1,159,250,000.00						Jl. TAMA N KARTI NI, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00030/Baros
13	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	3,410,900,000.00	4,542			3,410,900,000.00						Jl. SAM RATU LANGI , Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00035/Baros

N o	NMUNI T	NMAS ET	TAH UN	NILAI PEROLEHAN	LUAST NH	TAHU N	Masih harus ditelusuri di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023 (tanah sebagian)		Reklas kembali dari Aset Lainnya ke KIB A di TA 2023		ALAM AT	KETERANGAN
14	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	1,775,700,000.00	3,600			1,775,700,000.00						Jl. PASOP ATI, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00005/Setiamanah
15	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Lain-lain	2016	673,260,000.00	735			673,260,000.00						Jl. Pojok Selatan	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00005/Setiamanah
16	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	9,205,760,000.00	9,720			9,205,760,000.00				4,826,845,638	5,096	Jl. SISING AMAN GARAJ A, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00005/Setiamanah. Panjang jalan 1,192 km, terdiri dari 0,625 km, masuk kedalam jalan umum dan 0,567 km masuk ke dalam sertifikat lahan TNI, sesuai penunjukkan batas dilapangan.
17	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	2,892,750,000.00	5,350				2,892,750,000.00					Jl. SETAS ION, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00011/Karangmekar

N o	NMUNI T	NMAS ET	TAH UN	NILAI PEROLEHAN	LUAST NH	TAHU N	Masih harus ditelusuri di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2022	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023	Pengakuan Aset Lainnya di TA 2023 (tanah sebagian)		Reklas kembali dari Aset Lainnya ke KIB A di TA 2023		ALAM AT	KETERANGAN
18	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	2,565,750,000.00	4,920					619.534.756,-	1.188			Jl. BP. AMPI, Kecama tan Cimahi Tengah	Panjang Jalan 0,820 km, terdiri dari 0,622 km masuk kedalam jalan umum dan 0,198 km masuk dalam sertifikat lahan TNI sesuai penunjukkan batas dilapangan
19	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	11,264,800,000.00	18,780					3.505.173.005,-	5.844			Jl. Ibu Ganirah , Kecama tan Cimahi Tengah	Panjang Jalan 3,082 km, terdiri dari 2,123 km masuk kedalam jalan umum dan 0,959 km masuk dalam sertifikat lahan TNI, sesuai penunjukkan batas dilapangan.
20	DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN PENATA AN RUANG	Tanah Untuk Jalan Kabupa ten	2015	2,227,110,000.00	2,490					801.759.600,-	896			Jl. SUKIM UN, Kecama tan Cimahi Tengah	Masuk dalam IKN TNI AD Cq Kodam III/Slw, Sertifikat Hak Pakai No. 00003/Baros, Panjang Jalan 0,375 km, terdiri dari 0,240 km, masuk kedalam jalan umum dan 0,135 km masuk dalam sertifikat lahan TNI, sesuai penunjukkan batas dilapangan.
							24,698,175,000.00	34,516,740,000	23,688,770,000	5.026.543.360,64	8.182,01	4,826,845,638	5,096		

Selain itu terdapat tanah seluas 30.750 m² yang tercatat di KIB A sebesar Rp3.228.750.000,- yang kami catat berdasarkan inventarisasi pada saat penyusunan neraca awal Pemerintah Kota Cimahi sebagai lahan aset milik Pemerintah Desa Padasuka yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Padasuka.

Terdapat lahan milik Desa Padasuka berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/Kep.516-PemDes/1986 tentang Penetapan Tanah Pengganti bekas tanah hak pakai Desa Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Tingkat II Bandung yang dipergunakan oleh Stadion Olah Raga Koni Jawa Barat. Lahan pengganti tersebut merupakan lahan milik Drs. Aliman SA seluas 9.090 M², yang berlokasi di blok Pakuhaji Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, persil 6 D.III Kohir 387 dan lahan milik Nunung seluas 3.564 M², milik Asep Karwita seluas 1.910 M², dan Ariyah seluas 3.910 M² dan seluruh tanah tersebut berada di blok Tegal Kawung Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, persil 94 b. S.IV. Hingga saat ini keberadaan lahan tersebut tidak dicatat dalam Neraca aset tanah milik Pemerintah Kota Cimahi.

Terdapat pula lahan PSU dari 4 (empat) pengembang perumahan seluas 23.730m² yang diterima dan di catat pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.703.633.000,00. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Kota, Pasal 15, Ayat 3 bahwa “Penyerahan PSU dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Kota harus dilakukan pada saat awal proses pembuatan perizinan pembangunan dengan sekaligus *pelepasan hak*, setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dibuatkan berita acara serah terima.” Adapun perumahan tersebut adalah Tegal Kawung Garden, Green Valley Cibeber, Nusa Exclusive Cluster dan Blok K Cypress selain itu pada Tahun 2023 terdapat pula 2 (dua) developer perumahan yaitu Graha Kencana Residence dan Griya Asri Cahaya Cipageran yang baru melakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) administrasi lahan PSU seluas 97.176 m² sedangkan jumlah perumahan yang tersebar di seluruh wilayah kota Cimahi yang masih memerlukan verifikasi lanjutan, baik keberadaan, pengelolaan, dan ukuran PSU yang masih tersedia adalah sebanyak 108 (seratus delapan) perumahan dengan luasan perumahan sekitar 3.116.478,41m² dengan taksiran kompensasi PSU sebesar 30% dari luas perumahan atau sekitar 934.943,52 m². Termasuk didalamnya Perumahan Bukit Permana Residence yang telah menyerahkan PSU namun belum menyelesaikan administrasi penyerahan PSU. Rincian 108 (seratus delapan) perumahan tersebut dapat dilihat pada *lampiran 11b*.

Selain hal diatas terdapat penambahan tanah senilai Rp4.826.845.637,58 hasil dari reklas kembali dari aset lainnya menjadi aset tanah, yang merupakan hasil dari BAST lapangan serta penunjukkan batas dilapangan. Tanah tersebut adalah bagian dari Jl. Sisingamangaraja panjang jalan 1,192 km, terdiri dari 0,625 km masuk kedalam jalan umum dan 0,567 km masuk ke dalam sertifikat lahan TNI. Sertifikat Hak Pakai No. 0005/Setiamanah. Penambahan lain dalam aset tanah yaitu yang berasal dari Hibah Fasum Fasos dari Developer Bukit Permana Residence dan Developer Green Valley Cibeber berupa 3 (tiga) bidang Tanah untuk Makam Lain-lain senilai Rp 2.590.426.000,-.

Sedangkan pegurangan dalam tanah senilai Rp31.396.278.791,95 merupakan hasil reklas

ke aset lainnya. Tanah tersebut merupakan jalan kota yang berada seluruhnya dan/atau sebagian di Tanah TNI yaitu Jalan Unjani, Jalan Gedung Empat, Jl. Sriwijaya, Jl. Terusan Kalidam, Jalan Setasion, Jalan Bp. Amp, Jalan Ibu Ganirah, Jalan Lapang Tembak, dan Jalan Sukimun. Pengurang lain yaitu reklas dari aset tanah ke KDP senilai Rp79.619.856,00 yang merupakan DED Imah Seni tahap 1 di Disbudparpora.

Selain pengurang dan penambah dalam aset tanah, terdapat pula mutasi antar SKPD yaitu Tanah Lapang Sepak Bola Cibaligo berlokasi di Kelurahan Cipageran senilai Rp1.715.000.000,00 dari Kecamatan Cimahi Utara ke Disbudpora, Tanah LKMD dan Balai Karya berlokasi di Jalan K.H Usman Dhomiri Kelurahan Padasuka senilai Rp467.250.000,00 dari Kecamatan Cimahi Tengah ke Disbudparpora dan Tanah Lapang Poral sebesar Rp1.764.000.000,00 dari Kecamatan Cimahi Selatan ke Disbudparpora juga.

B. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.83 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan Tahun 2023 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2023 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp.)
Peralatan dan Mesin	671.637.270.027,82	82.000.087.865,75	8.238.935.983,00	745.398.421.910,57

Transaksi penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp82.000.087.865,75 sebagai berikut:

- f) Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp42.675.735.899,00
- g) Reklas antar KIB sebesar Rp30.076.679.916,00
- h) Reklas dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp42.532.425,00
- i) Reklas dari belanja pemeliharaan Rp139.744.376,00
- j) Reklas dari belanja persediaan Rp 36.950.000,00
- k) Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.724.161.250,00
- l) Hibah sebesar Rp6.081.578.596,75
- m) BTT sebesar Rp1.222.705.403,00

Didalam transaksi-transaksi tersebut diatas terdapat dari hibah yaitu hibah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia senilai Rp420.675.000,00 yang berupa Sepeda Motor 10 unit dan Mobil Ambulance 1 unit di Dinas Kesehatan, Hibah dari Kementerian Perhubungan senilai Rp970.185.160,00 berupa (Dua) unit Bus Sekolah pada Dinas Perhubungan, hibah dari Pemprov Jabar dan Kementerian PUPR berupa dump truck, truck sampah roda 6 dan mesin pemadat sampah senilai Rp4.000.319.228,00 pada Dinas LH, Hibah yang berasal dari Posko Oksigen Jabar untuk RSUD Cibabat senilai Rp117.953.934,75,00 berupa 51 Unit Tabung Oksigen, serta Hibah dari BNPB senilai

Rp391.445.274,00 berupa Mobil Dapur lapangan dan senilai Rp312.789.000,00 berupa Mobil Pick Up pada BPBD Kota Cimahi.

Penambahan lain berupa reklas dari persediaan ke peralatan dan mesin senilai Rp28.500.000,00 berupa kabel CCTV dan timbangan digital pada Dinas LH dan senilai Rp4.950.000,00 berupa 2 (Dua) buah papan nama instansi pada Dinas Pangan dan Pertanian. Terdapat juga reklas dari belanja pemeliharaan ke peralatan dan mesin senilai Rp13.968.000,00 berupa brucket CCTV pada Dinas LH, senilai Rp125.776.376,00 berupa partisi pada Inspektorat, serta reklas dari Belanja jasa ke peralatan dan mesin senilai Rp26.918.277,00 dan Rp15.614.148,00 berupa partisi ruangan Gedung BITC pada Disdagkoperin.

Transaksi Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2023 sebesar Rp8.238.935.983,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- d) Aset yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp3.667.899.872,00
- e) Reklas Antar KIB sebesar Rp35.370.000,00
- f) Reklas ke persediaan sebesar Rp105.867.990,00
- g) Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.724.161.250,00
- h) Rusak berat/Penghapusan sebesar Rp1.795.332.746,00
- i) Koreksi sebesar Rp260.059.125,00
- j) Hibah sebesar Rp650.245.000,00

Untuk pengurangan pada peralatan dan mesin terjadi untuk kategori barang karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi/extracountable yaitu senilai Rp3.110.625.000,00 dan Rp548.249.872,00 yang merupakan belanja modal mebel berupa kursi kayu, meja kayu, papan tulis pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi, senilai Rp6.013.000,00 berupa peralatan personal computer, mebel, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan pada Dinas Kesehatan, senilai Rp7.139.460,00 berupa perabot kantor pada DPKP, senilai Rp27.615.000,00 berupa Hardisk, Rak besi, Stand Speaker dan Speed Bumper pada Dinas Perhubungan, senilai Rp950.000,00 yang merupakan bahan komputer berupa peralatan jaringan pada Diskominfo, senilai Rp53.038.000,00 yang berupa kabel HDMI, harddisk eksternal, mesin cuci steam kendaraan dan trolley pada DLH, senilai Rp1.500.000,00 berupa trolley. Reklasifikasi ke Belanja Persediaan berupa trolley dan thermometer pada Dinas Sosial, senilai Rp5.143.250,00 berupa External Harddisk, Tensi meter digital, Mikrofon dengan kabel pada Dinas Arsip Daerah, Rp3.494.280,00 yaitu Alat Kedokteran Thermohyrometer pada RSUD, dan senilai Rp975.000,00 berupa tripod kamera pada Inspektorat.

Pengurangan lain akibat dari kegiatan penghapusan yaitu senilai Rp82.170.766,00 pada Dinas Pendidikan, senilai Rp266.110.000,00 yaitu Pagar yang berlokasi di Alun-Alun Kota Cimahi pada DPKP, sebesar Rp519.245.000,00 Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Nopol D2T/D1101T SK No.032/Kep.986-BPKAD/2023 pada Setda, senilai Rp131.000.000,00 penghapusan karena Hibah Kendaraan Bermotor Penumpang ke Kepolisian Resor Cimahi SK No. 024/kep.3155-BPLAD/2023 nopol. D 16 59 T pada Setda, senilai Rp343.916.300,00 yaitu partisi (Meubelair) pada setda, senilai Rp651.957.680,00 yaitu Alat Laboratorium Lain-lain pada setda, senilai Rp38.798.000,00 yaitu partisi (Alat Kantor Lainnya) pada setda, senilai Rp15.400.000,00 yaitu aset rusak berat pada BPKAD, senilai Rp217.480.000,00 dan Rp179.500.000,00 penghapusan hibah

kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi pada BPKAD. Serta adanya koreksi pada RSUD untuk pengurangan pada Peralatan dan Mesin yang merupakan pembayaran Hutang pada tahun 2022 senilai total Rp260.059.125,00 dengan rincian: AC SPLIT, Akses Kontrol, Tangki Bahan Solar Genset, 6 unit AC dan alat kedokteran.

Terdapat mutasi antar SKPD pada kendaraan senilai Rp199.750.000,00 Kendaraan Roda Empat dengan Nopol D 20 T dari Dinas Perhubungan kepada Sekretariat DPRD, senilai total Rp605.767.250,00 berupa Kendaraan Roda Empat dengan Nopol D 1087 T yang berasal dari DP3AP2KB dan Kendaraan Roda Empat dengan Nopol D 1743 T yang berasal dari Sekretariat Daerah kepada Dinas Perhubungan, senilai Rp197.190.000,00 berupa Kendaraan Bermotor Penumpang Nopol D 1741 T dari Setda ke DP3AP2KB, senilai Rp131.000.000,00 berupa Mini Bus D 1656 T dari BPBD kepada Setwan, senilai Rp172.000.000,00 Toyota Innova D 1676 T dari BPKAD kepada DP3AP2KB, senilai total Rp156.450.000,00 Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi D 8412 T yang terdiri dari Satu Unit Mobil, Karoseri dan Audio Cassete Recorder dari Bapenda kepada BPKAD

Terdapat mutasi antar SKPD pada peralatan mesin lainnya senilai Rp216.200.000,00 berupa Hadiah Chima personal komputer ke SKPD Dinas Arsip Daerah, Dinas Pangan dan Pertanian, Puskesmas Cibeureum, UPTD Rusunawa, UPTD Technopark, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Umum Setda Kota Cimahi, BPKAD dan DPKP dari Bappelitbangda, serta senilai Rp45.804.000,00 yakni partisi (Meubelair) dari NOC Sekretariat Daerah ke Diskominfo.

C. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.84 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan Tahun 2023 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2023 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp.)
Gedung dan Bangunan	807.092.567.588,52	160.517.997.156,36	17.549.072.204,00	950.061.492.540,88

Transaksi penambahan aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp160.517.997.156,36 sebagai berikut:

- Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp44.380.998.889,00
- Reklas antar KIB sebesar Rp114.386.412.050,36
- Reklas dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.550.000,00
- Reklas dari belanja pemeliharaan Rp67.036.217,00
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.676.000.000,00

Transaksi Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp17.549.072.204,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Reklas Antar KIB sebesar Rp6.616.116.392,00

- b) Reklas ke Barang dan Jasa Rp1.038.331.460,00
- c) Reklas ke persediaan sebesar Rp794.734.724,00
- d) Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.724.161.250,00
- e) Mutasi Ke Aset Lain-Lain Rp5.562.611.844,00
- f) Rusak berat/Penghapusan sebesar Rp1.644.937.000,00
- g) Koreksi sebesar Rp216.340.784,00

Terdapat reklas dari belanja barang dan jasa senilai Rp4.500.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan, senilai Rp3.050.000,00 berupa Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur serta senilai Rp67.036.217,00 dari belanja pemeliharaan untuk membuat kanopi pada Diskominfo. Sedangkan reklas lain berasal dari KDP berupa jasa konsultansi perencanaan & jasa konsultansi pengawasan gedung dan bangunan sebesar Rp.156.992.184,00 pada Dinas Kesehatan, serta reklas dari KDP yang merupakan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk Gedung Workshop Bina Marga senilai Rp259.195.000,00 pada DPUPR.

Untuk pengurangan pada Gedung dan Bangunan berasal dari penghapusan senilai Rp194.665.000,00 berupa perencanaan penataan Taman Alun-alun Kota Cimahi Tahun 2017 pada DPUPR, penghapusan senilai Rp78.861.000,00 berupa Gerbang Batas Lampu Hias Taman Alun-alun Kota Cimahi Tahun 2003 pada DPUPR, dan penghapusan berupa Bangunan Gedung SD Negeri Baros Mandiri 3 Kota Cimahi senilai Rp.1.371.411.000,00 pada Disdik. Terdapat juga koreksi atas Gedung dan Bangunan yang merupakan pembayaran Hutang pada tahun 2022 senilai total Rp 216.340.784,- dengan rincian: Pekerjaan, Perencanaan dan Pengawasan Rehab Gedung B Lantai 4 pada RSUD.

Terdapat pengurangan lain yaitu mutasi ke aset lainnya senilai Rp5.562.611.844,00 berupa gedung sekolah swasta diantaranya SMP Tutwuri Handayani, SMP Muhammadiyah 5, SMP Pasundan 1, SMP Siyata Bakti, TK IT Qur'ratul Ayyun, TK Kartika Siwi, TK Kartika XIX-9, TK Kartika XIX-12, TK Kartika XIX-14 dan TK IT Generasi Harapan pada Dinas Pendidikan.

Terjadi pula mutasi antar SKPD senilai Rp 636.000.000,- atas Rumah Desain Kota Cimahi untuk pemakaian Sinumbra dari Disbudparpora ke DPKP, senilai Rp636.000.000,00 berupa gedung RDKC dari Disbudparpora ke DPKP, dan senilai Rp.1.040.000,00 berupa Gedung LKMD dan Balaikarya dari Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Disbudparpora.

D. Jalan, irigasi & Jaringan

Saldo aset tetap Jalan, irigasi & Jaringan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.85 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun Anggaran 2023

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan Tahun 2023 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2023 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp.)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	806.294.757.832,59	132.341.425.554,90	11.629.307.166,00	927.006.876.221,49

Transaksi penambahan aset tetap jalan, irigasi & jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp132.341.425.554,90 sebagai berikut;

- a) Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp36.473.543.179,00
- b) Reklas antar KIB sebesar Rp 88.338.265.245,00
- c) Reklas dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp426.623.234,00
- d) Reklas dari aset lainnya Rp5.797.594.896,90
- e) Penerimaan Fasos/Fasum sebesar Rp1.107.900.000,00
- f) Koreksi sebesar Rp197.499.000,00

Transaksi Pengurangan aset tetap jalan, irigasi & jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp11.629.307.166,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Mutasi ke aset lain-lain sebesar Rp933.000.951,00
- b) Rusak berat/Penghapusan sebesar Rp10.696.306.215,00

Transaksi yang cukup signifikan pada aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah dikarenakan diatas 10 bidang tanah senilai Rp34.516.740.000,00 yang telah terbukti terdaftar dalam sertifikat hak pakai TNI terdapat Jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum yang masih dipelihara oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi Rp34.248.001.979,93. Untuk itu tindak lanjut yang dilakukan adalah mengkoreksi Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan tersebut ke Aset Lainnya dan hal ini telah tersaji dalam Laporan Keuangan TA 2022 . Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang dikoreksi tersebut adalah:

Tabel 4.86 Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang Berada diatas Tanah TNI

No	OPD	NAMA ASET	NILAI	ALAMAT	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	1.297.370.852,00	Jl. PONCOL	1.297.370.852,00
2	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	125.080.000,00	Jl. PONCOL	45.028.800,00
3	DPUPR	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.580.250.133,00	Jl. Kalidam	1.555.437.133,00
4	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	50.000.000,00	JEMB. KALIDAM	19.000.000,00
5	DPUPR	Saluran Drainage	229.582.000,00	Jl. Kalidam	183.665.600,00
6	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	709.148.000,00	JL SIMPANG	709.148.000,00
7	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	62.561.827,00	Jalan Munajan	62.561.827,00
8	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	546.252.000,00	JL. KARTINI	510.237.900,00
9	DPUPR	Saluran Drainage	510.000,00	JL. KARTINI / CIMAHI TENGAH	510.000,00
10	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	1.229.643.600,00	JL. SAM RATULANGI	1.125.124.100,00
11	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	5.971.163.775,93	JL. SISINGAMANGARAJA	5.015.966.627,52
12	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	20.000.000,00	JEMB. SISINGAMANGARAJA	7.600.000,00
13	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	2.894.587.000,00	JL. PASOPATI	2.826.608.000,00
14	DPUPR	Saluran Drainage	131.920.000,00	JL. PASOPATI / CIMAHI TENGAH	131.920.000,00
15	DPUPR	Saluran Air Kotor Sambungan	46.873.950,00	JL PASOPATI	19.921.428,75
16	DPUPR	Jalan Kabupaten Lain-lain	502.975.000,00	Jl. Pojok Selatan	406.022.222,22
17	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	3.522.544.068,00	JL. PASIR KUMELI	2.452.875.068,00

No	OPD	NAMA ASET	NILAI	ALAMAT	AKUMULASI PENYUSUTAN
18	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	40.000.000,00	JEMB. PASIRKUMELI	15.200.000,00
19	DPUPR	Bangunan Pengambilan Dari Waduk	97.250.000,00	BAROS / BEND. PASIR KUMELI 4,200M	23.225.000,00
20	DPUPR	Saluran Drainage	90.850.000,00	PASIR KUMELI / CIMAHI TENGAH	90.850.000,00
21	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	221.960.753,00	Jembatan Pasir Kumeli (89,28 m)	71.027.440,96
22	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	49.242.500,00	JL SIMPANG	19.697.000,00
23	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	48.141.100,00	Jl. PONCOL	19.256.440,00
24	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	73.231.800,00	Jalan Munajan	29.292.720,00
25	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	33.192.500,00	JL. KARTINI	16.596.250,00
26	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	37.293.000,00	JL. KARTINI	18.646.500,00
27	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	97.205.357,00	JL. SISINGAMANGARAJA	60.133.258,88
28	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	97.630.358,00	JL. PASIR KUMELI	60.398.884,25
29	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	49.228.000,00	JL. PASIR KUMELI	22.152.600,00
30	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	391.714.088,00	JL. TERUSAN KALIDAM	391.714.088,00
31	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	2.355.937.350,00	JL DUSTIRA	2.325.508.485,00
32	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	2.861.076.000,00	JL. GEDUNG EMPAT	2.861.076.000,00
33	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal	6.381.996.092,00	JL SRIWIJAYA	5.494.724.550,00
34	DPUPR	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.081.744.000,00	Jl. Menuju Universitas Unjani	635.973.400,00
35	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	60.000.000,00	JEMB. SRIWIJAYA II	22.800.000,00
36	DPUPR	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	313.272.000,00	JEMB. SRIWIJAYA I	119.043.360,00
37	DPUPR	Saluran Air Kotor Sumbungan Dari Rumah	126.156.650,00	Saluran JL SRIWIJAYA	23.688.150,13
38	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
39	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
40	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
41	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
42	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
43	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
44	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	49.630.000,00	Jl. Sriwijaya	37.222.500,00
45	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	199.218.000,00	Akses Kawasan Lapang Tembak	69.726.300,00
46	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	98.632.357,00	Jalan Panembakan Selatan	61.025.133,88
47	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	45.869.521,00	Jalan Sriwijaya VII Rw. 08 Rt. 03	22.934.760,50
48	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	214.992.648,00	JALAN SRIWIJAYA	107.496.324,00
49	DPKP	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	199.122.000,00	Rw. 08 Kelurahan Setiamanah	199.122.000,00
	JUMLAH		34.248.001.979,93		29.200.482.404,09

Atas kegiatan Penelitian Fisik dan Administrasi Lahan pada hari Rabu, 6 September 2023, dengan menghadirkan perwakilan dari BPKAD Kota Cimahi, DPUPR Kota Cimahi, ATR BPN Kota Cimahi, Zidam III/Slw serta Denzibang I/III Bdg dapat menyajikan secara rinci status jalan kota yang berada di wilayah penguasaan TNI. Sehingga atas JIJ pada tabel diatas dilakukan koreksi kembali, khususnya JIJ yang berada pada jalan umum, direklas dari aset lainnya menjadi JIJ kembali. Rincian JIJ tersebut meliputi:

Tabel 4.87 Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang Kembali ke Pemerintah Daerah Kota Cimahi

No	OPD	NAMA ASET	NILAI	ALAMAT	AKUMULASI PENYUSUTAN
11	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal*	3,130,853,489.90	JL. SISINGAMANGARAJA	3,130,853,489.90
31	DPUPR	Jalan Kabupaten Lokal*	2,355,937,350.00	JL DUSTIRA	2,355,937,350.00
38	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
39	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
40	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
41	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
42	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
43	DISHUB	Jalan Kabupaten Lain-lain	2.158.950,00	Jl. Dustira	2.158.950,00
45	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	199.218.000,00	Akses Kawasan Lapang Tembak (dari velodrome)	69.726.300,00
46	DISHUB	Penerangan Jalan Umum	98.632.357,00	Jalan Panembakan Selatan	61.025.133,88
	JUMLAH		5.797.594.896,90		5.630.495.973,78

Ket* Nilai Aset diperoleh dari proporsi jalan yang masuk ke lahan TNI dan lahan umum

Atas JIJ yang berada pada lahan TNI lainnya yaitu di Jl. Setasion, di sebagian Jl. Lapang Tembak, di sebagian Jl. Bapa Ampu, di sebagian Jl. Ibu Ganirah, dan di sebagian Jl. Sukimun masih diperlukan inventarisasi dan penelusuran fisik dilapangan. Hal ini akan dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya.

Transaksi lain dalam JIJ yaitu terdapat penambahan yang berasal dari Hibah yakni 2 (Dua) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berlokasi di Pasar Tagog dan Taman Alun-Alun senilai total Rp. 1.107.900.000,- pada Dishub.

Penambahan lain berasal dari rekla belanj barjas tahun 2019 dan 2020 senilai Rp. 197.499.000,00 yang merupakan Review DED Underpass / Fly Over Sriwijaya pada DPUPR, senilai Rp. 49.625.880,00 yang merupakan review perencanaan penggantian jembatan ciawitali pada DPUPR, senilai Rp. 150.766.755,00 yang merupakan perencanaan teknis di Jalan Lurah, Jalan Kebon Cau, Jalan Margaluyu, Jalan Cisangkan, Jalan Babakan Loa, Jalan Joyodikromo, Jalan Melong Asih, Jalan Kerkof, Jalan Karya Bakti, Jalan Rancabali, Jalan Kebon Kopi, dan Jalan Melong Raya pada DPUPR, senilai Rp. 74.582.010,00 merupakan review pengawasan Jembatan Ciawitali pada DPUPR, serta senilai Rp. 151.648.589,00 merupakan pengawasan teknis Jalan Lurah, Jalan Kebon Cau, Jalan Margaluyu, Jalan Cisangkan, Jalan Babakan Loa, Jalan Joyodikromo, Jalan Melong Asih, Jalan

Kerkof, Jalan Karya Bakti, Jalan Rancabali, Jalan Kebon Kopi, dan Jalan Melong Raya pada DPUPR.

Terdapat pengurangan pada JIJ atas hasil penghapusan senilai Rp. 88.200.000,00 berupa penghapusan Trotoar Taman Jl. Alun-alun Timur Kota Cimahi pada DPUPR, senilai Rp. 9.025.776.215,00 berupa penghapusan JIJ pada jalan kabupaten lokal dan jalan kabupaten lain-lain yang berada di atas lahan TNI, senilai Total Rp. 1.278.690.000,- berupa penghapusan Sumur Artesis dan Bangunan Pengambilan Irigasi yang berlokasi di Alun-alun Kota Cimahi pada DPKP, serta nilai Rp. 303.640.000,- penghapusan Trotoar, Lampu Hias, Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias Jalan yang berlokasi di Alun-Alun Kota Cimahi pada Dishub. Pengurangan JIJ lain berasal dari reklas ke aset lainnya senilai Rp. 933.000.951,00 yang merupakan belanja modal JIJ pada Jalan Terusan Kalidam, Warung Contong, dan Jalan Dustira yang berada dalam penguasaan TNI pada DPUPR.

E. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap Jalan, irigasi & Jaringan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.88 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan Tahun 2023 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2023 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp.)
Aset Tetap Lainnya	71.698.455.667,47	2.994.655.645,00	443.204.650,00	74.249.906.662,47

Transaksi penambahan aset tetap lainnya pada tahun 2023 sebesar 2.994.655.645,00 sebagai berikut:

- Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp2.959.285.645,00
- Reklas antar KIB sebesar Rp35.370.000,00

Transaksi Pengurangan aset tetap lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp443.204.650,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Reklas antar KIB sebesar Rp67.250.000,00
- Reklas ke aset lainnya Rp124.780.650,00
- Rusak berat/Penghapusan sebesar Rp251.174.000,00

Transaksi yang signifikan dalam aset tetap lainnya adalah penambahan dari belanja modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp2.623.098.720,- di lingkungan sekolah negeri Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

Terdapat penambahan aset tetap lainnya senilai Rp35.370.000,00 hasil dari reklas dari peralatan dan mesin berupa buku yang bersumber dari belanja modal BOS pada Dinas Pendidikan.

Pengurangan pada Aset Tetap lainnya senilai Rp36.746.550,00 merupakan software analisis dan desain pengembangan aplikasi- Aset Tak Berwujud pada Diskominfo dan senilai Rp88.034.100,00 berupa Aplikasi Sipeuting Emas - Aset Tak Berwujud pada DP3AP2KB, reklas ke Peralatan dan Mesin senilai Rp3.250.000,00 pada BPBD dan

senilai Rp64.000.000,00 berupa Proyektor, Sound System, Stand Mic dan alat peraga praktek kesenian, yang bersumber dari belanja modal BOS pada Dinas Pendidikan. Proses penghapusan pada Aset Tetap Lainnya senilai total Rp 251.174.000,- berupa Pahatan dan Tanaman yang berlokasi di Alun-alun Kota Cimahi pada DPKP.

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.89 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2023

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan Tahun 2023 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2023 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp.)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	229.627.190.875,36	91.339.603.640,05	318.038.909.749,41	2.927.884.766,00

Transaksi penambahan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp91.339.603.640,05 sebagai berikut:

- Reklas antar KIB sebesar Rp497.349.752,00
- Reklas dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp33.347.214,00
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp90.808.906.674,05

Transaksi Pengurangan aset tetap Konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2023 sebesar Rp318.038.909.749,41 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Reklas antar KIB sebesar Rp226.703.279.145,36
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp90.808.906.674,05
- Mutasi Ke Aset Lain-Lain Rp526.723.930,00

Penambahan pada KIB F KDP diperoleh hasil reklas dari aset gedung dan bangunan senilai Rp417.729.896,00 berupa Jasa Perencanaan Komplek SDN Sindangsari, Jasa Perencanaan Komplek SDN Melong Asih, Jasa Perencanaan Komplek SDN Cibeber, Asesment Kontruksi Gedung SDN Melong Mandiri 4 dan studi kelayakan lahan SMPN 15 Kota Cimahi pada Dinas Pendidikan, reklas penambahan dari Aset tanah senilai Rp79.619.856,00 berupa DED Imah Seni pada Disbudparpora. Juga hasil reklas dari dari reklas barang dan jasa senilai Rp18.814.066,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur untuk rehab ruang rapat, toilet, dan dapur serta senilai Rp14.533.148,00 berupa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur untuk partisi lantai 1 dan 2 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

Sedangkan pengurangan pada KDP berasal dari Reklas ke tanah senilai total Rp 167.558.430,- yaitu 2 (dua) buah bidang Tanah yang berlokasi di Cigugur Tengah dan Jl Cibogo pada DPKP, reklas ke Gedung dan Bangunan senilai Rp16.052.513.822,31 yang merupakan Gedung Bangunan SD Negeri Baros Mandiri 3 Kota Cimahi pada Dinas Pendidikan, kemudian senilai Rp1.916.623.500,00 berupa pekerjaan perencanaan teknis (Masterplan dan DED) revitalisasi stadion sangkuriang dan senilai Rp7.108.804.370,00 yang merupakan Konstruksi Revitalisasi Stadion Sangkuriang berikut jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan revitasilasi Stadion Sangkuring pada Disbudparpora. Selain

itu reklas ke Gedung dan bangunan senilai Rp.156.992.184,00 berupa jasa konsultansi perencanaan & jasa konsultansi pengawasan gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir reklas ke JIJ senilai Rp88.156.826.865,00 berupa Underpass Sriwijaya dan reklas pengurangan KDP ke gedung dan bangunan senilai Rp259.195.000,00 berupa Tembok Penahan Tanah untuk Gedung Workshop Bina Marga pada DPUPR.

Selain reklas diatas terdapat pula reklas ke aset lainnya yang akan dihapuskan senilai Rp47.305.000,00 berupa jasa konsultan perencanaan DED SMPN 16 Kota Cimahi, senilai Rp47.418.000,00 berupa jasa konsultan perencanaan DED SMPN 15 Kota Cimahi, senilai Rp47.206.000,00 berupa jasa konsultan perencanaan DED SMPN 17 Kota Cimahi, senilai Rp36.261.000,00 berupa jasa konsultan perencanaan Lapangan Parkir SMPN 3 Kota Cimahi, senilai Rp19.188.400,00 berupa jasa konsultan perencanaan Rehab ruang kelas SDN Bina Harapan, senilai Rp18.885.900,00 berupa jasa konsultan perencanaan Rehab ruang kelas SDN Sukanampa, pada Dinas Pendidikan serta senilai Rp.49.225.000,00 berupa tanah dalam pengerjaan pada Dinas LH.

Selain itu khusus untuk lahan jalan yang berada di Lahan TNI terdapat reklas ke aset lainnya senilai Rp88.683.230,00 dan akan dihapuskan berupa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Jl. Sriwijaya, senilai Rp49.541.800,00 berupa perencanaan JPO Jl. Sriwijaya, senilai Rp34.423.000,00 berupa perencanaan rehabilitasi gedung RDKC Tahun 2021 pada DPUPR serta nilai total Rp 90.586.600,- berupa 2 (dua) buah bidang tanah yang tidak dilanjutkan pengerjaannya (Belanja Jasa Penaksir Harga Tanah/Appraisal Leuwilayung dan Tanah Pengembangan SPAM Cimahi Utara untuk dilakukan penghapusan pada DPKP.

Terdapat mutasi antar SKPD senilai Rp.1.916.623.500,00 berupa pekerjaan perencanaan teknis (Masterplan dan DED) revitalisasi stadion sangkuriang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi kepada Disbudparpora, senilai Rp88.892.283.174,05 berupa gedung Mal Pelayanan Publik dari DPUPR ke DPMPTSP serta senilai Rp1.916.623.500,00 berupa pekerjaan perencanaan teknis (Masterplan & DED) revitalisasi stadion sangkuriang dari DPUPR ke Disbudparpora.

4.3.21. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar Rp(1.383.428.508.398,33) Rincian akumulasi penyusutan per SKPD disajikan pada *lampiran 12*.

4.3.22. Dana Cadangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan, Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun 2023 membentuk dana cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk membiayai pemilihan kepala daerah di Tahun 2024. Dana Cadangan tersebut ditempatkan di Bank BJB Rekening 0133216782001 an. Rek. Dana Cadangan Pemkot Cimahi dan diinvestasikan dalam bentuk deposito harian pada bank yang sama. Dari hasil deposito tersebut per 31 Desember 2023 Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan bunga sebesar Rp703.561.643,00 dimana bunga tersebut dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dicatat menambah nilai dana cadangan

sehingga per 31 Desember 2023 nilai dana cadangan adalah sebesar Rp30.703.561.643,00.

4.3.23. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.90 Rincian Saldo Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023

Jenis Aset Lainnya	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
Aset Tidak Berwujud	12.748.806.419,90	11.492.709.779,90
Akumulasi Amortisasi	(10.810.640.260,53)	(9.452.681.527,40)
Aset Tak Berwujud Netto	1.938.166.159,38	2.040.028.252,50
Aset Lain Lain	147.699.273.210,20	136.915.695.665,23
Jumlah	152.985.784.369,57	142.304.068.917,73

Atas posisi aset lainnya per 31 Desember 2023 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.348.345.000,00 merupakan nilai estimasi harga perolehan atas tanah seluas +/- 8.575 m² yang diinvestasikan dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah untuk pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Antri di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah dengan perjanjian Nomor 180/07-Perj/2003 Tanggal 17 Juli 2003.
- Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.748.806.419,90 merupakan software yang terdiri dari :

Tabel 4.91 Rincian Aset Tidak Berwujud Berupa *Software* Tahun Anggaran 2023

OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	668.380.800,00	668.380.800,00
Dinas Kesehatan	172.730.000,00	172.730.000,00
RSUD Cibabat	392.194.000,00	392.194.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.500.774.910,00	1.500.774.910,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	536.171.588,00	324.720.140,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65.000.000,00	65.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.780.000,00	-
Dinas Sosial	100.800.000,00	-
Dinas Pengendalian penduduk. Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	120.674.100,00	32.640.000,00
Dinas Tenaga Kerja	505.224.050,00	411.318.050,00
Dinas Pangan dan Pertanian	71.975.455,00	51.975.455,00
Dinas Lingkungan Hidup	349.472.000,00	349.472.000,00

OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	384.974.250,00	384.974.250,00
Dinas Perhubungan	355.089.395,00	355.089.395,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Kepustakaan	1.043.676.233,00	1.006.929.683,00
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	731.428.820,00	636.943.400,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	819.692.900,00	819.692.900,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	137.150.000,00	117.150.000,00
BAPPEDA	280.094.646,90	264.694.646,90
BPKAD	657.107.500,00	519.907.500,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.873.622.522,00	1.687.042.900,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	378.260.500,00	378.260.500,00
Sekretariat Daerah	265.576.000,00	166.952.500,00
Sekretariat DPRD	833.311.000,00	743.221.000,00
Inspektorat	49.700.000,00	49.700.000,00
Kecamatan Cimahi Utara	71.193.750,00	71.193.750,00
Kecamatan Cimahi Tengah	173.664.500,00	173.664.500,00
Kecamatan Cimahi Selatan	100.595.000,00	100.595.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa	47.492.500,00	47.492.500,00
Jumlah	12.748.806.419,90	11.492.709.779,90

c. Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp(10.810.640.260,53) merupakan amortisasi aset tetap tak berwujud dari tahun perolehan hingga tahun 2023. Rincian Akumulasi Amortisasi disajikan pada *lampiran 13*.

d. Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp147.699.273.210,20 terdiri dari :

Tabel 4.92 Rincian Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2023

OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset Tetap Rusak Berat	36.657.233.161,79	41.332.760.911,30
Piutang Retribusi Kadaluwarsa	212.739.385,00	212.739.385,00
Koreksi Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan	-	5.422.866.048,00
Peralatan dan Mesin tidak dalam penguasaan*	-	1.992.585.462,00
Peralatan dan Mesin Diserahkan Kepada Masyarakat – DLH	-	336.169.000,00
Peralatan Mesin Hilang Dalam Proses TGR*	-	101.684.500,00
Piutang Treasury Deposit Facility	26.634.160.000,00	8.491.417.379,00
Penghapusan Aset Tetap dari KIB D ke Aset Lainnya*	-	44.508.732.979,93
Penghapusan Aset Tetap Tanah dari KIB A ke Aset Lainnya	-	34.516.740.000,00
Reklas Dari Temuan Aset Tetap	5.918.639.048,00	-
Aset Tetap Renovasi	77.709.785.655,41	-
Jaminan Rusunawa (DPKP)	566.715.960,00	-
Jumlah	147.699.273.210,20	136.915.695.665,23

Ket *:Telah berpindah menjadi kategori Aset Tetap Rusak Berat

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp147.699.273.210,20 terdiri dari aset tetap rusak berat yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp36.657.233.161,79 dan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp 212.739.385,00 Piutang Treasury Deposit Facility Rp26.634.160.000,00 reklas dari temuan aset tetap Rp5.918.639.048,00 Aset Tetap Renovasi Rp77.709.785.655,41 dan Uang Jaminan Penghuni Rusunawa Rp566.715.960,00 (rincian pada *lampiran 14*).

Penambahan yang signifikan dalam Aset Tetap Rusak Berat adalah dikarenakan pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan sensus barang milik daerah (inventarisasi) untuk aset tetap peralatan dan mesin. Berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penelitian dari 57.056 unit barang senilai Rp658.180.596.227,00 terdapat 7.017 unit barang senilai Rp35.499.258.592,00 yang dipastikan dalam kondisi rusak berat kemudian 7.017 unit barang senilai Rp35.499.258.592,00 yang dipastikan dalam kondisi rusak berat tersebut direklas ke aset lainnya - aset tetap rusak berat. Pada Tahun 2023 terjadi penambahan Aset Rusak Berat sebesar Rp526.723.930,00 pada Dinas Pendidikan, PUPR, DPKP dan Dinas Lingkungan Hidup sedangkan pengurangan Aset Rusak Berat Tahun adalah sebesar Rp7.136.917.641,51.

Sampai dengan tahun 2013 izin yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) berjumlah 66 jenis. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 141 yang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu adalah Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol. Retribusi Izin Gangguan (HO). Retribusi Izin Trayek. dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sehingga KPPT Kota Cimahi hanya memungut tiga jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Izin Gangguan (HO). dan Retribusi Izin Trayek (IT). Pada Tahun 2005 sampai dengan 2009 sudah terbit beberapa izin retribusi namun belum dibayar oleh wajib retribusi, sehingga berdasarkan peraturan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Pasal 23, hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. Oleh karena itu, KPPT telah melakukan verifikasi izin-izin retribusi yang masa tagihnya telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp212.739.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.93 Rincian Izin Retribusi yang Masa Tagihnya Kadaluwarsa pada Tahun 2013

Jenis retribusi	2013 (Rp)
IMB	64.461.601,00
HO	30.926.150,00
IT	150.000,00
KP	405.000,00
IPPT	102.215.234,00
SIUP	2.650.000,00
TDP	1.510.000,00
SIUKP	525.000,00
SITU	426.400,00
TDG	120.000,00

Jenis retribusi	2013 (Rp)
SIUJK	100.000,00
IPKTK.SWSATA	300.000,00
SIPA.ANGK	750.000,00
IUA	750.000,00
IP	7.450.000,00
Jumlah	212.739.385,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa Penyaluran Dana Bagi Hasil Non Tunai dilaksanakan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposit Facility*) yaitu fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Rekening TDF Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah **Rek Lain BI TDF TKD Kota Cimahi Nomor 519000329980** dengan saldo Rp26.634.160.000,00 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.94 Rincian Dana Bagi Hasil TDF Tahun Anggaran 2023

No	Rekening	Rp
1	Non Tunai Pajak Penghasilan	11.140.294.000,00
2	Non Tunai PBB	476.750.000,00
3	Non Tunai SDA Minyak Bumi	2.597.756.000,00
4	Non Tunai Minerba	83.729.000,00
5	Non Tunai Panas Bumi	12.335.631.000,00
Total Piutang		26.634.160.000,00

Saldo Aset Renovasi Tahun 2023 sebesar Rp77.709.785.655,41 merupakan saldo Aset yang berasal dari Pengakuan belanja Modal atas biaya Renovasi Aset yang berada diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi berupa bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.562.611.844,00 Jalan di Dinas PUPR sebesar Rp71.152.395.027,51 dan Rambu Lalu Lintas dan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Lainnya di Dinas Perhubungan dan DPKP sebesar Rp 994.778.783,90.

Jaminan Rusunawa sebesar Rp566.715.960,00 merupakan kas pada Rekening UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kas pada Rekening UPTD Rusunawa tersebut penerimaannya berasal dari pembayaran jaminan penghuni rusunawa beserta bunga atas jaminan tersebut.

4.3.24. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.95 Saldo Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2023

Uraian	2022 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	125.000,00	583.400,00	125.000,00	583.400,00
Bagian Lancar Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	92.533.016,65	61.632.238,01	92.533.016,65	61.632.238,01
Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00	855.508.220,00	855.508.220,00
Pendapatan Diterima Dimuka	330.272.010,00	1.444.397.645,06	68.332.140,00	1.706.337.515,06
Utang Belanja	3.373.424.947,00	2.316.428.153,00	3.373.424.947,00	2.316.428.153,00
Utang Lain-lain	11.315.101.409,72	64.038.030.341,00	49.518.243.325,72	25.834.888.425,00
Jumlah	15.966.964.603,37	68.716.579.997,07	53.908.166.649,37	30.775.377.951,07

Atas saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp583.400,00 merupakan Utang PFK BOS SD pada Dinas Pendidikan.
- Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 Berdasarkan Surat Tagihan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor S-457/WPB.13/2024, tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp61.632.238,01 merupakan proporsi bunga berjalan yang akan jatuh tempo pada 20 Maret 2024.
- Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp855.508.220,00 merupakan kewajiban utang sesuai dengan naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi dengan Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007. Saldo Utang sebesar Rp855.508.220,00 tersebut merupakan bagian lancar utang kepada pemerintah pusat yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp427.754.110,00 dan tanggal 20 September 2024 sebesar Rp427.754.110,00.
- Utang Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.706.337.515,06 merupakan sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga atas hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah, terdiri dari:

Tabel 4.96 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023

NO	KONTRAK/POLIS	KETERANGAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
1	555/5912/BPKAD	PT. Bali Towerindo Sentra Tbk	261.939.870,00
2	267/CIM-ASU/2023	Bnak BJB Cabang Cimahi	842.317.500,00
3	600/1262/DPUPR	PT.BINTANG WARNA MANDIRI	15.303.014,95
4	032/3251/DPUPR	RONY ARDHITIA S (WADIR PT.IFORTE)	17.994.478,00
5	032/3193/DPUPR	KARTIKA MAULANI	1.598.468,67
6	032/2998/DPUPR	HJ. KECIH RATNANINGSIH (DIR.PT. KEMBAR MAS)	9.786.260,00

NO	KONTRAK/POLIS	KETERANGAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
7	600/1263/DPUPR	PT.KEMBAR MAS	18.340.943,00
8	032/2718/DPUPR	PT. REKSO NASIONAL FOOD	25.345.539,92
9	621/3641/DPUPR	PT.LINK NET TBK	11.638.998,00
10	032/084/DPUPR	PT. HOLI PHARMA	44.478.060,00
11	032/3961/DPUPR	PT. HARJA GUNATAMA LESTARI	6.637.067,25
12	032/3961/DPUPR	PT. HARJA GUNATAMA LESTARI	4.441.363,50
13	032/4053/DPUPR	PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	446.515.951,78
Jumlah			1.706.337.515,06

- e. Utang Belanja Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.316.428.153,00 merupakan utang belanja pegawai dan barang jasa selama tahun 2023. Rincian utang belanja dapat dilihat pada *lampiran 15*.
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.834.888.425,00 merupakan saldo utang kepada pihak ketiga, terdiri dari:

Tabel 4.97 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023

Uraian	2022 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2023 (Rp)
Utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi)	1.319.924.798,00	0,00	0,00	1.319.924.798,00
Utang RSUD Cibabat atas pembelian barang	9.040.572.322,72	60.645.156.866,00	46.044.702.080,72	23.641.027.108,00
Utang Kompensasi Jasa Pelayanan	59.172.520,00	596.991.975,00	609.307.945,00	46.856.550,00
Utang Kompensasi Dampak Negatif	255.516.800,00	2.561.446.500,00	2.616.686.300,00	200.277.000,00
Jaminan pada UPTD Rusunawa	579.827.960,00	234.435.000,00	247.547.000,00	566.715.960,00
Pengembalian PEN atas denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Underpass Sriwijaya dan Pembangunan Wisata Cimenteng Tahun 2021, yang masih belum dikembalikan ke Kas Provinsi Jawa Barat	60.087.009,00	0,00	0,00	60.087.009,00
Jumlah	11.315.101.409,72	64.038.030.341,00	49.518.243.325,72	25.834.888.425,00

Rincian utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi), utang RSUD Cibabat atas pembelian barang serta utang Kompensasi Jasa Pelayanan dan Kompensasi Dampak negatif dapat dilihat pada *lampiran 16, 17 dan 18*.

4.3.25. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat untuk pembiayaan pembangunan Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.98 Saldo Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023

Uraian	2022 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2023 (Rp)
Utang Kepada Pemerintah Pusat	1.711.016.438,70	-	855.508.220,00	855.508.218,70

Utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat tersebut berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007 dengan plafon pinjaman sebesar Rp14.086.072.432,00. Pada tanggal 19 April 2010, plafon pinjaman diubah menjadi Rp12.832.623.298,00 dengan Amandemen Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor AMA-369/SLA-1208/DSMI/2010. Sesuai dengan naskah perjanjian, pembayaran angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2011 dan berakhir tanggal 20 September 2025.

4.3.26. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.99 Saldo Ekuitas Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas	2.879.666.554.396,81	2.949.071.814.343,26

Ekuitas dijelaskan lebih rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2023. (Rincian Dapat Dilihat pada *Lampiran 22*)

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan-LO dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan yang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sampai dengan akhir tahun anggaran bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas dicatat di Neraca sebagai penambahan Piutang dan Ekuitas Dana Lancar.

Pendapatan diakui setelah ada bukti setor ke Kas Daerah dan apabila sampai akhir tahun belum direalisasi ke Kas Daerah, maka dicatat di Neraca sebagai penambah Kas dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan yang telah diterima untuk periode tahun anggaran selanjutnya dicatat di Neraca sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Jumlah pendapatan-LO Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.440.648.877.555,63 Jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi pendapatan yang berpengaruh terhadap neraca.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Pengeluaran beban daerah terdiri dari:

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang
- c. Beban Bunga
- d. Beban Subsidi
- e. Beban Hibah
- f. Beban Bantuan Sosial
- g. Beban Penyusutan Aset Tetap
- h. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- i. Beban Penyisihan Piutang
- j. Beban Penyisihan Dana Bergulir
- k. Beban Lain-lain

Jumlah beban daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.526.271.301.757,97 jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi beban yang berpengaruh terhadap neraca.

Koreksi atas Pengeluaran Beban (penerimaan pengembalian beban) yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan beban. apabila diterima pada tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran beban dicatat dalam lain-lain pendapatan yang sah.

4.4.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp439.082.366.782,00.

4.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp213.533.434.643,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.100 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Hotel	500.934.141,00	295.722.582,00
Pajak Restoran	25.270.023.902,00	23.272.329.594,00
Pajak Hiburan	359.043.252,00	461.850.519,00
Pajak Reklame	4.370.420.300,00	3.005.511.600,00
Pajak Penerangan Jalan Umum	42.284.388.475,00	41.170.519.697,00
Pajak Parkir	1.098.984.276,00	1.128.004.404,00
Pajak Air Tanah	24.230.489.904,00	15.899.944.873,00
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	49.444.869.836,00	63.482.838.861,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	65.974.280.557,00	51.047.178.518,00
Jumlah	213.533.434.643,00	199.763.900.648,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah – LRA menjadi Pendapatan Pajak Daerah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO periode 1 Januari 203 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.267.627.070,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.101 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	5.916.891.470,00	5.658.208.467,00
Retribusi Jasa Usaha	5.899.442.800,00	5.718.893.050,00
Retribusi Perijinan Tertentu	1.451.292.800,00	747.152.750,00
Jumlah	13.267.627.070,00	12.124.254.267,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.102 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Retribusi Daerah	13.267.627.070,00	12.124.254.267,00
Retribusi Jasa Umum	5.916.891.470,00	5.658.208.467,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.396.163.164,00	2.181.745.406,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	183.061.250,00	126.737.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	819.787.000,00	771.883.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.012.875.350,00	958.210.400,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	539.943.700,00	579.679.100,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	137.874.000,00	115.297.500,00
Retribusi Pengendalian Menara	426.406.506,00	495.231.061,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	179.240.000,00	195.110.000,00
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	53.981.000,00	44.081.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	167.559.500,00	190.233.500,00
Retribusi Jasa Usaha	5.899.442.800,00	5.718.893.050,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.547.204.150,00	5.420.483.550,00
Retribusi Pasar Grosir	66.833.400,00	0,00
Retribusi Terminal	239.889.000,00	256.477.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	45.516.250,00	41.932.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.451.292.800,00	747.152.750,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	113.724.093,00	13.839.200,00
Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	14.850.000,00	13.650.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	719.663.550,00
Retribusi Persetujuan Bangunan	1.322.718.707,00	-

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA menjadi Pendapatan Retribusi Daerah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.627.628.409,00

yaitu:

Tabel 4.103 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Perusahaan Daerah		
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	11.627.628.409,00	11.022.613.597,00
Jumlah	11.627.628.409,00	11.022.613.597,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO sebesar Rp11.627.628.409,00 tersebut merupakan bagian deviden atas laba Tahun 2022 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 1.07% saham atau sebanyak 104.000.000 lembar saham pada PT Bank BJB.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas BPD Jawa Barat dan Banten, Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 9 Maret 2022 menyertakan modal kepada Bank BJB dengan membeli 7.215.958 lembar saham dengan harga perlembar sebesar Rp1.355,00.

4.4.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp200.653.676.660,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.104 Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	319.161.177,00	851.993.938,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	304.512.050,94	342.898.794,80
Penerimaan Jasa Giro	6.005.169.523,00	8.007.768.300,97
Pendapatan Bunga Lain-Lain	1.325.482.377,06	798.069.058,45
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.155.159.504,00	3.411.390.499,67
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.699.677,00	60.001,05
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	89.892.787,00	46.526.247,00
Pendapatan Denda Pajak	2.578.650.376,00	1.936.634.909,00
Pendapatan Denda Retribusi	22.694.382,00	16.759.312,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	-	96.660.750,00
Pendapatan dari Pengembalian	599.957.132,00	587.092.623,00
Pendapatan Dari BLUD	188.083.640.008,00	160.419.215.622,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	100.000.000,00	739.520.000,00

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	46.907.666,00	54.700.115,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	20.750.000,00	5.250.000,00
Jumlah	200.653.676.660,00	177.314.540.170,94

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA menjadi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya. dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp989.268.566.831,00.

Tabel 4.105 Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	824.177.659.257,00	780.549.729.251,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	-	5.528.168.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.090.907.574,00	156.685.305.350,00
Jumlah	989.268.566.831,00	942.763.202.601,00

4.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer Pemerintah Pusat -LO Dana Perimbangan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp824.177.659.257,00 yang terdiri dari :

4.4.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp61.665.229.000,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.106 Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.228.263.000,00	6.502.605.564,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	7.186.875.000,00	40.104.132.476,00
DBH PPh Pasal 21	43.390.241.000,00	6.945.732.763,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.859.850.000,00	6.414.564.832,00
Jumlah	61.665.229.000,00	59.967.035.635,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak – LRA menjadi Dana Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.980.064.000,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.107 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.705.362.000,00	6.965.809.916,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.007.625.000,00	6.236.984.395,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	329.976.000,00	1.545.481.698,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.057.420.000,00	138.235.887,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	2.170.064.211,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	27.646.547.000,00	22.301.699.463,00
Jumlah	38.980.064.000,00	39.358.275.570,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA menjadi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.2.1.3. Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp553.049.730.500,00 yaitu:

Tabel 4.108 Dana Alokasi Umum – LO Tahun Anggaran 2023

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	553.049.730.500,00	519.937.401.610,00

4.4.2.1.4. Dana Alokasi Khusus - LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp170.482.635.757,00 yaitu:

Tabel 4.109 Dana Alokasi Khusus – LO Tahun Anggaran 2023

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	13.481.150.654,00	21.060.743.820,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	157.001.485.103,00	140.226.272.616,00
Jumlah	170.482.635.757,00	161.287.016.436,00

4.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu:

Tabel 4.110 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO Tahun Anggaran 2023

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
DID	-	5.528.168.000,00

4.4.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Transfer dari Pemerintah Provinsi - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp143.849.414.574,00 yang terdiri dari:

4.4.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Transfer dari Pemerintah Provinsi - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.111 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	52.577.788.245,00	51.096.431.535,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.085.706.310,00	26.382.753.270,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.171.110.504,00	35.847.645.429,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	189.014.550,00	202.937.450,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	29.825.794.965,00	30.794.937.666,00
Transfer Pemerintah Provinsi	143.849.414.574,00	144.324.705.350,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA menjadi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan dalam **Lampiran 19**.

4.4.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi - LO

Bantuan Keuangan Provinsi - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.241.493.000,00

Tabel 4.112 Bantuan Keuangan Provinsi - LO Tahun Anggaran 2023

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	21.241.493.000,00	12.360.600.000,00
Jumlah	21.241.493.000,00	12.360.000.000,00

4.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO periode 1 Januari 2023 sampai

dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.297.943.942,63 terdiri dari:

Tabel 4.113 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Hibah	12.297.943.942,63	13.205.048.800,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah	12.297.943.942,63	13.205.048.800,00

Adapun rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan	Rp5.034.292.906,78
2. RSUD Cibabat	Rp1.585.425.473,85
3. BPBD	Rp586.223.474,00
4. DP3KB	Rp121.497.700,00
5. DLH	Rp4.000.319.228,00
6. DISHUB	Rp970.185.160,00

Jumlah Rp12.297.943.942,63

Penjelasan transaksi penyesuaian Pendapatan Hibah – LRA menjadi Pendapatan Hibah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 19*.

4.4.4 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Beban Pegawai pada APBD dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Jumlah Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp643.002.415.638,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.114 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023

Beban Pegawai	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Gaji Pokok dan Tunjangan	288.561.651.177,00	286.598.598.855,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	176.854.593.690,00	177.860.225.984,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.651.395.548,00	91.508.917.388,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	40.867.243.972,00	37.689.483.344,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	675.275.856	510.090.496,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	692.000.000,00	732.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	55.700.255.395,00	64.195.354.576,00
Jumlah	643.002.415.638,00	659.094.670.643,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Pegawai – LRA menjadi Beban Pegawai – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*.

4.4.5 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membiayai persediaan yang telah digunakan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, Beban Persediaan dicatat sesuai dengan pemakaian persediaan yang telah terjadi.

Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp255.716.742.218,47 yang terdiri dari :

Tabel 4.115 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023

Beban Persediaan	2023	2022
Alat Listrik	3.603.082.133,96	3.319.509.439,90
Alat Tulis Kantor	4.193.597.572,29	8.327.822.221,81
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.384.114.756,38	2.719.239.757,80
Bahan Bakar dan Pelumas	4.383.294.344,00	4.422.921.871,00
Bahan Baku	139.029.801,00	353.982.828,00
Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.142.283.952,50	7.233.400.063,50
Bahan Cetak	15.024.212.049,86	12.241.291.199,82
Bahan Kimia	11.595.780.141,71	2.654.580.162,00
Bahan Komputer	2.896.711.488,01	1.027.838.761,00
Bahan Lainnya	4.443.253.217,07	6.633.241.354,61
Bahan/Bibit Tanaman	880.172.553,00	632.339.954,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	8.790.000,00	97.848.900,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	428.345.000,00	609.981.485,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.148.521.625,00	6.667.737.970,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan-LO	1.907.865.425,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.560.151.373,00	27.580.464.543,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	3.290.000,00	9.336.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	220.788.100,00	539.613.574,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	181.469.622,00	100.060.876,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	108.131.500,00	143.700.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.069.595.800,00	231.846.950,00
Belanja Pakaian KORPRI	-	3.050.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	630.476.705,00	250.960.850,00
Belanja Pakaian Paskibraka	175.934.300,00	6.821.800,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	63.050.000,00	12.625.000,00
Belanja Pakaian Siaga	101.815.000,00	23.301.800,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	190.500.000,00	97.844.625,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	102.277.125,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	162.000.000,00	
Belanja Pakaian Teknik	-	9.580.000,00

Beban Persediaan	2023	2022
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	13.560.000,00	
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	60.495.000,00	74.120.000,00
Benda Pos	457.044.100,00	389.672.780,00
Isi Tabung Gas	139.760.410,00	58.842.000,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	172.056.780,00	98.850.888,00
Kertas dan Cover	3.154.016.564,04	525.508.950,00
Komponen Peralatan	179.999.514,00	12.899.150,00
Komponen Rambu-Rambu	396.506.712,00	809.538.278,00
Natura	5.945.150.462,69	6.711.533.994,38
Natura dan Pakan Lainnya	302.222.609,00	7.606.000,00
Obat	56.292.646.358,90	55.440.952.163,98
Obat-obatan Lainnya	1.594.988.842,64	19.007.367,00
Pakan	74.601.600,00	137.361.000,00
Perabot Kantor	7.709.419.217,42	4.799.993.016,00
Perlengkapan Dinas	494.758.942,00	292.007.780,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	246.337.123,00	17.720.014,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	51.616.931.162,00	52.658.290.080,56
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	6.336.045.600,00	1.295.807.444,00
Suku Cadang Alat Bengkel	57.042.800,00	45.423.650,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	570.000,00	
Suku Cadang Alat Laboratorium	-	47.571.380,00
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	7.542.998,00
Suku Cadang Alat Angkutan	7.817.445,00	
Suku Cadang Alat Pertanian	4.566.000,00	
Suku Cadang Lainnya	583.608.465,00	50.087.700,00
Suvenir/Cendera Mata	2.230.340.051,00	1.675.512.783,00
Beban Persediaan BOS	-	-
Jumlah	255.716.742.218,47	211.229.068.528,36

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Persediaan – LRA menjadi Beban Persediaan – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*.

4.4.6 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa habis pakai diluar persediaan. Biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Beban Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp364.755.609.359,28 yang terdiri dari :

Tabel 4.116 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2023

No	S O P D	Beban Jasa 2023 (Rp)	Beban Jasa 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	49.343.091.089,25	49.510.638.953,42
2	Dinas Kesehatan	53.444.009.334,60	50.680.461.598,67
3	Rsud Cibabat	42.480.472.310,17	52.496.638.792,83
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.344.597.913,10	5.700.546.559,27
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.362.508.079,94	21.822.900.831,41
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.370.850.813,08	4.848.227.562,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.917.783.697,50	2.263.158.462,83
8	Dinas Sosial	3.812.998.979,00	3.499.952.545,00
9	Dinas Tenaga Kerja	5.118.187.583,67	4.129.139.444,50
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	8.231.792.321,09	5.402.674.806,16
11	Dinas Pangan dan Pertanian	1.800.290.312,16	1.876.089.398,67
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.680.622.028,16	18.883.553.597,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.301.980.913,00	1.235.793.532,50
14	Dinas Perhubungan	14.576.908.847,67	12.989.205.183,24
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.939.679.528,83	4.834.950.202,42
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.237.744.648,05	4.352.727.462,50
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	10.151.031.484,67	4.406.031.319,16
18	Dinas Arsip Daerah	895.681.955,42	722.372.226,09
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	10.970.331.433,00	9.527.172.031,67
20	Sekretariat Daerah	15.686.361.821,42	13.994.521.457,66
21	Sekretariat DPRD	11.544.590.863,25	10.008.469.549,59
22	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	2.781.156.320,00	1.918.767.846,22
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.964.859.443,50	2.483.016.405,16
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.699.691.358,92	2.196.511.214,28
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.814.932.589,83	2.627.304.627,17
26	Inspektorat Kota	1.406.271.781,67	884.164.972,00
27	Kecamatan Cimahi Utara	12.972.331.136,50	9.629.998.129,00
28	Kecamatan Cimahi Tengah	17.079.128.618,33	12.886.396.370,00
29	Kecamatan Cimahi Selatan	16.288.097.527,34	11.497.841.253,00

No	S O P D	Beban Jasa 2023 (Rp)	Beban Jasa 2022 (Rp)
30	Kantor Kesatuan Bangsa	2.537.624.626,16	2.237.246.551,33
	JUMLAH	364.755.609.359,28	329.546.472.884,75

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Jasa – LRA menjadi Beban Jasa – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20* sedangkan rincian beban jasa dijelaskan di *Lampiran 21*.

4.4.7 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk pemeliharaan terhadap Aset Tetap yang tidak menambah nilai Aset Tetap itu sendiri selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.587.355.167,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.117 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023

Beban Pemeliharaan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	158.718.847,00	484.360.469,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.227.322.128,00	12.883.723.450,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.138.949.084,00	1.841.892.383,00
Beban Penggantian Suku Cadang		-
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	449.164.934,00	2.323.452.315,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.788.975,00	6.993.000,00
Beban Pemeliharaan BOS	981.468.379,00	1.000.550.951,00
Beban Pemeliharaan BLUD	8.617.942.820,00	1.269.804.382,00
Jumlah	26.587.355.167,00	19.810.776.950,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Pemeliharaan – LRA menjadi Beban Pemeliharaan – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*

4.4.8 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, pelatihan dan pendidikan, bimbingan teknis, kursus, seminar dan sosialisasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.122.616.250,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.118 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023

Beban Perjalanan Dinas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Perjalanan dinas dalam daerah	43.935.455.686,00	34.060.904.468,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap		172.290.181,00

Beban Perjalanan Dinas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		257.350.000,00
Beban Kursus.kursus singkat/ Pelatihan		-
Beban Sosialisasi		-
Beban Bimbingan Teknis		-
Beban Pendidikan dan Pelatihan		-
Beban Perjalanan Dinas BOS	2.853.057.000,00	2.607.889.150,00
Beban Perjalanan Dinas BLUD	1.334.103.564,00	860.365.340,00
Jumlah	48.122.616.250,00	37.958.799.139,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Perjalanan Dinas – LRA menjadi Beban Perjalanan Dinas – LO dijelaskan dalam **Lampiran 20**

4.4.9 Beban Bunga

Beban Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Beban Bunga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp139.519.133,36 yang terdiri dari :

Tabel 4.119 Rincian Beban Bunga Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	139.519.133,36	198.166.004,18
Jumlah	139.519.133,36	198.166.004,18

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Bunga – LRA menjadi Beban Bunga – LO dijelaskan dalam **Lampiran 20**

4.4.10 Beban Subsidi

Beban Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Tidak terdapat Realisasi Beban Subsidi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023:

Tabel 4.120 Beban Subsidi Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Subsidi kepada BUMN	-	198.166.004,18
Jumlah	-	198.166.004,18

4.4.11 Beban Hibah

Beban Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Beban Hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp50.649.381.829,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.121 Beban Hibah Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	50.649.381.829,00	38.597.225.649,00
Jumlah	50.649.381.829,00	38.597.225.649,00

Penjelasan transaksi penyesuaian Beban Hibah – LRA menjadi Beban Hibah – LO dijelaskan dalam *Lampiran 20*

4.4.12 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.148.320.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.122 Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023

Beban Bantuan Sosial	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.148.320.000,00	3.133.871.600,00
Jumlah	4.148.320.000,00	3.133.871.600,00

4.4.13 Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Beban Penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Perhitungan nilai beban penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi menggunakan metode garis lurus.

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp118.515.829.397,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.123 Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2023

No	S O P D	Beban Penyusutan Aset Tetap (Rp)
1	Dinas Pendidikan	9.639.207.162,95
2	Dinas Kesehatan	4.019.178.439,42
3	RSUD Cibabat	24.834.413.221,76

No	S O P D	Beban Penyusutan Aset Tetap (Rp)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.564.902.043,48
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.675.573.570,28
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	967.475.169,55
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	274.431.684,74
8	Dinas Sosial	259.011.150,00
9	Dinas Tenaga Kerja	72.387.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	173.781.679,17
11	Dinas Pangan dan Pertanian	507.215.584,87
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.669.685.715,95
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	525.408.694,00
14	Dinas Perhubungan	8.709.250.253,99
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.001.465.698,37
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.701.927.154,41
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	836.073.334,54
18	Dinas Arsip Daerah	213.109.007,14
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	3.739.242.586,29
20	Sekretariat Daerah	2.410.447.614,23
21	Sekretariat DPRD	787.580.576,54
22	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	242.301.777,30
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	144.411.192,40
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	238.082.030,51
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	90.141.600,00
26	Inspektorat Kota	283.401.641,02
27	Kecamatan Cimahi Utara	454.923.939,11
28	Kecamatan Cimahi Tengah	838.488.027,12
29	Kecamatan Cimahi Selatan	583.375.759,05
30	Kantor Kesatuan Bangsa	58.936.089,70
	JUMLAH	118.515.829.397,90

4.4.14 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.357.958.733,13 yang berasal dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya terdiri dari :

Tabel 4.124 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	81.716.328,13	71.715.337,50
Dinas Kesehatan	3.250.000,00	9.492.500,00
RSUD Cibabat	-	33.061.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	182.512.486,88	148.175.471,25
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	87.672.397,00	44.001.410,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00
BPBD	15.695.000,00	-
Dinas sosial. pengendalian penduduk. dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-
Dinas Sosial	25.200.000,00	-
Dinas Tenaga Kerja	60.858.103,13	62.120.137,50
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	22.008.525,00	-
Dinas Pangan dan Pertanian	5.000.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	65.698.000,00	65.698.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	45.663.750,00	61.829.487,50
Dinas Perhubungan	5.186.336,25	5.186.336,25
Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan		9.912.375,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.186.637,50	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	133.945.475,00	162.438.225,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	25.625.000,00	20.625.000,00
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	128.561.080,00	141.735.975,00
Sekretariat Daerah	24.655.875,00	-
Sekretariat DPRD	41.897.500,00	81.708.250,00
Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	23.776.250,00	23.676.250,01
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	245.514.989,25	182.168.775,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.213.875,00	55.913.875,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
Inspektorat Kota	-	-
Kecamatan Cimahi Utara	-	-
Kecamatan Cimahi Tengah	6.248.000,00	16.086.125,00
Kecamatan Cimahi Selatan	11.000.000,00	11.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.873.125,00	11.873.125,00
Jumlah	1.357.958.733,13	1.223.417.655,01

4.4.15 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan pengakuan piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Nilai beban penyisihan piutang sebesar Rp13.275.554.031,84 ditentukan dengan penggolongan kualitas pajak. Beban Penyisihan Piutang dibagi menjadi Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Penyisihan Piutang Retribusi dan Beban Penyisihan Piutang lain-lain.

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 mengalami penambahan beban sebesar Rp12.508.831.810,69 yang terdiri dari:

Tabel 4.125 Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023

Piutang	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2022(Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak 2023 (Rp)
Pajak Hotel	1.495.069,93	1.471.488,00	23.581,93
Pajak Restoran	396.067,50	1.066.201,79	-
Pajak Reklame	277.825.716,00	186.457.470,50	91.368.245,50
Pajak Hiburan	150,00	-	150,00
Pajak Parkir	6.163,00	271.420.814,06	-
Pajak Air Tanah	265,933,776,53	271.420.814,06	-
PBB	70.839.199.750,69	58.421.759.917,42	12.417.439.833,27
Jumlah	71.384.856.693,64	58.882.194.046,77	12.508.831.810,70

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 mengalami penambahan beban sebesar Rp531.494.024,25 yang terdiri dari :

Tabel 4.126 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2022

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2022 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2023 (Rp)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	64.185.539,50	101.766.876,00	-
Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	51.898.211,00	-
Izin Trayek (IT)	3.504.500,00	3.245.000,00	259.500,00
Izin Kartu Pengawasan	1.1140.000,00	1.140.000,00	-
Laboratorium (DLH)	16.748.820,00	16.578.665,00	170.155,00
Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	46.460.925,00	62.262.525,00	-
Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	-	9.495.912,25	-
Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2.648.078.744,50	2.117.014.375,25	531.064.369,25
Menara	-	2.498.090,00	-
Jumlah	2.832.016.740,00	2.365.899.654,50	531.494.024,25

3. Beban Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami penambahan beban sebesar Rp235.228.196,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.127 Beban Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023

Piutang	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2022 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lainnya 2023 (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	204.342.390,87	70.642.371,47	133.700.019,40
Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat	-	0,00	-
Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00	-
Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	-	61.662.335,00	-
Piutang TGR Pihak Ketiga DPUPR	-	322.736,29	-
Piutang TGR Pihak Ketiga Disdik	77.662,93	77.662,93	-
Piutang BLUD Air Minum	1.242.121.970,50	1.140.593.793,00	101.528.177,50
Piutang BLUD Puskesmas	-	10.000,00	-
Jumlah	1.670.679.549,30	1.497.436.423,69	235.228.196,90

Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2021 telah dihapuskan karena Piutang BLUD Puskesmas telah dibayar oleh BPJS Kesehatan Tahun 2022, sehingga Beban Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas adalah Rp10.000,00 atas Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2022 sebesar Rp2.000.000,00.

4.4.16 Beban Transfer

Beban Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Realisasi Beban Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

4.4.17 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban operasional Kota Cimahi yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan beban penyisihan.

Tidak terdapat beban lain-lain periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 :

Tabel 4.128 Beban Lain-Lain Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Bahan Pembelajaran		
Aset Tetap yang Nilainya dibawah Nilai Kapitalisasi	-	-
Reklas Persediaan	-	-
Beban Lain-lain BLUD Puskesmas Dinkes	-	-
Beban Penurunan Nilai Investasi	-	-
Jumlah	-	-

4.4.18. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan penghapusan Peralatan dan Mesin Rp52.360.837.006,86 terdiri dari :

Tabel 4.129 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023

No	O P D	Defisit dari kegiatan non Operasional (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(1.453.581.766,00)
2	Dinas Kesehatan	632.829.608,04
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(35.723.100.611,03)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	97.316.338.580,64
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.900.000,00)
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	(327.884.632,33)
7	Dinas Tenaga Kerja	(132.385.000,00)
8	Dinas Pangan dan Pertanian	(388.921.832,58)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(1.808.181.922,68)
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(232.790.175,00)
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	(15.252.500,00)
12	Dinas Perhubungan	443.113.555,40)
13	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(386.338.500,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(492.878.641,00)
15	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	(350.842.995,52)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(545.455.252,00)
17	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(273.362.400,00)
18	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah	(329.390.813,00)
19	Sekretariat Daerah	(1.553.916.980,00)
20	Sekretariat Dewan	(324.406.500,00)
21	Kecamatan Cimahi Selatan	(418.195.000,00)
JUMLAH		52.360.837.006,86

4.4.19. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Realisasi Beban Luar Biasa pada tahun 2023 sebesar Rp1.626.517.480,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.130 Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2023

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	1.626.517.480,00	5.570.083.787,00
Jumlah	1.626.517.480,00	5.570.083.787,00

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kota Cimahi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp134.301.815.353,00. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp27.236.319.228,00. Selisih kurang dari aktivitas investasi sebesar Rp160.683.084.761,00. Selisih kurang dari aktivitas pendanaan sebesar Rp855.508.220,00 dan selisih dari aktivitas transitoris sebesar Rp458.400,00. Apabila penurunan arus kas tahun 2023 sebesar Rp134.301.815.353,00 ditambah dengan saldo awal kas 2023 sebesar Rp251.398.323.142,00 maka saldo kas per 31 Desember 2023 berjumlah Rp117.096.507.789,00.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.096.507.789,00 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp105.005.699.466,00, Saldo di Kas di Bendahara Penerimaan Rp200,00, Saldo Kas di RSUD sebesar Rp3.293.628.125,00, Kas di BLUD Air Minum Rp1.548.921.537,00, Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp6.938.812.861,00, Kas Dana BOS Rp308.862.200,00, Utang PFK dari pengelolaan Dana BOS Rp583.400.

4.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.236.319.228,00 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp1.398.513.861.538,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp1.371.277.542.310,00

Tabel 4.131 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi :		
Jumlah Arus Masuk Kas	1.398.513.861.538,00	1.330.186.281.173,53
Jumlah Arus Keluar Kas	1.371.277.542.310,00	1.296.102.267.636,17
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	27.236.319.228,00	34.084.013.537,36

4.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.398.513.861.538,00 terdiri dari :

Tabel 4.132 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	210.047.163.097,00	193.890.140.403,00
Penerimaan Retribusi Daerah	12.952.863.977,00	11.294.079.342,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.022.613.597,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	190.671.489.141,00	177.617.892.290,53
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	55.785.582.168,00	54.229.638.467,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.716.968.211,00	36.604.255.359,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	553.049.730.500,00	519.937.401.610,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	170.482.635.757,00	161.287.016.436,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	5.528.168.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	145.938.307.278,00	146.414.475.669,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	21.241.493.000,00	12.360.600.000,00
Penerimaan Hibah	-	-
Dana BOS	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.398.513.861.538,00	1.330.186.281.173,53

4.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.371.277.542.310,00 terdiri dari:

Tabel 4.133 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pembayaran Pegawai	642.933.272.638,00	658.940.382.015,00
Pembayaran Barang	666.384.924.873,00	588.254.398.560,17
Pembayaran Bunga	170.419.912,00	234.672.144,00
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	54.633.767.129,00	39.388.772.249,00
Pembayaran Bantuan Sosial	4.148.320.000,00	3.133.871.600,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	100.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga	3.006.837.758,00	6.050.171.068,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Restribusi	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.371.277.542.310,00	1.296.102.267.636,17

4.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar (160.683.084.761,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp319.161.177,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp161.002.245.938,00

Tabel 4.134 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi:		
Jumlah Arus Masuk Kas	319.161.177,00	851.993.938,00
Jumlah Arus Keluar Kas	161.002.245.938,00	91.347.665.734,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(160.683.084.761,00)	(90.495.671.796,00)

4.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp319.161.177,00

Tabel 4.135 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	80.997.100,00	809.394.038,00
Penjualan atas Gedung dan bangunan	200.389.200,00	32.941.100,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan atas Aset Lainnya	37.774.877,00	9.658.800,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	319.161.177,00	851.993.938,00

4.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk belanja modal selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp161.002.245.938,00 terdiri dari:

Tabel 4.136 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	-
Perolehan Tanah	3.754.393.256,00	171.269.485,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	42.675.735.899,00	22.831.957.980,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	44.380.998.889,00	40.246.977.335,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.473.543.179,00	16.911.640.321,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.959.285.645,00	1.408.197.523,00

Perolehan Aset Lainnya	758.289.070,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	9.777.623.090,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	161.002.245.938,00	91.347.665.734,00

4.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(855.508.220,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp0,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp855.508.220,00.

Tabel 4.137 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan :		
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	855.508.220,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)	(855.508.220,00)

4.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Tabel 4.138 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-

4.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. sebesar Rp855.508.220,00 terdiri dari:

Tabel 4.139 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggarna 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	855.508.220,00	855.508.220,00

Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp855.508.220,00 terdiri dari pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp0,00.

4.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 458.400 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp96.983.300.933,38 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp96.982.842.533,38.

Tabel 4.140 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris :		
Jumlah Arus Masuk Kas	97.468.281.455,17	87.773.363.792,14
Jumlah Arus Keluar Kas	97.467.823.055,17	87.821.515.387,14
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	458.400,00	(48.151.595,00)

4.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp96.983.300.933,38 terdiri dari :

Tabel 4.141 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. PPN	34.818.029.598,00	17.421.899.623,26
b. PPh 21	35.440.734.807,00	25.330.711.656,69
c. PPh 22	2.147.957.301,38	1.745.294.332,81
d. PPh 23	2.235.483.227,00	1.906.605.396,38
e. PPh Pasal 4 Ayat (2)	3.066.943.662,00	22.206.295.328,00
f. Iuran Wajib Pegawai 1%	4.350.102.377,25	3.654.898.156,00
g. Jaminan Kesehatan 4%	397.100.108,54	21.482.186,00
h. Iuran Wajib Pegawai 8%	15.011.930.374,00	15.486.177.113,00
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	97.468.281.455,17	87.773.363.792,14

4.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp96.982.842.533,38 terdiri dari :

Tabel 4.142 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. PPN	34.818.029.598,00	17.461.979.394,26
b. PPh 21	35.440.734.807,00	25.331.479.000,69
c. PPh 22	2.147.957.301,38	1.745.294.332,81
d. PPh 23	2.235.024.827,00	1.913.909.876,38
e. PPh Pasal 4 Ayat (2)	3.066.943.662,00	22.206.295.328,00
f. Iuran Wajib Pegawai 1%	4.350.102.377,25	3.654.898.156,00
g. Jaminan Kesehatan 4%	397.100.108,54	21.482.186,00
h. Iuran Wajib Pegawai 8%	15.011.930.374,00	15.486.177.113
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	97.467.823.055,17	87.821.515.387,14

4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO
3. RK PPKD
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5. Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi)
6. Pendapatan Yang Ditangguhkan
7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.879.666.554.396,81 atau turun 2,35% dari Ekuitas tahun sebelumnya, yaitu Rp2.949.071.814.343,26

4.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2023. Nilai Ekuitas Awal diperoleh dari Neraca per 31 Desember 2023, yaitu :

	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	2.949.071.814.343,26

4.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO diperoleh dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, yaitu :

	1 Jan 2023 – 31 Des 2023 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(34.888.104.675,48)

4.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar sebesar Rp0,00 merupakan saldo pembulatan pada RSUD Cibabat dikarenakan Bank BJB tidak dapat mengakomodir transaksi desimal.

- b. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang merupakan penyisihan piutang sampai dengan Tahun 2023 karena perubahan kebijakan akuntansi.

	31 Desember 2023
Koreksi Nilai Piutang	(116.271.009,17)

- c. Koreksi Nilai Utang

Koreksi Nilai Utang merupakan koreksi atas nilai.

	31 Desember 2023
Koreksi Nilai Utang	0,00

- d. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi Persediaan sampai dengan Tahun 2023 karena perubahan kebijakan akuntansi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPBD.

	31 Desember 2023
Koreksi Nilai Persediaan	192.364.436,00

- e. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi terhadap Nilai Aset Tetap dilakukan karena adanya perpindahan aset tetap antar SKPD satu dengan SKPD lainnya, aset tetap dibawah nilai kapitalisasi dibawah tahun 2023 dan hibah aset tetap kepada masyarakat.

	31 Desember 2023
Koreksi Nilai Aset Tetap	66.499.000,00

- f. Koreksi Nilai Aset Lainnya

Tidak ada koreksi terhadap Aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2023

4.6.4. Lain-Lain (Perubahan Basis Akuntansi)

Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi) terdiri dari penyisihan piutang sebesar Rp185.872.425,44 dan juga penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp27.046.172.906,73. Penyesuaian atas akumulasi penyusutan merupakan penyesuaian atas perhitungan kembali penyusutan aset tetap karena pergantian aplikasi dari SIPKD Aset ke aplikasi Grafis.

4.6.5. Koreksi Utang PFK

Koreksi utang PFK sebesar Rp0,00 Bank BJB Per 31 Desember 2023 dan baru disetorkan pada Tahun 2023.

4.6.6. Keuntungan/Kerugian Investasi Pemerintah Daerah

Kerugian Investasi Pemerintah Daerah berasal dari kenaikan investasi Pemerintah Daerah dari dana bergulir Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp7.799.447.216,50)

4.6.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang diperoleh dari Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit LO dan RK PPKD dikurangi/ditambah dengan koreksi-koreksi yang berasal dari dampak kumulatif, perubahan basis akuntansi dan pendapatan yang ditangguhkan. Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2022
Ekuitas Akhir	2.879.666.554.396,81

Rincian disajikan di *Lampiran 22*.

BAB V

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Event*)

Peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan di-otorisasi untuk terbit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa Penyaluran Dana Bagi Hasil Non Tunai dilaksanakan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposit Facility*) yaitu fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Rekening TDF Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah **Rek Lain BI TDF TKD Kota Cimahi Nomor 519000329980** yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 memiliki saldo Rp 26.634.160.000,00. Atas rekening tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendapatkan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp0,00 yang baru kami ketahui setelah tanggal neraca dan kami catat sebagai Piutang Jasa Giro.

5.2 Profil Entitas

Dari hasil perjuangan yang cukup panjang, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Secara formal Kota Cimahi diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengandung paradigma baru dalam pemerintahan daerah dimana tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan, keadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kondisi geografis suatu wilayah secara langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan di wilayah tersebut terutama dalam pengelolaan ruang untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di suatu wilayah. Pengembangan Kota Cimahi pun tidak terlepas dari kondisi geografis yang dimilikinya.

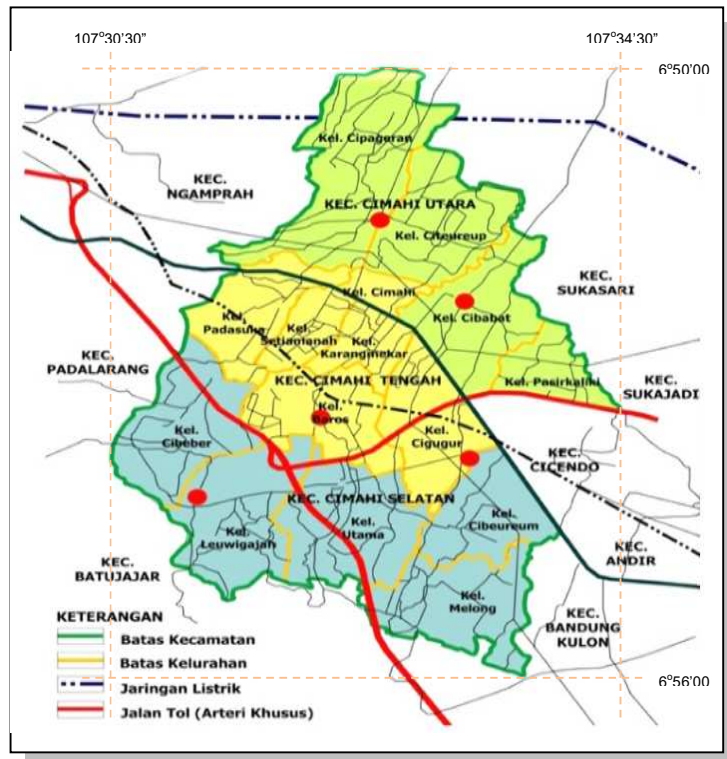
Secara geografis Kota Cimahi terletak pada cekungan Bandung, yang merupakan inti dari wilayah Bandung Raya. Kota Cimahi dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung – Kota Jakarta; Jalan Tol Cileunyi–Purwakarta–Padalarang, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Dengan melihat kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai

sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia, terutama industri, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

Luas Wilayah Kota Cimahi adalah 40,25 km² (4.025,73 ha) yang dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan, dengan letak wilayah administrasi berbatasan dengan Kota Bandung pada bagian timur dan selatan. Kabupaten Bandung pada bagian selatan, serta dengan Kabupaten Bandung Barat pada bagian utara, barat dan selatan.

Luas wilayah Kecamatan Cimahi Utara 13,31 km² dibagi menjadi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Pasirkaliki 3,23 km², Kelurahan Cibabat 2,87 km², Kelurahan Citeureup 1,27 km², dan Kelurahan Cipageran 5,94 km². Kemudian untuk Kecamatan Cimahi Tengah memiliki luas wilayah 10,11 dibagi menjadi 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Baros 2,25 km², Kelurahan Cigugur tengah 2,35 km², Kelurahan Karang Mekar 1,31 km², Kelurahan Setiamanah 1,38 km², Kelurahan Padasuka 1,98 km², dan Kelurahan cimahi 0,84 km². Dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki luas wilayah 16,83 km² dibagi menjadi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Utama 3,13 km². Kelurahan Leuwigajah 2,64 km². Kelurahan Cibeber 3,33 km². Kelurahan Cibeureum 3,93 km² dan Kelurahan Melong 3,8 km².

Gambar 5.1
Peta Administrasi Kota Cimahi



Meskipun secara geografis letak Kota Cimahi menguntungkan namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ruang, sebagai berikut :

1. Sebagian wilayah Kota Cimahi ($\pm 20\%$ luas wilayah) menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2000 termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara. Kawasan Kota terkena bahaya kecelakaan dan pada daerah horisontal dalam dikembangkan maksimal ketinggian bangunan yang terbatas.
2. Peruntukan lahan Wilayah Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi yaitu 1.446,59 ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.
3. Fungsi lindung Garis Sempadan Sungai (GSS), jalan tol dan jalur kereta api. Selain menguntungkan Kota Cimahi juga menjadi hambatan dalam pengembangan kota, yang menjadikan Kota Cimahi menjadi tersegmentasi.

Kendala-kendala tersebut tidak menjadikan Kota Cimahi menjadi stagnan namun kendala tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam pengembangan dan pembangunan kota sehingga pengembangan dan pembangunan Kota Cimahi menjadi sangat dinamis dan selalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada.

5.3 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2023

Pada Tahun 2023 terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dimana PJ. Wali Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan S.Si, M.M. yang diangkat menjadi Penjabat Wali Kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5772 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat digantikan oleh Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc. yang diangkat menjadi Penjabat Wali Kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4111 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Daerah kota Cimahi melakukan perubahan satuan kerja perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas Satuan Kerja Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah:

Tabel 5.1 Daftar SKPD Penyusun Laporan Keuangan Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3	DINAS KESEHATAN
4	RSUD CIBABAT
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	DINAS PERHUBUNGAN
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS SOSIAL
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
19	SEKRETARIAT DAERAH
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
21	SEKRETARIAT DPRD
22	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
23	INSPEKTORAT
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
25	KECAMATAN CIMAHI UTARA
26	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
27	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
29	DINAS ARSIP DAERAH
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tipologi dan urusan pemerintahan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

- b. Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Dinas meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan sosial;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat;
 - 8) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan perindustrian;
 - 9) Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 11) Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi;
 - 12) Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - 13) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, urusan pariwisata, serta urusan kepemudaan dan olahraga;
 - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan energi dan sumber daya mineral;

- 15) Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan;
- 16) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; dan
- 17) Dinas Arsip Daerah dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan;

e. Badan meliputi :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A, meliputi :

- a) Kelurahan Cipageran;
- b) Kelurahan Citeureup;
- c) Kelurahan Cibabat;
- d) Kelurahan Pasirkaliki;

2. Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A, meliputi:

- a) Kelurahan Padasuka;
- b) Kelurahan Setiamanah;
- c) Kelurahan Karangmekar;
- d) Kelurahan Baros;
- e) Kelurahan Cimahi;
- f) Kelurahan Cigugur Tengah;

3. Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A, meliputi:

- a) Kelurahan Cibeureum;
- b) Kelurahan Cibeber;
- c) Kelurahan Leuwigajah;

- d) Kelurahan Utama;
- e) Kelurahan Melong;

5.4 Hubungan Dengan DPRD, BPK serta Forkopimda

5.4.1 Hubungan dengan DPRD

Hubungan dengan DPRD merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dan di dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi Pemerintah serta fungsi DPRD sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan DPRD berjalan secara dinamis sesuai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengajukan rancangan perda, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, serta tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan ini terlihat diantaranya dalam penyusunan rencana anggaran (KUA, PPAS, RAPBD dan APBD) maupun dalam pansus-pansus menghasilkan perda. Selain itu, secara berkala ada forum kebersamaan eksekutif-legislatif mendengarkan pencerahan dari narasumber yang relevan (sosial/politik/ekonomi/hukum).

5.4.2 Hubungan dengan BPK

Hubungan dengan BPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sampai saat ini telah berjalan dengan baik.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait masih adanya catatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada dengan harapan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi pada tahun mendatang tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5.4.3 Hubungan dengan Forkopimda

Hubungan dengan Forkopimda terjalin sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing seperti dengan Unsur Pimpinan DPRD, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaaan dan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Harmonisasi yang telah terjalin diwujudkan dalam Program Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pengamanan Daerah serta Koordinasi pada setiap event sosial dan kemasyarakatan.

5.5 Pengaruh *Stakeholder* (pemegang kepentingan): DPRD

Pengaruh *stakeholder* DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan cukup kuat, baik dalam proses penganggaran maupun inisiatif penyusunan produk legislatif/perda. Pengaruh DPRD dalam penyelenggaraan program kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diwujudkan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah, fungsi anggaran untuk menetapkan APBD dan fungsi pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

5.6 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan

Dampak lingkungan entitas terhadap risiko bidang kerja dan laporan keuangan dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor:

1. Lingkungan internal;
Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi.
2. Lingkungan eksternal :
 - a. Kenyamanan lingkungan kerja yang belum optimal;
 - b. Kesempatan memperoleh pendidikan dan latihan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan khususnya akuntansi dan laporan keuangan;
 - c. Pendidikan dan latihan yang diberikan terlalu singkat.

5.7 Alamat Kantor

Tabel 5.2 Alamat Kantor SKPD Kota Cimahi

No	Nama	Alamat	Telepon	Faximile	Keterangan
1	Kepala Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654016	6654274 Psw 125	MelaluiSanditel
2	SekretariatDewan/DPRD	Jl.Hj.Julaeha Kartasasmita	022- 6633315	6633315	Langsung
3	Inspektorat Kota	Jl. TTUC Jl. Pesantren, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513	022- 6630330	6654274 Psw 125	Langsung
4	Sekretariat Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274	5554274	Langsung
5	BPKAD	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274 Psw 117/132	6654274 Psw 125	MelaluiSanditel
6	Mall Pelayanan Publik	Jl. Aruman, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat	022- 6632601/ 6641454	022- 6641454	Langsung

BAB VI

PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam rangka mempertahankan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.


Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Belanja Hibah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023

I Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

NO.	JENIS	SPP		SPM		SP2D		KEPERLUAN	NILAI
		NO SPP	TGL SPP	NOSPM	TGL SPM	NO SP2D	TGL SP2D		
1	LS	02.23/02.0/000045/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.02/5/2023	23-Mei-23	02.23/03.0/000045/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.02/5/2023	23-Mei-23	02.23/04.0/000044/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.02/5/2023	24-Mei-23	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (BNN) Kota Cimahi TA 2023	250.000.000,00
2	LS	02.23/02.0/000112/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	27-Nov-23	02.23/03.0/000112/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	27-Nov-23	02.23/04.0/000110/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	29-Nov-23	Belanja Hibah Uang Bawaslu Kota Cimahi	3.809.375.600,00
3	LS	02.23/02.0/000117/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/12/2023	04-Des-23	02.23/03.0/000117/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/12/2023	04-Des-23	02.23/04.0/000115/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/12/2023	05-Des-23	Belanja Hibah Uang KPU KOTA CIMAHI	14.290.942.000,00
Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat									18.350.317.600

II Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

1	LS	02.23/02.0/000109/LS/1.03.0.00.0.0 0.01.0000/P.03/7/2023	27-Jul-23	02.23/03.0/000109/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/P.03/7/2023	27-Jul-23	02.23/04.0/000106/LS/1.03.0.00.0.00 .01.0000/P.03/7/2023	31-Jul-23	85 % Perencanaan Pembangunan Polsek Cimahi Tengah	211.775.885
2	LS	02.23/02.0/000142/LS/1.03.0.00.0.0 0.01.0000/P.03/8/2023	18-Agu-23	02.23/03.0/000143/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/P.03/8/2023	18-Agu-23	02.23/04.0/000139/LS/1.03.0.00.0.00 .01.0000/P.03/8/2023	22-Agu-23	85% Perencanaan Renovasi Polres Cimahi	84.634.415
3	LS	02.23/02.0/000282/LS/1.03.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	20-Nov-23	02.23/03.0/000289/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	20-Nov-23	02.23/04.0/000263/LS/1.03.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	22-Nov-23	100% Pengawasan Renovasi Polres Cimahi	69.911.700
4	LS	02.23/02.0/000284/LS/1.03.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	20-Nov-23	02.23/03.0/000291/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	20-Nov-23	02.23/04.0/000264/LS/1.03.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	22-Nov-23	100% Renovasi Polres Cimahi	897.340.700
5	LS	02.23/02.0/000283/LS/1.03.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	20-Nov-23	02.23/03.0/000290/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	20-Nov-23	02.23/04.0/000260/LS/1.03.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	22-Nov-23	15% Perencanaan Renovasi Polres Cimahi	14.935.485
6	LS	02.23/02.0/000317/LS/1.03.0.00.0.0 0.01.0000/P.05/12/2023	14-Des-23	02.23/03.0/000325/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/P.05/12/2023	14-Des-23	02.23/04.0/000293/LS/1.03.0.00.0.00 .01.0000/P.05/12/2023	19-Des-23	15% Perencanaan Pembangunan Polsek Cimahi Tengah	37.372.215
7	LS	02.23/02.0/000313/LS/1.03.0.00.0.0 0.01.0000/P.05/12/2023	14-Des-23	02.23/03.0/000321/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/P.05/12/2023	14-Des-23	02.23/04.0/000295/LS/1.03.0.00.0.00 .01.0000/P.05/12/2023	19-Des-23	100% Pengawasan Pembangunan Polsek Cimahi Tengah	168.512.900
8	LS	02.23/02.0/000314/LS/1.03.0.00.0.0 0.01.0000/P.05/12/2023	14-Des-23	02.23/03.0/000322/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/P.05/12/2023	14-Des-23	02.23/04.0/000292/LS/1.03.0.00.0.00 .01.0000/P.05/12/2023	19-Des-23	100% Pembangunan Polsek Cimahi Tengah	2.499.902.000
Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat									3.984.385.300,00

III Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

1	LS	02.23/02.0/000019/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.01/3/2023	07-Mar-23	02.23/03.0/000019/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.01/3/2023	08 Maret 2023	02.23/04.0/000019/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.01/3/2023	09-Mar-23	Hibah Uang KONI Kota Cimahi Semester I	1.933.287.500,00
2	LS	02.23/02.0/000026/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.01/3/2023	13-Mar-23	02.23/03.0/000025/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.01/3/2023	15 Maret 2023	02.23/04.0/000025/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.01/3/2023	16-Mar-23	Hibah Uang Kwarcab Pramuka Kota Cimahi	132.294.000,00
3	LS	02.23/02.0/000027/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.01/3/2023	20-Mar-23	02.23/03.0/000026/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.01/3/2023	24 Maret 2023	02.23/04.0/000026/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.01/3/2023	24-Mar-23	Hibah Uang NPCI Kota Cimahi	500.000.000,00
4	LS	02.23/02.0/000032/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.01/3/2023	30-Mar-23	02.23/03.0/000031/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.01/3/2023	31 Maret 2023	02.23/04.0/000031/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.01/3/2023	03-Apr-23	Hibah Uang DPD KNPI Kota Cimahi	141.656.000,00
5	LS	02.23/02.0/000080/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.02/7/2023	13-Jul-23	02.23/03.0/000084/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.02/7/2023	13 Juli 2023	02.23/04.0/000079/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.02/7/2023	13-Jul-23	Hibah Uang KONI Kota Cimahi Semester II	2.066.712.500,00
6	LS	02.23/02.0/000084/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.02/7/2023	17-Jul-23	02.23/03.0/000087/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.02/7/2023	17 Juli 2023	02.23/04.0/000082/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.02/7/2023	18-Jul-23	Hibah Uang kepada Pramuka Kota Cimahi	167.706.000,00
7	LS	02.23/02.0/000089/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.03/8/2023	02-Agu-23	02.23/03.0/000093/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.03/8/2023	02 Agustus 2023	02.23/04.0/000088/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.03/8/2023	03-Agu-23	HIBAH UANG NPCI KOTA CIMAHI Semester II	500.000.000,00
8	LS	02.23/02.0/000126/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.03/10/2023	16-Okt-23	02.23/03.0/000131/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.03/10/2023	16 Oktober 2023	02.23/04.0/000125/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.03/10/2023	18-Okt-23	Belanja Hibah KNPI Kota Cimahi semester 2	158.344.000,00
9	LS	02.23/02.0/000031/LS/1.02.0.00.0.0 0.01.0000/P.01/3/2023	30-Mar-23	02.23/03.0/000030/LS/1.02.0.00. 0.00.01.0000/P.01/3/2023	30 Maret 2023	02.23/04.0/000030/LS/1.02.0.00.0.00 .01.0000/P.01/4/2023	03-Apr-23	Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga, yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kegiatan kesehatan khusus (PMI Kota Cimahi) 02.23	500.000.000,00
		02.23/02.0/000034/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.01/4/2023	17-Apr-23	02.23/03.0/000034/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.01/4/2023	17 April 2023	02.23/04.0/000033/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.01/4/2023	18-Apr-23	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023	400.000.000,00
10		02.23/02.0/000061/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.02/6/2023	06-Jun-23	02.23/03.0/000065/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.02/6/2023	06 Juni 2023	02.23/04.0/000060/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.02/6/2023	06-Jun-23	Belanja Hibah Uang kepada Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Tahap I Tahun 2023	100.000.000,00
11		02.23/02.0/000090/LS/2.22.3.26.2.1 9.04.0000/P.03/8/2023	08-Agu-23	02.23/03.0/000097/LS/2.22.3.26. 2.19.04.0000/P.03/8/2023	08-Agu-23	02.23/04.0/000093/LS/2.22.3.26.2.19 .04.0000/P.03/8/2023	14-Agu-23	Belanja Hibah Uang kepada Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC) Tahap ke- 2 Tahun 2023	100.000.000,00
10		02.23/02.0/000043/LS/4.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.01/3/2023	20-Mar-23	02.23/03.0/000043/LS/4.01.0.00. 0.00.01.0000/P.01/3/2023	20 Maret 2023	02.23/04.0/000043/LS/4.01.0.00.0.00 .01.0000/P.01/3/2023	21-Mar-23	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi	200.000.000,00
11		BOP PAUD dan KESETARAAN - Di Transfer Langsung dari KPPN ke Rekening Penerima							9.479.240.000
12	STS	STS Pengembalian						Pengembalian Hibah KONI	- 300.000,00
13	STS	STS Pengembalian						Pengembalian sisa Anggaran Hibah BAZNAS Kota Cimahi Tahun 2023	- 31.005.722,00

IV Belanja Hibah Dana BOS

IV Belanja Hibah Dana BOS		
1	Sekolah SWASTA - Di Transfer Langsung dari KPPN ke Rekening Penerima	13.702.254.951
	Belanja Hibah Dana BOS	13.702.254.951

V Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1	LS	02.23/02.0/000109/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000108/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000106/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	160.560.000
2	LS	02.23/02.0/000105/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000109/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000107/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	183.330.000
3	LS	02.23/02.0/000103/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000103/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000105/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	404.625.000
4	LS	02.23/02.0/000111/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000111/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000100/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	261.757.500
5	LS	02.23/02.0/000108/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000107/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000104/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	314.527.500
6	LS	02.23/02.0/000106/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000105/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000101/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	319.155.000
7	LS	02.23/02.0/000110/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000110/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000109/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	169.620.000
8	LS	02.23/02.0/000104/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000104/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000108/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	245.107.500
9	LS	02.23/02.0/000102/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000102/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000103/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2023	82.282.500
10	LS	02.23/02.0/000107/LS/8.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/11/2023	10-Nov-23	02.23/03.0/000106/LS/8.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/11/2023	10 November 2023	02.23/04.0/000102/LS/8.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/11/2023	13-Nov-23	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023	107.910.000
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik									2.248.875.000,00
TOTAL BELANJA HIBAH									54.633.767.129,00

Lampiran 1

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023

NO.	JENIS	SPP		SPM		SP2D		KEPERLUAN	NILAI
		NO SPP	TGL SPP	NO SPM	TGL SPM	NO SP2D	TGL SP2D		
1	TU	02.23/02.0/000004/TU/1.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/12/2023	04-Des-23	02.23/03.0/000004/TU/1.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/12/2023	04 Desember 2023	02.23/04.0/000003/TU/1.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/12/2023	06-Des-23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Sosial Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Jenjang SD Tahun Anggaran 2023	1.727.100.000,00
2	TU	02.23/02.0/000003/TU/1.01.0.00.0.0 0.01.0000/P.04/12/2023	04-Des-23	02.23/03.0/000003/TU/1.01.0.00. 0.00.01.0000/P.04/12/2023	04 Desember 2023	02.23/04.0/000004/TU/1.01.0.00.0.00 .01.0000/P.04/12/2023	06-Des-23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu (Bantuan Sosial Sumbangan Pembinaan Pendidikan Jenjang SMP) Tahun Anggaran 2023	2.421.220.000,00
JUMLAH									4.148.320.000,00

Daftar Piutang Daerah Per 31 Desember 2023

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	Piutang Pajak :					
	Piutang pajak daerah					
	1) Pajak Hotel	2023	15.284.880,00	500.934.141,00	496.217.756,00	20.001.265,00
	2) Pajak Restoran	2023	180.322.860,00	25.270.023.902,00	25.426.661.921,00	23.684.841,00
	3) Pajak Reklame	2023	934.057.835,00	4.370.420.300,00	4.418.639.600,00	885.838.535,00
	4) Pajak Hiburan dan Tontonan	2023	-	359.043.252,00	359.013.252,00	30.000,00
	5) Pajak Penerangan Jalan Umum	2023	-	42.271.188.187,00	42.271.188.187,00	-
	6) Pajak Genset Non PLN	2023	-	13.200.288,00	13.200.288,00	-
	7) Pajak Parkir	2023	290.800,00	1.098.984.276,00	1.098.042.476,00	1.232.600,00
	8) Pajak Air Tanah	2023	1.062.118.438,00	24.230.489.904,00	23.335.953.825,00	1.956.654.517,00
	9) BPHTB	2023	-	49.444.869.836,00	49.444.869.836,00	-
	10) PBB	2023	132.486.092.006,00	65.974.280.557,00	63.183.375.956,00	135.276.996.607,00
Jumlah			134.678.166.819,00	213.533.434.643,00	210.047.163.097,00	138.164.438.365,00

Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2023

Penyisihan Piutang Pajak Hotel 2023

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2021	14.684.880,00			14.684.880,00	1.468.488,00				
2022	-								
2023	5.316.385,00	5.316.385,00	26.581,93						
Jumlah	20.001.265,00	5.316.385,00	26.581,93	14.684.880,00	1.468.488,00	-	-	-	-
Jumlah Pokok		20.001.265,00							
Jumlah Penyisihan		1.495.069,925							
NRV		18.506.195,08							

Penyisihan Piutang Pajak Restoran 2023

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2021	1.732.500,00			1.732.500,00	173.250,00				
2022	1.190.061,00			1.190.061,00	119.006,10				
2023	20.762.280,00	20.762.280,00	103.811,40						
Jumlah	23.684.841,00	20.762.280,00	103.811,40	2.922.561,00	292.256,10	-	-	-	-
Jumlah Pokok		23.684.841,00							
Jumlah Penyisihan		396.067,50							
NRV		23.288.773,50							

Penyisihan Piutang Pajak Reklame 2023

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2012	118.091.438,00							118.091.438,00	118.091.438,00
2013	2.031.250,00							2.031.250,00	2.031.250,00
2014	7.228.422,00							7.228.422,00	7.228.422,00
2015	3.565.625,00							3.565.625,00	3.565.625,00
2016	-								
2017	-								
2018	-								
2019	31.739.200,00					31.739.200,00	15.869.600,00		
2020	211.785.700,00					211.785.700,00	105.892.850,00		
2021	136.750.900,00			136.750.900,00	13.675.090,00				
2022	101.033.800,00			101.033.800,00	10.103.380,00				
2023	273.612.200,00	273.612.200,00	1.368.061,00						
Jumlah	885.838.535,00	273.612.200,00	1.368.061,00	237.784.700,00	23.778.470,00	243.524.900,00	121.762.450,00	130.916.735,00	130.916.735,00
Jumlah Pokok		885.838.535,00							
Jumlah Penyisihan		277.825.716,00							
NRV		608.012.819,00							

Penyisihan Piutang Pajak Hiburan 2023

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2022	-		-	-	-				
2023	30.000,00	30.000,00	150,00						
Jumlah	30.000,00	30.000,00	150,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pokok		30.000,00							
Jumlah Penyisihan		150,000							
NRV		29.850,00							

Penyisihan Piutang Pajak Parkir 2023

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2020									
2022									
2023	1.232.600,00	1.232.600,00	6.163,00						
Jumlah	1.232.600,00	1.232.600,00	6.163,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pokok		1.232.600,00							
Jumlah Penyisihan		6.163,000							
NRV		1.226.437,00							

Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah 2023

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2012	63.977.520,00							63.977.520,00	63.977.520,00
2013	45.403.164,00							45.403.164,00	45.403.164,00
2014	2.911.232,00							2.911.232,00	2.911.232,00
2015	-								
2016	-								
2017	-								
2018	124.469.520,00					124.469.520,00	62.234.760,00		
2019	129.937.812,00					129.937.812,00	64.968.906,00		
2020	16.377.279,00					16.377.279,00	8.188.639,50		
2021	79.079.120,00			79.079.120,00	7.907.912,00				
2022	30.201.565,00			30.201.565,00	3.020.156,50				
2023	1.464.297.305,00	1.464.297.305,00	7.321.486,53						
Jumlah	1.956.654.517,00	1.464.297.305,00	7.321.486,53	109.280.685,00	10.928.068,50	270.784.611,00	135.392.305,50	112.291.916,00	112.291.916,00
Jumlah Pokok		1.956.654.517,00							
Jumlah Penyisihan		265.933.776,525							
NRV		1.690.720.740,48							

Penyisihan Piutang PBB 2023

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2013	8.671.815.064,00							8.671.815.064,00	8.671.815.064,00
2014	8.212.306.692,00							8.212.306.692,00	8.212.306.692,00
2015	9.206.212.587,00							9.206.212.587,00	9.206.212.587,00
2016	8.769.844.715,00							8.769.844.715,00	8.769.844.715,00
2017	9.386.581.958,00							9.386.581.958,00	9.386.581.958,00
2018	11.134.367.408,00					11.134.367.408,00	5.567.183.704,00		
2019	14.292.422.923,00					14.292.422.923,00	7.146.211.461,50		
2020	21.274.084.548,00					21.274.084.548,00	10.637.042.274,00		
2021	23.039.174.644,00			23.039.174.644,00	2.303.917.464,40				
2022	8.754.030.531,00			8.754.030.531,00	875.403.053,10				
2023	12.536.155.537,00	12.536.155.537,00	62.680.777,69						
Jumlah	135.276.996.607,00	12.536.155.537,00	62.680.777,69	31.793.205.175,00	3.179.320.517,50	46.700.874.879,00	23.350.437.439,50	44.246.761.016,00	44.246.761.016,00
Jumlah Pokok		135.276.996.607,00							
Jumlah Penyisihan		70.839.199.750,69							
TOTAL		64.437.796.856,32							

Penyisihan Piutang Pajak Hotel	1.495.069,93	-
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	396.067,50	-
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	277.825.716,00	-
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	150,00	-
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	6.163,00	-
Penyisihan Piutang Pajak Air	265.933.776,53	-
Penyisihan Piutang PBB	70.839.199.750,69	-
Total Penyisihan	71.384.856.693,64	

Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Penambahan Piutang Tahun 2023	Pengurangan Piutang Tahun 2023	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 31 Desember 2023
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	108.286.824,00	1.436.442.800,00	1.322.718.707,00	222.010.917,00	64.185.539,50
2	Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00	-	-	51.898.211,00	51.898.211,00
3	Izin Trayek (IT)	3.950.000,00	14.850.000,00	14.100.000,00	4.700.000,00	3.504.500,00
4	Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00	1.140.000,00
5	Laboratorium (DLH)	45.812.500,00	818.502.000,00	836.577.000,00	27.737.500,00	16.748.820,00
6	Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	84.531.525,00	710.739.250,00	726.297.250,00	68.973.525,00	46.460.925,00
7	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	33.416.700,00	33.416.700,00	66.833.400,00	-	-
8	Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2.751.245.682,00	3.718.694.600,00	3.425.767.500,00	3.044.172.782,00	2.648.078.744,50
9	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	24.980.900,00	426.406.506,00	451.387.406,00	-	-
	Jumlah	3.105.262.342,00	7.159.051.856,00	6.843.681.263,00	3.420.632.935,00	2.832.016.740,00

Penyisihan Piutang Retribusi

A. PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2022	Piutang Retribusi IMB tahun 2022	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60.906.517,00	Rp 60.906.517,00
2	22/06/2023	HERNI LISDIATI		Rp -		Rp -	Rp 4.963.500	Rp 2.481.750,00		Rp -
3	10/10/2023	JERICO ADITYA		Rp -	Rp 174.400,00	Rp 17.440,00				Rp -
4	21/12/2023	AGUS MULYADHI SUSANTO qq. PT. STERIN HEALTHCARE INDONESIA	122.147.300,00	Rp 610.736,50						
5	21/12/2023	NUR'AENI	1.698.600,00	Rp 8.493,00						
6	28/12/2023	HENDRA WIJAYA	12.120.800,00	Rp 60.604,00						
7	28/12/2023	ADE HARYANTO	2.331.400,00	Rp 11.657,00						
8	28/12/2023	ANI SUMARNI	3.093.200,00	Rp 15.466,00						
9	28/12/2023	BUDI PRASETIO	827.700,00	Rp 4.138,50						
10	28/12/2023	RICHARD HANS	2.235.400,00	Rp 11.177,00						
11	28/12/2023	SITI HARIANI	4.655.400,00	Rp 23.277,00						
12	28/12/2023	WILLIAM ALAMSYAH	1.570.400,00	Rp 7.852,00						
13	28/12/2023	WILLIAM ALAMSYAH	1.590.000,00	Rp 7.950,00						
14	28/12/2023	WILLIAM ALAMSYAH	1.512.500,00	Rp 7.562,50						
15	28/12/2023	RONNY NIWARLANGGA	1.750.300,00	Rp 8.751,50						
16	28/12/2023	KUSMAYATI	433.500,00	Rp 2.167,50						
	JUMLAH		Rp 155.966.500,00	Rp 779.832,50	Rp 174.400,00	Rp 17.440,00	Rp 4.963.500,00	Rp 2.481.750,00	Rp 60.906.517,00	Rp 60.906.517,00
	JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN		Rp 222.010.917,00							
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IMB TAHUN 2023		Rp 64.185.539,50							

B. PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2022	Piutang Retribusi IG tahun 2021	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.898.211,00	Rp 51.898.211,00
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
		JUMLAH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.898.211,00	Rp 51.898.211,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	Rp 51.898.211,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IG TAHUN 2023	Rp 51.898.211,00							

C. PIUTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2022	Piutang Retribusi IT tahun 2022	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00
2	30/01/2023	KSU TUNAS MANDIRI D 1923 TZ		Rp -			Rp 150.000,00	Rp 75.000,00		
3	03/04/2023	KOBUTRI JABARD 1927 SW		Rp -		Rp -	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00		
4	11/07/2023	KOAMARA D 1901 TA		Rp -		Rp -	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00		
5	22/08/2023	KOAMARA D 1922 SM		Rp -		Rp -	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00		
6	27/12/2023	PT. BAGJA TRANSPORT INDONESIA D 1949 TC	Rp 150.000,00	Rp 750,00						
7	27/12/2023	PT. BAGJA TRANSPORT D 1984 TM	Rp 150.000,00	Rp 750,00						
8	27/12/2023	KOAMARA D 1924 TD	Rp 150.000,00	Rp 750,00						
9	27/12/2023	PT. BAGJA TRANSPORT D 1930 TA	Rp 150.000,00	Rp 750,00				Rp -		
10	27/12/2023	KOPERASI MITRA SEJAHTERA D 1923 TF	Rp 150.000,00	Rp 750,00				Rp -		
11	27/12/2023	KSU TUNAS MANDIRI D 1968 SH	Rp 150.000,00	Rp 750,00				Rp -		
		JUMLAH	Rp 900.000,00	Rp 4.500,00	Rp -	Rp -	Rp 600.000,00	Rp 300.000,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK	Rp 4.700.000,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IT TAHUN 2023	Rp 3.504.500,00							

D. PIUTANG KARTU PENGAWASAN

No	Tahun	Rincian	0 s/d 1 Tahun (Lancar)		> 1 s/d 2Tahun (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 Tahun (Diragukan)		>5 Tahun (Macet)	
			Piutang	0,50%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	2011	Heru Gunawan	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00
2	2011	Iming Vertical	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
3	2011	Yuliani Herwanti	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
4	2011	Sansan Saudaratex	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
5	2011	Sansan Saudaratex	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
6	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
7	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
8	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	230.000,00	230.000,00
9	2011	Menna Ria Sitorus	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
10	2011	Nandang Sumitra	-	-	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	1.140.000,00	1.140.000,00
		JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN	1.140.000,00							
		JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG KARTU PENGAWASAN 2023	1.140.000,00							

E. PIUTANG RETRIBUSI LABORATORIUM

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	2022	Piutang sampai dengan 2022							Rp 15.985.500,00	Rp 15.985.500,00
2	Agustus	Bapak Ace					Rp 971.000,00	Rp 485.500,00		
3	November	PT Sansan 2			Rp 1.287.000,00	Rp 128.700,00				
4	November	PT Sansan 2			Rp 1.070.000,00	Rp 107.000,00				
5	Desember	PT Logam Bima	Rp 1.257.000,00	Rp 6.285,00						
6	Desember	PT Sansan Saudaratex 1	Rp 1.275.000,00	Rp 6.375,00						
7	Desember	PT Sansan Saudaratex 1	Rp 1.070.000	Rp 5.350,00						
8	Desember	PT Sansan Saudaratex 5	Rp 712.500	Rp 3.562,50						
9	Desember	PT Sansan Saudaratex 5	Rp 1.070.000	Rp 5.350,00						
10	Desember	PT Sansan Saudaratex 2	Rp 1.287.000	Rp 6.435,00						
11	Desember	PT Sansan Saudaratex 2	Rp 1.070.000	Rp 5.350,00						
12	Desember	PT Indah Jaya	Rp 682.500	Rp 3.412,50						
JUMLAH			Rp 8.424.000,00	Rp 42.120,00	Rp 2.357.000,00	Rp 235.700,00	Rp 971.000,00	Rp 485.500,00	Rp 15.985.500,00	Rp 15.985.500,00
JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI LABORATORIUM			Rp 27.737.500,00							
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI LAB TAHUN 2023			Rp 16.748.820,00							

F. PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (BITC)

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	s.d 2022	Piutang BITC sd. 2022		Rp -		Rp -		Rp -	Rp 45.213.525,00	Rp 45.213.525,00
2	11. November	ACDI LT.1		Rp -	Rp 6.741.000,00	Rp 674.100,00				
3	11. November	ACDI LT.3		Rp -	Rp 2.205.000,00	Rp 220.500,00				
4	11. November	SMARTEK		Rp -	Rp 2.934.000,00	Rp 293.400,00				
5	12. Desember	ACDI LT.2	Rp 6.741.000,00	Rp 33.705,00		Rp -				
6	12. Desember	ACDI LT.4	Rp 2.205.000,00	Rp 11.025,00		Rp -				
7	12. Desember	SMARTEK	Rp 2.934.000,00	Rp 14.670,00		Rp -				
JUMLAH			Rp 11.880.000,00	Rp 59.400,00	Rp 11.880.000,00	Rp 1.188.000,00	Rp -	Rp -	Rp 45.213.525,00	Rp 45.213.525,00
JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI (BITC)			Rp 68.973.525,00							
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI BITC TAHUN 2023			Rp 46.460.925,00							

G. PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (RUSUNAWA)

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	sd. 2021	Rusunawa Kota Cimahi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.731.846.532,00	Rp 1.731.846.532,00
2	sd. 2022	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp 744.488.750,00	Rp 744.488.750,00
3	Januari 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	63.220.000,00	Rp 31.610.000,00		Rp -
4	Februari 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	50.107.500,00	Rp 25.053.750,00		Rp -
	Maret 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	34.470.000,00	Rp 17.235.000,00		Rp -
5	April 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	31.487.500,00	Rp 15.743.750,00	-	Rp -
6	Mei 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	27.712.500,00	Rp 13.856.250,00	-	Rp -
7	Juni 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	27.107.500,00	Rp 13.553.750,00	-	Rp -
8	Juli 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	23.602.500,00	Rp 11.801.250,00	-	Rp -
9	Agustus 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	28.115.000,00	Rp 14.057.500,00	-	Rp -
10	September 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	Rp -	32.402.500,00	Rp 16.201.250,00	-	Rp -
11	Oktober 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	48.567.500,00	Rp 4.856.750,00		Rp -	-	Rp -
12	November 2023	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	71.252.500,00	Rp 7.125.250,00		Rp -	-	Rp -
13	Desember 2023	Rusunawa Kota Cimahi	129.792.500,00	Rp 648.962,50		Rp -		Rp -	-	Rp -
Jumlah			Rp 129.792.500,00	Rp 648.962,50	Rp 119.820.000,00	Rp 11.982.000,00	Rp 318.225.000,00	Rp 159.112.500,00	Rp 2.476.335.282,00	Rp 2.476.335.282,00
Jumlah Piutang Retribusi Rusunawa Tahun 2023			Rp 3.044.172.782,00							
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa Tahun 2023			Rp 2.648.078.744,50							

Biaya Dibayar Di Muka
Per 31 Desember 2023

No	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	83.333.333,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
2	DINAS KESEHATAN	142.651.976,73	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
3	RSU DAERAH CIBABAT	8.054.883,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	954.776.694,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung; Belanja Sewa Tanah untuk Jalan; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Tanah untuk Jalan.
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	116.269.657,50	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	47.095.525,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal; Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja.
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	88.463.495,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
8	DINAS SOSIAL	33.518.716,67	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
9	DINAS TENAGA KERJA	169.566.633,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	103.241.719,08	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	16.023.241,67	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	484.188.858,34	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	91.992.693,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
14	DINAS PERHUBUNGAN	165.541.666,67	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.781.072,50	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	328.020.342,95	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	161.548.783,33	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
18	DINAS ARSIP DAERAH	42.728.153,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	56.658.733,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
20	SEKRETARIAT DAERAH	691.036.336,25	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III.
21	SEKRETARIAT DPRD	44.217.212,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
22	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.174.807,78	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
23	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	13.951.154,17	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	168.299.280,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.723.500,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
26	INSPEKTORAT KOTA	14.564.575,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang.
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	12.799.762,50	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	19.799.796,67	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	9.092.058,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK	41.875.895,84	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
JUMLAH		4.129.990.558,29	

Catatan:

Biaya di bayar dimuka dihitung secara bulanan

Jangka waktu asuransi/sewa: Tanggal 1 s.d 15 dihitung sebagai biaya asuransi /sewa bulan ini

Jangka waktu asuransi/sewa: Tanggal 16 s.d 31 dihitung sebagai biaya asuransi /sewa bulan berikutnya

**Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2023**

No	Penanggung Jawab	Data			Hasil Pemantauan													Bagian Lancar (Rp)	Penyisihan Piutang
	Nama	Kasus	Dokumen TP/TGR	SKTJM/SKP	TMT dan JT Terakhir	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa					
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A	KERUGIAN KEUANGAN DAERAH																		
1	Dedy Priyatna	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-2002	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.157-keu/2004	001/SKTJM/TPT GR/2011	15-12-2004 dan 15-12-2006	1	15.042.100,00	1	900.000,00	0	-	0	-	1	14.142.100,00	14.142.100,00	14.142.100,00		
2	Nur Asih Amari	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.159-keu/2010	SKTJM Th.2010	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	248.165.000,00	1	69.320.000,00	0	116.707.500,00	0		1	62.137.500,00	62.137.500,00	62.137.500,00		
3	Saeffulloh	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.158-keu/2010	SKTJM Th.2010	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	105.732.500,00	1	19.653.500,00	0	22.012.000,00	0	64.067.000,00	1	-	-	-		
4	H. Gozali	Kekuarangan Volume Pekerjaan	LHP BPK	-	2022	1	12.085.920,00	1	12.082.258,00	0		0		1	3.662,00	3.662,00	3.662,00		
5	Fiqi Rizqi Ramadhan	Kekuarangan Volume Pekerjaan	LHP BPK	-	2021	1	8.315.113,64	1	1.000.000,00	0		0		1	7.315.113,64	7.315.113,64	7.315.113,64		
6	Devriady, B.E.	Kekuarangan Volume Pekerjaan	LHP BPK	-	2021	1	11.217.471,99	1	3.000.000,00	0		0		1	8.217.471,99	8.217.471,99	8.217.471,99		
7	Sri Kuncoro	Kekuarangan Volume Pekerjaan	LHP BPK	-	2012	1	17.840.128,80	1	7.840.128,00	0		0		1	10.000.000,80	10.000.000,80	10.000.000,80		
8	Drs. Kosasih	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.155-Keu/2010	Tanpa SKTJM	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	40.537.900,00	1	16.000.000,00	0		0	-	1	24.537.900,00	24.537.900,00	24.537.900,00		
	JUMLAH A					8	458.936.134,43	8	129.795.886,00	0	138.719.500,00	0	64.067.000,00	8	126.353.748,43	126.353.748,43	126.353.748,43		
B	KERUGIAN KEHILANGAN ASET DAERAH																		
2	Setia Kusbaran	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2005	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.201-Keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	49.500.000,00	1	46.133.332,00	0	-	0	-	1	3.366.668,00	3.366.668,00	3.366.668,00		
4	Achmad Gunawan	Kehilangan Kendaraan-2005	Keputusan Walikota Cimahi 900/198-keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	84.800.000,00	1	41.000.000,00	0	-	1	34.800.000,00	1	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		
5	Dedi Dasikin	Kehilangan Kendaraan-2007	Keputusan Walikota Cimahi 900/387-keu/2009	001/SKTJM/TP-TGR/2010	09-12-2009 dan 09-12-2011	1	30.000.000,00	1	3.500.000,00	0	-	0	-	1	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00		
	JUMLAH B					3	164.300.000,00	3	90.633.332,00	0	-	1	34.800.000,00	3	38.866.668,00	38.866.668,00	38.866.668,00		
	JUMLAH (A+B)					11	623.236.134,43	11	220.429.218,00	0	138.719.500,00	1	98.867.000,00	11	165.220.416,43	165.220.416,43	165.220.416,43		

**Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat
Per 31 Desember 2023**

NO	PERUSAHAAN	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2023	PENYISIHAN PIUTANG	SALDO SETELAH PENYISIHAN
1	BPJS KESEHATAN	5.675.462.075,00	133.500.393.231,00	125.504.852.018,00	13.671.003.288,00	68.355.016,44	13.602.648.271,56
2	PT. JASA RAHARJA	86.908.388,00	1.617.189.291,00	1.617.189.291,00	86.908.388,00	22.036.520,00	64.871.868,00
3	BPJS KETENAGAKERJAAN	71.055.373,00	752.565.927,00	795.854.936,00	27.766.364,00	2.760.692,55	25.005.671,45
4	PT TASPEN	-	16.589.950,00	16.282.975,00	306.975,00	1.534,88	305.440,12
5	KEMENKES	-	9.644.983.600,00	6.629.281.500,00	3.015.702.100,00	110.328.902,00	2.905.373.198,00
6	RS MITRA KASIH	-	479.152.800,00	479.152.800,00	-	-	-
7	RS DUSTIRA	-	254.233.100,00	254.233.100,00	-	-	-
8	RS KASIH BUNDA	720.000,00	18.333.900,00	18.333.900,00	720.000,00	3.600,00	716.400,00
9	RSUP HASAN SADIKIN	55.000.000,00	917.760.000,00	887.980.000,00	84.780.000,00	423.900,00	84.356.100,00
10	RS IMC PADALARANG	-	5.040.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	144.000,00	1.296.000,00
11	RSAU dr.M. SALAMUN	9.380.000,00	86.738.900,00	92.768.900,00	3.350.000,00	16.750,00	3.333.250,00
12	RS AVISENA	4.680.000,00	11.520.000,00	16.200.000,00	-	-	-
13	RS SILOAM PURWAKARTA	-	255.420.000,00	201.125.000,00	54.295.000,00	271.475,00	54.023.525,00
14	RSUD CILILIN	-	21.855.000,00	21.855.000,00	-	-	-
15	RS LEMBANG	-	5.995.000,00	5.995.000,00	-	-	-
16	RS GRAHA MEDIKA	-	16.560.000,00	16.560.000,00	-	-	-
17	RS CAHYA KAWALUYAAN	-	203.905.000,00	203.905.000,00	-	-	-
18	RS CIKALONG WETAN	-	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-
19	RS ADVENT	-	335.000,00	335.000,00	-	-	-
20	RSGM UNJANI	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
T O T A L		5.903.205.836,00	147.809.750.699,00	136.766.684.420,00	16.946.272.115,00	204.342.390,87	16.741.929.724,13

**Rekapitulasi Piutang Dan Penyisihan BLUD Air Minum
Per 31 Desember 2023**

Piutang BLUD Air Minum

NO	KETERANGAN	PENAMBAHAN PIUTANG 2023	PENGURANGAN PIUTANG 2023	SALDO AKHIR PIUTANG 2023
	SALDO 31 DESEMBER 2023			1.819.279.600,00
1	JANUARI	Rp 443.582.900	Rp 417.339.900	Rp 1.845.522.600,00
2	FEBRUARI	Rp 425.803.800	Rp 452.252.000	Rp 1.819.074.400,00
3	MARET	Rp 425.417.700	Rp 437.983.200	Rp 1.806.508.900,00
4	APRIL	Rp 390.270.000	Rp 399.536.000	Rp 1.797.242.900,00
5	MEI	Rp 461.928.900	Rp 468.427.000	Rp 1.790.744.800,00
6	JUNI	Rp 418.631.900	Rp 459.375.600	Rp 1.750.001.100,00
7	JULI	Rp 435.077.200	Rp 428.870.200	Rp 1.756.208.100,00
8	AGUSTUS	Rp 461.441.600	Rp 425.457.700	Rp 1.792.192.000,00
9	SEPTEMBER	Rp 458.939.900	Rp 444.226.700	Rp 1.806.905.200,00
10	OKTOBER	Rp 462.757.700	Rp 447.988.100	Rp 1.821.674.800,00
11	NOVEMBER	Rp 424.357.700	Rp 444.717.800	Rp 1.801.314.700,00
12	DESEMBER	Rp 438.770.100	Rp 404.223.800	Rp 1.835.861.000,00
	JUMLAH	Rp 5.246.979.400	Rp 5.230.398.000	Rp 1.835.861.000,00

Penyisihan Piutang BLUD Air Minum

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	<i>sampai dg Des 22</i>	Rp 1.179.985.000,00	-	Rp -	-	Rp -	14.523.900,00	Rp 7.261.950,00	1.165.461.100,00	Rp 1.165.461.100,00
2	<i>Januari 2023</i>	Rp 12.952.100,00	-	Rp -	-	Rp -	12.952.100,00	Rp 6.476.050,00		Rp -
3	<i>Februari 2023</i>	Rp 9.630.100,00	-	Rp -	-	Rp -	9.630.100,00	Rp 4.815.050,00		Rp -
4	<i>Maret 2023</i>	Rp 10.720.200,00	-	Rp -	-	Rp -	10.720.200,00	Rp 5.360.100,00		Rp -
5	<i>Apr-23</i>	Rp 7.705.400,00	-	Rp -	-	Rp -	7.705.400,00	Rp 3.852.700,00	-	Rp -
6	<i>Mei 2023</i>	Rp 8.199.900,00	-	Rp -	-	Rp -	8.199.900,00	Rp 4.099.950,00	-	Rp -
7	<i>Juni 2023</i>	Rp 9.114.000,00	-	Rp -	-	Rp -	9.114.000,00	Rp 4.557.000,00	-	Rp -
8	<i>Juli 2023</i>	Rp 13.331.700,00	-	Rp -	-	Rp -	13.331.700,00	Rp 6.665.850,00	-	Rp -
9	<i>Agustus 2023</i>	Rp 17.778.200,00	-	Rp -	-	Rp -	17.778.200,00	Rp 8.889.100,00	-	Rp -
10	<i>Sep-23</i>	Rp 24.304.600,00	-	Rp -	-	Rp -	24.304.600,00	Rp 12.152.300,00	-	Rp -
11	<i>Oktober 2023</i>	Rp 38.397.000,00	-	Rp -	38.397.000,00	Rp 3.839.700,00			-	Rp -
12	<i>Nov-23</i>	Rp 64.972.700,00	-	Rp -	64.972.700,00	Rp 6.497.270,00			-	Rp -
13	<i>Desember 2023</i>	Rp 438.770.100,00	438.770.100,00	Rp 2.193.850,50					-	Rp -
Jumlah			Rp 438.770.100,00	Rp 2.193.850,50	Rp 103.369.700,00	Rp 10.336.970,00	Rp 128.260.100,00	Rp 64.130.050,00	Rp 1.165.461.100,00	Rp 1.165.461.100,00
Jumlah Piutang Air Minum Tahun 2023			Rp 1.835.861.000,00							
Jumlah Penyisihan Piutang Air Minum Tahun 2023			Rp 1.242.121.970,50							

**Saldo Akhir Persediaan
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Alat Listrik	Alat Tulis Kantor	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Cetak	Bahan Kimia	Bahan Komputer	Bahan Lainnya
1	DISDIK	-	-	-	-	832.500,00	-	-	-
2	DINKES	4.791.737,04	83.459.309,00	779.582.796,00	-	102.546.287,00	218.676.334,29	26.793.110,00	2.139.283.884,71
3	RSUD	2.208.660,00	105.458.832,74	399.995.087,32	-	388.698.474,00	3.348.196.000,00	-	-
4	DPUPR	-	-	-	516.014.950,00	-	-	-	-
5	DPKP	255.000,00	3.329.600,00	12.916.000,00	127.497.860,00	52.920.090,00	160.646.312,00	1.650.000,00	5.062.000,00
6	SATPOL	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPBD	-	-	4.836.000,00	12.378.000,00	-	-	-	-
8	DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKER	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DP3AP2KB	-	1.643.100,00	-	-	719.500,00	-	-	-
11	DISPANGTAN	-	3.310.800,00	25.684.498,00	-	48.891.700,00	41.898.836,00	1.848.000,00	6.775.900,00
12	DLH	-	977.000,00	163.254.870,00	-	5.651.680,00	-	348.000,00	-
13	DISDUK	-	-	-	-	161.485.800,00	-	6.790.980,00	-
14	DISHUB	1.201.978.839,00	-	-	-	231.549.869,82	-	-	-
15	DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DISBUDPAR	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DISARDA	-	-	-	-	11.400.000,00	-	-	-
19	DISDAGKOPERIN	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SETDA	3.181.250,00	1.321.291,00	(32.298.550,00)	-	79.770.106,00	-	268.000,00	-
21	SETWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BAPELITBANGDA	-	-	-	-	-	-	-	-
23	BAPENDA	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BPKAD	-	3.394.900,00	-	-	11.094.000,00	-	-	-
25	BKPSDMD	-	-	-	-	-	-	-	-
26	INSPEKTORAT	-	802.282,00	-	-	380.600,00	-	-	-
27	CIMAH UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CIMAH TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CIMAH SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BAKESBANGPOL	-	5.686.476,00	-	-	522.300,00	-	9.436.000,00	-
	Grand Total	1.212.415.486,04	209.383.590,74	1.353.970.701,32	655.890.810,00	1.096.462.906,82	3.769.417.482,29	47.134.090,00	2.151.121.784,71

**Saldo Akhir Persediaan
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Bahan/Bibit Tanaman	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Benda Pos	Isi Tabung Gas	Kertas dan Cover	Natura	Obat	Obat-obatan Lainnya	Pakan
1	DISDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINKES	-	-	2.490.000,00	-	24.422.550,00	-	2.803.906.021,61	-	-
3	RSUD	-	-	-	-	28.600,00	25.788.361,33	6.573.451.364,42	-	-
4	DPUPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DPKP	-	-	680.000,00	-	4.406.300,00	150.000,00	-	-	-
6	SATPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPBD	-	-	-	-	3.622.500,00	-	-	-	-
8	DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DP3AP2KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DISPANGTAN	32.349.000,00	87.390.000,00	840.000,00	654.000,00	9.932.900,00	162.000,00	11.093.500,00	88.316.937,00	21.530.000,00
12	DLH	-	-	1.770.000,00	-	47.800,00	-	-	-	-
13	DISDUK	-	-	-	-	12.905.400,00	-	-	-	-
14	DISHUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DISBUDPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DISARDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DISDAGKOPERIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SETDA	-	-	490.000,00	-	(11.094.083,00)	-	-	-	-
21	SETWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BAPELITBANGDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	BAPENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BPKAD	-	-	-	-	12.316.000,00	-	-	-	-
25	BKPSDMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	INSPEKTORAT	-	-	682.500,00	-	34.499,00	-	-	-	-
27	CIMAHI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CIMAHI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CIMAHI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BAKESBANGPOL	-	-	-	-	5.615.700,00	-	-	-	-
	Grand Total	32.349.000,00	87.390.000,00	6.952.500,00	654.000,00	62.238.166,00	26.100.361,33	9.388.450.886,03	88.316.937,00	21.530.000,00

**Saldo Akhir Persediaan
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Perabot Kantor	Perlengkapan Dinas	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Suku Cadang Alat Bengkel	Suku Cadang Alat Pertanian	Suku Cadang Lainnya	Suvenir/Cendera Mata	Grand Total
1	DISDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	832.500,00
2	DINKES	28.307.076,08	-	-	-	-	-	-	1.900.350,00	6.216.159.455,72
3	RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	10.843.825.379,81
4	DPUPR	-	-	-	7.096.539.200,00	-	-	-	-	7.612.554.150,00
5	DPKP	1.114.000,00	-	-	-	5.610.600,00	622.000,00	2.500.000,00	-	379.359.762,00
6	SATPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPBD	525.000,00	-	298.956.812,00	-	-	-	-	-	320.318.312,00
8	DINSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DISNAKER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DP3AP2KB	-	-	151.910.993,00	-	-	-	-	-	154.273.593,00
11	DISPANGTAN	2.205.000,00	-	459.166.766,00	-	-	-	-	-	842.049.837,00
12	DLH	80.544.200,00	9.765.000,00	-	-	-	-	-	-	262.358.550,00
13	DISDUK	1.024.000,00	-	-	-	-	-	-	4.650.000,00	186.856.180,00
14	DISHUB	-	-	-	-	-	-	-	-	1.433.528.708,82
15	DISKOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DISBUDPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DISARDA	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400.000,00
19	DISDAGKOPERIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SETDA	43.972.950,00	-	-	-	-	-	-	76.142.448,00	161.753.412,00
21	SETWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BAPELITBANGDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	BAPENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	26.804.900,00
25	BKPSDMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1.899.881,00
27	CIMAHI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CIMAHI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CIMAHI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BAKESBANGPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	21.260.476,00
	Grand Total	157.692.226,08	9.765.000,00	910.034.571,00	7.096.539.200,00	5.610.600,00	622.000,00	2.500.000,00	82.692.798,00	28.475.235.097,35

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
PD. Jati Mandiri
Per 31 Desember 2023

No	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aset (Rp)					Kewajiban dan Ekuitas (Rp)							
				Lancar	Penyertaan Jk Panjang (KSO)	Tetap	Lainnya	Total	Kewajiban			Ekuitas				
Jangka Pendek	Jangka Panjang	Total	Penyertaan Modal						Koreksi Nilai Aset Tetap	Koreksi Kas	Laba (Rugi) Kumulatif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	PD. Jati Mandiri Selisih pengakhiran penyertaan modal pada KSO Lingga Jati Bidang Usaha : Perdagangan, Informatika, Telematika, Air Bersih,	unaudited	-	1.322.644,00	-	38.773.988.854,00	-	38.775.311.498,00	4.250.246.180,00	-	4.250.246.180,00	51.351.000.000,00 6.270.623.559,00	174.075.107,00	1.322.644,00	(23.271.955.992,00)	28.254.441.759,00 6.270.623.559,00
Jumlah				1.322.644,00	-	38.773.988.854,00	-	38.775.311.498,00	4.250.246.180,00	-	4.250.246.180,00	57.621.623.559,00	174.075.107,00	1.322.644,00	(23.271.955.992,00)	34.525.065.318,00

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
PD. Jati Mandiri
Per 31 Desember 2023

No	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Pendapatan Usaha (Rp)	Beban Usaha (Rp)	Pendapatan Kotor (Rp)	Pendapatan Lain-lain (Rp)	Beban Lain-lain (Rp)	Laba (Rugi) Sebelum PKLB (Rp)	PKLB (Rp)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak (Rp)	Pajak Penghasilan (Rp)	Laba (Rugi) Bersih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10 = 7+8-9	11	12 = 10 - 11	13	14 = 12 - 13
1	PD. Jati Mandiri Bidang Usaha : Perdagangan, Informatika, Telematika, Air Bersih, Perumahan, dan jenis usaha lainnya	unaudited	-	-	7.846.127.999,00	(7.846.127.999,00)	-	(42.230.133,00)	(7.803.897.866,00)	-	(7.803.897.866,00)	-	(7.803.897.866,00)
	Jumlah			-	7.846.127.999,00	(7.846.127.999,00)	-	(42.230.133,00)	(7.803.897.866,00)	-	(7.803.897.866,00)	-	(7.803.897.866,00)

Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2023

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN							
Saldo Awal (Audited)	62.055.425.372,000	79.452.983.710,360	209.867.061.055,000	599.205.674,000	48.942.633.946,850	16.599.501.122,310	417.516.810.880,520
Penambahan :	-	9.094.706.092,000	30.702.239.438,310	-	2.658.468.720,000	417.729.896,000	42.873.144.146,310
Pengurangan :	-	3.776.415.638,000	7.351.752.740,000	-	64.000.000,000	16.268.778.122,310	27.460.946.500,310
Saldo Akhir	62.055.425.372,000	84.771.274.164,360	233.217.547.753,310	599.205.674,000	51.537.102.666,850	748.452.896,000	432.929.008.526,520
DINAS KESEHATAN							-
Saldo Awal (Audited)	7.870.642.001,000	48.654.512.686,610	47.311.454.031,000	898.890.120,000	61.713.000,000	156.992.184,000	104.954.204.022,610
Penambahan :	-	2.652.418.576,000	4.881.019.339,000	-	-	-	7.533.437.915,000
Pengurangan :	-	6.013.000,000	-	-	-	156.992.184,000	163.005.184,000
Saldo Akhir	7.870.642.001,000	51.300.918.262,610	52.192.473.370,000	898.890.120,000	61.713.000,000	-	112.324.636.753,610
RSUD CIBABAT							-
Saldo Awal (Audited)	28.362.300.000,000	275.701.287.879,490	128.993.130.638,200	7.127.838.639,000	12.025.600,000	-	440.196.582.756,690
Penambahan :	-	3.183.310.778,750	1.520.898.519,000	-	-	-	4.704.209.297,750
Pengurangan :	-	263.553.405,000	216.340.784,000	-	-	-	479.894.189,000
Saldo Akhir	28.362.300.000,000	278.621.045.253,240	130.297.688.373,200	7.127.838.639,000	12.025.600,000	-	444.420.897.865,440
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							-
Saldo Awal (Audited)	666.404.861.656,000	11.339.456.005,000	71.830.684.743,000	585.506.986.004,840	534.085.000,000	181.462.041.369,050	1.517.078.114.777,890
Penambahan :	7.538.543.729,614	338.593.450,000	9.413.413.520,000	98.735.042.204,900	-	-	116.025.592.904,514
Pengurangan :	31.427.011.453,016	-	273.526.000,000	10.046.977.166,000	-	179.395.576.569,050	221.143.091.188,066
Saldo Akhir	642.516.393.932,598	11.678.049.455,000	80.970.572.263,000	674.195.051.043,740	534.085.000,000	2.066.464.800,000	1.411.960.616.494,340
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							-
Saldo Awal (Audited)	127.698.970.377,000	12.350.696.157,760	37.906.672.764,000	142.511.091.022,000	16.621.893.815,000	258.145.030,000	337.347.469.165,760
Penambahan :	99.461.617.430,000	2.364.124.783,000	1.730.118.645,000	15.870.134.139,000	-	-	119.425.994.997,000
Pengurangan :	-	7.139.460,000	379.418.972,000	1.278.690.000,000	251.174.000,000	258.145.030,000	2.174.567.462,000
Saldo Akhir	227.160.587.807,000	14.707.681.480,760	39.257.372.437,000	157.102.535.161,000	16.370.719.815,000	-	454.598.896.700,760
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							-
Saldo Awal (Audited)	-	13.718.527.509,340	1.800.860.743,000	-	97.119.000,000	-	15.616.507.252,340
Penambahan :	-	2.753.166.200,000	-	-	-	-	2.753.166.200,000
Pengurangan :	-	9.025.000,000	-	-	-	-	9.025.000,000
Saldo Akhir	-	16.462.668.709,340	1.800.860.743,000	-	97.119.000,000	-	18.360.648.452,340
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	-	2.237.459.194,000	-	-	9.800.000,000	-	2.247.259.194,000
Penambahan :	-	885.234.274,000	-	-	-	-	885.234.274,000
Pengurangan :	-	131.000.000,000	-	-	-	-	131.000.000,000
Saldo Akhir	-	2.991.693.468,000	-	-	9.800.000,000	-	3.001.493.468,000

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							-
Penambahan :	-	-	-	-	-	-	-
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							-
Saldo Awal (Audited)	-	4.160.655.674,150	645.033.000,000	-	3.999.380,620	-	4.809.688.054,770
Penambahan :	-	683.620.400,000	-	-	88.034.100,000	-	771.654.500,000
Pengurangan :	-	408.577.250,000	-	-	88.034.100,000	-	496.611.350,000
Saldo Akhir	-	4.435.698.824,150	645.033.000,000	-	3.999.380,620	-	5.084.731.204,770
DINAS SOSIAL							-
Saldo Awal (Audited)	-	1.688.049.273,540	-	-	-	-	1.688.049.273,540
Penambahan :	-	310.767.250,000	-	-	-	-	310.767.250,000
Pengurangan :	-	5.143.250,000	-	-	-	-	5.143.250,000
Saldo Akhir	-	1.993.673.273,540	-	-	-	-	1.993.673.273,540
DINAS TENAGA KERJA							-
Saldo Awal (Audited)	-	1.831.099.100,000	-	-	5.790.000,000	-	1.836.889.100,000
Penambahan :	-	80.325.000,000	-	-	-	-	80.325.000,000
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir	-	1.911.424.100,000	-	-	5.790.000,000	-	1.917.214.100,000
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN							-
Saldo Awal (Audited)	14.252.840.000,000	4.549.834.886,410	12.438.498.256,100	4.149.277.550,000	270.975.000,000	-	35.661.425.692,510
Penambahan :	-	188.347.390,000	159.036.330,000	-	-	-	347.383.720,000
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir	14.252.840.000,000	4.738.182.276,410	12.597.534.586,100	4.149.277.550,000	270.975.000,000	-	36.008.809.412,510
DINAS LINGKUNGAN HIDUP							-
Saldo Awal (Audited)	21.755.801.960,000	37.071.492.007,760	11.937.610.263,000	5.522.787.791,000	8.800.000,000	49.225.000,000	76.345.717.021,760
Penambahan :	-	17.012.241.751,000	242.449.441,000	-	-	-	17.254.691.192,000
Pengurangan :	-	53.038.000,000	54.849.500,000	-	-	49.225.000,000	157.112.500,000
Saldo Akhir	21.755.801.960,000	54.030.695.758,760	12.125.210.204,000	5.522.787.791,000	8.800.000,000	-	93.443.295.713,760
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							-
Saldo Awal (Audited)	-	8.586.441.200,000	41.036.000,000	186.635.000,000	48.674.800,000	-	8.862.787.000,000
Penambahan :	-	1.213.664.000,000	-	-	3.250.000,000	-	1.216.914.000,000
Pengurangan :	-	-	-	-	3.250.000,000	-	3.250.000,000
Saldo Akhir	-	9.800.105.200,000	41.036.000,000	186.635.000,000	48.674.800,000	-	10.076.451.000,000
DINAS PERHUBUNGAN							-
Saldo Awal (Audited)	8.319.000.000,000	38.359.948.480,000	14.101.060.100,000	57.562.040.521,000	3.765.000,000	-	118.345.814.101,000
Penambahan :	-	3.170.543.680,000	-	17.736.249.211,000	-	-	20.906.792.891,000
Pengurangan :	-	493.475.000,000	-	303.640.000,000	-	-	797.115.000,000
Saldo Akhir	8.319.000.000,000	41.037.017.160,000	14.101.060.100,000	74.994.649.732,000	3.765.000,000	-	138.455.491.992,000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							-
Saldo Awal (Audited)	-	9.826.749.679,000	1.006.158.191,000	220.487.300,000	-	-	11.053.395.170,000
Penambahan :	-	521.669.918,000	263.295.135,000	-	36.746.550,000	33.347.214,000	855.058.817,000
Pengurangan :	-	950.000,000	188.708.918,000	-	36.746.550,000	-	226.405.468,000
Saldo Akhir	-	10.347.469.597,000	1.080.744.408,000	220.487.300,000	-	33.347.214,000	11.682.048.519,000
DINAS ARSIP DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	98.000.000,000	2.034.056.429,000	1.533.652.000,000	-	1.349.110.431,000	-	5.014.818.860,000
Penambahan :	-	290.278.300,000	-	-	208.156.275,000	-	498.434.575,000
Pengurangan :	-	1.500.000,000	-	-	-	-	1.500.000,000
Saldo Akhir	98.000.000,000	2.322.834.729,000	1.533.652.000,000	-	1.557.266.706,000	-	5.511.753.435,000
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN							-
Saldo Awal (Audited)	9.272.750.000,000	14.730.818.867,980	161.595.309.924,000	1.574.060.725,000	364.050.825,000	-	187.536.990.341,980
Penambahan :	-	472.379.547,000	148.043.122,000	-	-	-	620.422.669,000
Pengurangan :	-	-	148.043.122,000	-	-	-	148.043.122,000
Saldo Akhir	9.272.750.000,000	15.203.198.414,980	161.595.309.924,000	1.574.060.725,000	364.050.825,000	-	188.009.369.888,980
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							-
Saldo Awal (Audited)	-	6.593.063.618,000	-	-	4.440.000,000	23.992.481.800,000	30.589.985.418,000
Penambahan :	-	29.504.002.047,000	96.402.050.874,050	-	-	88.892.283.174,050	214.798.336.095,100
Pengurangan :	-	-	6.853.260.431,000	-	-	112.884.764.974,050	119.738.025.405,050
Saldo Akhir	-	36.097.065.665,000	89.548.790.443,050	-	4.440.000,000	-	125.650.296.108,050
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							-
Saldo Awal (Audited)	27.344.959.050,000	2.243.836.646,000	5.680.434.666,000	-	245.025.000,000	7.108.804.370,000	42.623.059.732,000
Penambahan :	7.700.643.256,000	154.085.880,000	14.329.941.491,000	-	-	1.996.243.356,000	24.180.913.983,000
Pengurangan :	79.619.856,000	-	636.000.000,000	-	-	9.025.427.870,000	9.741.047.726,000
Saldo Akhir	34.965.982.450,000	2.397.922.526,000	19.374.376.157,000	-	245.025.000,000	79.619.856,000	57.062.925.989,000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	-	3.317.504.631,590	-	-	9.800.000,000	-	3.327.304.631,590
Penambahan :	-	971.589.137,000	210.348.837,000	-	-	-	1.181.937.974,000
Pengurangan :	-	216.200.000,000	210.348.837,000	-	-	-	426.548.837,000
Saldo Akhir	-	4.072.893.768,590	-	-	9.800.000,000	-	4.082.693.768,590
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	-	10.035.756.581,000	-	-	226.000.000,000	-	10.261.756.581,000
Penambahan :	-	693.412.900,000	196.822.900,000	-	-	-	890.235.800,000
Pengurangan :	-	584.380.000,000	196.822.900,000	-	-	-	781.202.900,000
Saldo Akhir	-	10.144.789.481,000	-	-	226.000.000,000	-	10.370.789.481,000
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	-	5.426.330.677,660	167.033.430,000	-	91.863.000,000	-	5.685.227.107,660
Penambahan :	-	178.482.900,000	-	-	-	-	178.482.900,000
Pengurangan :	-	156.450.000,000	-	-	-	-	156.450.000,000
Saldo Akhir	-	5.448.363.577,660	167.033.430,000	-	91.863.000,000	-	5.707.260.007,660

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH								-
BKPSDMD								-
Saldo Awal (Audited)	-	2.247.531.604,000	-	-	-	-	-	2.247.531.604,000
Penambahan :	-	148.950.000,000	-	-	-	-	-	148.950.000,000
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir	-	2.396.481.604,000	-	-	-	-	-	2.396.481.604,000
SEKRETARIAT DAERAH								-
Saldo Awal (Audited)	6.164.015.740,000	33.859.368.286,780	58.328.132.188,220	175.060.800,000	500.749.922,000	-	-	99.027.326.937,000
Penambahan :	-	1.346.102.000,000	-	-	-	-	-	1.346.102.000,000
Pengurangan :	-	2.125.100.980,000	-	-	-	-	-	2.125.100.980,000
Saldo Akhir	6.164.015.740,000	33.080.369.306,780	58.328.132.188,220	175.060.800,000	500.749.922,000	-	-	98.248.327.957,000
SEKRETARIAT DPRD								-
Saldo Awal (Audited)	2.756.775.000,000	16.901.180.661,000	12.270.490.134,000	-	2.261.194.720,000	-	-	34.189.640.515,000
Penambahan :	-	1.302.460.000,000	198.000.000,000	-	-	-	-	1.500.460.000,000
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir	2.756.775.000,000	18.203.640.661,000	12.468.490.134,000	-	2.261.194.720,000	-	-	35.690.100.515,000
INSPEKTORAT KOTA								-
Saldo Awal (Audited)	-	2.100.531.301,000	4.542.127.425,000	-	-	-	-	6.642.658.726,000
Penambahan :	-	577.287.889,000	-	-	-	-	-	577.287.889,000
Pengurangan :	-	975.000,000	-	-	-	-	-	975.000,000
Saldo Akhir	-	2.676.844.190,000	4.542.127.425,000	-	-	-	-	7.218.971.615,000
KECAMATAN CIMAHI UTARA								-
Saldo Awal (Audited)	12.194.245.000,000	5.244.718.646,110	6.539.117.500,000	49.558.364,000	7.792.489,000	-	-	24.035.431.999,110
Penambahan :	-	380.731.000,000	-	-	-	-	-	380.731.000,000
Pengurangan :	1.715.000.000,000	-	-	-	-	-	-	1.715.000.000,000
Saldo Akhir	10.479.245.000,000	5.625.449.646,110	6.539.117.500,000	49.558.364,000	7.792.489,000	-	-	22.701.162.999,110
KECAMATAN CIMAHI TENGAH								-
Saldo Awal (Audited)	10.506.345.128,000	8.779.389.379,280	11.789.085.581,000	21.263.637,000	3.896.246,000	-	-	31.099.979.971,280
Penambahan :	-	802.423.200,000	-	-	-	-	-	802.423.200,000
Pengurangan :	467.250.000,000	-	1.040.000.000,000	-	-	-	-	1.507.250.000,000
Saldo Akhir	10.039.095.128,000	9.581.812.579,280	10.749.085.581,000	21.263.637,000	3.896.246,000	-	-	30.395.153.171,280
KECAMATAN CIMAHI SELATAN								-
Saldo Awal (Audited)	15.227.905.000,000	7.591.878.659,000	6.767.924.956,000	189.574.684,750	9.812.492,000	-	-	29.787.095.791,750
Penambahan :	-	571.555.000,000	120.319.565,000	-	-	-	-	691.874.565,000
Pengurangan :	1.764.000.000,000	-	-	-	-	-	-	1.764.000.000,000
Saldo Akhir	13.463.905.000,000	8.163.433.659,000	6.888.244.521,000	189.574.684,750	9.812.492,000	-	-	28.714.970.356,750
KESBANGPOLL								-
Saldo Awal (Audited)	2.075.500.000,000	1.002.110.596,000	-	-	3.446.000,000	-	-	3.081.056.596,000
Penambahan :	-	153.614.523,000	-	-	-	-	-	153.614.523,000
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir	2.075.500.000,000	1.155.725.119,000	-	-	3.446.000,000	-	-	3.234.671.119,000
	1.101.608.259.390,600	745.398.421.910,570	950.061.492.540,880	927.006.876.221,490	74.249.906.662,470	2.927.884.766,000		3.801.252.841.492,010
Saldo Awal (Audited)	1.022.360.336.284,000	671.637.270.027,820	807.092.567.588,520	806.294.757.832,590	71.698.455.667,470	229.627.190.875,360		3.608.710.578.275,760
Penambahan :	114.700.804.415,614	82.000.087.865,750	160.517.997.156,360	132.341.425.554,900	2.994.655.645,000	91.339.603.640,050		583.894.574.277,674
Pengurangan :	35.452.881.309,016	8.238.935.983,000	17.549.072.204,000	11.629.307.166,000	443.204.650,000	318.038.909.749,410		391.352.311.061,426
Saldo Akhir (Reviewed)	1.101.608.259.390,600	745.398.421.910,570	950.061.492.540,880	927.006.876.221,490	74.249.906.662,470	2.927.884.766,000		3.801.252.841.492,010

Rekapitulasi Laporan Aset Tetap BOS Tahun 2023

No. Urut	Nama Sekolah	BELANJA MODAL ASET TETAP			Jumlah Belanja Modal Bos
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap lainnya	
1	SD NEGERI CIBEBER 1	39.257.000		8.410.100	47.667.100,00
2	SD NEGERI CIBEBER 2	37.674.623		6.170.400	43.845.023,00
3	SD NEGERI CIBEBER 3	16.948.000		7.110.100	24.058.100,00
4	SD NEGERI CIBEBER 4	18.803.500		10.840.500	29.644.000,00
5	SD NEGERI CIBEBER MANDIRI 1	69.788.270		21.332.200	91.120.470,00
6	SD NEGERI CIBEBER MANDIRI 2	120.462.500		9.189.000	129.651.500,00
7	SD NEGERI CIBEUREUM 5	21.067.000		14.047.200	35.114.200,00
8	SD NEGERI CIBEUREUM 7	1.320.000		7.409.100	8.729.100,00
9	SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 1	93.660.000		46.542.200	140.202.200,00
10	SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 2	123.812.990		55.916.300	179.729.290,00
11	SD NEGERI CIBODAS 1	3.107.000		16.636.000	19.743.000,00
12	SD NEGERI CIBODAS 2	8.163.000		5.324.100	13.487.100,00
13	SD NEGERI CIBODAS 3	10.388.000		12.494.300	22.882.300,00
14	SD NEGERI CIREUNDEU	1.456.000		4.817.000	6.273.000,00
15	SD NEGERI KIHAPIT	69.201.170		25.966.100	95.167.270,00
16	SD NEGERI LEUWIGAJAH 2	77.716.850		16.294.600	94.011.450,00
17	SD NEGERI LEUWIGAJAH 3	29.529.500		35.200.000	64.729.500,00
18	SD NEGERI LEUWIGAJAH 5	76.793.000		14.942.800	91.735.800,00
19	SD NEGERI LEUWIGAJAH 6	58.313.303		15.508.200	73.821.503,00
20	SD NEGERI LEUWIGAJAH MANDIRI 1	27.672.000		39.194.000	66.866.000,00
21	SD NEGERI LINGGABUDI	53.697.000		5.122.800	58.819.800,00
22	SD NEGERI MELONG ASIH 4	29.271.000		7.442.600	36.713.600,00
23	SD NEGERI MELONG ASIH 5	14.800.000		5.124.800	19.924.800,00
24	SD NEGERI MELONG ASIH 7	10.899.500		13.089.900	23.989.400,00
25	SD NEGERI MELONG ASIH 8	26.406.000		12.546.500	38.952.500,00
26	SD NEGERI MELONG MANDIRI 1	65.095.899		31.385.900	96.481.799,00
27	SD NEGERI MELONG MANDIRI 2	65.779.400		25.936.000	91.715.400,00
28	SD NEGERI MELONG MANDIRI 3	51.899.170		11.518.800	63.417.970,00
29	SD NEGERI MELONG MANDIRI 4	63.849.000		29.337.300	93.186.300,00
30	SD NEGERI MELONG MANDIRI 5	49.958.170		19.292.800	69.250.970,00
31	SD NEGERI MELONG MANDIRI 6	108.938.000		37.701.300	146.639.300,00
32	SD NEGERI MELONG MANDIRI 7	28.573.680		19.965.000	48.538.680,00
33	SD NEGERI RANCABENTANG 3	95.636.000		21.404.100	117.040.100,00
34	SD NEGERI TUNAS HARAPAN	4.342.000		6.210.700	10.552.700,00
35	SD NEGERI TUNAS MEKAR	622.000		6.272.900	6.894.900,00
36	SD NEGERI UTAMA 3	10.652.000		446.500	11.098.500,00
37	SD NEGERI UTAMA 6	46.511.000		7.888.000	54.399.000,00
38	SD NEGERI UTAMA 7	9.232.000		7.730.600	16.962.600,00
39	SD NEGERI UTAMA MANDIRI 1	67.680.999		26.119.900	93.800.899,00
40	SD NEGERI BAROS MANDIRI 1	29.561.000		19.623.300	49.184.300,00
41	SD NEGERI BAROS MANDIRI 2	69.094.000		8.138.200	77.232.200,00
42	SD NEGERI BAROS MANDIRI 3	29.100.000		25.582.200	54.682.200,00
43	SD NEGERI BAROS MANDIRI 4	7.048.500		35.438.800	42.487.300,00
44	SD NEGERI BAROS MANDIRI 5	91.031.620		20.673.100	111.704.720,00
45	SD NEGERI BAROS MANDIRI 6	35.657.848		17.900.100	53.557.948,00
46	SD NEGERI BAROS MANDIRI 7	25.740.000		6.151.600	31.891.600,00
47	SD NEGERI BINA HARAPAN	25.253.000		2.506.800	27.759.800,00
48	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH	1.672.000		5.615.000	7.287.000,00
49	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH MANDIRI 1	75.196.000		29.824.000	105.020.000,00
50	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH MANDIRI 2	-		17.823.200	17.823.200,00
51	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 1	61.801.000		54.342.800	116.143.800,00
52	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 2	28.737.000		44.779.500	73.516.500,00
53	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 3	11.530.250		12.787.900	24.318.150,00
54	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 4	16.153.900		17.704.600	33.858.500,00
55	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 5	51.337.000		43.484.200	94.821.200,00
56	SD NEGERI CIMINDI 2	23.005.000		2.996.400	26.001.400,00
57	SD NEGERI CIMINDI 4	24.824.951		1.579.800	26.404.751,00

No. Urut	Nama Sekolah	BELANJA MODAL ASET TETAP			Jumlah Belanja Modal Bos
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap lainnya	
58	SD NEGERI CIMINDI 5	14.813.000		3.798.000	18.611.000,00
59	SD NEGERI HARAPAN 1	-		13.720.900	13.720.900,00
60	SD NEGERI HARAPAN 2	-		7.691.000	7.691.000,00
61	SD NEGERI KARANGMEKAR MANDIRI 1	123.959.999		27.667.400	151.627.399,00
62	SD NEGERI KARANGMEKAR MANDIRI 2	13.594.000		-	13.594.000,00
63	SD NEGERI KARYA BAKTI	-		9.932.700	9.932.700,00
64	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 1	81.473.000		27.477.700	108.950.700,00
65	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 2	18.536.999		18.088.000	36.624.999,00
66	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 3	9.776.000		29.410.700	39.186.700,00
67	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 4	23.266.000		18.091.400	41.357.400,00
68	SD NEGERI SETIAMANAH MANDIRI 1	96.675.000		59.757.000	156.432.000,00
69	SD NEGERI SINDANGSARI	90.228.000		11.919.700	102.147.700,00
70	SD NEGERI SUKAMAJU 1	14.468.000		7.483.220	21.951.220,00
71	SD NEGERI SUKAMAJU 2	19.610.000		3.764.100	23.374.100,00
72	SD NEGERI SUKANAMPA	31.456.150		15.867.000	47.323.150,00
73	SD NEGERI CIBABAT 2	35.009.550		4.640.600	39.650.150,00
74	SD NEGERI CIBABAT 4	22.230.000		9.135.500	31.365.500,00
75	SD NEGERI CIBABAT 5	26.645.450		11.009.100	37.654.550,00
76	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 1	112.341.389		27.371.500	139.712.889,00
77	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 2	9.142.000		40.007.400	49.149.400,00
78	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 3	75.924.000		54.436.000	130.360.000,00
79	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 4	41.233.000		-	41.233.000,00
80	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 5	48.579.150		19.548.900	68.128.050,00
81	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 1	47.213.830		96.474.300	143.688.130,00
82	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 2	60.951.093		11.610.000	72.561.093,00
83	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 3	36.130.998		10.260.600	46.391.598,00
84	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 4	-		3.382.000	3.382.000,00
85	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 1	41.949.000		56.654.400	98.603.400,00
86	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 2	88.780.000		68.582.000	157.362.000,00
87	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 3	34.251.000		34.952.700	69.203.700,00
88	SD NEGERI PAMBUDI DHARMA	16.523.000		-	16.523.000,00
89	SD NEGERI PASIRKALIKI MANDIRI 1	32.182.750		14.508.800	46.691.550,00
90	SD NEGERI PASIRKALIKI MANDIRI 2	115.912.950		47.776.500	163.689.450,00
91	SD NEGERI SETIAWARGA	62.713.000		-	62.713.000,00
	Jumlah SD	3.761.287.901	-	1.799.851.220	5.561.139.121,00
1	SMP NEGERI 1 CIMAHI	20.292.000		52.525.000	72.817.000,00
2	SMP NEGERI 2 CIMAHI	7.854.500		4.752.000	12.606.500,00
3	SMP NEGERI 3 CIMAHI	15.148.580		81.231.000	96.379.580,00
4	SMP NEGERI 4 CIMAHI	31.422.500		94.243.700	125.666.200,00
5	SMP NEGERI 5 CIMAHI	54.902.000		66.066.200	120.968.200,00
6	SMP NEGERI 6 CIMAHI	22.534.998		87.769.000	110.303.998,00
7	SMP NEGERI 7 CIMAHI	70.378.587		59.568.400	129.946.987,00
8	SMP NEGERI 8 CIMAHI	46.510.000		65.976.100	112.486.100,00
9	SMP NEGERI 9 CIMAHI	28.695.350		71.220.000	99.915.350,00
10	SMP NEGERI 10 CIMAHI	53.907.998		3.859.600	57.767.598,00
11	SMP NEGERI 11 CIMAHI	57.388.299		37.817.500	95.205.799,00
12	SMP NEGERI 12 CIMAHI	34.074.000		50.266.700	84.340.700,00
13	SMP NEGERI 13 CIMAHI	18.907.996		15.637.200	34.545.196,00
14	SMP NEGERI 14 CIMAHI	59.039.231		64.728.100	123.767.331,00
15	SMP NEGERI 15 CIMAHI	38.252.402		30.173.500	68.425.902,00
16	SMP NEGERI 16 CIMAHI	22.855.250		37.413.500	60.268.750,00
	Jumlah SMP	582.163.691	-	823.247.500	1.405.411.191,00
	Total Jumlah	4.343.451.592	-	2.623.098.720	6.966.550.312,00

DATA PERUMAHAN YANG MASIH MEMERLUKAN VERIFIKASI KEBERADAAN, PENGELOLAAN DAN LUASAN PSU

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
1	Bukit Permana Residence	Ma'ruf Dahlan	IR. ROCHMAH.MS C & DRG. UUN CH PAGGI	Kp. Permana Utara RT 005 RW 006	Cimahi Utara	Citeureup	14.902	4.471	434	3.118,20	3.021,80	18	55	Telah menyerahkan PSU namun belum BAST Administrasi
2	Perumahan Cipageran Asri	Ir. Ucu Safrudin	PT. Gracia Griya Kencana	Jl. Pasir Kiara RT 05 RW 16	Cimahi Utara	Cipageran	68.000	20.400	336	12.600	63.000	17	497	Site Plan Perumahan
3	Town House Jl. Sisingamangaraja RT 002 RW 003	Sugianto	PT. Remi Investama	Jl. Sisingamangaraja RT 002 RW 003	Cimahi Tengah	Setiamanah	22.894	6.868	122	4.578,80	2.289,40	12	24	Site Plan Perumahan
4	Citra Asri Permai	Dr. Hendra Setiaputra	Dr. Hendra Setiaputra	Citra Asri Permai RT 005 RW 009	Cimahi Utara	Pasirkaliki	3.750	1.125	50	750	375	5	0	Belum Terverifikasi
5	Nusa Hijau	Hj. Kecih Ratnaningsih	PT. Nusa Sumatera Indah	Jl. Encep Kartawiria RT 006 RW 018	Cimahi Utara	Citeureup	24.809	7.443	265	5.706,70	5.872,30	26	464	Site Plan Perumahan
6	Blok Babakan Loa Kulon RT 002 RW 005	Ir. Kusnadi Surya Chandra	Ir. Kusnadi Surya Chandra	Blok Babakan Loa Kulon RT 002 RW 005	Cimahi Utara	Pasirkaliki	3.750	1.125	50	750	375	5	0	Belum Terverifikasi
7	Kamp. Sentral RT 001 RW 005	Chandra Sutawijaya	Chandra Sutawijaya	Kamp. Sentral RT 001 RW 005	Cimahi Utara	Cibabat	3.750	1.125	50	750	375	5	0	Belum Terverifikasi
8	Oliver Richard - William Mambu	Derajat Sukma Amperawan	Oliver Richard - William Mambu	Jl. Sentral/Blok Cibelentuk RT 001 RW 005	Cimahi Utara	Cibabat	3.750	1.125	50	750	375	5	19	Site Plan Perumahan
9	PT. Mega Sentra Development	Drs. Robert Moniaga	PT. Mega Sentra Development	Jl. HMS Mintaredja RT 003 RW 003	Cimahi Tengah	Baros	7.500	2.250	100	1.500	750	10	83	Site Plan Perumahan
10	Jl. Padat Karya Blok Pasir Kuntul RT 002 RW 001	Ir. Maktal S. Nugraha	Ir. Maktal S. Nugraha	Jl. Padat Karya Blok Pasir Kuntul RT 002 RW 001	Cimahi Selatan	Cibeber	3.750	1.125	50	750	375	5	0	Belum Terverifikasi
11	Pancanaka Royal Garden	Bambang Hariyanto, Ir. M.Si	PT. Pancanaka Swasakti	Kp. Ciuyah, Jl. Sukarasa RT 004 RW 012	Cimahi Utara	Citeureup	46.290	13.887	559	9.668,60	8.693,40	56	102	Site Plan Perumahan

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
12	Citra Alam Town House	Uus Rusmana	Sri Siti Mungar (Alm) dan RH. Dadang Sukarno	Jl. Danurasmaya RT 003 RW 007	Cimahi Utara	Cibabat	52.107,49	15.632	278	10.421,50	5.210,75	28	62	Site Plan Perumahan
13	Dream Hills Residence	H. Bemby Djuanda	PT. Cipta Griya Asri	Blok Pasir Kuntul / Pasir Haris RT 002 RW 001	Cimahi Selatan	Cibeber	48.120	14.436	443	16.524	8.312	44	66	Site Plan Perumahan
14	PT. Sanghyang Dayahusu	Ir. Titto Lasmana Hudaya	PT. Sanghyang Dayahusu	Kp. Jati Nunggal RT 005 RW 004	Cimahi Selatan	Cibeber	7.500	2.250	100	1.500	750	10	0	Belum Terverifikasi
15	Jl. Melong Asih Dalam RT 006 RW 016	Moh. Wahyu Priharta	Moh. Wahyu Priharta	Jl. Melong Asih Dalam RT 006 RW 016	Cimahi Selatan	Melong	3.000	900	40	600	300	4	0	Belum Terverifikasi
16	Jl. Sangkuriang Barat II RT 004 RW 020	Dede Dardjat	Dede Dardjat	Jl. Sangkuriang Barat II RT 004 RW 020	Cimahi Utara	Cipageran	3.000	900	40	600	300	4	0	Belum Terverifikasi
17	Kiara Green Residence	Herdiansyah	Herdiansyah	Jl. Danurasmaya RT 003 RW 007	Cimahi Utara	Cibabat	19.264,50	5.779	336	4.244,90	3.858,10	22	19	Site Plan Perumahan
18	Ranting Pesona	Andrew Purnomo	Andrew Purnomo	Jl. Encep Kartawiria RT 001 RW 006	Cimahi Utara	Citeureup	13.240	3.972	118	3.985,70	3.350,30	12	46	Site Plan Perumahan
19	PT. Sinar Cakra Laksana	Karna Puji	PT. Sinar Cakra Laksana	Jl. Kamarung RT 007 RW 004	Cimahi Utara	Citeureup	1.800	540	24	360	180	2	7	Site Plan Perumahan
20	Jl. Encep Kartawiria RT 002 RW 018	Tri Suwarno	Tri Suwarno	Jl. Encep Kartawiria RT 002 RW 018	Cimahi Utara	Citeureup	3.000	900	40	600	300	4	0	Belum Terverifikasi
21	Alam Asri Residence	Hj. Kecih Ratnaningsih	PT. Kembar Mas	Blok Ciawitali RT 001 RW 019	Cimahi Utara	Citeureup	24.976,50	7.493	133	4.995,30	2.497,65	13	118	Site Plan Perumahan
22	Cluster Karangmekar Regency	Nanang Suharna	-	Jl. Lurah RT 001 RW 017	Cimahi Tengah	Karang Mekar	1.680	504	1.680	541,60	335,40	2	7	Site Plan Perumahan
23	Cluster Jl. Budi RT 003 RW 003	Subchi, S.E	Subchi, S.E	Jl. Budi RT 003 RW 003	Cimahi Utara	Pasirkaliki	1.554,20	466	19	273,50	319,50	2	23	Site Plan Perumahan

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
24	Orchard Residence	Wahyu Utomo	Orchard Residence	Jl. Kolonel Masturi RT 001 RW 013	Cimahi Utara	Cipageran	10.000	3.000	120	2.000	1.000	12	41	Site Plan Perumahan
25	Jl. Kamarung RT 003 RW 005	Samsul Muarif, S.T	Samsul Muarif, S.T	Jl. Kamarung RT 003 RW 005	Cimahi Utara	Citeureup	3.000	900	40,00	600	300	4	0	Belum Terverifikasi
26	Green Hills Parahyangan	Didin Wahyudin, S.H	PT. Addien Putra Perkasa	Jl. Lapang Tembak RT 009 RW 006	Cimahi Tengah	Padasuka	24.160	7.248		4.734,30	8.010,70	5	82	Site Plan Perumahan
27	Jl. Ibu Ganirah Blok Curug RT 002 RW 006	Mulyanto	Mulyanto	Jl. Ibu Ganirah Blok Curug RT 002 RW 006	Cimahi Selatan	Cibeber	1.011	303	12	205,10	195,90	1	0	Belum Terverifikasi
28	eL Verde	Norman Nurdjaman, SE., MM	PT. Bintang Nusantara Realty	Kp. Singkur Mulya RT 002 RW 012	Cimahi Utara	Pasirkaliki	2.036	611	23	433,38	476,13	2	129	Site Plan Perumahan
29	Grand Cimahi City	Taufik Yudha Perdana	Taufik Yudha Perdana	Blok Ciawitali / Blok Permana RT 002 RW 013	Cimahi Utara	Citeureup	7.298,10	2.189	60	1.493	2.800	6	226	Site Plan Perumahan
30	Santiningsih Residence	Watnoningsih	Watnoningsih	Komp. Peda Baru RT 008 RW 019	Cimahi Tengah	Padasuka	35.411,52	10.623	189	7.082,30	3.541,15	19	26	Site Plan Perumahan
31	Bumi Parahyangan Cimahi	Djudju Suryana	PT. Anugerah Surya Cipta Mandiri	Jl. Danurasmaya RT 003 RW 007	Cimahi Utara	Cibabat	41.808	12.542	523	6.911,40	8.765,60	52	283	Site Plan Perumahan
32	Perumahan Hunian Lestari Asri	Inge Susanti	Perumahan Hunian Lestari Asri	Jl. Permana Timur RT 004 RW 006	Cimahi Utara	Citeureup	4.247	1.274	50	843,90	910,50	5	19	Site Plan Perumahan
33	G-land Cipageran Residence	Rambert Gandaputra	Rambert Gandaputra	Jl. Konconegoro RT 002 RW 016	Cimahi Utara	Cipageran	3.889,90	1.167	46	745,90	861,10	5	19	Site Plan Perumahan
34	D'Green Aqila	Drs. Bambang Prasetyo Soenarko	Drs. Bambang Prasetyo Soenarko	Jl. Kol. Masturi RT 001 RW 014	Cimahi Utara	Cipageran	20.905	6.272	241	4.522,35	4.341,65	24	86	Site Plan Perumahan
35	Lumbung Padi Merah	Thio Silvani	Thio Silvani	Blok Ciawitali RT 007 RW 009	Cimahi Utara	Citeureup	8.274	2.482	94	1.659	1.903,60	9	38	Site Plan Perumahan

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
36	Jl. Kebon Kelapa RT 001 RW 003	Crhistian Gunawan	Crhistian Gunawan	Jl. Kebon Kelapa RT 001 RW 003	Cimahi Tengah	Setiamanah	7.551,50	2.265	90	1.508,80	1.522,30	9	0	Belum Terverifikasi
37	Mahkota Singosari Residence	Andrias Chandra Saputra	PT. Mahkota Asha Saputra	Kp. Melong RT 006 RW 007	Cimahi Selatan	Melong	25.741,78	7.723	137	5.148,36	2.574,18	14	11	Site Plan Perumahan
38	Pesona Asih Village	Eka Ahmad Fauzi	Eka Ahmad Fauzi	Kp. Tegal Kawung RT 004 dan 006 RW 008	Cimahi Utara	Cipageran	2.808	842	34	551,40	561,60	3	17	Site Plan Perumahan
39	Cluster Santosa Mandiri	Danny	Cluster Santosa Mandiri	Jl. Cibeber (Gg. H. Khodir) RT 002 RW 005	Cimahi Selatan	Cibeber	77.548,09	23.264	414	15.509,62	7.754,81	41	12	Site Plan Perumahan
40	Nuansa Asri	Djudju Suryana	PT. Karunia Abadi Nuansa Indah	Jl. Ciawitali RT 007 RW 009	Cimahi Utara	Citeureup	12.459,15	3.738	66	2.491,83	1.245,92	7	77	Site Plan Perumahan
41	Flamingo Hill Regency	Pamungkas Agung Nugroho	PT. Grahaland Nusantara	Jl. Padat Karya RT 001 RW 001	Cimahi Selatan	Cibeber	50.902	15.271	451	11.110,20	17.261,80	45	151	Site Plan Perumahan
42	Cimenteng Asri (Anabil Cluster)	Hannas Nainggolan	Hannas Nainggolan	Jl. Cimenteng RT 003 RW 011	Cimahi Utara	Cipageran	2.359	708	25	494	613	3	8	Site Plan Perumahan
43	Cluster Cahaya Melong	Endi Roswendi	Cluster Cahaya Melong	Jl. Bomber Raya Komplek Melong Green Garden RT 005 RW 029	Cimahi Selatan	Melong	33.000,62	9.900	176	6.600,12	3.300,06	18	16	Site Plan Perumahan
44	Jl. Melong Asih RT 001 RW 006	Kiky Gunawan	-	Jl. Melong Asih RT 001 RW 006	Cimahi Selatan	Melong	1.200	360	16	240	120	2	0	Belum Terverifikasi
45	Cluster Jl. Tirta Kencana II RT 012 RW 008	Mila Kamila	-	Jl. Tirta Kencana II RT 012 RW 008	Cimahi Utara	Cibabat		0	24	0	0	2	11	Site Plan Perumahan
46	Kamarung Regency	Karna Puji	PT. Mandalay Burpee Kingdom	Jl. Kamarung Nomor 50 RT 007 RW 004	Cimahi Utara	Citeureup	7.291	2.187	68	1.519,30	2.351,70	7	23	Site Plan Perumahan
47	Jl. Cibogo RT 004 RW 007	T. Komara Klana Pasti	-	Jl. Cibogo RT 004 RW 007	Cimahi Selatan	Leuwigajah	669	201	14	137,90	140,10	1	0	Belum Terverifikasi

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
48	Cluster Cibogo Asri	Mochamad Darmawan	Cluster Cibogo Asri	Kp. Cibogo RT 005 RW 007	Cimahi Selatan	Leuwigajah	1.875	563	25	318,40	327,30	2	14	Site Plan Perumahan
49	Royal Orchid Villa	M. Arief Gunawan Sungkar	PT. Bumindo Abadi Mandiri	Jl. Rd. Guru Putro / Jl. Karya Bhakti (Pasir Kiara) RT 005 RW 016	Cimahi Utara	Cipageran	21.267,30	6.380	113	4.253,46	2.126,73	11	113	Site Plan Perumahan
50	Griya Asri	Sri Ratnawati	PT. Nur Mandiri Jaya Property	Jl. Sapta Jaya RT 002 dan 005 RW 010	Cimahi Selatan	Leuwigajah	7.250,50	2.175	39	1.450,10	725,05	4	1	Site Plan Perumahan
51	Kolmas Regency	FX. Dermawan Saputra	-	Jl. Kolonel Masturi RT 005 RW 022	Cimahi Utara	Cipageran	36.644	10.993	195	7.328,80	3.664,40	20	84	Site Plan Perumahan
52	Cluster Cipageran	Adang Wahyu	PT. Tri Karya Properti	Blok Cileutik RT 001 RW 014	Cimahi Utara	Cipageran	7.020	2.106	140	1.513,80	1.610,20	8	36	Site Plan Perumahan
53	Setra Mekar Residence	Eric Yanata	-	Jl. Babakan Loa Wetan RT 003 RW 003	Cimahi Utara	Pasirkaliki	4.030	1.209	21	806	403	6	7	Site Plan Perumahan
54	Kota Mas	Hj. Kecih Ratnaningsih	PT. Kembar Mas	Jl. Kolonel Masturi	Cimahi Utara	Citeureup	126.295,30	37.889	674	25.259,06	12.629,53	67	619	Site Plan Perumahan
55	Taman Pondok Mas Indah	Hj. Kecih Ratnaningsih	PT. Kembar Mas	Jl. Baros	Cimahi Selatan	Leuwigajah	40.000	12.000	7	34.603,13	5.034,88	1	356	Site Plan Perumahan
56	Setra Permai Residence	Agih Harmoko Gunawan	Setra Permai Residence	Jl. Budi RT002 RW 005	Cimahi Utara	Pasirkaliki	1.430	429	17	276	287	2	9	Site Plan Perumahan
57	Siti Kuspartinah	Sugianto	Siti Kuspartinah	Jl.Sisingamangaraja RT. 002 RW. 003	Cimahi Selatan	Setiamanah	1.500	450	20	300	150	2	19	Site Plan Perumahan
58	Nanang Suharna	RumantinaSitumorang	Rumantina Situmorang	Jl. Lurah RT. 001 RW. 017	Cimahi Tengah	Karang Mekar	1.500	450	20	300	150	2	7	Site Plan Perumahan
59	Amara Town House	Nurcholis Hakim	PT. Mitra Karya Prospekta	Jl. K.H. Usman Dhomiri RT. 001 RW. 003	Cimahi Tengah	Padasuka	1.420	426	16	303,70	292,30	2	6	Site Plan Perumahan

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
60	Cluster Budi Asri	Muhammad Iskandar	Muhammad Iskandar	Jl. Budi Asri Raya RT. 001 RW. 008	Cimahi Utara	Cibabat	2.372	712	30	394,50	474,50	3	13	Site Plan Perumahan
61	Town House Jl. Gn.Rahayu I No 7 RT. 003 RW. 011	Antonius T. Chorman	Antonius T. Chorman	Jl. Gn.Rahayu I No 7 RT. 003 RW. 011	Cimahi Utara	Pasirkaliki	1.852	556	56	436,20	478,80	2	2	Site Plan Perumahan
62	Setra Mas	Wawa Husen		Jl. Encep Kartawiria (dibawah Perumahan Nusa Hijau)	Cimahi Utara	Citeureup	41.814,52	12.544	223	8.362,92	4.181,46	22	55	Site Plan Perumahan
63	Taman Bukit Cibogo	Haliemunawati Trenggono; Rd. Airlangga Kertajasa	PT. Sarana Daya Karya	Taman Bukit Cibogo RT 001 RW 017	Cimahi Selatan	Leuwigajah	72.423,90	21.727	821	15.614	15.763	82	551	Site Plan Perumahan
64	Bukit Permana Indah			Jl. Permana	Cimahi Utara	Citeureup	29.728,03	8.918	159	5.945,61	2.972,80	16	25	Site Plan Perumahan
65	Griya Pesantren Indah		PT. Eka Bhakti	Jl. Pesantren	Cimahi Utara	Pasirkaliki	53.576,22	16.073	286	10.715,24	5.357,62	29	118	Site Plan Perumahan
66	Bukit Cimindi Raya		PT. Eka Bhakti		Cimahi Utara	Pasirkaliki	87.458,91	26.238	467	17.493,78	8.746,89	47	238	Site Plan Perumahan
67	Edelweiss Residence Cipageran Asri				Cimahi Utara	Cipageran	46.478,69	13.944	248	9.295,74	4.647,87	25	82	Site Plan Perumahan
68	Perumahan Cihanjuang Indah			Jl. Pesantren	Cimahi Utara	Cibabat	83.234,22	24.970	444	16.646,84	8.323,42	44	188	Site Plan Perumahan
69	Komplek Permana Indah		PT. Gracia Griya Kencana		Cimahi Utara	Citeureup	31.245,54	9.374	167	6,681,11	3.124,55	17	132	Site Plan Perumahan
70	The Orchard Residence Cimahi			Jl. Kolonel Masturi	Cimahi Utara	Cipageran	10.000	3.000	53	2.000	1.000	5	41	Site Plan Perumahan
71	Cluster Pesona Camaroong	Syamsul Mu'arif		Jl. Kamarung Nomor 65 RT 03 RW 05	Cimahi Utara	Citeureup	4.790,70	1.437	53	988,40	1.157,60	5	18	Site Plan Perumahan

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
72	Komplek Nuansa Indah Rinjani				Cimahi Utara	Cipageran	13.715,28	4.115	73	2.743,06	1.371,53	7	21	Site Plan Perumahan
73	Bukit Indah Residence			Jl. Kolonel Masturi	Cimahi Utara	Cipageran	31.534,80	9.460	168	6.306,96	3.153,48	17	55	Site Plan Perumahan
74	Bukit Mas Cipageran			Jl. Kolonel Masturi	Cimahi Utara	Cipageran	61.003,70	18.301	325	12.200,74	6.100,37	33	14	Site Plan Perumahan
75	Nuansa Asri Residence			Jl. Ciawitali	Cimahi Utara	Citeureup	13.600,47	4.080	73	2.720,09	1.360,05	7	77	Site Plan Perumahan
76	Vila Cipageran			Jl. Kolonel Masturi Nomor 9	Cimahi Utara	Cipageran	8.634,49	2.590	46	1.736,90	858,45	5	5	Site Plan Perumahan
77	Perumahan Setra Duta Cendana	Hendry Leonadi	PT. Berkat Propertindo Utama	Jl. Budi (Blok Babakan Loa) RT 01 RW 05	Cimahi Utara	Pasirkaliki	8.641	2.592	85	1.947	2.419,20	9	85	Site Plan Perumahan
78	Perumahan PPTM				Cimahi Utara	Cibabat	68.840,46	20.652	90	13.768	6.884,05	9	77	Site Plan Perumahan
79	Cluster Jl. Tirta Indah Rt 001 RW 011	Dr. I Made Nuratna		Jl. Tirta Indah Rt 001 RW 011	Cimahi Selatan	Cibeureum	1.530	459		200,40	302,70	3	30	Site Plan Perumahan
80	Cluster Setra Mekar / Budi Luhur Asri	Soehana Oetojo	PT. Sarana Pramestha Lestari	Jl. Budi Luhur Blok Babakan Loa RT 03 RW 007	Cimahi Utara	Pasirkaliki	2.400	720	21	472,10	487,90	3	12	Site Plan Perumahan

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
81	Margamulya Regency	Setiani Sri Rejeki		Jl. Margamulya RT 03 RW 01	Cimahi Tengah	Cimahi	4.602	1.381	18	659,60	3.022,40	2	11	Site Plan Perumahan
82	Cluster Kp. Kihapit RT 007 RW 008	Timoer Situmorang, GRAD. DIP		Kp. Kihapit RT 007 RW 008	Cimahi Selatan	Leuwigajah	935	281	17	103		2	7	Site Plan Perumahan
83	Cluster Taman Bukit Cibogo	Rd. Airlangga Kertajasa	PT. Sarana Daya Karya	Taman Bukit Cibogo RT 001 RW 017	Cimahi Selatan	Leuwigajah	3.800	1.140	43	811,80	849,20	4	12	Site Plan Perumahan
84	Cimahi Paradiso Land	Heru Kurnia Suprianto		Jl. Tegal Kawung RT 05 RW 08	Cimahi Utara	Cipageran	2.417,90	725	30	413,30	483,60	3	29	Site Plan Perumahan
85	Rosalie Hills	Arie Susanto, S. KOM	PT. Rosa Lie Propertindo	Jl. Cipageran Asri RT 05 RW 06	Cimahi Utara	Cipageran	19.852	5.956	210	4.974,70	4.363,80	21	85	Site Plan Perumahan
86	Velocity Residence Cimahi	Lingga Setiadi	PT. Tanah Air Gelora	Jl. Paguyuban RT 006 RW 019	Cimahi Tengah	Padasuka	5.012	1.504	60	1.025,60	1.003,40	6	6	Site Plan Perumahan
87	Taman Mutiara			Jl. Amir Mahmud	Cimahi Tengah	Cigugur Tengah	104.306,30	31.292	556	20.861,26	10.430,63	56	391	Site Plan Perumahan
88	Fajar Raya		PT. Puri Fadjar				105.776,49	31.733	564	21.155,30	10.577,65	56	158	Site Plan Perumahan
89	Melong Green Residence						815.726,37	244.718	4.351	163.145,27	81.572,64	435	393	Site Plan Perumahan
90	Perumahan Puri Cipageran Indah I		PT. Raya Davindo				105.000	31.500	560	21.000	10.500	56	1.386	Site Plan Perumahan

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
91	Taman Nusasari Citeureup	Ir. Johan Hariawan dan Heri Hariawan	Ir. Johan Hariawan dan Heri Hariawan	RT 06 RW 01	Cimahi Utara	Citeureup	104.306,30	31.292	556	20.861,26	10.430,63	56	201	Site Plan Perumahan
92	PERUM PERUMNAS						85.338,67	25.602	455	17.077,73	8.538,87	45	983	Site Plan Perumahan
93	Puri Fadjar Cibeber		PT. Puri Fadjar				63.599	19.080	585	28.000	6.359,90	58	555	Site Plan Perumahan
94	Nusa Cisangkan Permai				Cimahi Tengah	Padasuka		0				9	176	Site Plan Perumahan
95	Alamanda			RW 05	Cimahi Selatan	Cibeber		0				5	32	Site Plan Perumahan
96	Komplek Pemda I			RW 10	Cimahi Selatan	Cibeber		0				8	108	Site Plan Perumahan
97	Komplek Pemda II			RW 11	Cimahi Selatan	Cibeber		0				6	69	Site Plan Perumahan
98	Nusa Persada			RW 13	Cimahi Selatan	Leuwigajah		0				7	96	Site Plan Perumahan
99	Aneka Bakti			RW 11	Cimahi Selatan	Leuwigajah		0				8	205	Site Plan Perumahan
100	Leuwigajah Permai			RW 11	Cimahi Selatan	Leuwigajah		0				7	167	Site Plan Perumahan

NO	NAMA PERUMAHAN	NAMA PEMOHON	PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	POTENSI FASOS FASUM						UNIT RUMAH	INPUT DATA BERDASARKAN HASIL
							LUAS PERUMAHAN	KOMPENSASI PSU (30%) (Standar Minimal)	KOMPEN SASI TPU	JENIS FASOS FASUM				
										PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS SOSIAL	UTILITAS UMUM		
							(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	UNIT		
101	Baros Indah				Cimahi Tengah	Baros		0				8	58	Site Plan Perumahan
102	Pilar Mas				Cimahi Selatan	Leuwigajah		0				11	60	Site Plan Perumahan
103	Bumi Citeureup Permai				Cimahi Utara	Citeureup		0				11	313	Site Plan Perumahan
104	Cibeureum raya				Cimahi Selatan	Cibeureum		0				5	75	Site Plan Perumahan
105	Komplek Unjani			RW 10	Cimahi Selatan	Cibeber		0				9	61	Site Plan Perumahan
106	Perumahan Kenari Kebon Alam Asri				Cimahi Selatan	Cibeureum	261	78				5	62	Site Plan Perumahan
107	Cluster Aruman		PT. Kembar Mas	Pasirkaliki RT 04 RW 04	Cimahi Utara	Pasirkaliki	4.480	1.344				3	66	Site Plan Perumahan
108	Perumahan Shangyang Royal Village			RW 04	Cimahi Selatan	Cibeber		0				7	14	Site Plan Perumahan
JUMLAH LUASAN, UNIT PSU DAN UNIT RUMAH							3.116.478,41	934.943,52	21.410,00	668.900,80	436.466,75	2.033,00	11.756,00	

PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2023

NO	SKPD	31 Desember 2022	Beban Penyusutan Tahun 2023	Ekuitas 2023	31 Desember 2023
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 116.696.965.486,99	Rp 9.639.207.162,95	Rp 28.409.709,94	Rp 126.364.582.359,88
2	DINAS KESEHATAN	Rp 50.892.485.075,52	Rp 4.019.178.439,42	Rp 1.003.592.314,33	Rp 55.915.255.829,26
3	RSUD Cibabat	Rp 260.630.402.979,73	Rp 24.834.413.221,76	Rp 284.562.487,36	Rp 285.749.378.688,85
4	DPUPR	Rp 442.896.350.561,65	Rp 35.564.902.043,47	Rp 22.331.483.855,37	Rp 500.792.736.460,49
5	DPKP	Rp 51.847.793.988,15	Rp 7.675.573.570,28	Rp (28.320.248,10)	Rp 59.495.047.310,33
6	SATPOL PP DAN DAMKAR	Rp 13.084.214.420,16	Rp 967.475.169,55	Rp 20.932.070,80	Rp 14.072.621.660,51
7	BPBD	Rp 1.787.125.330,31	Rp 274.431.684,74	Rp (106.234.320,71)	Rp 1.955.322.694,34
8	DINAS SOSIAL	Rp 1.124.574.273,54	Rp 259.011.150,00	Rp 11.034.250,00	Rp 1.394.619.673,54
9	DP3AP2KB	Rp 3.983.468.968,51	Rp 173.781.679,17	Rp (10.938.678,52)	Rp 4.146.311.969,15
10	DINAS TENAGA KERJA	Rp 1.722.878.350,00	Rp 72.387.000,00	Rp (12.411.500,00)	Rp 1.782.853.850,00
11	DISPANGTAN	Rp 9.351.298.795,53	Rp 507.215.584,87	Rp (139.296.673,08)	Rp 9.719.217.707,32
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 32.479.348.303,53	Rp 4.669.685.715,95	Rp 4.084.282.421,05	Rp 41.233.316.440,53
13	DISDUKCAPIL	Rp 8.117.262.199,85	Rp 525.408.694,00	Rp 94.727.607,15	Rp 8.737.398.501,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 65.559.769.101,26	Rp 8.709.250.253,99	Rp 1.041.958.717,60	Rp 75.310.978.072,85
15	DISKOMINFO	Rp 7.299.007.961,23	Rp 1.001.465.698,37	Rp 55.217.867,14	Rp 8.355.691.526,74
16	DISARDA	Rp 2.066.821.623,05	Rp 213.109.007,14	Rp -	Rp 2.279.930.630,19
17	DISDAGKOPERIN	Rp 40.428.019.106,02	Rp 3.739.242.586,29	Rp 87.272.025,47	Rp 44.254.533.717,79
18	DPMPTSP	Rp 4.148.809.239,84	Rp 8.701.927.154,41	Rp 268.228.733,67	Rp 13.118.965.127,93
19	DISBUDPARPORA	Rp 1.979.694.084,55	Rp 836.073.334,55	Rp 397.007.160,30	Rp 3.212.774.579,40
20	BAPPEDA	Rp 3.140.448.957,36	Rp 242.301.777,30	Rp 9.327.355,00	Rp 3.392.078.089,66
21	BPKAD	Rp 9.651.490.052,87	Rp 238.082.030,51	Rp (382.270.463,93)	Rp 9.507.301.619,46
22	BAPENDA	Rp 5.255.867.884,96	Rp 144.411.192,40	Rp (196.558.706,30)	Rp 5.203.720.371,06
23	BKPSDMD	Rp 2.131.224.729,00	Rp 90.141.600,00	Rp 9.955.025,00	Rp 2.231.321.354,00
24	SETDA	Rp 51.380.091.701,88	Rp 2.410.447.614,23	Rp (1.761.668.211,01)	Rp 52.028.871.105,10
25	SETWAN	Rp 19.451.757.853,21	Rp 787.580.576,54	Rp 433.561.558,93	Rp 20.672.899.988,68
26	INSPEKTORAT KOTA	Rp 2.436.771.820,37	Rp 283.401.641,02	Rp (19.721.214,29)	Rp 2.700.452.247,11
27	KEC. CIMAHI UTARA	Rp 7.093.526.780,71	Rp 454.923.939,11	Rp (133.033.334,09)	Rp 7.415.417.385,73
28	KEC. CIMAHI TENGAH	Rp 11.264.006.216,01	Rp 838.488.027,12	Rp (342.506.864,83)	Rp 11.759.987.378,30
29	KEC. CIMAHI SELATAN	Rp 9.032.145.397,22	Rp 583.375.759,05	Rp 12.592.462,48	Rp 9.628.113.618,75250
30	KESBANG	Rp 932.884.850,70	Rp 58.936.089,70	Rp 4.987.500,00	Rp 996.808.440,40
JUMLAH		Rp 1.237.866.506.093,70	Rp 118.515.829.397,90	Rp 27.046.172.906,73	Rp 1.383.428.508.398,33

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2023

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
1	Dinas Pendidikan		668.380.800,00	53.787.500,00	40.297.950,00	71.715.337,50	81.716.328,13	510.737.287,50	592.453.615,63	81.716.328,13
	Aplikasi Siadik	2022	82.800.000,00			20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	41.400.000,00	20.700.000,00
	Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2021	148.521.800,00		21.130.450,00	31.847.837,50	61.016.328,13	52.978.287,50	113.994.615,63	61.016.328,13
	Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2021	84.521.800,00							-
	Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2022	64.000.000,00							-
	Sistem Penilaian Kinerja Guru	2019	76.670.000,00	19.167.500,00	19.167.500,00	19.167.500,00	-	76.670.000,00	76.670.000,00	-
	Aplikasi SIM Pendataan Pendidikan	2016	46.774.000,00			-		46.774.000,00	46.774.000,00	-
	Software Dinas Pendidikan	2015	99.535.000,00			-		99.535.000,00	99.535.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Pembangunan Aplikasi Web Dinas Pendidikan	2017	39.160.000,00	9.790.000,00		-		39.160.000,00	39.160.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi SIM Absensi Terintegrasi Bagi Guru	2017	49.500.000,00	12.375.000,00		-		49.500.000,00	49.500.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi BOS	2017	49.820.000,00	12.455.000,00		-		49.820.000,00	49.820.000,00	-
	Software Cont Off-line Computer (temuan BPK 2017) disdik dan sekolah	2016	75.600.000,00			-		75.600.000,00	75.600.000,00	-
2	Dinas Kesehatan		172.730.000,00	34.132.500,00	9.492.500,00	9.492.500,00	3.250.000,00	169.480.000,00	172.730.000,00	3.250.000,00
	SPTJB JAMPRO	2016	20.000.000,00	-		-		20.000.000,00	20.000.000,00	-
	Sistem Pelayanan Terintegrasi (SIMPATI)	2017	79.860.000,00	19.965.000,00		-		79.860.000,00	79.860.000,00	-
	Software WEB Service Terintegrasi Sijariemas Cimahi	2017	18.700.000,00	4.675.000,00		-		18.700.000,00	18.700.000,00	-
	Pengadaan windows original (temuan BPK 2017)	2013	16.200.000,00	-		-		16.200.000,00	16.200.000,00	-
	Sistem Informasi SPM	2019	24.970.000,00	6.242.500,00	6.242.500,00	6.242.500,00		24.970.000,00	24.970.000,00	-
	Aplikasi Survei Kepuasan masyarakat	2020	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	Sistem Antrian paket	2020	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00
3	RSUD		392.194.000,00	36.498.500,00	33.061.000,00	33.061.000,00	-	392.194.000,00	392.194.000,00	-
	Software Billing (temuan BPK 2017)	2006	200.000.000,00	-				200.000.000,00	200.000.000,00	-
	Software Billing (temuan BPK 2017)	2011	8.250.000,00	-				8.250.000,00	8.250.000,00	-
	Software - BPJS C1 (temuan BPK 2017)	2016	37.950.000,00	-				37.950.000,00	37.950.000,00	-
	SIMRS (temuan BPK 2017)	2017	13.750.000,00	3.437.500,00				13.750.000,00	13.750.000,00	-
	License Software Billing	2019	6.294.000,00	1.573.500,00	1.573.500,00	1.573.500,00		6.294.000,00	6.294.000,00	-
	Aplikasi SKP	2019	57.200.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00		57.200.000,00	57.200.000,00	-
	Acronics Server dan Cloud ST	2019	44.825.000,00	11.206.250,00	11.206.250,00	11.206.250,00		44.825.000,00	44.825.000,00	-
	Multimedia Informasi	2019	23.925.000,00	5.981.250,00	5.981.250,00	5.981.250,00		23.925.000,00	23.925.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		1.500.774.910,00	199.856.250,00	246.337.775,00	148.175.471,25	182.512.486,88	1.056.248.496,25	1.238.760.983,13	182.512.486,88
	Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	2018	711.675.910,00	104.472.500,00	128.892.775,00	84.810.783,75	84.810.783,75	457.243.558,75	542.054.342,50	84.810.783,75
	<i>Induk Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang</i>	<i>2018</i>	<i>188.100.000,00</i>							
	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	<i>2019</i>	<i>180.070.000,00</i>							
	<i>Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang</i>	<i>2020</i>	<i>49.720.000,00</i>							
	<i>Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	<i>2021</i>	<i>97.681.100,00</i>							
	<i>Aset Tidak Berwujud- Pemeliharaan Sistem Informasi penataan Ruang</i>	<i>2022</i>	<i>97.816.530,00</i>							-
	<i>Aset Tidak Berwujud- Pengembangan Substansi dalam Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	<i>2022</i>	<i>98.288.280,00</i>							-
	Aset Tidak Berwujud-Pengembangan Sistem Informasi jalan dan Jembatan (SILAJA)	2022	99.743.000,00			24.935.750,00	24.935.750,00	24.935.750,00	49.871.500,00	24.935.750,00

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	Sistem informasi Monev Bangunan Gedung	2021	175.777.000,00		22.061.250,00	38.428.937,50	72.765.953,13	60.490.187,50	133.256.140,63	72.765.953,13
	<i>Induk Sistem informasi Monev Bangunan Gedung</i>	<i>2021</i>	<i>88.245.000,00</i>							-
	<i>Updating Sistem Informasi Movev Bangunan Gedung</i>	<i>2022</i>	<i>87.532.000,00</i>					-		-
	Penyusunan Database Jaringan Jalan Kota Cimahi Berbasis GIS	2018	381.535.000,00	95.383.750,00	95.383.750,00	-	-	381.535.000,00	381.535.000,00	-
	Software Keuangan & Kepegawaian (temuan BPK 2017)	2007	49.940.000,00					49.940.000,00	49.940.000,00	-
	Software LAN (temuan BPK 2017)	2007	82.104.000,00					82.104.000,00	82.104.000,00	-
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		536.171.588,00	45.593.625,00	43.874.875,00	44.001.410,00	87.672.397,00	265.116.535,00	352.788.932,00	87.672.397,00
	Aplikasi Sistem Informasi Rusunawa	2022	49.588.140,00	-		12.397.035,00	12.397.035,00	12.397.035,00	24.794.070,00	12.397.035,00
	Belanja Peningkatan Aplikasi Billing.	2020	89.650.000,00	22.412.500,00	22.412.500,00	22.412.500,00	22.412.500,00	67.237.500,00	89.650.000,00	22.412.500,00
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi Revitalisasi SIM UPT PALD	2019	36.767.500,00	9.191.875,00	9.191.875,00	9.191.875,00		36.767.500,00	36.767.500,00	-
	Sistem Pencatatan Meter Air dan Online Billing	2018	49.082.000,00	12.270.500,00	12.270.500,00	-		49.082.000,00	49.082.000,00	-
	Sistem Operasi Windows Komputer Rusunawa (temuan BPK 2017)	2017	6.875.000,00	1.718.750,00				6.875.000,00	6.875.000,00	-
	SIM UPT Air Minum	2016	44.027.500,00					44.027.500,00	44.027.500,00	-
	SIM Pelanggan Penyedotan Lumpur Tinja	2016	48.730.000,00					48.730.000,00	48.730.000,00	-
	Aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman Terpadu (SIRUKIMDU)	2023	82.806.000,00				20.701.500,00		20.701.500,00	20.701.500,00
	Jasa Pembuatan Aplikasi SABAKAMALIR	2023	56.401.098,00				14.100.274,50		14.100.274,50	14.100.274,50
	Belanja Sistem Informasi Pemahaman	2023	47.102.850,00				11.775.712,50		11.775.712,50	11.775.712,50
	Aplikasi Mobile Meter Reading	2023	25.141.500,00				6.285.375,00		6.285.375,00	6.285.375,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		65.000.000,00	16.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	5.000.000,00
	<u>Website</u> <u>www.satpolppdamkar.cimahikota.go.id</u>	2017	45.000.000,00	11.250.000,00				45.000.000,00	45.000.000,00	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	Upgrade Aplikasi Sistem Papan Informasi	2020	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		62.780.000,00	-	-	-	15.695.000,00	-	15.695.000,00	15.695.000,00
	Sistem Informasi Bencana Daerah (SIBEDA)	2023	62.780.000,00				15.695.000,00		15.695.000,00	15.695.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		120.674.100,00	7.500.000,00	-	-	22.008.525,00	32.640.000,00	54.648.525,00	22.008.525,00
	SIM Database Terpilah Anak	2017	30.000.000,00	7.500.000,00				30.000.000,00	30.000.000,00	-
	software Windows 7 (temuan BPK 2017)	2011	2.640.000,00					2.640.000,00	2.640.000,00	-
	Aplikasi SAPEUTING EMAS	2023	88.034.100,00				22.008.525,00		22.008.525,00	22.008.525,00
9	Dinas Sosial		100.800.000,00	-	-	-	25.200.000,00	-	25.200.000,00	25.200.000,00
	Pengembangan Website SIKS PMKS	2023	25.200.000,00				6.300.000,00		6.300.000,00	6.300.000,00
	Website DILAN PPKS	2023	75.600.000,00				18.900.000,00		18.900.000,00	18.900.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja		505.224.050,00	57.959.250,00	80.346.750,00	62.120.137,50	60.858.103,13	261.791.637,50	322.649.740,63	60.858.103,13
	Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2020	264.031.050,00	21.137.500,00	43.525.000,00	49.842.137,50	37.381.603,13	114.504.637,50	151.886.240,63	37.381.603,13
	Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2020	84.550.000,00							
	Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2021	89.550.000,00							
	Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2022	89.931.050,00							
	Database Ketenagakerjaan Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	2018	98.175.000,00	24.543.750,00	24.543.750,00			98.175.000,00	98.175.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	2019	49.112.000,00	12.278.000,00	12.278.000,00	12.278.000,00		49.112.000,00	49.112.000,00	-
	Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2023	93.906.000,00				23.476.500,00		23.476.500,00	23.476.500,00

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
11	Dinas Pangan dan Pertanian		71.975.455,00	4.668.750,00	2.000.000,00	-	5.000.000,00	51.975.455,00	56.975.455,00	5.000.000,00
	Aplikasi Pemutakhiran Data Pertanian dan Kehatanan Pangan (Diskopindagtan - 2016)	2016	33.300.455,00					33.300.455,00	33.300.455,00	-
	Aplikasi SIM Puskesmas	2017	10.675.000,00	2.668.750,00				10.675.000,00	10.675.000,00	-
	Aplikasi SIM Puskesmas	2018	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00	-
	Website Dispangtan	2023	20.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)		349.472.000,00	21.670.000,00	21.670.000,00	65.698.000,00	65.698.000,00	152.378.000,00	218.076.000,00	65.698.000,00
	SIM Laboratorium	2018	38.830.000,00	9.707.500,00	9.707.500,00			38.830.000,00	38.830.000,00	-
	SIM Dokumen Lingkungan Online	2018	47.850.000,00	11.962.500,00	11.962.500,00			47.850.000,00	47.850.000,00	-
	Aplikasi Retribusi Pelayanan Persampahan	2022	96.570.000,00			24.142.500,00	24.142.500,00	24.142.500,00	48.285.000,00	24.142.500,00
	Database dan Aplikasi Website RTH Kehati	2022	69.042.000,00			17.260.500,00	17.260.500,00	17.260.500,00	34.521.000,00	17.260.500,00
	Pengembangan Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup (Sitangkal)	2022	97.180.000,00			24.295.000,00	24.295.000,00	24.295.000,00	48.590.000,00	24.295.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		384.974.250,00	58.354.487,50	54.166.987,50	61.829.487,50	45.663.750,00	278.810.500,00	324.474.250,00	45.663.750,00
	Belanja Jasa Aplikasi Website	2020	34.705.000,00	8.676.250,00	8.676.250,00	8.676.250,00	8.676.250,00	26.028.750,00	34.705.000,00	8.676.250,00
	Belanja Jasa License Zoom	2020	26.950.000,00	6.737.500,00	6.737.500,00	6.737.500,00	6.737.500,00	20.212.500,00	26.950.000,00	6.737.500,00
	Pengembangan Aplikasi Silima	2019	35.250.000,00	8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00		35.250.000,00	35.250.000,00	-
	Software	2019	29.412.950,00	7.353.237,50	7.353.237,50	7.353.237,50		29.412.950,00	29.412.950,00	-
	Sistem Koneksi (Intervase tahap awal) NIK Pembuatan Digital Arsip	2018	38.600.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00			38.600.000,00	38.600.000,00	-
	Informasi yang dapat diakses masyarakat melalui web Dinas Kependudukan	2018	26.750.000,00	6.687.500,00	6.687.500,00			26.750.000,00	26.750.000,00	-
	Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Intervase Tahap Awal) NIK	2018	25.000.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00	-
	Aplikasi Monev Pelayanan Dokumen Kependudukan	2016	22.330.000,00	-				22.330.000,00	22.330.000,00	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	Aplikasi CD Interaktif Profil Disdukcapil	2017	16.750.000,00	4.187.500,00				16.750.000,00	16.750.000,00	-
	ESET NOD32 (temuan BPK 2017)	2015	5.000.000,00	-				5.000.000,00	5.000.000,00	-
	Kaspersky (temuan BPK 2017)	2009	3.226.300,00	-				3.226.300,00	3.226.300,00	-
	Belanja Jasa tenaga Informasi DILANDACITA	2022	121.000.000,00	-	-	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	60.500.000,00	30.250.000,00
14	Dinas Perhubungan		355.089.395,00	12.349.200,00	-	5.186.336,25	5.186.336,25	339.530.386,25	344.716.722,50	5.186.336,25
	Upgrade Aplikasi BLUE RFID Kemenhub	2022	20.745.345,00			5.186.336,25	5.186.336,25	5.186.336,25	10.372.672,50	5.186.336,25
	Aplikasi Untuk Penyempurnaan Software Website Dinas Perhubungan Tahun 2016	2016	19.493.750,00					19.493.750,00	19.493.750,00	-
	OS Windows	2014	2.700.000,00					2.700.000,00	2.700.000,00	-
	Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum	2017	49.396.800,00	12.349.200,00				49.396.800,00	49.396.800,00	-
	SOFTWARE APLIKASI SISTEM INFORMASI (temuan BPK 2017)	2006	22.000.000,00					22.000.000,00	22.000.000,00	-
	WINDOWS XP SOFTWARE (temuan BPK 2017)	2006	1.881.000,00					1.881.000,00	1.881.000,00	-
	sim database angkutan umum (temuan BPK 2017)	2015	41.345.000,00					41.345.000,00	41.345.000,00	-
	software website dishub (temuan BPK 2017)	2015	100.425.000,00					100.425.000,00	100.425.000,00	-
	Sistem Informasi PJU (temuan BPK 2017)	2015	48.702.500,00					48.702.500,00	48.702.500,00	-
	Sistem Reklame (temuan BPK 2017)	2015	48.400.000,00					48.400.000,00	48.400.000,00	-
15	Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan		1.043.676.233,00	203.049.170,75	46.622.420,75	9.912.375,00	9.186.637,50	1.006.929.683,00	1.016.116.320,50	9.186.637,50
	Sistem Pengelolaan Administrasi Pelayanan Informasi Publik	2017	38.940.000,00	9.735.000,00				38.940.000,00	38.940.000,00	-
	Aplikasi Cimahi Smart City	2017	586.767.000,00	146.691.750,00				586.767.000,00	586.767.000,00	-
	Revitalisasi Aplikasi Pengaduan Terintegrasi (KAPPDE-2016)	2016	45.795.000,00	-				45.795.000,00	45.795.000,00	-
	Aplikasi Pengaduan Berbasis Android (KAPPDE-2016)	2016	52.886.000,00	-				52.886.000,00	52.886.000,00	-
	Revitalisasi Aplikasi Intervensi Kemiskinan (KAPPDE-2016)	2016	31.240.000,00	-				31.240.000,00	31.240.000,00	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	2019	39.649.500,00	9.912.375,00	9.912.375,00	9.912.375,00		39.649.500,00	39.649.500,00	-
	Piranti Lunak Pengamanan Jaringan Komputer	2018	55.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00			55.000.000,00	55.000.000,00	-
	Computer mainframe	2018	91.840.183,00	22.960.045,75	22.960.045,75			91.840.183,00	91.840.183,00	-
	Software Operating System Server - (temuan BPK 2017)	2013	9.900.000,00					9.900.000,00	9.900.000,00	-
	Software Database Management System - (temuan BPK 2017)	2013	19.250.000,00					19.250.000,00	19.250.000,00	-
	Software Development tools - (temuan BPK 2017)	2013	4.950.000,00					4.950.000,00	4.950.000,00	-
	perangkat lunak windows Pro SP2 OEM /MS Office 2007 Pro FPP(temuan BPK 2017)	2008	30.712.000,00					30.712.000,00	30.712.000,00	-
	Analisis Design Pengembangan Aplikasi	2023	36.746.550,00				9.186.637,50		9.186.637,50	9.186.637,50
16	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		731.428.820,00	88.566.625,00	118.669.125,00	141.735.975,00	128.561.080,00	426.705.225,00	555.266.305,00	128.561.080,00
	Aplikasi Sistem Collect-CE	2022	49.633.650,00			12.408.412,50	12.408.412,50	12.408.412,50	24.816.825,00	12.408.412,50
	Website Pelayanan Kementrologian	2022	88.883.250,00			22.220.812,50	22.220.812,50	22.220.812,50	44.441.625,00	22.220.812,50
	SIMECI(Aplikasi Metrologi Cimahi)	2021	46.500.000,00		11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	23.250.000,00	34.875.000,00	11.625.000,00
	Jasa Pembuatan Website Integritas Layanan Teknis (Cerah)	2021	47.850.000,00		11.962.500,00	11.962.500,00	11.962.500,00	23.925.000,00	35.887.500,00	11.962.500,00
	Aplikasi Pameran Virtual Expo	2021	49.810.000,00		12.452.500,00	12.452.500,00	12.452.500,00	24.905.000,00	37.357.500,00	12.452.500,00
	Aplikasi Virtual EXPO	2020	60.632.000,00	15.158.000,00	15.158.000,00	15.158.000,00	15.158.000,00	45.474.000,00	60.632.000,00	15.158.000,00
	Aplikasi Pelayanan Metrologi	2020	26.850.000,00	6.712.500,00	6.712.500,00	6.712.500,00	6.712.500,00	20.137.500,00	26.850.000,00	6.712.500,00
	Aplikasi Lapaku	2020	49.600.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	37.200.000,00	49.600.000,00	12.400.000,00
	Aplikasi Kegiatan Pemetaan dan Pendataan UKM (LAPAKU)	2019	49.200.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00		49.200.000,00	49.200.000,00	-
	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	2019	48.900.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00		48.900.000,00	48.900.000,00	-
	Aplikasi Meteorologi	2019	49.085.000,00	12.271.250,00	12.271.250,00	12.271.250,00		49.085.000,00	49.085.000,00	-
	Aplikasi Meteorologi	2018	46.249.500,00	11.562.375,00	11.562.375,00			46.249.500,00	46.249.500,00	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	Aplikasi SIM Laporan Kinerja	2017	23.750.000,00	5.937.500,00				23.750.000,00	23.750.000,00	-
	Sistem informasi Metrologi	2023	44.906.160,00				11.226.540,00		11.226.540,00	11.226.540,00
	Sistem Informasi Pemasaraan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2023	49.579.260,00				12.394.815,00		12.394.815,00	12.394.815,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		819.692.900,00	73.671.000,00	187.163.225,00	162.438.225,00	133.945.475,00	556.005.200,00	689.950.675,00	133.945.475,00
	Sistem Operasi untuk Server dan Software Monitoring	2022	32.500.000,00			8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	16.250.000,00	8.125.000,00
	Aplikasi Pendukung MPP	2021	453.968.900,00		113.492.225,00	113.492.225,00	113.492.225,00	226.984.450,00	340.476.675,00	113.492.225,00
	Konsultasi Pengembangan Sipinter DPMPTSP	2020	49.313.000,00	12.328.250,00	12.328.250,00	12.328.250,00	12.328.250,00	36.984.750,00	49.313.000,00	12.328.250,00
	Konsultasi Pengembangan Sipinter DPMPTSP	2019	48.224.000,00	12.056.000,00	12.056.000,00	12.056.000,00		48.224.000,00	48.224.000,00	-
	Konsultasi pengembangan integrasi dan migrasi SIM KPPT ke Sipinter DPMPTSP	2019	34.177.000,00	8.544.250,00	8.544.250,00	8.544.250,00		34.177.000,00	34.177.000,00	-
	Aplikasi Migrasi Data	2019	31.570.000,00	7.892.500,00	7.892.500,00	7.892.500,00		31.570.000,00	31.570.000,00	-
	Sistem informasi pelayanan perizinan terpadu	2018	47.500.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00			47.500.000,00	47.500.000,00	-
	pembuatan konten dashboard pada aplikasi multimedia 2018	2018	39.900.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00			39.900.000,00	39.900.000,00	-
	Penyedia jasa penyusunan integrase dan migrasi SIM KPPT ke system pelayanan terpadu tahun 2018	2018	44.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00			44.000.000,00	44.000.000,00	-
	Software Aplikasi Sistem Informasi Arsip - Temuan BPK	2010	14.850.000,00					14.850.000,00	14.850.000,00	-
	Mainframe (Temuan BPK 2017)	2011	6.190.000,00					6.190.000,00	6.190.000,00	-
	Software DAAS MOD (Temuan BPK 2017)	2012	17.500.000,00					17.500.000,00	17.500.000,00	-
18	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga		137.150.000,00	8.662.500,00	8.662.500,00	20.625.000,00	25.625.000,00	55.275.000,00	80.900.000,00	25.625.000,00
	Aplikasi Pembuatan Web Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cimahi	2018	34.650.000,00	8.662.500,00	8.662.500,00			34.650.000,00	34.650.000,00	-
	Sistem Aplikasi Data Kebudayaan Terpadu (SADAYAPADU)	2022	82.500.000,00			20.625.000,00	20.625.000,00	20.625.000,00	41.250.000,00	20.625.000,00
	Website Disbudpar	2023	20.000.000,00				5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		280.094.646,90	12.271.874,99	8.676.250,00	23.676.250,00	23.776.250,00	202.342.146,90	226.118.396,90	23.776.250,00

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	Sistem Pengelolaan Data infrastruktur Lingkungan	2021	34.705.000,00		8.676.250,00	8.676.250,00	8.676.250,00	17.352.500,00	26.028.750,00	8.676.250,00
	Sistem Perencanaan Sektor Cipta Karya dan Lingkungan Hidup	2017	49.087.500,00	12.271.875,00				49.087.500,00	49.087.500,00	-
	microsoft windows server, sqls, ms office (temuan BPK 2017)	2016	120.902.146,90	- 0,01				120.902.146,90	120.902.146,90	-
	Sistem PIRAMIDA	2022	75.400.000,00			15.000.000,00	15.100.000,00	15.000.000,00	30.100.000,00	15.100.000,00
	Pengembangan Sistem PIRAMIDA	2022	60.000.000,00							
	Pengembangan Sistem PIRAMIDA	2023	15.400.000,00							
20	BPKAD		657.107.500,00	68.864.250,00	56.626.750,00	55.913.875,00	90.213.875,00	448.317.125,00	538.531.000,00	90.213.875,00
	Belanja Modal Software Website BPKAD	2022	46.120.500,00			11.530.125,00	11.530.125,00	11.530.125,00	23.060.250,00	11.530.125,00
	Aplikasi SIP Persediaan	2020	148.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	111.000.000,00	148.000.000,00	37.000.000,00
	Aplikasi RKBMD	2019	29.535.000,00	7.383.750,00	7.383.750,00	7.383.750,00	7.383.750,00	29.535.000,00	36.918.750,00	7.383.750,00
	Aplikasi RKBMD	2018	48.972.000,00	12.243.000,00	12.243.000,00			48.972.000,00	48.972.000,00	-
	Aplikasi Smart Accounting Control	2017	48.950.000,00	12.237.500,00				48.950.000,00	48.950.000,00	-
	Aplikasi Integrasi Sistem SIPKD Keuangan dengan SIPKD Persediaan	2016	49.500.000,00					49.500.000,00	49.500.000,00	-
	Aplikasi QR code	2016	49.060.000,00					49.060.000,00	49.060.000,00	-
	Perangkat Lunak SIPKD Persediaan - (temuan BPK 2017)	2014	99.770.000,00					99.770.000,00	99.770.000,00	-
	PERSEGI 2023	2023	44.000.000,00				11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00
	GRAFIS	2023	44.000.000,00				11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00
	Sistem SIMPATI Pengamanan Aset Tanah	2023	49.200.000,00				12.300.000,00		12.300.000,00	12.300.000,00
21	Badan Pengelolaan Pendapatan		1.873.622.522,00	254.313.125,00	235.169.275,00	182.168.775,00	245.514.989,25	1.521.742.350,00	1.767.257.339,25	245.514.989,25
	Aplikasi SISMIOP	2016	816.635.745,00	158.406.875,00	114.372.500,00	85.572.000,00	174.848.745,00	641.787.000,00	816.635.745,00	174.848.745,00
	Induk Aplikasi SISMIOP/SIM PBB (Dinas Pendapatan-2016)	2016	34.457.500,00							-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah</i>	2017	176.137.500,00							-
	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah</i>	2018	156.200.000,00							-
	<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah</i>	2019	155.100.000,00							-
	<i>Pengembangan Aplikasi SISMIOP</i>	2020	96.030.000,00							-
	<i>Pengembangan dan Custom Aplikasi SISMIOP</i>	2020	50.160.000,00							-
	<i>Pengembangan Aplikasi SISMIOP</i>	2022	59.274.000,00							-
	<i>Pengembangan Aplikasi SISMIOP</i>	2023	89.276.745,00							
	Pengembangan Sistem BAPENDA	2021	133.552.100,00		33.388.025,00	33.388.025,00	33.388.025,00	66.776.050,00	100.164.075,00	33.388.025,00
	Aplikasi e-PAD (Dinas Pendapatan-2016)	2016	34.595.000,00					34.595.000,00	34.595.000,00	-
	<i>Pengembangan Aplikasi e-PAD</i>	2020	51.810.000,00	12.952.500,00	12.952.500,00	12.952.500,00	12.952.500,00	38.857.500,00	51.810.000,00	12.952.500,00
	<i>Pengembangan Aplikasi E-PAD</i>	2019	106.150.000,00	26.537.500,00	26.537.500,00	26.537.500,00		106.150.000,00	106.150.000,00	-
	<i>Pengembangan Aplikasi E-PAD</i>	2023	97.302.877,00				24.325.719,25		24.325.719,25	24.325.719,25
	<i>Pengembangan Aplikasi E-PAD</i>	2018	96.800.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00			96.800.000,00	96.800.000,00	-
	<i>Pengembangan Aplikasi E-PAD</i>	2017	33.990.000,00	8.497.500,00				33.990.000,00	33.990.000,00	-
	Aplikasi Pelayanan/Permatahiraan Data PBB Berbasis Web	2019	94.875.000,00	23.718.750,00	23.718.750,00	23.718.750,00		94.875.000,00	94.875.000,00	-
	BPHTB pada Kegiatan Pendapatan Daerah (Dinas Pendapatan-2016)	2016	47.135.000,00					47.135.000,00	47.135.000,00	-
	Sistem Penghapusan Piutang dan NOP Ganda Pajak Bumi dan Bangunan (Dinas Pendapatan-2016)	2016	48.907.500,00					48.907.500,00	48.907.500,00	-
	Software Pendapatan (Dinas Pendapatan-2016)	2012	165.529.300,00					165.529.300,00	165.529.300,00	-
	Software Capaian Kinerja Pegawai (Temuan BPK 2017)	2015	30.300.000,00					30.300.000,00	30.300.000,00	-
	Software Pemeliharaan (Temuan BPK)	2011	23.540.000,00					23.540.000,00	23.540.000,00	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	Software Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Software Administrasi Sistem, Lap Kegiatan (Temuan BPK 2017)	2011	92.500.000,00					92.500.000,00	92.500.000,00	-
22	BKPSDMD		378.260.500,00	48.409.625,00	23.941.500,00	-	-	378.260.500,00	378.260.500,00	-
	Aplikasi Kinerja	2018	47.784.000,00	11.946.000,00	11.946.000,00			47.784.000,00	47.784.000,00	-
	Restrukturisasi Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi	2018	47.982.000,00	11.995.500,00	11.995.500,00			47.982.000,00	47.982.000,00	-
	Aplikasi SKP Online	2017	49.060.000,00	12.265.000,00				49.060.000,00	49.060.000,00	-
	Aplikasi Pengelolaan TKD	2017	48.812.500,00	12.203.125,00				48.812.500,00	48.812.500,00	-
	Aplikasi Absensi Pegawai Kegiatan Pembangunan (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2016	43.285.000,00					43.285.000,00	43.285.000,00	-
	Aplikasi Human Capital Care (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2016	47.520.000,00					47.520.000,00	47.520.000,00	-
	Software aplikasi kenaikan gaji berkala (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2009	39.567.000,00					39.567.000,00	39.567.000,00	-
	Software Otomatisasi absensi (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2010	43.250.000,00					43.250.000,00	43.250.000,00	-
	MS Office 2007 (temuan BPK 2017)	2012	6.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00	-
	OS Windows 7 - (temuan BPK 2017)	2013	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	-
23	Sekretariat Daerah		265.576.000,00	28.985.000,00	4.496.250,00	-	24.655.875,00	166.952.500,00	191.608.375,00	24.655.875,00
	Aplikasi SIM Kelurahan	2017	49.060.000,00	12.265.000,00				49.060.000,00	49.060.000,00	-
	Sistem Informasi Kinerja Instansi Pemerintah (SIKIP)	2017	48.895.000,00	12.223.750,00				48.895.000,00	48.895.000,00	-
	Sistem Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi	2016	38.087.500,00					38.087.500,00	38.087.500,00	-
	Sistem Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi (pengembangan)	2018	17.985.000,00	4.496.250,00	4.496.250,00			17.985.000,00	17.985.000,00	-
	software Windows (temuan BPK 2017)	2008	12.925.000,00					12.925.000,00	12.925.000,00	-
	Aplikasi Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja	2023	98.623.500,00				24.655.875,00	-	24.655.875,00	24.655.875,00

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
24	Sekretariat DPRD		833.311.000,00	82.958.250,00	36.708.250,00	81.708.250,00	41.897.500,00	723.846.000,00	765.743.500,00	41.897.500,00
	Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas	2016	144.500.000,00			45.000.000,00		144.500.000,00	144.500.000,00	-
	<i>Induk Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas</i>	<i>2016</i>	<i>99.500.000,00</i>							
	<i>Pengembangan Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas</i>	<i>2022</i>	<i>45.000.000,00</i>							
	Aplikasi SIKWAN	2020	77.500.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00	58.125.000,00	77.500.000,00	19.375.000,00
	Aplikasi (SIWANI)	2019	69.333.000,00	17.333.250,00	17.333.250,00	17.333.250,00		69.333.000,00	69.333.000,00	-
	Sistem Pengendalian Anggaran Belanja	2017	89.000.000,00	22.250.000,00				89.000.000,00	89.000.000,00	-
	Sistem Informasi Arsip Digital	2017	96.000.000,00	24.000.000,00				96.000.000,00	96.000.000,00	-
	Software Sistem Manajemen DPRD	2016	195.800.000,00	-				195.800.000,00	195.800.000,00	-
	SIM Legislatif	2016	59.488.000,00	-				59.488.000,00	59.488.000,00	-
	Microsoft (temuan BPK 2017)	2011	11.600.000,00	-				11.600.000,00	11.600.000,00	-
	Website DPRD	2023	90.090.000,00				22.522.500,00		22.522.500,00	22.522.500,00
25	Inspektorat		49.700.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00	-	-	49.700.000,00	49.700.000,00	-
	Aplikasi Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan	2018	49.700.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00			49.700.000,00	49.700.000,00	-
26	Kecamatan Cimahi Utara		71.193.750,00	12.449.000,00	-	-	-	71.193.750,00	71.193.750,00	-
	Aplikasi Sepakat Online	2017	49.796.000,00	12.449.000,00				49.796.000,00	49.796.000,00	-
	O.S Window 7, ms office (temuan BPK 2017) Kel. Cibabat	2013	15.897.750,00					15.897.750,00	15.897.750,00	-
	Software DAAS(temuan BPK 2017)kel. Cipageran	2015	3.500.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00	-
	Software Cont Off-line Computer(temuan BPK 2017) kel. Citeureup	2015	2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00	-
27	Kecamatan Cimahi Tengah		173.664.500,00	35.543.125,00	31.904.875,00	16.086.125,00	6.248.000,00	161.168.500,00	167.416.500,00	6.248.000,00
	Website Kelurahan Baros	2021	24.992.000,00		6.248.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00	12.496.000,00	18.744.000,00	6.248.000,00

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Harga Perolehan	2020	2021	2022	2023	Akumulasi Amortisasi 2022	Akumulasi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023
	Pengembangan Aplikasi Website Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2019	2019	39.352.500,00	9.838.125,00	9.838.125,00	9.838.125,00		39.352.500,00	39.352.500,00	-
	SIM Pelayanan	2018	53.130.000,00	13.282.500,00	13.282.500,00			53.130.000,00	53.130.000,00	-
	Aplikasi Sepakat Online	2017	39.545.000,00	9.886.250,00				39.545.000,00	39.545.000,00	-
	Perangkat Lunak SMS Center(temuan BPK 2017) kel. Baros	2015	6.500.000,00	-				6.500.000,00	6.500.000,00	-
	Aplikasi Sepakat Online Pemeliharaan	2018	10.145.000,00	2.536.250,00	2.536.250,00			10.145.000,00	10.145.000,00	-
28	Kecamatan Cimahi Selatan		100.595.000,00	19.648.750,00	9.831.250,00	11.000.000,00	11.000.000,00	89.595.000,00	100.595.000,00	11.000.000,00
	SIM Pelayanan	2018	61.325.000,00	9.831.250,00	9.831.250,00	11.000.000,00	11.000.000,00	50.325.000,00	61.325.000,00	11.000.000,00
	<i>Induk SIM Pelayanan</i>	<i>2018</i>	<i>39.325.000,00</i>							
	<i>Pengembangan SIM Pelayanan</i>	<i>2022</i>	<i>22.000.000,00</i>							
	Aplikasi Sepakat Online	2017	39.270.000,00	9.817.500,00				39.270.000,00	39.270.000,00	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		47.492.500,00	-	11.873.125,00	11.873.125,00	11.873.125,00	23.746.250,00	35.619.375,00	11.873.125,00
	Sistem Informasi Ormas	2021	47.492.500,00		11.873.125,00	11.873.125,00	11.873.125,00	23.746.250,00	35.619.375,00	11.873.125,00
	JUMLAH		12.748.806.419,90	1.498.437.358,24	1.329.017.633,25	1.223.417.655,00	1.357.958.733,13	9.452.681.527,40	10.810.640.260,53	1.357.958.733,13

Rekapitulasi Aset Lain-Lain 2023

		SALDO AWAL					PENAMBAHAN							PENGURANGAN							SALDO AKHIR				
NO.	SKPD	Total Aset Rusak Berat	Putang Kadaluwarsa	Aset renovasi	Total Reklas dari Temuan	Aset Lain-lain (TDF) dan Uang Jaminan Rusunawa	Total Saldo Awal Rusak Asat Lain-lain	Total Aset Rusak Berat	Putang Kadaluwarsa	Aset renovasi	Total Reklas dari temuan	Aset Lain-lain (TDF) dan Uang Jaminan Rusunawa	Total Penambahan Aset Lain-lain	Total Aset Rusak Berat	Putang Kadaluwarsa	Aset renovasi	Total Reklas dari Temuan	Aset Lain-lain (TDF) dan Uang Jaminan Rusunawa	Total Pengurangan Aset Lain-lain	Total Aset Rusak Berat	Putang Kadaluwarsa	Aset renovasi	Total Reklas dari Temuan	Aset Lain-lain (TDF) dan Uang Jaminan Rusunawa	Total Saldo Akhir Aset Lain-lain
1	2	3=a+b+c+d+e+f	4	5=g+h	6=i+j	7	8=a+3+4+5+6+7+8	9=k+l+m+n+o+p	10	11=q+r	12=s+t	13	14=10+11+12+13+14+15	15=u+v+w+x+y+z	16	17=aa+ab	18=ac+ad	19	20=17+18+19+20+21+22	21=aa+aa+ag+ah+ai+aj+ak	22	23=ak+al	23=am+an	24	25=24+21+26+27+28+29
1	DINAS PENDIDIKAN	3.129.937.291,01		-	5.861.406.048,00		8.991.343.279,01	216.264.300,00		5.962.611.844	-		5.778.876.144,00	-		-	-	-	-	3.346.201.591,01		5.962.611.844,00	5.861.406.048,00	-	14.770.219.423,01
2	DINAS KESEHATAN & PUSKESMAS	5.449.594.852,63		-	-		5.449.594.852,63	-		-	-	-	-	632.829.608,04			-	-	632.829.608,04	4.816.765.244,59	-	-	-	-	4.816.765.244,59
3	RSUD CIBABAT	10.181.028.566,83		-	-		10.181.028.566,83	-		-	-	-	-	-			-	-	-	10.181.028.566,83		-	-	-	10.181.028.566,83
4	DINAS POKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	979.818.450,00		77.719.890.139,03	-		78.699.708.589,03	170.648.030,00		34.936.741.896	-		35.107.389.925,99	433.425.450,00		41.904.237.008	-	-	41.937.662.457,51	717.841.639,00		71.152.395.027,51	-	71.869.436.057,51	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKJIAN	1.163.012.994,48		199.122.000,00	-		1.362.134.994,48	90.586.600,00		-	-	566.715.960,00	657.302.560,00	447.856.419,36		-	-	-	447.856.419,36	805.743.175,12		199.122.000,00	-	566.715.960,00	1.571.581.135,12
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.534.507.790,00		-	-		3.534.507.790,00	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	3.534.507.790,00		-	-	-	3.534.507.790,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.900.000,00		-	-		8.900.000,00	-		-	-	-	-	8.900.000,00			-	-	8.900.000,00	-		-	-	-	-
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	350.287.982,33		-	-		350.287.982,33	-		-	-	-	-	327.884.632,33			-	-	327.884.632,33	22.403.350,00		-	-	-	22.403.350,00
9	DINAS SOSIAL	19.647.750,00		-	-		19.647.750,00	-		-	-	-	-	-			-	-	-	19.647.750,00		-	-	-	19.647.750,00
10	DINAS TENAGA KERJA	299.687.000,00		-	-		299.687.000,00	-		-	-	-	-	132.385.000,00			-	-	132.385.000,00	167.302.000,00		-	-	-	167.302.000,00
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	675.148.332,58		-	-		675.148.332,58	-		-	-	-	-	388.921.832,58			-	-	388.921.832,58	286.226.500,00		-	-	-	286.226.500,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.489.553.029,28		-	-		3.489.553.029,28	49.225.000,00		-	-	-	49.225.000,00	1.808.181.922,68			-	-	1.808.181.922,68	1.730.596.106,60		-	-	-	1.730.596.106,60
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	600.810.748,00		-	(5.000.000,00)		595.810.748,00	-		-	-	-	-	232.790.175,00			-	-	232.790.175,00	368.020.573,00		-	(5.000.000,00)	-	363.020.573,00
14	DINAS PERKULUNGAN	1.503.336.580,10		1.106.460.840,90	-		2.609.797.421,00	-		-	-	-	-	-		310.804.057	-	-	310.804.057,00	1.503.336.580,10		795.656.783,90	-	-	2.298.953.364,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	363.732.500,10		-	-		363.732.500,10	-		-	-	-	-	15.252.500,00			-	-	15.252.500,00	348.480.000,10		-	-	-	348.480.000,10
16	DINAS ARSIP DAERAH	423.046.419,00		-	-		423.046.419,00	-		-	-	-	-	-			-	-	-	423.046.419,00		-	-	-	423.046.419,00
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	850.078.527,00		-	-		850.078.527,00	-		-	-	-	-	386.338.500,00			-	-	386.338.500,00	463.740.027,00		-	-	-	463.740.027,00
18	DPMPPTSP	1.128.956.759,86	212.739.385,00	-	-		1.341.696.144,86	-		-	-	-	-	492.878.641,00			-	-	492.878.641,00	636.078.119,86	212.739.385,00		-	-	848.817.503,86
19	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, KEPERUMUDAN DAN OLAHRAGA	39.572.500,00		-	-		39.572.500,00	-		-	-	-	-	-			-	-	-	39.572.500,00		-	-	-	39.572.500,00
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	611.842.736,43		-	-		611.842.736,43	-		-	-	-	-	350.842.995,52			-	-	350.842.995,52	260.999.740,91		-	-	-	260.999.740,91
21	BPKAD	528.212.241,00		-	-		528.212.241,00	-		-	-	-	-	133.075.252,00			-	-	133.075.252,00	395.136.989,00		-	-	-	395.136.989,00
22	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	771.560.479,93		-	-	8.491.417.379,00	9.262.977.858,93	-		-	-	26.634.160.000,00	26.634.160.000,00	273.362.400,00			-	-	8.491.417.379,00	8.764.779.779,00		-	-	26.634.160.000,00	27.132.358.079,93
23	BKPSDM	424.577.813,00		-	-		424.577.813,00	-		-	-	-	-	329.390.813,00			-	-	329.390.813,00	95.187.000,00		-	-	-	95.187.000,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	3.308.036.567,00		-	62.233.000,00		3.370.269.567,00	-		-	-	-	-	-			-	-	-	3.308.036.567,00		-	62.233.000,00	-	3.370.269.567,00
25	SEKRETARIAT DPRD	808.347.700,00		-	-		808.347.700,00	-		-	-	-	-	324.406.500,00			-	-	324.406.500,00	483.941.200,00		-	-	-	483.941.200,00
26	INSPEKTORAT KOTA	47.942.000,00		-	-		47.942.000,00	-		-	-	-	-	-			-	-	-	47.942.000,00		-	-	-	47.942.000,00
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	902.654.634,44		-	-		902.654.634,44	-		-	-	-	-	-			-	-	-	902.654.634,44		-	-	-	902.654.634,44
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	618.216.850,00		-	-		618.216.850,00	-		-	-	-	-	-			-	-	-	618.216.850,00		-	-	-	618.216.850,00
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	958.649.338,30		-	-		958.649.338,30	-		-	-	-	-	418.195.000,00			-	-	418.195.000,00	540.454.338,30		-	-	-	540.454.338,30
30	KEBANGPOL	96.728.500,00		-	-		96.728.500,00	-		-	-	-	-	-			-	-	-	96.728.500,00		-	-	-	96.728.500,00
		43.267.426.873,30	212.739.385,00	79.825.472.879,93	5.918.639.048,00	8.491.417.379,00	136.915.695.665,23	526.723.930,00	-	40.499.353.739,99	-	27.200.875.960,00	68.226.953.629,99	7.136.917.641,51	-	41.815.041.064,51	-	8.491.417.379,00	57.443.376.085,02	36.657.233.161,79	212.739.385,00	77.709.785.655,41	5.918.639.048,00	27.200.875.960,00	147.899.273.210,20

Utang Belanja Per 31 Desember 2023

No	SKPD	Listrik	Air	Telepon	Internet	Utang Sewa Mesin Fotocopy	Utang Penerangan Jalan Umum (PJU)	Utang Belanja Jasa Lainnya	Utang Belanja Pemeliharaan	Utang Belanja Persediaan	Utang Belanja Modal	Belanja Pegawai	Total
1	Dinas Pendidikan	779.988,00		1.153.522,00	418.750,00							158.217.200,00	160.569.460,00
2	Dinas Kesehatan	36.933.770,00	1.833.450,00	826.540,00	11.565.543,00			1.882.792,00					53.042.095,00
3	RSUD Cibabat	205.672.155,00	45.000,00	1.021.956,00	-				490.476.089,00	92.832.622,00			790.047.822,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.982,00		98.732,00									279.714,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	72.313.398,00		3.401.322,00								69.143.000,00	144.857.720,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		59.700,00	733.662,00									793.362,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.013.206,00		907.150,00	908.182,00								3.828.538,00
8	Dinas Sosial	-		-	186.150,00								186.150,00
9	Dinas Tenaga Kerja	82.380,00		39.186,00									121.566,00
10	Dinas Pangan Dan Pertanian	5.631.919,00		189.046,00									5.820.965,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	19.105.416,00	64.670,00	2.059.836,00									21.229.922,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	271.498,00		38.686,00									310.184,00
13	Dinas Perhubungan	8.220.827,00		2.374.116,00	-		823.800.597,00						834.395.540,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan												-
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	60.568.272,00		1.293.463,00									61.861.735,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64.478.569,00		99.572,00	58.000,00	2.608.500,00							67.244.641,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	2.368.347,00		1.179.098,00									3.547.445,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												-
19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			39.186,00									39.186,00
20	BAPENDA			232.356,00		693.750,00							926.106,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			39.186,00									39.186,00
22	Sekretariat Daerah	109.014.190,00		2.128.835,00	1.453.586,00								112.596.611,00
23	Sekretariat DPRD	23.820.696,00		131.271,00									23.951.967,00
24	Inspektorat Kota	3.112.783,00		113.944,00									3.226.727,00
25	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	218.371,00	59.700,00	140.922,00									418.993,00
26	Dinas Arsip												-
27	Kecamatan Cimahi Utara	2.945.176,00	119.340,00	2.067.934,00									5.132.450,00
28	Kecamatan Cimahi Tengah	9.016.964,00	24.600,00	613.679,00	3.510.243,00								13.165.486,00
29	Kecamatan Cimahi Selatan	8.345.194,00	59.700,00	351.002,00									8.755.896,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			38.686,00									38.686,00
	Jumlah	635.094.101,00	2.266.160,00	21.312.888,00	18.100.454,00	3.302.250,00	823.800.597,00	1.882.792,00	490.476.089,00	92.832.622,00	-	227.360.200,00	2.316.428.153,00

**Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan dan Pembangunan (Retensi)
Per 31 Desember 2023**

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
1	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PAK-15A/PWS/DISTAKOT/2005	8.400.000,00	7.560.000,00	840.000,00	Pengawasan Peningkatan 2 bh Rumah Dinas Puskesmas Padasuka
2	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PAK-13/PWS/DISTAKOT/2005	16.200.000,00	14.580.000,00	1.620.000,00	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Cimindi
3	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PAK-15/PWS/DISTAKOT/2005	6.700.000,00	6.030.000,00	670.000,00	Pengawasan Peningkatan Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Utara
4	2005	Dinas Tata Kota	CV. GRIYA LOKA	601/13.E/SP/PWS.P2RDPMA-PSPK/DISTAKOT/2005	12.150.000,00	10.935.000,00	1.215.000,00	Pengawasan Peningkatan 3 bh Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Selatan
5	2005	Dinas Tata Kota	CV. GRIYA LOKA	04/KKP/PAK-15B/PWS/DISTAKOT/2005	6.700.000,00	6.030.000,00	670.000,00	Pengawasan Peningkatan 2 bh Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Selatan
6	2005	Dinas Tata Kota	PT. GIRI AWAS	04/KKP/PAK-04/PWS/DISTAKOT/2005	10.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Pengawasan Peningkatan Mesjid Agung
7	2005	Dinas Tata Kota	PT. GIRI AWAS	01A/SP/PWS 01/ABT/DISTAKOT/2005	17.500.000,00	15.750.000,00	1.750.000,00	Pengawasan Peningkatan Mesjid Agung ABT
8	2005	Dinas Tata Kota	PT. RESTU IBU	621/39/HARLA/BM/DISTAKOT/2005	88.027.000,00	87.486.000,00	541.000,00	Pengadaan Aspal Untuk Pemeliharaan Jalan Berkala
8	Sub Total I				165.677.000,00	157.371.000,00	8.306.000,00	
9	2006	Dinas Tata Kota	CV. DIANA JULI	621/81/PJJ/BM-DISTAKOT/2006	46.346.000,00	44.028.700,00	2.317.300,00	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembuatan Gorong-gorong Crossing Jl. Padasuka
10	2006	Dinas Tata Kota	CV. SANDRILLA PUTRA	621/126/PJJ/BM-DISTAKOT/2006	48.871.000,00	46.427.450,00	2.443.550,00	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembuatan Saluran samping jalan cipageran
11	2006	Dinas Tata Kota	CV. HANDAYANI PRIMA	621/RPBRJ/BM-DISTAKOT/2006	27.785.000,00	15.885.000,00	11.900.000,00	peningkatan jalan lingk ar utara pengadaan alat-alat kantor (laptor)
3	Sub Total II				123.002.000,00	106.341.150,00	16.660.850,00	
12	2007	Dinas Tata Kota	CV. TRI SACITA	621/47/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	191.290.000,00	181.725.500,00	9.564.500,00	Pemeliharaan Jalan sindang sari cibaligo
13	2007	Dinas Tata Kota	CV. KUSDINAR	621/51/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	192.650.000,00	183.017.500,00	9.632.500,00	pemeliharaan jalan cibogo lamping dan cireundeu
14	2007	Dinas Tata Kota	CV. MITRA UTAMA	621/167/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	99.490.000,00	98.992.550,00	497.450,00	pemeliharaan jalan pabrik aci
15	2007	Dinas Tata Kota	CV. TRI MANUNGAL KARYA	621/113/JKS-PRASKOT/2007	48.800.000,00	46.360.000,00	2.440.000,00	perbaikan jalan curug cileungsi kel. Leuwigajah
4	Sub Total III				532.230.000,00	510.095.550,00	22.134.450,00	
16	2008	Sekretariat Daerah	CV. DIMAR	04/PPK/SP/R-SETDA/XII/2008	97.181.000,00	92.321.950,00	4.859.050,00	pemeliharaan tailling tanga
17	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. ENDORA SAKTI	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-10/PPBPK/2008	14.568.400,00		14.568.400,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
18	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. PRATAMA	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-11/PPBPK/2008	14.568.400,00		14.568.400,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
19	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. KARYA TIGA PUTRA	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-01/PPBPK/2008	19.213.975,00		19.213.975,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
20	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. ROSFER INDAH	027/49/DUK/2008	540.903.000,00	513.857.850,00	27.045.150,00	pengadaan jaringan komputer (tower LAN) kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK
21	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. TRI USAHA MANDIRI	510.2/673/DLH/VI/2007	49.821.000,00	47.329.950,00	2.491.050,00	keermur/TPT area unloading
22	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. CIPTA JAYA KENCANA	510.2/908/DLH/VI/2007	49.515.000,00	47.039.250,00	2.475.750,00	pegecoran area unloading TPK
23	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. A & B TERANG ABADI	510.2/1377/DLH/VIII/2007	34.539.000,00	32.812.050,00	1.726.950,00	pekerjaan konstruksi jaringan air bersih
24	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. TIGA SAUDARA	510.2/1569/DLH/IX/2007	556.239.000,00	556.238.999,00	1,00	pembangunan tahap II laboratorium seluas 200 m2
25	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. MEGA	510.2/2228.C/DLH/IX/2008	83.185.000,00	79.025.750,00	4.159.250,00	pengadaan konstruksi sumur resapan kel. Pasirkaliki (luncuran GRLK prov. 2007)
26	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. PERKASA UTAMA	510.2/2228.A/DLH/XI/2008	86.599.000,00	82.269.050,00	4.329.950,00	pengadaan konstruksi sumur resapan kel. cimahi (luncuran GRLK prov. 2007)
27	2008	Dinas Tata Kota	CV. INTAN	631/36/PU/PRASKOT/2008	99.850.000,00	94.857.500,00	4.992.500,00	pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang perbaikan jembatan di RW. 08 Kel. Karang Mekar
28	2008	Dinas Tata Kota	CV. SEPTIANA	621.5/25/Pm.L/PRASKOT/2008	87.391.000,00	83.021.450,00	4.369.550,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan lanjutan saluran RW. 21 kel. Melong

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
29	2008	Dinas Tata Kota	CV. KARYA TIGA PUTRA	621.5/04-SP/PL.5-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	43.313.000,00	41.147.350,00	2.165.650,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan lanjutan saluran RW. 20 Kel. Padasuka
30	2008	Dinas Tata Kota	CV. BRATA JAYA	621.5/46/m.L/PRASKOT/2008	84.310.000,00	80.094.500,00	4.215.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 05 kel. Cigugur tengah
31	2008	Dinas Tata Kota	CV. MAHARANI	621.5/04-SP/PL.10-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	49.500.000,00	47.025.000,00	2.475.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 03 kel. Leuwigajah
32	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.14-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	42.890.000,00	40.745.500,00	2.144.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 03 kel. Padasuka
33	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.17-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	39.200.000,00	37.240.000,00	1.960.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi normalisasi saluran RW. 08 kel. Melong dan RW 10 kel. Cibeureum
34	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.18-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	33.850.000,00	32.157.500,00	1.692.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 30 dan perbatasan RW 05 kel. Melong
35	2008	Dinas Tata Kota	CV. DIMAR	621.5/25/PL/ABT-PRASKOT/2008	49.000.000,00	46.550.000,00	2.450.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan gorong-gorong di kel. Cigugur tengah
36	2008	Dinas Tata Kota	CV. UTAMA	621.5/04-SP/PL.28-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	14.315.000,00	13.599.250,00	715.750,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi pembangunan drainase RW. 17 siliwangi jl. Kebon rumput III RW 17 Kel. Baros
37	2008	Dinas Tata Kota	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621.5/27/PL/ABT-PRASKOT/2008	9.625.000,00	9.143.750,00	481.250,00	pengadaan konstruksi pintu air perbaikan pintu air jorolot di kel. Leuwigajah
38	2008	Dinas Tata Kota	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621.3/28/PL/ABT-PRASKOT/2008	19.500.000,00	18.525.000,00	975.000,00	pengadaan konstruksi jalan pemasangan paving block di RT 01, 04 RW 03 kel. Padasuka
39	2008	Dinas Tata Kota	CV. MEGA	621.3/04-SP/PL.21-FPPS/PRASKOT-DTK/2008	47.690.000,00	45.305.500,00	2.384.500,00	pengadaan konstruksi jalan pembangunan jalan lingkungan pontren al-mushadah KH encep toha cilember jl. Cilember cimahi
40	2008	Dinas Tata Kota	CV. SURYA SAMUDRA	691/04-SP/PL.11-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	44.138.000,00	41.931.100,00	2.206.900,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum instalasi air bersih di kel. Cibeureum, 2 lokasi
41	2008	Dinas Tata Kota	CV. KARYA MANDIRI	691/04-SP/PL.13-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	24.640.000,00	23.408.000,00	1.232.000,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minumpembangunan sarana air bersih RW 08 kel. Cibeureum
42	2008	Dinas Tata Kota	CV. HARAVAN JAYA	691.27/37/Pm.L/PRASKOT/2008	97.348.000,00	92.480.600,00	4.867.400,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum bantuan untuk sarana air bersih RT 05/07 kel. Cibeureum
43	2008	Dinas Tata Kota	CV. TRIJAYA	691/04-SP/PL.15-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	49.491.000,00	47.016.450,00	2.474.550,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum bantuan untuk sarana air bersih RT 05/04 dan RT 04/08 kel. Cigugur tengah
44	2008	Dinas Tata Kota	CV. SASQIA REZHA PRATAMA	621.3/04-SP/PL.17-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	24.611.000,00	23.380.450,00	1.230.550,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum pembangunan jalan dan selokan air kotor di wilayah RT 05/07 jl. Pesantren kel. Cibabat
45	2008	Dinas Tata Kota	CV. SINAR SADULUR PUTRA	621/SPKK-22/BM-PRASKOT/2008	146.776.000,00	139.437.200,00	7.338.800,00	rehabilitasi/pemeliharaan jalan jl. Jayadikrama
46	2008	Dinas Tata Kota	CV. REZEKI	621/SPKK-40/BM-PRASKOT/2008	99.355.000,00	94.387.250,00	4.967.750,00	rehabilitasi/pemeliharaan jalan jl. Kalasan
31 Sub Total IV					2.653.125.775,00	2.502.348.199,00	150.777.576,00	
47	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. WIDYA PRATAMA	510.2/3183/DPLK/VII/2009 031/SPP/MS/VII/2009	253.363.000,00	246.514.598,00	6.848.402,00	pembuatan saluran pasangan daerah irigasi leuwiteureup
48	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. PUTRA JAYA	510.2/3137/DPLK/VII/2009 031/SPP/MS/VII/2009	208.467.000,00	205.047.000,00	3.420.000,00	pembuatan saluran pasangan daerah irigasi jorolot
49	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KENCANA ABADI PERKASA	510.2/4106.B/DPLK/IX/2009	47.658.000,00	45.275.100,00	2.382.900,00	rehabilitasi/pemeliharaan saluran pakuhaji di cijanggal (paket2)
50	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. TRIJAYA	04/KPA-DPLK-06-M/SP/XI/2009	92.900.000,00	88.255.000,00	4.645.000,00	rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi di leuwiliang (paket3)
51	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. REZITAMA	510.2/2346.C/DPLK/VII/2009	264.621.000,00	264.620.950,00	50,00	pengerukan sungai cikendal
52	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KAHURIPAN	510.2/3850/DPLK/X/2009	258.500.000,00	245.575.000,00	12.925.000,00	penyediaan sarana air bersih (sumur artesis) di kel. Cigugur tengah
53	2009	kantor lingkungan hidup	CV. DOHARDO	03/KPA/KLH-03/SP/IX/2009	119.611.000,00	113.630.450,00	5.980.550,00	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
54	2009	Dinas Kesehatan	CV. KARYA CIPTA ARTHA	03/KPA-Dinkes.01.M/SP/XI/2009	181.588.000,00	172.508.600,00	9.079.400,00	penataan puskesmas pembantu leuwigajah (lanjutan)
55	2009	Dinas Kesehatan	CV. SENTRAL AGUNG PRAKASA	04/KPA-Dinkes-01.M/SP/XI/2009	88.112.000,00	83.706.400,00	4.405.600,00	penataan puskesmas pembantu leuwigajah (lanjutan2)
56	2009	Dinas Kesehatan	CV. GURAT EMAS	04/KPA-Dinkes-07.M/SP/XI/2009	73.687.000,00	70.002.650,00	3.684.350,00	penataan puskesmas citeureup (lanjutan)
57	2009	Dinas Kesehatan	CV. GURAT EMAS	03/KPA/SPK/Pusk. CTRP.II/XI/2009	37.460.000,00	35.587.000,00	1.873.000,00	penataan puskesmas citeureup (lanjutan2)
58	2009	Dinas Kesehatan	CV. CIPTA PRATAMA	04/KPA/Dinkes.14.L/SP/XI/2009	501.160.000,00	476.102.000,00	25.058.000,00	pembangunan puskesmas pembantu melong
59	2009	Dinas Kesehatan	CV. HENDOKI BHAKTI	04/KPA-Dinkes-05.M/SP/XI/2009	75.248.000,00	71.485.600,00	3.762.400,00	penataan puskesmas dan gudang obat padasuka
60	2009	Dinas Kesehatan	CV. MEGA	04/KPA-Dinkes-02.M/SP/XI/2009	93.425.000,00	88.753.750,00	4.671.250,00	penataan puskesmas cimahi tengah
61	2009	Dinas Kesehatan	CV. PURBA GEBANG	04/KPA-Dinkes-04.M/SP/XI/2009	61.150.000,00	58.092.501,00	3.057.499,00	penataan puskesmas cigugur tengah

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
62	2009	Dinas Kesehatan	CV. GINANJAR	04/KPA/SPK/PSRKLK/Dinkes/2009	30.520.000,00	28.994.000,00	1.526.000,00	penataan puskesmas pasirkailiki
63	2009	Dinas Kesehatan	CV. PURBA GEBANG	04/KPA.Dinkes-03.M/SP/XI/2009	87.126.000,00	82.769.700,00	4.356.300,00	penataan puskesmas gedung obat ciawitali
64	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TUMARITIS	03/KPA-DPU-45 L/SP/VII/2009	463.694.000,00	440.510.200,00	23.183.800,00	penataan halaman pasar atas baru kota cimahi
65	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ABU RIZAL	03/KPA/SPK/Kel.Cigugur/PU/2009	49.984.000,00	47.484.800,00	2.499.200,00	penyempurnaan kantor kelurahan cigugur tengah
66	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. CIPTA JAYA KENCANA	03/KPA/SPK/UKS/PU/2009	49.989.000,00	47.489.550,00	2.499.450,00	penataan sekolah untuk lomba UKS
67	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BAGJA WALUYA	03/KPA/SP/DPU-64-L/IX/2009	129.375.000,00	122.906.250,00	6.468.750,00	pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di dalam site sekitar rusun
68	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	621/SPKK-24/BM-DPU/2009	192.057.000,00	182.454.150,00	9.602.850,00	pemeliharaan berkala jalan industri II
69	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DILAGGA	621/SPKK-274/RPJ-ABT/BM-DPU/2009	44.936.000,00	42.689.200,00	2.246.800,00	jalan margaluyu
70	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RISA	621/SPKK-281/RPJ-ABT/BM-DPU/2009	44.106.000,00	41.900.700,00	2.205.300,00	persimpangan jalan pesantren amir machmud
71	2009	Dinas Pendidikan	CV. JAYA MAKMUR	07/DISDIK-07-M/SPK/XI/2009	58.295.000,00	55.380.250,00	2.914.750,00	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMKN 1 cimahi
Sub Total V					3.507.032.000,00	3.357.735.399,00	149.296.601,00	
72	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KARYA TRISTA ASRI	510.2/4718/DPLK/XI/2010	446.920.000,00	424.574.000,00	22.346.000,00	pembuatan septik tank komunal/biogas/mck plus 4 di kel. Padasuka
73	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SANDRILLA PUTRA	510.2/4432/DPLK/XI/2010	49.600.000,00	47.120.000,00	2.480.000,00	pembuatan mck/septik tank/SPAL/IPAL 4 RW 22 kel. Citeureup
74	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. TIGA PUTRI	510.2/4337/DPLK/XI/2010	89.494.000,00	85.019.300,00	4.474.700,00	rehabilitasi/normalisasi/kimir/DPT kel. Cibabat (RW 17)
75	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. DILAGGA	510.2/5337/DPLK/XI/2010	73.860.000,00	70.167.000,00	3.693.000,00	penataan taman median jl. Mintaredja (tahap I)
76	2010	Dinas Perhubungan	CV. INSUN MEDAL LESTARI	555/SPKK-01/LU/DISHUB/X/2010	196.080.000,00	186.276.000,00	9.804.000,00	pengadaan marka jalan
77	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GELAR SARANA	027/DPU-ABT.03-M/SP/X/2010	98.370.000,00	93.451.500,00	4.918.500,00	penyempurnaan pasar atas baru kota cimahi
78	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	027/DPU-ABT.PG.05-PL/SPK/XI/2010	49.730.000,00	47.243.500,00	2.486.500,00	penataan sarana penunjang olah raga di kota cimahi
79	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	027/DPU-ABT.PG.03-PL/SPK/XI/2010	98.450.000,00	93.527.500,00	4.922.500,00	penyekatan gedung C3
80	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	027/DPU-ABT.PG.04-PL/SP/XI/2010	99.050.000,00	94.097.500,00	4.952.500,00	penataan sarana penunjang bandung cimahi junction (BJC)
81	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-22/L/BM-DPU/2010	221.010.000,00	209.959.500,00	11.050.500,00	pembuatan saluran dan trotoar jl. HMS mintaredja
82	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/SPKK-30/pml/BM-DPU/2010	94.254.000,00	89.541.300,00	4.712.700,00	penggantian plat beton jl. Amir machmud
83	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-01/pml/BM-DPU/2010	98.770.000,00	93.831.500,00	4.938.500,00	overlay jl. Kihapit
84	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RIFKINDO SAKTI	621/SPKK-05/pml/BM-DPU/2010	97.290.000,00	92.425.500,00	4.864.500,00	pelebaran beton jl. Sekolahan, cimahi tengah
85	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-11/PML/BM-DPU/2010	96.307.000,00	91.491.650,00	4.815.350,00	overlay jl. Usman dhomiri
86	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SENTRAL AGUNG PERKASA	621/SPKK-19/PML/BM-DPU/2010	93.560.000,00	88.882.000,00	4.678.000,00	overlay jl. Sisingamangaraja, cimahi tengah
87	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-24/PML/BM-DPU/2010	91.261.000,00	86.697.950,00	4.563.050,00	overlay jl. Contong
88	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SWASTIKA MEGA UTAMA	621/SPKK-41/PML/BM-DPU/2010	85.380.000,00	81.111.000,00	4.269.000,00	rehabilitasi jalan baros-dustira-sriwijaya-gandawijaya
89	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-47/PML/BM-DPU/2010	74.295.000,00	70.580.250,00	3.714.750,00	jl. Stadion
90	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UJUNG JAYA	621/SPKK-27/PML/BM-DPU/2010	74.393.000,00	70.673.350,00	3.719.650,00	overlay jl. Kebon rumput
91	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MUTIARA TEKNIK	621/SPKK-203/pml/BM-DPU/2010	49.680.000,00	47.196.000,00	2.484.000,00	kelurahan karang mekar
92	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-303/pml/BM-DPU/2010	49.747.000,00	47.259.650,00	2.487.350,00	kelurahan setiamanah
93	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TEKAD MULYA	621/SPKK-197/pml/BM-DPU/2010	49.700.000,00	47.215.000,00	2.485.000,00	kelurahan baros
94	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/SPKK-159/RPJ/BM-DPU/2010	49.679.000,00	47.195.050,00	2.483.950,00	kelurahan cigugur tengah
95	2010	Dinas Pekerjaan Umum	(prayitno basuki)	621/SPKK-177/RPJ/BM-DPU/2010	49.448.000,00	46.975.600,00	2.472.400,00	kelurahan utama
96	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-182/RPJ/BM-DPU/2010	49.516.000,00	47.040.200,00	2.475.800,00	kelurahan cibeureum
97	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI SACITA	621/SPKK-335/RPJ/BM-DPU/2010	49.496.000,00	47.021.200,00	2.474.800,00	pelebaran beton jl. Dustira, cimahi tengah
98	2010	Dinas Pekerjaan Umum	PT. HEMBI GEMILANG	621/SPKK-65/pml/BM-DPU/2010	69.450.000,00	65.977.500,00	3.472.500,00	pemagaran jl. Sriwijaya
99	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MANDIRI JAYA SETIA	621/SPKK-18/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.637.000,00	47.155.150,00	2.481.850,00	jl. Padasuka
100	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-45/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.596.000,00	47.116.200,00	2.479.800,00	jl. Gatot subroto dalam (TEPBK TNI)
101	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARANG NUNGGAL	621/SPKK-57/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.772.000,00	47.283.400,00	2.488.600,00	jl. Baros pasar RW 01 kel. Leuwigajah
102	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-03/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	48.799.000,00	46.359.050,00	2.439.950,00	jl. Encep kartawirya
103	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. INTAN	621/SPKK-32/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.643.000,00	47.160.850,00	2.482.150,00	jl. Sriwijaya (lanjutan)
104	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-111/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.480.000,00	47.006.000,00	2.474.000,00	jl. Mukodar cibeureum
105	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/SPKK-54/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.814.000,00	47.323.300,00	2.490.700,00	jl. Terusan jenderal sudirman
106	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MUTIARA TEKNIK	621/SPKK-93/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.451.000,00	46.978.450,00	2.472.550,00	jl. Kalasan II

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
107	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TUMARITIS	621/SPKK-105/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.548.000,00	47.070.600,00	2.477.400,00	Jl. Sadarmanah
108	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ADHITAMA SARANA	621/SPKK-102/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.391.000,00	46.921.450,00	2.469.550,00	Jl. Padat karya
109	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/SPKK-96/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.542.000,00	47.064.900,00	2.477.100,00	Jl. Bakti I cibeureum
110	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA CITRA UTAMA	621/SPKK-48/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.622.000,00	47.140.900,00	2.481.100,00	Jl. Sriwijaya 1
111	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUNCAK JAYA ABADI	621/SPKK-51/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.640.000,00	47.158.000,00	2.482.000,00	Jl. Sriwijaya 3
112	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. AKAR MANDIRI	621/SPKK-21/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.330.000,00	46.863.500,00	2.466.500,00	pengecatan marka jalan gandawijaya
113	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDHI BUANA	621/SPKK-144/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	48.147.000,00	45.739.650,00	2.407.350,00	drainase jalan melong
114	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SUKONINDO	621/SPKK-66/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.115.000,00	46.659.250,00	2.455.750,00	drainase bapa ampi
115	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SEJAHTERA	621/SPKK-108/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.700.000,00	47.215.000,00	2.485.000,00	Jl. Singosari
116	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RISA	621/SPKK-72/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	45.883.800,00	43.589.610,00	2.294.190,00	pembuatan dan pengecatan median
117	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRA JAYA	621/SPKK-39/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.654.000,00	47.171.300,00	2.482.700,00	Jl. Taman raden saleh kel. Baros
118	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MEGA	621/SPKK-63/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.674.000,00	47.190.300,00	2.483.700,00	Jl. Muhammad yamin
119	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UJUNG JAYA	621/SPKK-30/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	47.063.000,00	44.709.850,00	2.353.150,00	Jl. Pemasangan median
120	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/SPKK-66/PmL-ABT/BM-DPU/2010	59.150.000,00	56.192.500,00	2.957.500,00	kelurahan citeureup
121	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621/SPKK-192/RPJ/BM-DPU/2010	48.006.000,00	45.605.700,00	2.400.300,00	ruas jalan puri cipageran
122	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINA RAYA	621/SPKK-60/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.613.000,00	47.132.350,00	2.480.650,00	Jl. Lingkungan RW 08 Kel. Setiamanah
123	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. INTAN	510.2/5653.A/DPLK/XII/2010	29.719.000,00	28.233.050,00	1.485.950,00	kelurahan cigugur tengah
124	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. GURAT EMAS	510.2/5651.A/DPLK/XII/2010	49.465.000,00	46.991.750,00	2.473.250,00	bumi prima RW 22 kel. Cibabat
125	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SINAR TERANG	510.2/5660.A/DPLK/XII/2010	49.461.000,00	46.987.950,00	2.473.050,00	sungai citaman RW 16 kel. Cibabat
126	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. CIBAJA	510.2/5662.A/DPLK/XII/2010	49.387.000,00	46.917.650,00	2.469.350,00	pemakaman umum RW kel. Cibabat
127	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SANDHI BUANA	510.2/5652.A/DPLK/XII/2010	49.507.000,00	47.031.650,00	2.475.350,00	kel. Karangmekar RW 08 dan 06
128	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. PERKASA UTAMA	510.2/5656.A/DPLK/XII/2010	49.466.000,00	46.992.700,00	2.473.300,00	sungai citaman RW 08 kel. Cibabat
129	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. MEGA	510.2/5654.A/DPLK/XII/2010	49.763.000,00	47.274.850,00	2.488.150,00	kel. Cigugur tengah RW 06
130	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SANTIKA PUTRA USAHA	027/Disdik-71-PL/SPK/X/2010	89.465.000,00	84.991.750,00	4.473.250,00	pembangunan ruang kelas baru SMPN 8
131	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TRIJAYA	027/Disdik-74-PL/SPK/X/2010	79.399.000,00	75.429.050,00	3.969.950,00	Rehab sedang SMPN 10
132	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SUKAHARJA	027/Disdik-76-PL/SPK/X/2010	79.500.000,00	75.525.000,00	3.975.000,00	Rehab sedang SMPN 9
133	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TEAM BANGUN PERKASA	027/Disdik-77-PL/SPK/X/2010	79.463.000,00	75.489.850,00	3.973.150,00	Rehab Berat SMPN 2
134	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. MEGAH JAYA	027/Disdik-134-PL/SPK/X/2010	39.150.000,00	37.192.500,00	1.957.500,00	Rehab sedang SMPN 3
135	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. GURAT EMAS	027/Disdik-100-PL/SPK/X/2010	79.414.000,00	75.443.300,00	3.970.700,00	Rehab berat 1 unit ruang kelas SMPN 5
136	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. GURAT EMAS	027/Disdik-101-PL/SPK/X/2010	79.562.000,00	75.583.900,00	3.978.100,00	Rehab berat 1 unit ruang kelas SMP Muhammadiyah
137	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. KARANG NUNGGAL	027/Disdik-105-PL/SPK/X/2010	79.631.000,00	75.649.450,00	3.981.550,00	Rehab sedang 2 kelas SMPN 5
138	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SATRIA KARYA	027/Disdik-89-PL/SPK/X/2010	79.398.000,00	75.428.100,00	3.969.900,00	rehab berat 1 unit SDN utama mandiri 1
139	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TIGA PUTERI	027/Disdik-123-PL/SPK/X/2010	39.200.000,00	37.240.000,00	1.960.000,00	rehab sedang 1 unit SDN citeureup mandiri 1
140	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	027/Disdik-128-PL/SPK/X/2010	39.150.000,00	37.192.500,00	1.957.500,00	rehab sedang 1 unit SDN utama mandiri 1
141	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. PERKASA UTAMA	027/Disdik-119-PL/SPK/X/2010	79.320.000,00	75.354.000,00	3.966.000,00	rehab sedang 2 unit SMA Pasundan 2 cimahi
142	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. MEGA	027/Disdik-116-PL/SPK/X/2010	79.406.000,00	75.435.700,00	3.970.300,00	rehab berat 1 unit SMAN 6
143	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SINAR TERANG	027/Disdik-132-PL/SPK/X/2010	39.100.000,00	37.145.000,00	1.955.000,00	rehab sedang 1 unit SMK Moh Toha
144	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. CIPTA JAYA KENCANA	027/Disdik-109-PL/SPK/X/2010	89.451.000,00	84.978.450,00	4.472.550,00	ruang kelas baru 1 unit SDN padasuka mandiri 3
73			Sub Total VI		5.211.437.800,00	4.950.865.910,00	260.571.890,00	
145	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DRANARIN ABADI	03/PPK-KIMRUM/SPK/PSR2M/X/2011 03 Oktober 2011	97.960.000,00	93.062.000,00	4.898.000,00	Pembuatan Sumur Resapan Rusunawa Melong

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
146	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GANIJAN JAYA	KPA/SP/DPJ-75-L/X/2011 03 Nopember 2011	147.900.000,00	140.505.000,00	7.395.000,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi RW 13 Kelurahan Utama (DBP)
147	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RIFKINDO SAKTI	KPA/SP/DPJ-04-L/VIII/2011 11 Agustus 2011	166.065.000,00	157.761.750,00	8.303.250,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cipageran RW 10 (DBP)
148	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MELATI	KPA/SP/DPJ-05-L/VIII/2011 11 Agustus 2011	167.736.000,00	159.349.200,00	8.386.800,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cipageran RW 16 (DBP)
149	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GANIJAN JAYA	KPA/SP/DPJ-54-L/IX/2011 05 September 2011	162.795.000,00	154.655.250,00	8.139.750,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Margajaya Kel. Citeureup RW 2 (DBP)
150	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDHI BUANA	KPA/SP/DPJ-55-L/IX/2011 24 Agustus 2011	163.023.000,00	154.871.850,00	8.151.150,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Margaluyu Kel. Cimahi RW 2 (DBP)
151	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV EKA SAPTA	03/PPK- KIMRUM/SPK/NS.CKC/XI/2011 01 Nopember 2011	76.985.000,00	73.135.750,00	3.849.250,00	Rehabilitasi Saluran Cikendal Kel. Cipageran
152	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	17/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	99.407.000,00	94.436.650,00	4.970.350,00	Jl. CIBOGO LAMPING (APBD KOTA CIMAHI)
153	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	48/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.857.000,00	90.114.150,00	4.742.850,00	Jl. KEBON KOPI (DBP JAWA BARAT)
154	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	43/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.019.000,00	90.268.050,00	4.750.950,00	Jl. GANIRAH (DBP JAWA BARAT)
155	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRIJAYA	KPA/SP/DPJ-30-L/VIII/2011 11 Agustus 2011	190.030.000,00	180.528.500,00	9.501.500,00	PEMBANGUNAN SALURAN DI JALAN MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
156	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIRA SAWARGI	46/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.854.000,00	90.111.300,00	4.742.700,00	PERBAIKAN JALAN KEBON KOPI III KEL. CIBEUREUM KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
157	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIDYA TEKNIK	53/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.039.000,00	90.287.050,00	4.751.950,00	PERBAIKAN JALAN MELONG III KEL. MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
158	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MITRA DESA	44/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.788.000,00	90.048.600,00	4.739.400,00	PERBAIKAN JALAN SADARMANAH KEL. CIBEKER KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
159	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NADYA PRATAMA	55/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.657.000,00	89.924.150,00	4.732.850,00	PERBAIKAN Jl. HMS MINTAREJUA IV KEL. UTAMA KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
160	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRIANA AZZAHRA	47/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.649.000,00	89.916.550,00	4.732.450,00	PERBAIKAN Jl. KEBON KOPI IV KEL. CIBEUREUM KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
161	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. HERMI	54/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.800.000,00	90.060.000,00	4.740.000,00	PERBAIKAN Jl. MELONG IV KEL. MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
162	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GLOBALINDO DWI SAKTI	45/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.168.000,00	90.409.600,00	4.758.400,00	PERBAIKAN Jl. SADARMANAH I KEL. CIBEKER KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
163	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	KPA/SP/DPJ-25-L/VIII/2011 04 Agustus 2011	197.903.000,00	188.007.850,00	9.895.150,00	Jl. SETASION (APBD KOTA CIMAHI)
164	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	KPA/SP/DPJ-23-L/VIII/2011 04 Agustus 2011	278.701.000,00	264.765.950,00	13.935.050,00	Jl. URIP SUMOHARDJO (APBD KOTA CIMAHI)
165	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	83/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.293.000,00	88.628.350,00	4.664.650,00	Jl. DJULAEHA (DBP JAWA BARAT)
166	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	86/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.238.000,00	88.576.100,00	4.661.900,00	Jl. SRIWIJAYA (DBP JAWA BARAT)
167	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MADYA KARYA	KPA/SP/DPJ-37-L/VIII/2011 05 Agustus 2011	148.124.000,00	140.717.800,00	7.406.200,00	Jl. CIAWITALI (APBD KOTA CIMAHI)
168	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GUDITA	69/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.090.000,00	89.385.500,00	4.704.500,00	Jl. SANGKURIANG (DBP JAWA BARAT)
169	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SASQIA REZA PRATAMA	56/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.952.000,00	89.254.400,00	4.697.600,00	Jl. CIHANJUANG (DBP JAWA BARAT)
170	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MEGA	57/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.941.000,00	89.243.950,00	4.697.050,00	Jl. PESANTREN (DBP JAWA BARAT)
171	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	72/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.065.000,00	89.361.750,00	4.703.250,00	Jl. CIAWITALI (DBP JAWA BARAT)
172	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRIANA AZZAHRA	74/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.102.000,00	89.396.900,00	4.705.100,00	PERBAIKAN Jl. ENCEP KARTAWIRYA III KEL. CITEREP KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
173	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NADYA PRATAMA	76/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.979.000,00	89.280.050,00	4.698.950,00	PERBAIKAN Jl. SANGKURIANG III KEL. PADASUKA KEC. CIMAHI TENGAH (DBP JAWA BARAT)
174	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIRA SAWARGI	60/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.170.000,00	89.461.500,00	4.708.500,00	PERBAIKAN Jl. CIHANJUANG III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
175	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DEPA PERDANA KONSTRUKSI	61/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.045.000,00	89.342.750,00	4.702.250,00	PERBAIKAN Jl. PESANTREN III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
176	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. HERMI	62/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.180.000,00	89.471.000,00	4.709.000,00	PERBAIKAN Jl. DEMANG III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
177	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRI MANDIRI	68/SPK/RPJ/DPJ-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.010.000,00	89.309.500,00	4.700.500,00	PERBAIKAN Jl. MARGALUYU III KEL. CIMAHI KEC. CIMAHI TENGAH (DBP JAWA BARAT)

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
178	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MITRA DESA	75/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.911.000,00	89.215.450,00	4.695.550,00	PERBAIKAN JI. ENCEP KARTAWIRYA IV KEL. CITEREP KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
179	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GLOBALINDO DWI SAKTI	63/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.010.000,00	89.309.500,00	4.700.500,00	PERBAIKAN JI. CIHANJUANG IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
180	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RINJANI	64/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.987.000,00	89.287.650,00	4.699.350,00	PERBAIKAN JI. PESANTREN IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
181	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIDYA TEKNIK	65/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.084.000,00	89.379.800,00	4.704.200,00	PERBAIKAN JI. DEMANG IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
182	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DEPA PERDANA KONSTRUKSI	78/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.981.000,00	89.281.950,00	4.699.050,00	PERBAIKAN JI. RANCABALI KEL. PASIRKALIKI KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
183	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINA KONSTRUKSI	12/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	99.829.000,00	94.837.550,00	4.991.450,00	Jalan Lingkungan kebon Jeruk (APBD Kota Cimahi)
184	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DILAGGA	621/16/SPK.D/RPJ/DPU-BM/XI/2011 01 Nopember 2011	49.635.000,00	47.153.250,00	2.481.750,00	JALING PASIRKALIKI
185	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRIJAYA	621/17/SPK.D/RPJ/DPU-BM/XI/2011 01 Nopember 2011	49.853.000,00	47.360.350,00	2.492.650,00	JALING CIPAGERAN RW. 05
186	2011	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV. MADYA KARYA	510.2/4260/DKP/X/2011	296.698.000,00	281.863.100,00	14.834.900,00	Pembuatan Sumur Artesis Cibeureum
187	2011	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV. WIDYA TEKNIK	510.2/4261/DKP/X/2011	292.697.000,00	278.062.150,00	14.634.850,00	Pembuatan Sumur Artesis Leuwigajah
188	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV Permata	027/Disdikpora- 25 -L/SPK/X/2011	113.759.000,00	108.071.050,00	5.687.950,00	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pembangunan Perpustk SMP PGRI 3
189	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV TRIJAYA	027/Disdikpora-27-L/SPK/X/2011	227.335.000,00	215.968.250,00	11.366.750,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehab Ruang Kelas SDN Cimahi Mandiri 5
190	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV RIFKINDO SAKTI	KPA/SP/Disdikpora-15-X/2011	106.254.000,00	100.941.300,00	5.312.700,00	Pembangunan ruang kelas lanjutan, rehab, mushola, WC
191	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV Mutiara Teknik	027/disdikpora-114-PL/SPK/2011	24.878.000,00	23.634.100,00	1.243.900,00	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pembangunan Perpustakaan SMP Darussurur
47	Sub Total VII				5.608.436.000,00	5.328.014.200,00	280.421.800,00	
192	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. DILAGGA	027/ Disdikpora/112-PL/SPK/X/2012	14.813.000,00	14.072.350,00	740.650,00	Pemagaran SDN Cibeureum Mandiri 1
193	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. LEMBANG ABADI	027/ Disdikpora/115-PL/SPK/X/2012	15.657.000,00	14.874.150,00	782.850,00	Pemagaran SDN Melong Mandiri 2
194	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. Bina Kontruksi	027/ Disdikpora-025 -L/SPK/IX/2012	244.954.000,00	232.706.300,00	12.247.700,00	Pembuatan Ruang Kelas Baru, Penyelesaian Ruang Kelas, Pemasangan Trails dan Pekerjaan MCK Lanjutan
195	2012	Dinas Kesehatan	CV. FIMOS KARYA	36/SPK/PMB.PKM.CIMSEL(LANJUT ANJ)/KPA/DINKES-PL/VII/2012	49.242.000,00	46.779.900,00	2.462.100,00	Pembangunan Puskesmas Cimahi Selatan (Lanjutan)
196	2012	Dinas Kesehatan	CV. CIPTA JAYA KENCANA	05/PPK/Pojok Laktasi PKM Melong/SPK/Yanmed/Dinkes/VII/2012	49.725.000,00	47.238.750,00	2.486.250,00	Pembangunan Rehab untuk Pojok Laktasi
197	2012	Dinas Kesehatan	CV. NAGA MAS JAYA	02/PPK/Sp.Pem.Pustu Cimenteng_Lanjutan/DINKES/VIII/2012	507.687.000,00	497.467.260,00	10.219.740,00	Pembangunan Puskesmas Pembantu Cimenteng Sehat (Lanjutan)
198	2012	Dinas Kesehatan	CV. INTAN	52/SPK/Rumdin Medis/KPA/DINKES/X/2012	217.652.000,00	201.343.336,00	16.308.664,00	Pembangunan Rumah Dinas Medis
199	2012	Dinas Kesehatan	CV. INTAN	54/SPK/Rumdin Paramedis/KPA/DINKES/X/2012	265.557.000,00	191.216.973,00	74.340.027,00	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
200	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDRILA PUTRA	621/23/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 16 AGUSTUS 2012	269.681.000,00	256.196.950,00	13.484.050,00	Jl. PADAT KARYA
201	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/03/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 15 AGUSTUS 2012	197.202.000,00	187.341.900,00	9.860.100,00	Jl. IBU GANIRAH -WARUNG CONTONG
202	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/05/SPK/RPJ/DPU-BM/II/2012 TANGGAL, 27 FEBRUARI 2012	99.154.000,00	94.196.300,00	4.957.700,00	SALURAN Jl. IBU GANIRAH
203	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/27/SP/RPJ-DBP/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 09 OKTOBER 2012	99.187.000,00	94.227.650,00	4.959.350,00	JL. CISEUPAN

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
204	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	621/15/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 16 AGUSTUS 2012	570.084.000,00	541.579.800,00	28.504.200,00	Jl. DAENG M. ARDIWINATA
205	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/01/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 15 AGUSTUS 2012	197.556.000,00	187.678.200,00	9.877.800,00	Jl. MARTASIK
206	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDRILA PUTRA	621/26/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.208.000,00	94.247.600,00	4.960.400,00	Jl. RANCABALI
207	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/29/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.341.000,00	94.373.950,00	4.967.050,00	Jl. KAMARUNG PAMOYANAN
208	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/02/SP/RPJ-L-DBP/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 05 OKTOBER 2012	542.258.000,00	515.145.100,00	27.112.900,00	PEMBANGUNAN TROTOAR JL. SANGKURIANG
209	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/16/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 23 MEI 2012	99.411.000,00	94.440.450,00	4.970.550,00	JALING PADASUKA (RW. 15)
210	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/07/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 11 MEI 2012	98.334.000,00	93.417.300,00	4.916.700,00	JALING MELONG (RW. 29)
211	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/28/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.540.000,00	94.563.000,00	4.977.000,00	JALING GUNUNG BATU DALAM
212	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/69/SPK/RPJ/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 24 AGUSTUS 2012	99.379.000,00	94.410.050,00	4.968.950,00	JALING KARANG ANYAR CIGUGUR
213	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/72/SPK/RPJ/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 01 OKTOBER 2012	99.213.000,00	94.252.350,00	4.960.650,00	JALAN KEL. CIBEBER
214	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/34/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2012 TANGGAL, 01 JUNI 2012	98.700.000,00	93.765.000,00	4.935.000,00	JALING UTAMA (RW 16)
215	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV.DIMAR	621/18/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 23 MEI 2012	99.126.000,00	94.169.700,00	4.956.300,00	JALING KARANG MEKAR (PANDAY)
216	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PRIMA JAYA	621/56/SPK/RPJ/DPU-BM/II/2012 TANGGAL, 10 JULI 2012	99.302.000,00	94.336.900,00	4.965.100,00	JALING RW. 20 CIPAGERAN
217	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/08/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 11 MEI 2012	98.203.000,00	93.292.850,00	4.910.150,00	JALING KELURAHAN
218	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ABDI JAYA	621/04/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.762.000,00	47.273.900,00	2.488.100,00	JALING NATA ENDAH KEL. CIBABAT
219	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. INDRA NUGRAHA	621/17/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.542.000,00	47.064.900,00	2.477.100,00	JALING KEL. CIBEBER
220	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/06/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	99.121.000,00	94.164.950,00	4.956.050,00	JALAN GATOT SUBROTO
221	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ESA KARYA	621/24/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.613.000,00	47.132.350,00	2.480.650,00	JALAN DAYANG SUMBI
222	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NOVETA SAMUEL	02/PPK/SP-PKSPP/DPU/X/21012	294.524.000,00	279.797.800,00	14.726.200,00	Pembangunan Lanjutan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
223	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	03/PPK-KIMRUM/SPK/PMA/IV/2012	99.518.000,00	94.542.100,00	4.975.900,00	Penyempurnaan Mesjid Agung
224	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	02/PPK/SP-RLKCBT/DPU/X/21012	369.682.000,00	351.197.900,00	18.484.100,00	Rehabilitasi Lanjutan Kantor Kelurahan Cibabat
225	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	03/PPK-KIMRUM/SPK/KNP-PDSK/VI/2012	29.581.000,00	28.101.950,00	1.479.050,00	Pemasangan Kanopi Kantor Kelurahan Padasuka
226	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. FAJAR FIRDAUS	02/PPK-KIMRUM/SPK/TPT.MLNG/VI/21012	99.201.000,00	94.240.950,00	4.960.050,00	Perbaikan TPT di RW. 22 Kel. Melong
227	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MADYA KARYA	03/PPK-KIMRUM/SPK/DRA-LWG/V/2012	87.559.000,00	83.181.050,00	4.377.950,00	Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Leuwigajah
228	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SASQIA REZHA PRATAMA	03/PPK-KIMRUM/SPK/DRA-CBBT/VI/2012	87.477.000,00	83.173.450,00	4.303.550,00	Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Cibabat
229	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	02/PPK/SP-RJILT/DPU/X/21012	140.789.000,00	133.749.550,00	7.039.450,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leuwiteureup
230	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	03/PPK-KIMRUM/SPK/NSC-LWG/XI/2012	99.495.000,00	94.520.250,00	4.974.750,00	Normalisasi Sungai Sungai Cisangkan Kel. Leuwigajah
231	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	02/PPK-KIMRUM/SPK/NS.CBBR/VIII/2012 ADDM.: 076/01/PPK.KIMRUM/ADD/NS.CBBR /VII/2012	98.922.000,00	93.975.900,00	4.946.100,00	Normalisasi Sungai Sungai Cisangkan Cibeber

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
232	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	02/PPK-KIMRUM/SPK/NSS. CTMN/VII/2012	99.470.000,00	94.496.500,00	4.973.500,00	Rehabilitasi/Normalisasi Saluran Sungai Citaman
233	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KHARISMA JAYA MANDIRI	02/PPK/SP-PLKB/DPU/X/21012	482.012.000,00	457.911.400,00	24.100.600,00	Penataan Lapangan Krida Bakti (DBP)
234	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TIGA SAUDARA	02/PPK/SP/DPU-59-L/XI/2012	397.991.000,00	378.091.450,00	19.899.550,00	Penataan Lingkungan Kawasan Rusun Leuwigajah
235	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	03/PPK-KIMRUM/SPK/ART-LWG/VII/2012	49.413.000,00	46.942.350,00	2.470.650,00	Penyempurnaan Artesis RW. 16 Kelurahan Leuwigajah
236	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	03/PPK-KIMRUM/SPK/PGR-RL/VI/2012	99.481.000,00	94.506.950,00	4.974.050,00	Pemasangan Pagar Bagian Depan Rusunawa Leuwigajah
237	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIJAYA KUSUMAH	03/PPK-KIMRUM/FAN-PIPA/XI/2012	49.492.000,00	47.017.400,00	2.474.600,00	Pemasangan Pipa Distribusi dan Kelengkapannya Rusunawa Leuwigajah
238	2012	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV KURNIA PRIMA JAYA	510.2/3965/DKP/IX/2011 tanggal 19 September 2011	198.974.000,00	189.025.300,00	9.948.700,00	Penataan Taman Median Jalan Mintaredja (Tahap II)
239	2012	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV INSUN MEDAL LESTARI	510.2/2366.A/DKP/IX/2011 tanggal 19 September 2011	148.261.000,00	140.847.950,00	7.413.050,00	Pembangunan Gerbang Batas Kota (Padasuka)
48			Sub Total VIII		7.610.046.000,00	7.178.290.369,00	431.755.631,00	
			JUMLAH (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		25.410.986.575,00	24.091.061.777,00	1.319.924.798,00	

Pemerintah Kota Cimahi
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan dan Pembangunan (Retensi)
Per 31 Desember 2022

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	PEMBAYARAN UTANG TAHUN 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	Saldo Utang Retensi	1.319.924.798,00	-	-	1.319.924.798,00
	Total	1.319.924.798,00	-	-	1.319.924.798,00

**Utang RSUD Cibabat Kepada Rekanan
Per 31 Desember 2023**

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2022	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2023	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2023		
					UTANG 2022	UTANG 2023	2022	2023	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
1	ALBA UNIVERSAL ABADI			-		-	-	-	-
2	ANTAR MITRA SEMBADA			43.115.210		28.351.378	-	14.763.832	14.763.832
3	ANUGRAH ARGON MEDIKA	1.340.172.966,10		5.910.622.645	1.340.172.966,10	3.006.976.594	-	2.903.646.051	2.903.646.051
4	AULIA INDOTAMA LESTARI	7.348.200,00		79.981.050	7.348.200,00	79.981.050	-	-	-
5	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	256.743.256,01		2.884.823.021	256.743.256,01	1.914.700.297	-	970.122.724	970.122.724
6	ABADI NUSA USAHA SEMESTA	794.427.000,00		1.547.578.650	794.427.000,00	1.547.578.650	-	-	-
7	ANUGRAH JAYA FORDIC			-		-	-	-	-
8	ANUGRAH KARYA GEMILANG			-		-	-	-	-
9	AMODIA KARYAGUNA SEJAHTERA			-		-	-	-	-
10	ANUGRAH CORONA MEDIKA			-		-	-	-	-
11	ASIA TRAN SINERGI			-		-	-	-	-
12	ALIYPZ INTERNASIONAL			-		-	-	-	-
13	AFINDO BUANA JAYA	12.156.276,00		109.403.817	12.156.276,00	77.639.961	-	31.763.856	31.763.856
14	AGUNG WIJAYA EKASENTOSA			196.170.300		155.361.150	-	40.809.150	40.809.150
15	BINA SAN PRIMA	268.668.416,04		2.004.331.674	268.668.416,04	1.361.420.205	-	642.911.469	642.911.469
16	BRATACO			-		-	-	-	-
17	BIOTEK INTI KORPORINDO	290.315.441,00		1.428.620.392	290.315.441,00	844.659.500	-	583.960.892	583.960.892
18	BERKEMBANG SELARAS DAYA			-		-	-	-	-
19	BUMIASRI ANGSA TANA MANDIRI	11.599.500,00		248.951.871	11.599.500,00	248.951.871	-	-	-
20	BUANA JAYA ALKESINDO			21.312.000		-	-	21.312.000	21.312.000
21	BINA BAKTI NIAGAPERKASA	22.749.998,00		15.749.999	22.749.998,00	15.749.999	-	-	-
22	BIOMEDIKAL SCIENTIFIC INDONESIA			-		-	-	-	-
23	BISAWI TUMBUH SELARAS			48.504.225		29.026.500	-	19.477.725	19.477.725
24	BIO FARMA	59.720.220,00		160.104.624	59.720.220,00	160.104.624	-	-	-
25	BINA ARTHA SEMESTA	10.656.000,00		160.139.700	10.656.000,00	109.745.700	-	50.394.000	50.394.000
26	CIMEKAR RAYA PERKASA	21.319.996,00		128.259.987	21.319.996,00	128.259.987	-	-	-
27	CENTRAL BANDUNG RAYA	3.599.351,00		22.582.801	3.599.351,00	15.697.751	-	6.885.050	6.885.050
28	CIPTA KARUNIA MANDIRI	7.875.117,00		46.722.452	7.875.117,00	46.722.452	-	-	-
29	CIPTA KARYA MANDIRI			-		-	-	-	-

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2022	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2023	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2023		
					UTANG 2022	UTANG 2023	2022	2023	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
30	CITRA DIAN PRATAMA			4.379.801		-	-	4.379.801	4.379.801
31	CORONA CAHAYA SEMESTA			-		-	-	-	-
32	COBRA DENTAL INDONESIA	5.821.950,00		14.774.670	5.821.950,00	7.636.690	-	7.137.980	7.137.980
33	DAYA MUDA AGUNG			8.080.800		4.884.000	-	3.196.800	3.196.800
34	DISTRI VERSA BUANA MAS	21.378.156,00		64.902.210	21.378.156,00	38.397.164	-	26.505.046	26.505.046
35	DEMKA SAKTI			-		-	-	-	-
36	DIASTIKA BIOTEKINDO			75.968.400		75.968.400	-	-	-
37	DAMAI SEJAHTERA MEDIKA			-		-	-	-	-
38	DIFAS PUTRA GEMILANG	5.550.000,00		23.601.375	5.550.000,00	15.734.250	-	7.867.125	7.867.125
39	DUTA BERKAT ABADI			-		-	-	-	-
40	DIRA PHARMA ALKES			-		-	-	-	-
41	DEXA ARFINDO PRATAMA			-		-	-	-	-
42	DOS NI ROHA	62.206.764,00		119.515.537	62.206.764,00	76.838.026	-	42.677.511	42.677.511
43	EZZY GEMILANG JAYA	18.292.800,00		54.878.400	18.292.800,00	54.878.400	-	-	-
44	ELO KARSA UTAMA			-		-	-	-	-
45	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	620.708.175,44		3.180.826.971	620.708.175,44	1.791.846.066	-	1.388.980.905	1.388.980.905
46	FAJAR ALAM SCIENTIFIC	17.598.679,00		40.712.024	17.598.679,00	40.712.024	-	-	-
47	FISMED GLOBAL INDONESIA	219.225.000,00		1.774.043.625	219.225.000,00	1.214.451.000	-	559.592.625	559.592.625
48	FRISMED HOSLAB INDONESIA			-		-	-	-	-
49	GEMPA RAMADHAN			-		-	-	-	-
50	GRACIA PERSADA ABADI			-		-	-	-	-
51	GENETIKA SCIENCE INDONESIA			9.075.000		9.075.000	-	-	-
52	GENTA BUANA ASTADECA			188.811.000		188.811.000	-	-	-
53	GIRI SAKTI UTAMA			250.344.425		133.690.000	-	116.654.425	116.654.425
54	HIKMAH GAS	530.043.426,00		899.858.352	530.043.426,00	899.858.352	-	-	-
55	HARMONI			-		-	-	-	-
56	HOLI PHARMA			23.119.000		23.119.000	-	-	-
57	INTI MEDIKA SARANA			-		-	-	-	-
58	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	3.310.774,00		22.028.790	3.310.774,00	21.208.790	-	820.000	820.000
59	INDOHADETAMA	66.331.380,00		649.694.100	66.331.380,00	649.694.100	-	-	-
60	INDO DENTAL			-		-	-	-	-
61	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA			1.332.000		1.332.000	-	-	-
62	INDOPTA KARYA NETRATAMA			12.465.300		8.935.500	-	3.529.800	3.529.800

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2022	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2023	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2023		
					UTANG 2022	UTANG 2023	2022	2023	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
63	INDO MARTHA PRIMA			52.527.933		3.579.017	-	48.948.916	48.948.916
64	INSAN AFIAT MANDIRI	179.141.689,00		744.205.645	179.141.689,00	569.631.838	-	174.573.807	174.573.807
65	ITAMAYA RANORAYA	639.999.999,47		479.999.997	639.999.999,47	479.999.997	-	-	-
66	IDS MEDICAL SYSTEM INDONESIA	-		-	-	-	-	-	-
67	KIMIA PHARMA	512.738.186,82		3.534.657.028	512.738.186,82	2.275.582.244	-	1.259.074.784	1.259.074.784
68	KOLOSAL PRATAMA			-		-	-	-	-
69	KINARYA PRIMA HUSADA			124.431.000		-	-	124.431.000	124.431.000
70	KASHELARA			-		-	-	-	-
71	KURNIA ASTASURYA			-		-	-	-	-
72	LAKSANA ABADI MANDIRI	115.537.680,00		757.325.250	115.537.680,00	757.325.250	-	-	-
73	LITERA MULTI SARANA			-		-	-	-	-
74	MENSA BINA SUKSES	82.846.174,00		607.489.379	82.846.174,00	385.367.173	-	222.122.206	222.122.206
75	MERAPI UTAMA PHARMA	251.333.128,51		1.775.756.974	251.333.128,51	926.903.930	-	848.853.044	848.853.044
76	MILLENNIUM PHARMACON	125.675.800,96		1.281.550.470	125.675.800,96	751.790.178	-	529.760.292	529.760.292
77	MEGAH MEDIKA PHARMA	22.727.250,00		177.701.969	22.727.250,00	86.982.389	-	90.719.580	90.719.580
78	MEDIKA CAHAYA MANDIRI	8.035.068,00		51.777.281	8.035.068,00	38.968.714	-	12.808.567	12.808.567
79	MESAT INDO GLOBAL			-		-	-	-	-
80	MUARA SAKTI	5.643.600,00		59.511.783	5.643.600,00	42.289.076	-	17.222.707	17.222.707
81	MEDITECH INDONESIA			-		-	-	-	-
82	MEDQUEST JAYA GLOBAL			87.884.986		87.884.986	-	-	-
83	MEDISON JAYA RAYA			-		-	-	-	-
84	MITRA MAJU SENTOSA			-		-	-	-	-
85	MARIN LIZA FARMASI			-		-	-	-	-
86	MULYA HUSADA JAYA			-		-	-	-	-
87	MEDITRANS			275.734.360		70.104.000	-	205.630.360	205.630.360
88	MULTIDAYA MEDIKA			10.004.097		-	-	10.004.097	10.004.097
89	MIDIF FARMA			-		-	-	-	-
90	MAX TECH CARE MEDIKA	581.788.550,44		2.051.777.689	581.788.550,44	2.051.777.689	-	-	-
91	MUNGGARAN ROSARI INDONESIA	58.108.500,00		297.256.312	58.108.500,00	157.268.884	-	139.987.428	139.987.428
92	NUSA KARISMA RAYA	61.810.974,00		766.244.908	61.810.974,00	391.334.662	-	374.910.246	374.910.246
93	NUSA PRATAMA MANDIRI	-		-	-	-	-	-	-
94	NUSA ASIA MEDIKA	15.189.999,66		7.395.000	15.189.999,66	7.395.000	-	-	-
95	NASZA BERDIKARI			-		-	-	-	-

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2022	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2023	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2023		
					UTANG 2022	UTANG 2023	2022	2023	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
96	NAHL MEDICA UTAMA	2.442.000,00		138.905.955	2.442.000,00	120.842.370	-	18.063.585	18.063.585
97	NUANSA JAYA GROUP			-		-	-	-	-
98	NEYKA SHARY PRATAMA	29.259.600,00		1.079.645.815	29.259.600,00	50.194.200	-	1.029.451.615	1.029.451.615
99	OSADHA GRAHA SEJAHTERA			-		-	-	-	-
100	ORIZA MEDIKA MANDIRI			-		-	-	-	-
101	PRIMA ANUGRAH MANDIRI	15.065.226,00		19.394.251	15.065.226,00	10.295.004	-	9.099.247	9.099.247
102	PMI KOTA BANDUNG			196.185.000		196.185.000	-	-	-
103	PRIMA ALKESINDO NUSANTARA			-		-	-	-	-
104	PARIT PADANG	496.670.639,60		4.820.102.811	496.670.639,60	2.768.186.465	-	2.051.916.346	2.051.916.346
105	PRO HEALTH INTERNASIONAL			-		-	-	-	-
106	PUTRA DAFARA LESTARINDO	12.320.112,00		19.281.277	12.320.112,00	17.521.261	-	1.760.016	1.760.016
107	PUTRA SEDIA USAHA			3.994.034		-	-	3.994.034	3.994.034
108	PERUSAHAAN PERDAGANGAN IND			35.757.900		27.691.600	-	8.066.300	8.066.300
109	PRABU MANDIRI JAYA			-		-	-	-	-
110	PENTA VALENT	182.469.726,75		1.564.196.395	182.469.726,75	1.235.344.848	-	328.851.547	328.851.547
111	RAJAWALI MEDIKA MANDIRI	47.810.728,00		146.489.733	47.810.728,00	146.489.733	-	-	-
112	REVAS UTAMA MEDIKA			514.844.979		285.277.476	-	229.567.503	229.567.503
113	REKAMILENIUMINDO SELARAS			83.738.908		23.631.388	-	60.107.520	60.107.520
114	RONTHKARD			-		-	-	-	-
115	RAJAWALI NUSINDO	47.262.261,94		415.445.723	47.262.261,94	183.562.191	-	231.883.532	231.883.532
116	SURYA PRIMA PERKASA			-		-	-	-	-
117	SURGIKA ALKESINDO	20.271.042,00		577.277.091	20.271.042,00	378.981.704	-	198.295.387	198.295.387
118	SAPTA SARI TAMA			25.303.596		-	-	25.303.596	25.303.596
119	SENTRA ASIA GEMILANG	240.508.917,00		1.034.703.039	240.508.917,00	613.793.592	-	420.909.447	420.909.447
120	SUMARSANA/SUMAR SARANA GLOBAL	49.128.600,00		162.155.460	49.128.600,00	44.122.500	-	118.032.960	118.032.960
121	SEHAT MURNI SEJAHTERA			-		-	-	-	-
122	SABA INDOMEDIKA	7.150.620,00		16.543.442	7.150.620,00	16.543.442	-	-	-
123	SAN PRIMA SEJATI			-		-	-	-	-
124	SINERGI TRIDAYA MEDICAL			146.520.000		48.840.000	-	97.680.000	97.680.000
125	SARANA BINA PRATAMA			-		-	-	-	-
126	SAFIRA DWI TAMA			-		-	-	-	-
127	SINAR PANCA MEDIKA	60.140.738,92		446.304.299	60.140.738,92	224.802.557	-	221.501.742	221.501.742
128	SOMETECH INDONESIA			77.280.004		25.679.997	-	51.600.007	51.600.007

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2022	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2023	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2023		
					UTANG 2022	UTANG 2023	2022	2023	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
129	SAYAP SONDA			-		-	-	-	-
130	SUMIFIN CITRA ABADI			-		-	-	-	-
131	SINAR RODA UTAMA			1.880.194.590		1.463.722.590	-	416.472.000	416.472.000
132	SYAHARANI			61.166.000		-	-	61.166.000	61.166.000
133	SURIS WAHANACIPTA			189.782.805		67.257.120	-	122.525.685	122.525.685
134	SETIA GUNA MEDIKA			-		-	-	-	-
135	TUNAS BANGUN PRAKARSA	19.002.090,00		216.470.923	19.002.090,00	148.747.770	-	67.723.153	67.723.153
136	TEMPO	1.271.450,01		-	1.271.450,01	-	-	-	-
137	TRANSMEDIC INDONESIA	73.654.273,00		898.276.003	73.654.273,00	514.458.046	-	383.817.957	383.817.957
138	TAWADA HEALTHCARE	35.974.499,46		375.834.900	35.974.499,46	226.029.300	-	149.805.600	149.805.600
139	TRIPUTRA TECHNOMEDIKA BAHARI	25.019.400,00		256.448.850	25.019.400,00	181.390.650	-	75.058.200	75.058.200
140	TOTAL MEDIKA PERSADA			-		-	-	-	-
141	TRIMITRA INTERNUSA MEDIKA			-		-	-	-	-
142	TANAYA PUTRA MANDIRI	(0)		11.660.550	(0)	11.660.550	-	-	-
143	TRI SAPTA JAYA	82.694.001,78		554.916.822	82.694.001,78	464.053.680	-	90.863.142	90.863.142
144	TRANS BLOOD INDONESIA	94.799.158,00		446.662.871	94.799.158,00	446.662.871	-	-	-
145	TIARA KENCANA	9.213.903,01		98.652.369	9.213.903,01	40.784.770	-	57.867.599	57.867.599
146	TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA			27.010.000		11.110.000	-	15.900.000	15.900.000
147	TERANG JAYA DENTAL SUPPLY			20.433.102		18.143.172	-	2.289.930	2.289.930
148	TIGARAKSA SATRIA			-		-	-	-	-
149	UROGEN ADVANCED SOLUTIONS			46.082.005		46.082.005	-	-	-
150	UNITED DICO CITAS			134.094.504		112.291.796	-	21.802.708	21.802.708
151	USAHA SARANA MEDIKA			-		-	-	-	-
152	USAHA MEDIKA MANDIRI			-		-	-	-	-
153	VERSACON MEDICAL	15.525.000,00		18.490.004	15.525.000,00	18.490.004	-	-	-
154	VIOLET INDONESIA PERSADA	48.648.653,00		46.000.004	48.648.653,00	46.000.004	-	-	-
155	WIKATON MITRA TAMA			234.194.460		113.886.000	-	120.308.460	120.308.460
156	WEY DETANA HOSPINDO	76.039.440,00		84.276.750	76.039.440,00	80.114.250	-	4.162.500	4.162.500
157	WEGO MEDIKA INDONESIA			-		-	-	-	-
158	WORKCKHARDT PHARMA INDO	9.834.800,00		9.834.800	9.834.800,00	9.834.800	-	-	-
159	YABEZ KARYA MANDIRI			117.101.872		59.940.000	-	57.161.872	57.161.872
SUBTOTAL (A)		9.040.572.322,72	-	52.870.272.155	9.040.572.323	34.610.827.164	-	18.259.444.991	18.259.444.991

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2022	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2023	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2023		
					UTANG 2022	UTANG 2023	2022	2023	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
	Penunjang						-		
1	AULIA INDOTAMA LESTARI			32.530.400		32.530.400	-	-	-
2	ANUGRAH ARGON MEDIKA			36.837.250		9.600.000	-	27.237.250	27.237.250
3	BUMIASRI ANGSA TANA MANDIRI			88.325.475		50.030.475	-	38.295.000	38.295.000
4	BIO FARMA			-		-	-	-	-
5	CIPTA KARUNIA MANDIRI			-		-	-	-	-
6	DIASTIKA BIOTEKINDO			67.066.200		64.180.200	-	2.886.000	2.886.000
7	EZZY GEMILANG JAYA			113.592.960		63.287.760	-	50.305.200	50.305.200
8	ENSEVAL PUTRA MEGATRADING			-		-	-	-	-
9	FAJAR ALAM SCIENTIFIC			69.327.453		52.574.040	-	16.753.413	16.753.413
10	GENETIKA SCIENCE INDONESIA			-		-	-	-	-
11	GENTA BUANA ASTADECA			342.340.650		175.557.600	-	166.783.050	166.783.050
12	HIKMAH GAS			980.647.704		169.792.038	-	810.855.666	810.855.666
13	INDOHADETAMA			997.633.590		348.023.961	-	649.609.629	649.609.629
14	ITAMAYA RANORAYA			959.999.999		-	-	959.999.999	959.999.999
15	LAKSANA ABADI MANDIRI			911.461.071		470.051.145	-	441.409.926	441.409.926
16	PMI KOTA BANDUNG			129.660.000		107.055.000	-	22.605.000	22.605.000
17	PURWA ANUGRAH SETIA			26.022.279		26.022.279	-	-	-
18	MAX TECH CARE MEDIKA			112.628.979		112.628.979	-	-	-
19	MEDQUEST JAYA GLOBAL			98.641.990		38.859.990	-	59.782.000	59.782.000
20	NEYKA SHARY PRATAMA			153.017.940		45.830.790	-	107.187.150	107.187.150
21	RAJAWALI MEDIKA MANDIRI			148.164.823		98.265.276	-	49.899.547	49.899.547
22	SINAR RODA UTAMA			1.665.888.000		-	-	1.665.888.000	1.665.888.000
23	SABA INDOMEDIKA			22.983.661		7.711.171	-	15.272.490	15.272.490
24	TRANSMEDIC			-		-	-	-	-
25	TRANS BLOOD INDONESIA			653.044.492		356.231.695	-	296.812.797	296.812.797
26	TANAYA PUTRA MANDIRI			26.823.780		26.823.780	-	-	-
27	UROGEN ADVANCED SOLUTIONS			138.246.015		138.246.015	-	-	-
	SUBTOTAL (B)	-	-	7.774.884.711	-	2.393.302.594	-	5.381.582.117	5.381.582.117
	TOTAL SELURUH (A+B)	9.040.572.323	-	60.645.156.866	9.040.572.323	37.004.129.758	-	23.641.027.108	23.641.027.108

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
Rincian UTANG KJP dan KDN
Per 31 Desember 2023

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN	SALDO
KDN	59.172.520	596.991.975	609.307.945	46.856.550
KJP	255.516.800	2.561.446.500	2.616.686.300	200.277.000
TOTAL	314.689.320	3.158.438.475	3.225.994.245	247.133.550

UTANG KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF (KDN)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
31 Desember 2022	Saldo Utang KDN 2015-Kurang Bayar KDN Juni 2015		100.000	(100.000)
31 Desember 2022	KDN Desember 2022		38.327.520	(38.427.520)
31 Desember 2022	KDN Arus Balik Desember 2022		20.745.000	(59.172.520)
02 Februari 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Desember 2022 - 02.23/04.0/000010/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /M/2/2023	59.072.520		(100.000)
15 Februari 2023	KDN Januari 2023		35.025.270	(35.125.270)
15 Februari 2023	KDN Arus Balik Januari 2023		19.125.000	(54.250.270)
27 Februari 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Januari 2023- 02.23/04.0/000017/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /M/2/2023	54.150.270		(100.000)
31 Maret 2023	KDN Februari 2023		35.832.315	(35.932.315)
31 Maret 2023	KDN Arus Balik Februari 2023		19.455.000	(55.387.315)
02 Februari 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Januari 2023 - 02.23/04.0/000017/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /M/2/2023	59.072.520		3.685.205
18 April 2023	KDN Maret 2023		36.835.260	(33.150.055)
18 April 2023	KDN Arus Balik Maret 2023		19.995.000	(53.145.055)
28 April 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Maret 2023- 02.23/04.0/000058/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.01/4/2023	53.145.055		-
23 Mei 2023	KDN April 2023		31.294.620	(31.294.620)
23 Mei 2023	KDN Arus Balik April 2023		17.235.000	(48.529.620)
31 Mei 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan April 2023- 02.23/04.0/000075/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.02/5/2023	48.529.620		-
20 Juni 2023	KDN Mei 2023		38.652.390	(38.652.390)
20 Juni 2023	KDN Arus Balik Mei 2023		20.925.000	(59.577.390)
27 Juni 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Mei 2023- 02.23/04.0/000091/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.02/6/2023	59.577.390		-
18 Juli 2023	KDN Juni 2023		42.154.560	(42.154.560)
18 Juli 2023	KDN Arus Balik Juni 2023		23.580.000	(65.734.560)

27 Juli 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Juni 2023- 02.23/04.0/000108/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.03/7/2023	65.734.560		-
22 Agustus 2023	KDN Juli 2023		35.670.510	(35.670.510)
22 Agustus 2023	KDN Arus Balik Juli 2023		19.215.000	(54.885.510)
27 September 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Juli 2023- 02.23/04.0/000141/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.03/9/2023	54.885.510		-
04 Oktober 2023	KDN Agustus 2023		26.942.790	(26.942.790)
04 Oktober 2023	KDN Arus Balik Agustus 2023		14.805.000	(41.747.790)
18 Oktober 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Agustus 2023- 02.23/04.0/000158/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.03/10/2023	41.747.790		-
19 Oktober 2023	KDN September 2023		21.173.670	(21.173.670)
19 Oktober 2023	KDN Arus Balik September 2023		12.135.000	(33.308.670)
20 November 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan September 2023- 02.23/04.0/000175/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.04/11/2023	33.308.670		-
24 November 2023	KDN Oktober 2023		26.625.060	(26.625.060)
24 November 2023	KDN Arus Balik Oktober 2023		15.615.000	(42.240.060)
07 Desember 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Oktober 2023- 02.23/04.0/000187/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.04/12/2023	42.240.060		-
13 Desember 2023	KDN November 2023		23.968.980	(23.968.980)
13 Desember 2023	KDN Arus Balik November 2023		13.875.000	(37.843.980)
29 Desember 2023	Pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan November 2023- 02.23/04.0/000209/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.05/12/2023	37.843.980		-
18 Januari 2024	KDN Desember 2023		30.041.550	(30.041.550)
18 Januari 2024	KDN Arus Balik Desember 2023		16.815.000	(46.856.550)

UTANG KOMPENSASI JASA PELAYANAN (KJP)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
31 Desember 2022	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Desember 2022		255.516.800	(255.516.800)
02 Februari 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Desember 2022- 02.23/04.0/000011/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /M/2/2023	255.516.800		-
15 Februari 2023	Kompensasi Jasa Pelayan (KJP) Januari 2023		233.501.800	(233.501.800)
27 Februari 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Januari 2023- 02.23/04.0/000016/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /M/2/2023	233.501.800		-
10 Maret 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) bulan Februari 2023		238.882.100	(238.882.100)
02 Februari 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Februari 2023- 02.23/04.0/000124/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.03/8/2023	255.516.800		16.634.700
18 April 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Maret 2023		245.568.400	(228.933.700)
28 April 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Maret 2023- 02.23/04.0/000059/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.01/4/2023	228.933.700		-
23 Mei 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan April 2023		208.630.800	(208.630.800)
31 Mei 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan April 2023- 02.23/04.0/000074/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.02/5/2023	208.630.800		-
20 Juni 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Mei 2023		257.682.600	(257.682.600)
27 Juni 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Mei 2023- 02.23/04.0/000092/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.02/6/2023	257.682.600		-
18 Juli 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juni 2023		281.030.400	(281.030.400)
27 Juli 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Juni 2023- 02.23/04.0/000107/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.03/7/2023	281.030.400		-
28 Agustus 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juli 2023		237.803.400	(237.803.400)
27 September 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Juli 2023- 02.23/04.0/000142/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.03/9/2023	237.803.400		-

04 Oktober 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Agustus 2023		179.618.600	(179.618.600)
18 Oktober 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Agustus 2023- 02.23/04.0/000159/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.03/10/2023	179.618.600		-
31 Oktober 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan September 2023		141.157.800	(141.157.800)
20 November 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan September 2023- 02.23/04.0/000174/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.04/11/2023	141.157.800		-
15 November 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Oktober 2023		177.500.400	(177.500.400)
06 Desember 2023	Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) TPK Sarimukti DLH Prov. JABAR Bulan Oktober 2023- 02.23/04.0/000186/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.04/12/2023	177.500.400		-
13 Desember 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan November 2023		159.793.200	(159.793.200)
29 Desember 2023	Kompensasi Jasa Pelayanan TPA Sarimukti Bulan November 2023- 02.23/04.0/000210/LS/2.11.1.03.0.00.02.0000 /P.05/12/2023	159.793.200		-
18 Januari 2024	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Desember 2023		200.277.000	(200.277.000)
				(200.277.000)

**Penjelasan Mutasi Penyesuaian Pendapatan LRA - Pendapatan LO
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023**

A	Penjelasan Pendapatan Pajak Daerah LO	
	Pendapatan Pajak Daerah LRA Tahun Berjalan	210.047.163.097,00
	Pembayaran Piutang 2022 - Pajak Hotel	(600.000,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Pajak Resto	(177.400.299,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Pajak Reklame	(321.831.500,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Pajak Parkir	(290.800,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Pajak Pajak Air Tanah	(569.761.226,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Pajak PBB	(9.745.250.936,00)
	Penambahan Piutang Ketetapan Pajak Tahun 2023	14.301.406.307,00
	Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun Berjalan	213.533.434.643,00

B	Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah LO	
	Pendapatan Retribusi Daerah LRA Tahun Berjalan	12.952.863.977,00
	Pembayaran Piutang 2022 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) /PBG	(47.380.307,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Laboratorium (DLH)	(30.434.500,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC) dan Pertokoan	(72.734.700,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	(274.910.400,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Izin Trayek (Dishub)	(750.000,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	(24.980.900,00)
	Penambahan Piutang Ketetapan 2023 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) /PBG	161.104.400,00
	Penambahan Piutang Ketetapan 2023 - Laboratorium (DLH)	11.752.000,00
	Penambahan Piutang Ketetapan 2023 - Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	23.760.000,00
	Penambahan Piutang Ketetapan 2023 - Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	567.837.500,00
	Penambahan Piutang Ketetapan 2023 - Izin Trayek (Dishub)	1.500.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun Berjalan	13.267.627.070,00

C	Penjelasan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	
	Pendapatan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA Tahun Berjalan	11.627.628.409,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO Tahun Berjalan	11.627.628.409,00

C	Penjelasan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LO	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LRA Tahun Berjalan	190.990.650.318,00
	Pembayaran Piutang 2022 - Kontribusi Cimahi Mall	(108.534.973,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Bunga TDF	(2.059.426,94)
	Pembayaran Piutang 2022 - BLUD Air Minum	(639.294.600,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - RSUD	(5.816.252.996,00)
	Pembayaran Piutang 2022 - Dinas Kesehatan	(2.000.000,00)
	Penambahan Piutang Ketetapan Lainnya Tahun 2023	17.515.195.275,00
	Pendapatan dimuka Pengakuan	330.272.010,00
	Pendapatan dimuka Ketetapan	(1.706.337.515,06)
	Pengakuan Piutang Pendapatan Bunga Dana Cadangan	92.038.568,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LO Tahun Berjalan	200.653.676.660,00

D	Penjelasan Dana Bagi Hasil Pajak LO	
	Dana Bagi Hasil Pajak LRA Tahun Berjalan	55.785.582.168,00
	Pengakuan Pendapatan Non Tunai Pajak Penghasilan	(5.737.397.168,00)
	Non Tunai PPh	11.140.294.000,00
	Non Tunai PBB	476.750.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak LO Tahun Berjalan	61.665.229.000,00

E	Penjelasan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA Tahun Berjalan	26.716.968.211,00
	Non Tunai Cukai Hasil Tembakau	(2.754.020.211,00)
	Non Tunai SDA Minyak Bumi	2.597.756.000,00
	Non Tunai Panas Bumi	12.335.631.000,00
	Non Tunai Minerba	83.729.000,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO Tahun Berjalan	38.980.064.000,00

C	Penjelasan Pendapatan DAU LO	
	Pendapatan Pendapatan DAU LRA Tahun Berjalan	553.049.730.500,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan DAU LO Tahun Berjalan	553.049.730.500,00

C	Penjelasan Pendapatan DAK LO	
	Pendapatan Pendapatan DAK LRA Tahun Berjalan	170.482.635.757,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan DAK LO Tahun Berjalan	170.482.635.757,00

C	Penjelasan Pendapatan DID LO	
	Pendapatan Pendapatan DID LRA Tahun Berjalan	-
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan DID LO Tahun Berjalan	-

F	Penjelasan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA Tahun Berjalan	145.938.307.278,00
	Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor 2022	(2.317.152.540,00)
	Pelunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2022	(1.204.696.200,00)
	Pelunasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2022	(1.530.273.536,00)
	Pelunasan Pajak Air Permukaan 2022	(12.737.150,00)
	Pelunasan Pajak Rokok 2022	(2.639.675.826,00)
	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor 2023	1.751.826.270,00
	Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2023	1.063.195.650,00
	Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2023	2.787.619.228,00
	Pendapatan Pajak Air Permukaan 2023	13.001.400,00
	Pendapatan Pajak Rokok 2023	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO Tahun Berjalan	143.849.414.574,00

C	Penjelasan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi LO	
	Pendapatan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi LRA Tahun Berjalan	21.241.493.000,00
	Tidak ada Penyesuaian	-
	Pendapatan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi LO Tahun Berjalan	21.241.493.000,00

G	Penjelasan Pendapatan Hibah LO	
	Pendapatan Hibah LRA Tahun Berjalan	-
	Pendapatan Hibah Dinkes	5.034.292.906,78
	Pendapatan Hibah RSUD	1.585.425.473,85
	Pendapatan Hibah BPBD	586.223.474,00
	Pendapatan Hibah DP3AP2KB	121.497.700,00
	Pendapatan Hibah DLH	4.000.319.228,00
	Pendapatan Hibah Dinas Perhubungan	970.185.160,00
	Pendapatan Hibah LO Tahun Berjalan	12.297.943.942,63

Penjelasan Mutasi Penyesuaian Belanja - Beban
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

A	Penjelasan Beban Pegawai	
	Belanja Pegawai LRA Tahun Berjalan	642.933.272.638,00
	Pengakuan Beban Utang Belanja BLUD	69.143.000,00
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai Dinkes	-
	Beban Pegawai LO Tahun Berjalan	643.002.415.638,00
B	Penjelasan Beban Persediaan	
	Belanja Barang LRA Tahun Berjalan	149.671.062.156,00
	<i>Belanja Persediaan dari BLUD</i>	<i>60.069.355.222,00</i>
	<i>Belanja Persediaan dari BOS</i>	<i>12.465.930.647,00</i>
	<i>BTT yang menjadi Persediaan</i>	<i>157.614.875,00</i>
	<i>Belanja Persediaan Dari Utang</i>	<i>23.733.859.730,00</i>
	<i>Persediaan dari Pendapatan Hibah</i>	<i>6.216.365.345,88</i>
	<i>Koreksi Saldo Awal penyesuaian harga beras (Dispangtan)</i>	<i>192.364.436,00</i>
	<i>Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan mesin ke Persediaan</i>	<i>3.773.767.862,00</i>
	<i>Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan bangunan ke Persediaan</i>	<i>794.734.724,00</i>
	<i>Reklasifikasi dari Belanja Hibah</i>	<i>3.984.385.300,00</i>
	<i>Reklasifikasi dari Belanja Jasa</i>	<i>4.003.396.204,00</i>
	<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan mesin</i>	<i>(36.950.000,00)</i>
	<i>Reklasifikasi ke Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>(430.000,00)</i>
	<i>Reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan</i>	<i>(119.763.200,00)</i>
	<i>Koreksi Keluar Pelunasan Utang Persediaan tahun 2022</i>	<i>(9.268.407.044,72)</i>
	<i>Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca 2023)</i>	<i>(28.570.271.541,95)</i>
	<i>Persediaan Barang Tahun 2022 (Neraca)</i>	<i>28.649.727.503,26</i>
	Beban Persediaan LO Tahun Berjalan	255.716.742.218,47
C	Penjelasan Beban Jasa	
	Belanja Jasa LRA Tahun Berjalan	256.041.665.484,00
	<i>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</i>	<i>27.541.264.993,00</i>
	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.193.032.725,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	123.418.388.557,00
	Reklas Ke jasdari BM (Gedung dan bangunan DPMPTSP)	1.038.331.460,00
	<i>Belanja Persediaan dari BLUD</i>	<i>(60.069.355.222,00)</i>
	<i>Belanja Persediaan dari BOS</i>	<i>(12.465.930.647,00)</i>
	<i>Belanja Pemeliharaan dari BOS</i>	<i>(981.468.379,00)</i>
	<i>Belanja Pemeliharaan dari BLUD</i>	<i>(8.617.942.820,00)</i>
	<i>Belanja Perjalanan Dinas dari BOS</i>	<i>(2.853.057.000,00)</i>
	<i>Belanja Perjalanan Dinas dari BLUD</i>	<i>(1.334.103.564,00)</i>
	<i>Koreksi Pembayaran Utang 2022</i>	<i>(280.857.417,00)</i>
	Aset Tidak Berwujud dari beban jasa	(373.026.920,00)
	Biaya Dibayar Dimuka	(195.970.586,72)
	Selisih Pengakuan dan Pembayaran Utang Belanja	117.287.164,00
	Reklas Jasa ke Pers	(4.003.396.204,00)
	Reklas Ke BM dari Jasa	(510.052.873,00)
	Pelunasan Hutang KJP KDN	(67.555.770,00)
	Pembayaran Utang Pemeliharaan RSUD 2022	(841.643.621)
	Beban Jasa LRA Tahun Berjalan	364.755.609.359,28
D	Penjelasan Beban Pemeliharaan	
	Belanja Pemeliharaan LRA Tahun Berjalan	16.584.485.272,00
	<i>Belanja Pemeliharaan dari BOS</i>	<i>981.468.379,00</i>
	<i>Belanja Pemeliharaan dari BLUD</i>	<i>8.617.942.820,00</i>
	Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Ke Aset Tetap	(81.004.217,00)
	Reklasifikasi Aset tetap Ke Beban Pemeliharaan	
	Reklasifikasi Persediaan Ke Beban Pemeliharaan	119.763.200,00
	Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Ke Persediaan	
	Koreksi Ekuitas ke Beban Pemeliharaan	(125.776.376,00)
	Utang Pemeliharaan RSUD Cibabat	490.476.089,00
	Beban Pemeliharaan LO Tahun Berjalan	26.587.355.167,00

E	Penjelasan Beban Perjalanan Dinas	
	Belanja Perjalanan Dinas LRA Tahun Berjalan	43.935.025.686,00
	Reklas dari Persediaan (Budpar)	430.000,00
	Reklas Dari Beban Jasa (Disarda)	
	Koreksi Isnpektorat	
	Belanja Perjalanan Dinas dari BOS	2.853.057.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas dari BLUD	1.334.103.564,00
	Reklas Ke Persediaan (Setda)	
	Beban Perjalanan Dinas LO Tahun Berjalan	48.122.616.250,00
F	Penjelasan Beban Bunga	
	Belanja Bunga LRA Tahun Berjalan	170.419.912,00
	Reklas Pembayaran Bagian Lancar Utang Bunga 2021 dari beban bunga	(92.533.016,65)
	Pengakuan Utang Bunga 2022	61.632.238,01
	Koreksi Jurnal Selisih pembayaran utang bunga tahun 2021 dengan 2020	
	Beban Bunga LO Tahun Berjalan	139.519.133,36
G	Penjelasan Beban Hibah	
	Belanja Hibah LRA Tahun Berjalan	54.633.767.129,00
	Koreksi Belanja Hibah ke Persediaan - DPUPR	- 3.984.385.300,00
	Beban Hibah LO Tahun Berjalan	50.649.381.829,00
H	Penjelasan Beban Bantuan Soisal	
	Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun Berjalan	4.148.320.000,00
	Tidak ada jurnal penyesuaian	-
	Beban Bantuan Sosial LO Tahun Berjalan	4.148.320.000,00
I	Penjelasan Beban Transfer	
	Belanja transfer LRA Tahun Berjalan	-
	Tidak ada jurnal penyesuaian	-
	Beban transfer LO Tahun Berjalan	-
J	Penjelasan Beban Luar Biasa	
	Belanja BTT LRA Tahun Berjalan	3.006.837.758,00
	Reklas ke Beban Persediaan	- 157.614.875,00
	Reklas ke Aset tetap peralatan dan mesin	- 1.222.705.403,00
	Beban Luar Biasa LO Tahun Berjalan	1.626.517.480,00

Rincian Beban Jasa
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022

9.1.02.02	Beban Jasa-LO	364.755.609.359,28
9.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor-LO	178.137.306.290,00
9.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-LO	379.340.835,00
9.1.02.02.01.0003	Beban Jasa Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-LO	12.668.128.601,00
9.1.02.02.01.0004	Beban Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	785.782.800,00
9.1.02.02.01.0006	Beban Jasa Penyuluhan atau Pendampingan-LO	1.746.324.500,00
9.1.02.02.01.0007	Beban Jasa Rohaniwan-LO	369.075.000,00
9.1.02.02.01.0011	Beban Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan-LO	990.000.000,00
9.1.02.02.01.0012	Beban Jasa Tim Anggaran Pemerintah Daerah-LO	487.300.000,00
9.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-LO	8.305.688.870,00
9.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan-LO	1.637.471.584,00
9.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium-LO	235.570.000,00
9.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-LO	18.642.719.258,00
9.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat-LO	2.476.190.000,00
9.1.02.02.01.0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan-LO	1.527.340.000,00
9.1.02.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana-LO	1.025.834.436,00
9.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial-LO	3.583.795.000,00
9.1.02.02.01.0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan-LO	2.972.288.184,00
9.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan-LO	263.510.528,00
9.1.02.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan-LO	187.580.000,00
9.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan-LO	1.309.395.000,00
9.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi-LO	9.975.637.323,00
9.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer-LO	1.719.180.000,00
9.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO	27.765.257.474,00
9.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli-LO	5.189.167.597,00
9.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan-LO	12.507.372.068,00
9.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan-LO	9.317.406.189,00
9.1.02.02.01.0032	Beban Jasa Tenaga Caraka-LO	425.618.000,00
9.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir-LO	2.121.889.685,00
9.1.02.02.01.0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak-LO	7.200.000,00
9.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik-LO	313.177.150,00
9.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO-LO	196.412.370,00
9.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan-LO	373.548.000,00
9.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi-LO	827.755.000,00
9.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik-LO	429.389.900,00
9.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan-LO	956.400,00
9.1.02.02.01.0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan-LO	599.380.000,00
9.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan-LO	137.947.500,00
9.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi-LO	94.175.175,00
9.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara-LO	13.141.480.410,00
9.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi-LO	5.212.174.315,00
9.1.02.02.01.0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga-LO	45.448.000,00
9.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi-LO	25.173.000,00
9.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah-LO	739.955.792,00
9.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan-LO	1.450.500.615,00
9.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon-LO	286.592.464,00
9.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air-LO	16.400.700,00
9.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik-LO	13.903.554.439,00
9.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-LO	1.077.319.500,00
9.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-LO	5.069.810.462,00
9.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman-LO	48.413.000,00
9.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan-LO	430.792.151,00
9.1.02.02.01.0071	Beban Lembur-LO	4.980.757.550,00
9.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up-LO	80.159.465,00
9.1.02.02.01.0074	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi-LO	-
9.1.02.02.01.0077	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN-LO	33.970.000,00
9.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi-LO	41.481.766.477,99
9.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3-LO	32.243.863.045,00
9.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3-LO	4.754.036.000,00
9.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-LO	2.166.925.617,00
9.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-LO	275.520.759,00
9.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO	323.500.072,00
9.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah-LO	1.461.920.984,99
9.1.02.02.02.0009	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS-LO	256.000.000,00
9.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah-LO	499.436.509,27
9.1.02.02.03.0001	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO	45.375.000,00
9.1.02.02.03.0004	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	454.061.509,27

9.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin-LO	5.961.634.885,05
9.1.02.02.04.0003	Beban Sewa Excavator-LO	-
9.1.02.02.04.0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya-LO	-
9.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	881.505.999,00
9.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang-LO	129.367.500,00
9.1.02.02.04.0096	Beban Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor-LO	31.500.000,00
9.1.02.02.04.0102	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya-LO	-
9.1.02.02.04.0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)-LO	49.470.885,00
9.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya-LO	4.517.693.211,00
9.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel-LO	444.465.000,00
9.1.02.02.04.0120	Beban Sewa Alat Pembersih-LO	129.827.508,00
9.1.02.02.04.0202	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi-LO	15.000.000,00
9.1.02.02.04.0355	Beban Sewa Peralatan Umum-LO	-
9.1.02.02.04.0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya-LO	- 237.195.217,95
9.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan-LO	6.937.469.011,97
9.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor-LO	1.734.505.892,84
9.1.02.02.05.0002	Beban Sewa Bangunan Gudang-LO	1.807.649.756,69
9.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO	2.234.165.695,77
9.1.02.02.05.0010	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO	384.331.000,00
9.1.02.02.05.0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO	14.400.000,00
9.1.02.02.05.0012	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar-LO	55.000.000,00
9.1.02.02.05.0014	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool-LO	45.416.666,67
9.1.02.02.05.0018	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO	75.120.000,00
9.1.02.02.05.0032	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum-LO	182.600.000,00
9.1.02.02.05.0036	Beban Sewa Taman-LO	98.100.000,00
9.1.02.02.05.0040	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III-LO	271.000.000,00
9.1.02.02.05.0041	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-LO	33.620.000,00
9.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel-LO	1.560.000,00
9.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya-LO	360.230.025,00
9.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman-LO	360.230.025,00
9.1.02.02.08	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi-LO	9.600.494.146,00
9.1.02.02.08.0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural-LO	35.925.594,00
9.1.02.02.08.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-LO	81.858.127,00
9.1.02.02.08.0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung-LO	534.945.950,00
9.1.02.02.08.0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior-LO	538.550.000,00
9.1.02.02.08.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-LO	539.141.079,00
9.1.02.02.08.0006	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik-LO	-
9.1.02.02.08.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan-LO	374.476.330,00
9.1.02.02.08.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air-LO	866.295.018,00
9.1.02.02.08.0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi-LO	- 294.042.558,00
9.1.02.02.08.0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya-LO	-
9.1.02.02.08.0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah-LO	660.756.582,00
9.1.02.02.08.0016	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape-LO	197.449.020,00
9.1.02.02.08.0017	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang-LO	612.068.376,00
9.1.02.02.08.0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-LO	481.067.913,00
9.1.02.02.08.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung-LO	207.797.169,00
9.1.02.02.08.0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi-LO	867.944.520,00
9.1.02.02.08.0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air-LO	186.582.681,00
9.1.02.02.08.0023	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang-LO	411.860.172,00
9.1.02.02.08.0027	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta-LO	1.125.876.663,00
9.1.02.02.08.0028	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian-LO	759.184.320,00
9.1.02.02.08.0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan-LO	1.400.757.190,00
9.1.02.02.08.0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan-LO	-
9.1.02.02.08.0037	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya-LO	12.000.000,00
9.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi-LO	2.164.863.311,00
9.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika-LO	308.757.045,00
9.1.02.02.09.0006	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan-LO	118.747.800,00
9.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan-LO	-
9.1.02.02.09.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei-LO	823.220.800,00
9.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen-LO	635.109.771,00
9.1.02.02.09.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus-LO	214.120.645,00
9.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata-LO	64.907.250,00

9.1.02.02.11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS-LO	57.000.000,00
9.1.02.02.11.0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1-LO	13.000.000,00
9.1.02.02.11.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2-LO	22.000.000,00
9.1.02.02.11.0003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3-LO	22.000.000,00
9.1.02.02.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-LO	9.121.089.059,00
9.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan-LO	4.605.467.408,00
9.1.02.02.12.0002	Beban Sosialisasi-LO	2.453.162.751,00
9.1.02.02.12.0003	Beban Bimbingan Teknis-LO	737.146.900,00
9.1.02.02.12.0004	Beban Diklat Kepemimpinan-LO	1.325.312.000,00
9.1.02.02.15	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-LO	565.081.494,00
9.1.02.02.15.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise-LO	278.488.920,00
9.1.02.02.15.0005	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software-LO	286.592.574,00
9.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	24.727.317.038,00
9.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	21.097.032.038,00
9.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan-LO	7.452.228.403,00
9.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan-LO	-
9.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)-LO	3.291.750.000,00
9.1.02.05.01.0008	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain-LO	7.255.177.507,00
9.1.02.05.01.0009	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain-LO	1.684.731.892,00
9.1.02.05.01.0011	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat-LO	1.413.144.236,00
9.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	3.630.285.000,00
9.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-LO	120.390.000,00
9.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat-LO	3.509.895.000,00
9.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS-LO	32.892.576.699,00
9.1.02.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS-LO	32.892.576.699,00
9.1.02.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS-LO	32.892.576.699,00
9.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	52.249.344.413,00
9.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	52.249.344.413,00
9.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	52.249.344.413,00

Rincian Perhitungan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2023

URAIAN	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	SURPLUS/DEFISIT LO	RK PPKD/RK SKPD	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN	KOREKSI NILAI PIUTANG	KOREKSI NILAI UTANG	KOREKSI NILAI PERSEDIaan	KOREKSI NILAI ASET TETAP	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	Penyisihan Piutang	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Amortisasi	PENDAPATAN YANG DITANGGUKHAN	KOREKSI UTANG PFK	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	EKUITAS AKHIR
PPKD-PPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disdik	32.260.964.068,32	(338.209.179.491,33)	270.270.044.554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(28.409.709,95)	-	-	-	-	(35.706.580.578,96)
Dinkes	73.737.692.416,34	(112.090.565.171,63)	105.782.265.937,00	-	-	-	-	23.950.000,00	-	-	10.000,00	(1.003.592.314,33)	-	-	-	-	66.449.760.867,38
RSUD	205.897.132.113,90	(77.862.331.119,84)	47.558.672.419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(284.562.487,35)	-	-	-	-	175.308.910.925,71
DPUR	1.162.132.409.993,43	(116.343.044.107,47)	62.432.476.313,00	-	(64.547.257,60)	-	-	(90.611.407.674,05)	-	-	322.736,29	(22.331.483.855,37)	-	-	-	-	995.214.726.148,23
DPKP	290.220.867.692,28	29.404.623.818,67	78.861.711.766,00	-	-	-	-	666.100.000,00	-	-	-	28.320.248,10	-	-	-	-	399.181.623.525,05
SATPOL PP DAMKAR	6.112.313.384,26	(28.426.113.644,63)	30.203.569.076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.932.070,80)	-	-	-	-	7.868.836.744,83
BPRD	893.908.886,19	(6.385.659.959,24)	7.014.725.795,00	-	-	-	-	(131.000.000,00)	-	-	-	106.234.320,71	-	-	-	-	1.498.209.042,66
DP3AP2KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DINSOS	618.273.366,67	(12.364.066.493,00)	12.484.461.293,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.034.250,00)	-	-	-	-	727.633.916,67
DP3AP2KB	1.450.058.992,76	(18.308.490.846,59)	18.170.824.905,00	-	-	-	-	(39.387.250,00)	-	-	-	10.938.678,52	-	-	-	-	1.283.944.479,69
DISNAKER	731.723.559,50	(11.232.389.570,80)	11.141.936.138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.411.500,00	-	-	-	-	653.681.626,71
PANGAN	27.655.865.751,40	(12.570.139.118,61)	11.971.632.577,00	-	-	-	192.364.436,00	54.050.000,00	-	-	-	139.296.673,08	-	-	-	-	27.443.070.318,87
DLH	48.051.197.690,01	(43.302.102.064,79)	52.515.403.014,00	-	607.500,00	-	157.614.875,00	1.222.705.403,00	-	-	-	(4.084.282.421,05)	-	-	-	-	54.561.143.996,17
DISDUKASIP	2.313.265.465,37	(10.831.934.026,89)	10.654.507.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(94.727.607,15)	-	-	-	-	2.041.111.761,33
DISHUB	56.928.267.691,11	(33.830.086.651,37)	43.757.510.719,00	-	-	-	-	406.017.250,00	-	-	-	(1.041.958.717,60)	-	-	-	-	66.219.750.291,14
DISKOMINFOARPUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISKOMINFO	4.154.913.287,20	(12.110.127.684,70)	11.655.358.152,00	-	-	-	-	69.754.000,00	-	-	2.498.090,00	(55.217.867,14)	-	-	-	-	3.717.177.977,36
DISARDA	3.476.174.824,70	(5.932.424.331,56)	6.141.296.884,00	-	-	-	-	23.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.708.997.377,14
DISDAGKOPERIN	148.207.377.902,04	(25.895.338.309,29)	22.147.983.432,00	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	25.297.512,25	(87.272.025,47)	-	-	-	-	144.412.048.511,53
DPMPTSP	28.089.829.621,02	(26.036.712.548,46)	23.213.738.939,00	-	-	-	-	88.892.283.174,05	-	-	37.581.336,50	(268.228.733,67)	-	-	-	-	113.928.491.788,43
DISBUDPARFORA	41.080.381.672,45	(23.604.871.791,22)	30.758.599.027,00	-	-	-	-	6.266.873.500,00	-	-	-	(397.007.160,30)	-	-	-	-	54.103.975.247,93
BAPPEDA	866.681.488,44	(15.518.696.740,82)	15.885.309.085,00	-	-	-	-	(216.200.000,00)	-	-	-	(9.327.355,00)	-	-	-	-	1.007.766.477,62
BPKAD	353.510.937.508,20	729.885.230.384,20	(610.448.993.652,00)	-	-	-	(157.614.875,00)	(1.208.155.403,00)	-	-	-	382.270.463,93	-	-	-	(7.799.447.216,50)	464.164.227.209,83
BAPENDA	93.078.338.983,47	455.909.909.873,15	(450.559.975.842,00)	-	(52.331.251,57)	-	-	(156.450.000,00)	-	-	120.162.750,40	196.558.706,30	-	-	-	-	98.536.213.219,75
BKPSDMD	544.191.424,83	(11.128.410.791,83)	10.858.205.956,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.955.025,00)	-	-	-	-	264.031.564,00
DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETDA	51.514.464.932,79	(64.705.150.441,65)	62.387.988.479,00	-	-	-	-	(555.084.000,00)	-	-	-	1.761.668.211,01	-	-	-	-	50.403.887.181,15

URAIAN	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	SURPLUS/DEFISIT LO	RK PKD/RK SKPD	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN	KOREKSI NILAI PIUTANG	KOREKSI NILAI UTANG	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	KOREKSI NILAI ASET TETAP	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	Penyisihan Piutang	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Amortisasi	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	KOREKSI UTANG PFK	KEUNTUNGAN /KERUGI AN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	EKUITAS AKHIR
SETWAN	15.650.062.005,37	(97.984.113.678,79)	98.025.837.704,00	-	-		-	330.750.000,00	-	-	-	(433.561.558,93)	-	-	-	-	15.588.974.471,65
INSPEKTORAT	4.267.725.475,30	(12.030.016.221,69)	12.322.268.629,00	-	-		-	-	-	-	-	19.721.214,28	-	-	-	-	4.579.699.096,89
CIMUT	17.850.907.379,84	(27.673.933.279,61)	27.601.060.126,00	-	-		-	(1.715.000.000,00)	-	-	-	133.033.334,09	-	-	-	-	16.196.067.560,32
CIMTENG	20.471.969.126,27	(37.800.949.401,45)	37.759.988.364,00	-	-		-	(1.507.250.000,00)	-	-	-	342.506.864,83	-	-	-	-	19.266.264.953,65
CIMSEL	21.726.390.916,50	(35.509.170.670,39)	35.187.019.455,00	-	-		-	(1.764.000.000,00)	-	-	-	(12.592.462,48)	-	-	-	-	19.627.647.238,63
KESBANG	2.304.135.875,30	(32.401.850.593,86)	32.512.264.208,00	-	-		-	-	-	-	-	(4.987.500,00)	-	-	-	-	2.409.561.989,44
PPKD	233.273.390.848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.273.390.848,00
ELIMINASI			(128.267.691.382,00)														(128.267.691.382,00)
SALDO 2023	2.949.071.814.343,26	(34.888.104.675,48)	-	-	(116.271.009,17)	-	192.364.436,00	66.499.000,00	-	-	185.872.425,44	(27.046.172.906,73)	-	-	-	(7.799.447.216,50)	2.879.666.554.396,81

LAPORAN KEUANGAN SKPD

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	246.765.125.440,00	222.582.632.889,00	90,20	225.282.255.688,00
	Belanja Barang	75.987.325.164,00	73.395.144.274,00	96,59	70.347.209.072,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	23.313.900.000,00	23.181.494.951,00	99,43	21.427.624.835,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.419.805.534,00	4.148.320.000,00	93,86	3.133.871.600,00
	Jumlah Belanja Operasi	350.486.156.138,00	323.307.592.114,00	92,25	320.190.961.195,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	9.313.072.078,00	9.030.706.092,00	96,97	6.071.544.344,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	15.485.010.210,00	14.649.725.616,00	94,61	16.205.049.009,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.625.546.320,00	2.623.098.720,00	99,91	1.207.763.023,00
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	27.423.628.608,00	26.303.530.428,00	95,92	23.484.356.376,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	377.909.784.746,00	349.611.122.542,00	92,51	343.675.317.571,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	377.909.784.746,00	349.611.122.542,00	92,51	343.675.317.571,00
	SURPLUS / DEFISIT	(377.909.784.746,00)	(349.611.122.542,00)	92,51	(343.675.317.571,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(377.909.784.746,00)	(349.611.122.542,00)	92,51	(343.675.317.571,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	(357.056.204.649,00)	(277.715.126.661,00)
	Kas Lainnya	583.400,00	125.000,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	83.333.333,33	90.777.649,58
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	15.532.585,63	15.532.585,63
	Penyisihan Piutang Lainnya	(77.662,93)	(77.662,93)
	Persediaan	832.500,00	61.477.416,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	(356.956.000.492,97)	(277.547.291.672,72)
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	62.055.425.372,00	62.055.425.372,00
	Peralatan dan Mesin	84.771.274.164,36	79.452.983.710,36
	Gedung dan Bangunan	233.217.547.753,31	209.867.061.055,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	599.205.674,00	599.205.674,00
	Aset Tetap Lainnya	51.537.102.666,85	48.942.633.946,85
	Konstruksi dalam Pengerjaan	748.452.896,00	16.599.501.122,31
	Akumulasi Penyusutan	(126.364.582.359,89)	(116.696.965.486,99)
	Jumlah Aset Tetap	306.564.426.166,63	300.819.845.393,53
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	668.380.800,00	668.380.800,00
	Akumulasi Amortisasi	(592.453.615,63)	(510.737.287,50)
	Aset Lain-Lain	14.770.219.423,01	8.991.343.279,01
	Jumlah Aset Lainnya	14.846.146.607,39	9.148.986.791,51
	JUMLAH ASET	(35.545.427.718,95)	32.421.540.512,32

	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	583.400,00	125.000,00
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	160.569.460,00	160.451.444,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	161.152.860,00	160.576.444,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	161.152.860,00	160.576.444,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	(35.706.580.578,95)	32.260.964.068,32
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	(35.545.427.718,95)	32.421.540.512,32

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 355.882.500,00	Rp (355.882.500,00)	(100,00)
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp 355.882.500,00	Rp (355.882.500,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp 355.882.500,00	Rp (355.882.500,00)	(100,00)
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 222.582.632.889,00	Rp 225.440.472.888,00	Rp (2.857.839.999,00)	(1,27)
	Beban Persediaan	Rp 23.349.399.635,00	Rp 15.795.428.303,00	Rp 7.553.971.332,00	47,82
	Beban Jasa	Rp 49.343.091.089,25	Rp 49.510.638.953,42	Rp (167.547.864,17)	(0,34)
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.118.130.379,00	Rp 1.138.475.951,00	Rp (20.345.572,00)	(1,79)
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 3.311.605.291,00	Rp 2.556.605.581,00	Rp 754.999.710,00	29,53
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 23.181.494.951,00	Rp 21.427.624.835,00	Rp 1.753.870.116,00	8,19
	Beban Bantuan Sosial	Rp 4.148.320.000,00	Rp 3.133.871.600,00	Rp 1.014.448.400,00	32,37
	Beban Penyusutan	Rp 9.639.207.162,95	Rp 8.979.792.217,87	Rp 659.414.945,08	7,34
	Beban Amortisasi	Rp 81.716.328,13	Rp 71.715.337,50	Rp 10.000.990,63	13,95
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp (0,00)	Rp 0,00	(100,00)
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 336.755.597.725,33	Rp 328.054.625.666,79	Rp 8.700.972.058,54	2,65
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (336.755.597.725,33)	Rp (327.698.743.166,79)	Rp (9.056.854.558,54)	2,76
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (1.453.581.766,00)	Rp (302.791.080,00)	Rp (1.150.790.686,00)	380,06
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (1.453.581.766,00)	Rp (302.791.080,00)	Rp (1.150.790.686,00)	380,06
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (338.209.179.491,33)	Rp (328.001.534.246,79)	Rp (10.207.645.244,54)	3,11
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -			
	Beban Luar Biasa	Rp -			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (338.209.179.491,33)	Rp (328.001.534.246,79)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PENDIDIKAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	32.260.964.068,32	87.365.167.746,15
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(338.209.179.491,33)	(328.001.534.246,79)
3	RK PPKD/RK SKPD	270.270.044.554,00	268.600.272.836,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	(73.931.290,00)
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	10.000.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	369.656,45
	-Akumulasi Penyusutan	(28.409.709,95)	4.360.619.366,51
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	(35.706.580.578,95)	32.260.964.068,32

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah			-	
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.942.271.420,00	21.516.760.339,00	102,74	18.946.647.100,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	20.942.271.420,00	21.516.760.339,00	102,74	18.946.647.100,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	20.942.271.420,00	21.516.760.339,00	102,74	18.946.647.100,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	59.710.300.798,00	56.538.003.440,00	94,69	55.841.975.796,00
	Belanja Barang	87.887.710.358,00	69.391.640.554,00	78,95	63.689.155.310,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	148.098.011.156,00	126.429.643.994,00	85,37	120.031.131.106,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.436.524.713,00	2.207.793.576,00	64,24	2.184.260.689,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	4.817.323.400,00	4.724.027.155,00	98,06	151.708.650,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	479.622.800,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	8.253.848.113,00	6.931.820.731,00	83,98	2.815.592.139,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	156.351.859.269,00	133.361.464.725,00	85,30	122.846.723.245,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	156.351.859.269,00	133.361.464.725,00	85,30	122.846.723.245,00
	SURPLUS / DEFISIT	(135.409.587.849,00)	(111.844.704.386,00)	82,60	(103.900.076.145,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(135.409.587.849,00)	(111.844.704.386,00)	82,60	(103.900.076.145,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	(1.082.154.639,00)	4.980.283.810,00
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	142.651.976,73	88.411.658,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	2.000.000,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	(10.000,00)
	Persediaan	6.216.159.455,72	9.192.568.546,29
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	5.276.656.793,45	14.263.254.014,62
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	7.870.642.001,00	7.870.642.001,00
	Peralatan dan Mesin	51.300.918.262,61	48.654.512.686,61
	Gedung dan Bangunan	52.192.473.370,00	47.311.454.031,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	898.890.120,00	898.890.120,00
	Aset Tetap Lainnya	61.713.000,00	61.713.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	156.992.184,00
	Akumulasi Penyusutan	(55.915.255.829,26)	(50.892.485.075,52)
	Jumlah Aset Tetap	56.409.380.924,35	54.061.718.947,09
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	172.730.000,00	172.730.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(172.730.000,00)	(169.480.000,00)
	Aset Lain-Lain	4.816.765.244,59	5.449.594.852,63
	Jumlah Aset Lainnya	4.816.765.244,59	5.452.844.852,63
	JUMLAH ASET	66.502.802.962,39	73.777.817.814,34

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	53.042.095,00	40.125.398,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	53.042.095,00	40.125.398,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	53.042.095,00	40.125.398,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	66.449.760.867,39	73.737.692.416,34
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	66.502.802.962,39	73.777.817.814,34

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KESEHATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 21.514.760.339,00	Rp 18.924.727.100,00	Rp 2.590.033.239,00	13,69
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 21.514.760.339,00	Rp 18.924.727.100,00	Rp 2.590.033.239,00	13,69
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 5.034.292.906,78	Rp 9.723.267.574,00	Rp (4.688.974.667,22)	-48,224
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 5.034.292.906,78	Rp 9.723.267.574,00	Rp (4.688.974.667,22)	-48,22
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 26.549.053.245,78	Rp 28.647.994.674,00	Rp (2.098.941.428,22)	-7,327
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 56.538.003.440,00	Rp 55.838.047.224,00	Rp 699.956.216,00	1,25
	Beban Persediaan	Rp 19.553.776.099,35	Rp 20.478.805.199,27	Rp (925.029.099,92)	-4,52
	Beban Jasa	Rp 53.444.009.334,60	Rp 50.680.461.598,67	Rp 2.763.547.735,93	5,45
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.685.151.080,00	Rp 1.091.938.255,00	Rp 593.212.825,00	54,33
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 2.263.420.416,00	Rp 1.139.908.594,00	Rp 1.123.511.822,00	98,56
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 4.019.178.439,42	Rp 4.558.089.958,74	Rp (538.911.519,32)	-11,82
	Beban Amortisasi	Rp 3.250.000,00	Rp 9.492.500,00	Rp (6.242.500,00)	-65,76
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 10.000,00	Rp (10.000,00)	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 138.006.788.809,37	Rp 134.296.753.329,68	Rp 3.710.035.479,69	2,76
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (111.457.735.563,59)	Rp (105.648.758.655,68)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (632.829.608,04)	Rp (122.305.600,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (632.829.608,04)	Rp (122.305.600,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (112.090.565.171,63)	Rp (105.771.064.255,68)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (112.090.565.171,63)	Rp (105.771.064.255,68)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KESEHATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	73.737.692.416,34	67.270.559.577,05
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(112.090.565.171,63)	(105.771.064.255,68)
3	RK PPKD/RK SKPD	105.782.265.937,00	105.705.912.601,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	23.950.000,00	10.000.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	10.000,00	119.600,00
	-Akumulasi Penyusutan	(1.003.592.314,33)	6.522.164.893,97
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	66.449.760.867,39	73.737.692.416,34

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - CIBABAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah			-	
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	145.000.000.000,00	149.918.888.476,00	103,39	136.867.524.937,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	145.000.000.000,00	149.918.888.476,00	103,39	136.867.524.937,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	145.000.000.000,00	149.918.888.476,00	103,39	136.867.524.937,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	99.021.394.093,00	94.532.301.549,00	95,47	112.469.799.875,00
	Belanja Barang	101.328.201.198,00	106.113.577.056,00	104,72	107.828.779.122,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	200.349.595.291,00	200.645.878.605,00	100,15	220.298.578.997,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.000.000.000,00	3.065.356.844,00	76,63	3.538.373.366,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.520.898.519,00	76,04	1.494.390.175,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	6.000.000.000,00	4.586.255.363,00	76,44	5.032.763.541,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	206.349.595.291,00	205.232.133.968,00	99,46	225.331.342.538,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	206.349.595.291,00	205.232.133.968,00	99,46	225.331.342.538,00
	SURPLUS / DEFISIT	(61.349.595.291,00)	(55.313.245.492,00)	90,16	(88.463.817.601,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SilPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(61.349.595.291,00)	(55.313.245.492,00)	90,16	(88.463.817.601,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA RSU CIBABAT
Per 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	3.293.628.125,00	11.048.201.198,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	8.054.883,33	18.200.144,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	16.946.272.115,00	5.903.205.836,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(204.342.390,87)	(70.642.371,48)
	Persediaan	10.843.825.379,81	10.327.639.662,80
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	30.887.438.112,28	27.226.604.469,82
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	28.362.300.000,00	28.362.300.000,00
	Peralatan dan Mesin	278.621.045.253,24	275.701.287.879,49
	Gedung dan Bangunan	130.297.688.373,20	128.993.130.638,20
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.127.838.639,00	7.127.838.639,00
	Aset Tetap Lainnya	12.025.600,00	12.025.600,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(285.749.378.688,84)	(260.630.402.979,73)
	Jumlah Aset Tetap	158.671.519.176,60	179.566.179.776,96
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	392.194.000,00	392.194.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(392.194.000,00)	(392.194.000,00)
	Aset Lain-Lain	10.181.028.566,83	10.181.028.566,83
	Jumlah Aset Lainnya	10.181.028.566,83	10.181.028.566,83
	JUMLAH ASET	199.739.985.855,70	216.973.812.813,62

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	790.047.822,00	2.036.108.377,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	23.641.027.108,00	9.040.572.322,72
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	24.431.074.930,00	11.076.680.699,72
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	24.431.074.930,00	11.076.680.699,72
III	EKUITAS		
	EKUITAS	175.308.910.925,70	205.897.132.113,90
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	199.739.985.855,70	216.973.812.813,62

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL RSU CIBABAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 160.961.954.755	Rp 136.108.212.522	Rp 24.853.742.233	18,26
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 160.961.954.755	Rp 136.108.212.522	Rp 24.853.742.233	18,26
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 1.585.425.473,85	Rp 1.190.538.903,00	Rp 394.886.570,85	33,17
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 1.585.425.473,85	Rp 1.190.538.903,00	Rp 394.886.570,85	33,17
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 162.547.380.228,85	Rp 137.298.751.425,00	Rp 25.248.628.803,85	18,39
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 94.532.301.549,00	Rp 112.469.799.875,00	Rp (17.937.498.326,00)	-15,95
	Beban Persediaan	Rp 70.579.901.586,37	Rp 56.065.970.666,72	Rp 14.513.930.919,65	25,89
	Beban Jasa	Rp 42.480.472.310,17	Rp 52.496.638.792,83	Rp (10.016.166.482,66)	-19,08
	Beban Pemeliharaan	Rp 7.796.059.662,00	Rp 841.643.621,00	Rp 6.954.416.041,00	826,29
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 52.863.000,00	Rp -	Rp 52.863.000,00	
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 24.834.413.221,76	Rp 28.742.733.143,70	Rp (3.908.319.921,94)	-13,60
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 33.061.000,00	Rp (33.061.000,00)	-100,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 133.700.019,39	Rp -	Rp 133.700.019,39	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 240.409.711.348,69	Rp 250.649.847.099,25	Rp (10.240.135.750,56)	-4,09
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (77.862.331.119,84)	Rp (113.351.095.674,25)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (705.854.800,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (705.854.800,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (77.862.331.119,84)	Rp (114.056.950.474,25)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (77.862.331.119,84)	Rp (114.056.950.474,25)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS RSU CIBABAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	205.897.132.113,90	246.870.957.407,95
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(77.862.331.119,84)	(114.056.950.474,25)
3	RK PPKD/RK SKPD	47.558.672.419,00	58.522.399.325,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	0,39
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	(197.129.997,09)
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	(197.129.997,09)
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	194.051.245,00
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	5.796.584.775,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	797.517.935,13
	-Akumulasi Penyusutan	(284.562.487,35)	7.969.701.896,76
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	175.308.910.925,70	205.897.132.113,90

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	7.178.253.585,00	6.959.697.408,00	96,96	7.458.012.412,00
	Belanja Barang	39.862.219.174,00	37.528.279.369,00	94,14	23.603.003.616,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	4.057.437.000,00	3.984.385.300,00	98,20	791.546.600,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	51.097.909.759,00	48.472.362.077,00	94,86	31.852.562.628,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	345.413.800,00	338.593.450,00	98,03	192.712.560,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	9.183.000.000,00	9.154.218.520,00	99,69	3.461.825.662,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.531.503.000,00	4.467.302.266,00	98,58	10.711.443.578,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	14.059.916.800,00	13.960.114.236,00	99,29	14.365.981.800,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	65.157.826.559,00	62.432.476.313,00	95,82	46.218.544.428,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	65.157.826.559,00	62.432.476.313,00	95,82	46.218.544.428,00
	SURPLUS / DEFISIT	(65.157.826.559,00)	(62.432.476.313,00)	95,82	(46.218.544.428,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(65.157.826.559,00)	(62.432.476.313,00)	95,82	(46.218.544.428,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	954.776.694,00	1.328.758.854,10
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	64.547.257,60
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	(322.736,29)
	Persediaan	7.612.554.150,00	4.065.469.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	8.567.330.844,00	5.458.452.375,41
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	642.516.393.932,60	666.404.861.656,00
	Peralatan dan Mesin	11.678.049.455,00	11.339.456.005,00
	Gedung dan Bangunan	80.970.572.263,00	71.830.684.743,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	674.195.051.043,74	585.506.986.004,84
	Aset Tetap Lainnya	534.085.000,00	534.085.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.066.464.800,00	181.462.041.369,05
	Akumulasi Penyusutan	(500.792.736.460,50)	(442.896.350.561,65)
	Jumlah Aset Tetap	911.167.880.033,84	1.074.181.764.216,24
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Aset Tak Berwujud	1.500.774.910,00	1.500.774.910,00
	Akumulasi Amortisasi	(1.238.760.983,13)	(1.056.248.496,25)
	Aset Lain-Lain	71.869.436.057,50	78.699.708.589,03
	Jumlah Aset Lainnya	75.479.794.984,38	82.492.580.002,78
	JUMLAH ASET	995.215.005.862,22	1.162.132.796.594,43

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	279.714,00	386.601,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	279.714,00	386.601,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	279.714,00	386.601,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	995.214.726.148,22	1.162.132.409.993,43
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	995.215.005.862,22	1.162.132.796.594,43

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2023		2022	
		Kenaikan / Penurunan		(−)	
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp	-	Rp	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	-	Rp	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	-	Rp	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	-	Rp	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	-	Rp	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp	-	Rp	-
	Dana Alokasi Umum	Rp	-	Rp	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp	-	Rp	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp	-	Rp	-
	Dana Penyesuaian	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp	-	Rp	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	-	Rp	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	-	Rp	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp	-	Rp	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp	-	Rp	-
	Pendapatan Lainnya	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	-	Rp	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	-	Rp	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp	6.959.697.408,00	Rp	7.458.012.412,00
	Beban Persediaan	Rp	30.798.442.183,00	Rp	15.927.503.780,00
	Beban Jasa	Rp	6.344.597.913,10	Rp	5.700.546.559,27
	Beban Pemeliharaan	Rp	516.787.000,00	Rp	496.495.250,00
	Beban Perjalanan Dinas	Rp	253.004.462,00	Rp	131.387.223,00
	Beban Bunga	Rp	-	Rp	-
	Beban Subsidi	Rp	-	Rp	-
	Beban Hibah	Rp	-	Rp	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp	-	Rp	-
	Beban Penyusutan	Rp	35.564.902.043,48	Rp	23.952.793.875,90
	Beban Amortisasi	Rp	182.512.486,88	Rp	148.175.471,25
	Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	Rp	(0,00)
	Beban Transfer	Rp	-	Rp	-
	Beban Lain-lain	Rp	-	Rp	-
	JUMLAH BEBAN	Rp	80.619.943.496,45	Rp	53.814.914.571,42
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp	(80.619.943.496,45)	Rp	(53.814.914.571,42)
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	(35.723.100.611,03)	Rp	(14.800.000,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp	(35.723.100.611,03)	Rp	(14.800.000,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp	(116.343.044.107,48)	Rp	(53.829.714.571,42)
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp	-	Rp	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp	(116.343.044.107,48)	Rp	(53.829.714.571,42)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	1.162.132.409.993,43	1.124.789.789.015,21
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(116.343.044.107,48)	(53.829.714.571,42)
3	RK PPKD/RK SKPD	62.432.476.313,00	46.218.544.428,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(64.547.257,60)	(331.908.121,95)
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(90.611.407.674,05)	22.500.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	322.736,29	1.659.540,60
	-Akumulasi Penyusutan	(22.331.483.855,37)	45.261.539.702,99
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	995.214.726.148,22	1.162.132.409.993,43

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah	3.466.899.145,00	3.848.764.750,00	111,01	3.312.360.350,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.771.022.190,00	5.604.605.804,00	117,47	5.157.174.326,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	8.237.921.335,00	9.453.370.554,00	114,75	8.469.534.676,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	8.237.921.335,00	9.453.370.554,00	114,75	8.469.534.676,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	11.266.032.892,00	10.763.539.919,00	95,54	10.639.887.434,00
	Belanja Barang	62.703.171.832,00	58.483.773.905,00	93,27	40.454.265.262,00
	Belanja Bunga				
	Belanja Subsidi				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	73.969.204.724,00	69.247.313.824,00	93,62	51.094.152.696,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	93.769.485,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	2.355.684.800,00	2.136.044.191,00	90,68	394.876.748,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.118.047.730,00	1.094.118.645,00	97,86	728.200.565,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.483.550.032,00	15.688.695.759,00	95,18	2.845.238.019,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	19.980.000,00
	Belanja Aset Lainnya	220.000.000,00	186.309.948,00	84,69	-
	Jumlah Belanja Modal	20.177.282.562,00	19.105.168.543,00	94,69	4.082.064.817,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	94.146.487.286,00	88.352.482.367,00	93,85	55.176.217.513,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	94.146.487.286,00	88.352.482.367,00	93,85	55.176.217.513,00
IV	SURPLUS / DEFISIT	(85.908.565.951,00)	(78.899.111.813,00)	91,84	(46.706.682.837,00)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(85.908.565.951,00)	(78.899.111.813,00)	91,84	(46.706.682.837,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	1.548.921.537,00	1.586.321.584,00
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	579.827.960,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	3.044.172.782,00	2.751.245.682,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.648.078.744,50)	(2.117.014.375,25)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	116.269.657,50	184.563.862,44
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	1.835.861.000,00	1.819.279.600,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.242.121.970,50)	(1.140.593.793,00)
	Persediaan	379.359.762,00	286.943.083,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	3.034.384.023,50	3.950.573.603,19
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	227.160.587.807,00	127.698.970.377,00
	Peralatan dan Mesin	14.707.681.480,76	12.350.696.157,76
	Gedung dan Bangunan	39.257.372.437,00	37.906.672.764,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	157.102.535.161,00	142.511.091.022,00
	Aset Tetap Lainnya	16.370.719.815,00	16.621.893.815,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	258.145.030,00
	Akumulasi Penyusutan	(59.495.047.310,33)	(51.847.793.988,15)
	Jumlah Aset Tetap	395.103.849.390,43	285.499.675.177,61
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	536.171.588,00	324.720.140,00
	Akumulasi Amortisasi	(352.788.932,00)	(265.116.535,00)
	Aset Lain-Lain	1.571.581.135,12	1.362.134.994,48
	Jumlah Aset Lainnya	1.754.963.791,12	1.421.738.599,48
	JUMLAH ASET	399.893.197.205,05	290.871.987.380,28

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	144.857.720,00	71.291.728,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	566.715.960,00	579.827.960,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	711.573.680,00	651.119.688,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	711.573.680,00	651.119.688,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	399.181.623.525,05	290.220.867.692,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	399.893.197.205,05	290.871.987.380,28

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 4.141.691.850,00	Rp 4.070.853.350,00	Rp 70.838.500,00	1,74
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 5.621.187.204,00	Rp 5.393.946.626,00	Rp 227.240.578,00	4,21
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 9.762.879.054,00	Rp 9.464.799.976,00	Rp 298.079.078,00	3,15
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 1.660.622.899,00	Rp -	
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp 1.660.622.899,00	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 9.762.879.054,00	Rp 11.125.422.875,00	Rp (1.362.543.821,00)	-12,25
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 10.832.682.919,00	Rp 10.639.887.434,00	Rp 192.795.485,00	1,81
	Beban Persediaan	Rp 28.318.727.655,00	Rp 15.561.533.048,00	Rp 12.757.194.607,00	81,98
	Beban Jasa	Rp 27.362.508.079,94	Rp 21.822.900.831,41	Rp 5.539.607.248,53	25,38
	Beban Pemeliharaan	Rp 2.065.560.434,00	Rp 2.884.177.741,00	Rp (818.617.307,00)	-28,38
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 699.276.214,00	Rp 389.776.377,00	Rp 309.499.837,00	79,40
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 7.675.573.570,28	Rp 6.870.607.166,11	Rp 804.966.404,17	11,72
	Beban Amortisasi	Rp 87.672.397,00	Rp 44.001.410,00	Rp 43.670.987,00	99,25
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 632.592.546,75	Rp 1.052.917.237,75	Rp (420.324.691,00)	-39,92
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 77.674.593.815,97	Rp 59.265.801.245,27	Rp 18.408.792.570,70	31,06
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (67.911.714.761,97)	Rp (48.140.378.370,27)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 97.316.338.580,64	Rp (445.389.165,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp 97.316.338.580,64	Rp (445.389.165,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 29.404.623.818,67	Rp (48.585.767.535,27)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 29.404.623.818,67	Rp (48.585.767.535,27)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	290.220.867.692,28	280.047.606.231,48
2	SURPLUS/DEFISIT LO	29.404.623.818,67	(48.585.767.535,27)
3	RK PPKD/RK SKPD	78.861.711.766,00	47.431.532.326,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
8	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
9	KOREKSI NILAI ASET TETAP	666.100.000,00	12.883.431.328,00
10	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
11	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	28.320.248,10	(1.555.934.657,93)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
12	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
13	KOREKSI UTANG PFK	-	-
14	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
15	EKUITAS AKHIR	399.181.623.525,05	290.220.867.692,28

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30	115.297.500,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30	115.297.500,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	125.000.000,00	137.874.000,00	110,30	115.297.500,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	15.239.340.282,00	14.425.225.674,00	94,66	14.630.239.549,00
	Belanja Barang	13.711.521.770,00	13.163.411.202,00	96,00	8.251.531.644,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	805.620.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	28.950.862.052,00	27.588.636.876,00	95,29	23.687.391.193,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	2.777.124.750,00	2.753.166.200,00	99,14	462.971.800,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	2.777.124.750,00	2.753.166.200,00	99,14	462.971.800,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	31.727.986.802,00	30.341.803.076,00	95,63	24.150.362.993,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	31.727.986.802,00	30.341.803.076,00	95,63	24.150.362.993,00
	SURPLUS / DEFISIT	(31.602.986.802,00)	(30.203.929.076,00)	95,57	(24.035.065.493,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(31.602.986.802,00)	(30.203.929.076,00)	95,57	(24.035.065.493,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	360.000,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	47.095.525,00	41.863.202,08
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	47.095.525,00	42.223.202,08
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	16.462.668.709,34	13.718.527.509,34
	Gedung dan Bangunan	1.800.860.743,00	1.800.860.743,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	97.119.000,00	97.119.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(14.072.621.660,51)	(13.084.214.420,16)
	Jumlah Aset Tetap	4.288.026.791,83	2.532.292.832,18
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	65.000.000,00	65.000.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(65.000.000,00)	(60.000.000,00)
	Aset Lain-Lain	3.534.507.790,00	3.534.507.790,00
	Jumlah Aset Lainnya	3.534.507.790,00	3.539.507.790,00
	JUMLAH ASET	7.869.630.106,83	6.114.023.824,26

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	793.362,00	1.710.440,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	793.362,00	1.710.440,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	793.362,00	1.710.440,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	7.868.836.744,83	6.112.313.384,26
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.869.630.106,83	6.114.023.824,26

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 137.874.000,00	Rp 115.297.500,00	Rp 22.576.500,00	19,58
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 137.874.000,00	Rp 115.297.500,00	Rp 22.576.500,00	19,58
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 137.874.000,00	Rp 115.297.500,00	Rp 22.576.500,00	19,58
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 14.425.225.674,00	Rp 14.630.239.549,00	Rp (205.013.875,00)	-1,40
	Beban Persediaan	Rp 6.664.691.680,00	Rp 2.476.125.748,00	Rp 4.188.565.932,00	169,16
	Beban Jasa	Rp 5.370.850.813,08	Rp 4.848.227.562,00	Rp 522.623.251,08	10,78
	Beban Pemeliharaan	Rp 697.579.500,00	Rp 688.941.642,00	Rp 8.637.858,00	1,25
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 433.164.808,00	Rp 245.369.000,00	Rp 187.795.808,00	76,54
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp 805.620.000,00	Rp (805.620.000,00)	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 967.475.169,55	Rp 603.917.974,08	Rp 363.557.195,47	60,20
	Beban Amortisasi	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 28.563.987.644,63	Rp 24.303.441.475,08	Rp 4.260.546.169,55	17,53
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (28.426.113.644,63)	Rp (24.188.143.975,08)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (28.426.113.644,63)	Rp (24.188.143.975,08)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (28.426.113.644,63)	Rp (24.188.143.975,08)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMADAM
KEBAKARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	6.112.313.384,26	2.707.889.884,00
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(28.426.113.644,63)	(24.188.143.975,08)
3	RK PPKD/RK SKPD	30.203.569.076,00	24.035.425.493,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(20.932.070,80)	3.557.141.982,34
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	7.868.836.744,83	6.112.313.384,26

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	2.679.551.591,00	2.547.922.629,00	95,09	2.573.133.397,00
	Belanja Barang	4.277.893.270,00	4.091.234.166,00	95,64	3.675.825.943,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	41.540.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	6.957.444.861,00	6.639.156.795,00	95,43	6.290.499.340,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	320.728.000,00	312.789.000,00	97,52	516.691.450,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	69.826.000,00
	Belanja Aset Lainnya	63.150.000,00	62.780.000,00	99,41	-
	Jumlah Belanja Modal	383.878.000,00	375.569.000,00	97,84	586.517.450,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	7.341.322.861,00	7.014.725.795,00	95,55	6.877.016.790,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.341.322.861,00	7.014.725.795,00	95,55	6.877.016.790,00
	SURPLUS / DEFISIT	(7.341.322.861,00)	(7.014.725.795,00)	95,55	(6.877.016.790,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(7.341.322.861,00)	(7.014.725.795,00)	95,55	(6.877.016.790,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	88.463.495,00	85.343.412,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	320.318.312,00	343.162.536,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	408.781.807,00	428.505.948,50
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.991.693.468,00	2.237.459.194,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(1.955.322.694,34)	(1.787.125.330,31)
	Jumlah Aset Tetap	1.046.170.773,66	460.133.863,69
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	62.780.000,00	-
	Akumulasi Amortisasi	(15.695.000,00)	-
	Aset Lain-Lain	-	8.900.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	47.085.000,00	8.900.000,00
	JUMLAH ASET	1.502.037.580,66	897.539.812,19

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	3.828.538,00	3.630.926,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.828.538,00	3.630.926,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.828.538,00	3.630.926,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.498.209.042,66	893.908.886,19
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.502.037.580,66	897.539.812,19

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 586.223.474,00	Rp 38.934.050,00	Rp 547.289.424,00	1.405,68
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 586.223.474,00	Rp 38.934.050,00	Rp 547.289.424,00	1.405,68
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 586.223.474,00	Rp 38.934.050,00	Rp 547.289.424,00	1.405,68
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 2.547.922.629,00	Rp 2.388.762.313,00	Rp 159.160.316,00	6,66
	Beban Persediaan	Rp 1.550.540.523,00	Rp 1.695.897.630,00	Rp (145.357.107,00)	-8,57
	Beban Jasa	Rp 1.917.783.697,50	Rp 2.263.158.462,83	Rp (345.374.765,33)	-15,26
	Beban Pemeliharaan	Rp 317.112.189,00	Rp 237.604.814,00	Rp 79.507.375,00	33,46
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 339.497.710,00	Rp 166.062.587,00	Rp 173.435.123,00	104,44
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 274.431.684,74	Rp 196.662.469,31	Rp 77.769.215,43	39,54
	Beban Amortisasi	Rp 15.695.000,00	Rp -	Rp 15.695.000,00	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 6.962.983.433,24	Rp 6.948.148.276,14	Rp 14.835.157,10	0,21
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (6.376.759.959,24)	Rp (6.909.214.226,14)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (8.900.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (8.900.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (6.385.659.959,24)	Rp (6.909.214.226,14)		-
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (6.385.659.959,24)	Rp (6.909.214.226,14)		-

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	893.908.886,19	1.392.427.100,33
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(6.385.659.959,24)	(6.909.214.226,14)
3	RK PPKD/RK SKPD	7.014.725.795,00	6.430.337.518,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	(6.512.936,00)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(131.000.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	106.234.320,71	(13.128.570,00)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	1.498.209.042,66	893.908.886,19

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.542.364.883,00	4.378.728.346,00	96,40	3.596.948.771,00
	Belanja Barang	11.726.032.600,00	7.794.965.697,00	66,48	5.187.569.174,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	16.268.397.483,00	12.173.694.043,00	74,83	8.784.517.945,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	324.896.800,00	310.767.250,00	95,65	618.438.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	324.896.800,00	310.767.250,00	95,65	618.438.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	16.593.294.283,00	12.484.461.293,00	75,24	9.402.955.945,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	16.593.294.283,00	12.484.461.293,00	75,24	9.402.955.945,00
	SURPLUS / DEFISIT	(16.593.294.283,00)	(12.484.461.293,00)	75,24	(9.402.955.945,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(16.593.294.283,00)	(12.484.461.293,00)	75,24	(9.402.955.945,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS SOSIAL
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	33.518.716,67	36.033.066,67
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	33.518.716,67	36.033.066,67
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	1.993.673.273,54	1.688.049.273,54
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(1.394.619.673,54)	(1.124.574.273,54)
	Jumlah Aset Tetap	599.053.600,00	563.475.000,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	100.800.000,00	-
	Akumulasi Amortisasi	(25.200.000,00)	-
	Aset Lain-Lain	19.647.750,00	19.647.750,00
	Jumlah Aset Lainnya	95.247.750,00	19.647.750,00
	JUMLAH ASET	727.820.066,67	619.155.816,67

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	186.150,00	882.450,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	186.150,00	882.450,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	186.150,00	882.450,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	727.633.916,67	618.273.366,67
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	727.820.066,67	619.155.816,67

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS SOSIAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.378.728.346,00	Rp 3.596.948.771,00	Rp 781.779.575,00	21,73
	Beban Persediaan	Rp 3.637.875.941,00	Rp 1.520.560.920,00	Rp 2.117.315.021,00	139,25
	Beban Jasa	Rp 3.812.998.979,00	Rp 3.499.952.545,00	Rp 313.046.434,00	8,94
	Beban Pemeliharaan	Rp 81.430.000,00	Rp 47.703.509,00	Rp 33.726.491,00	70,70
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 168.822.077,00	Rp 118.765.000,00	Rp 50.057.077,00	42,15
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 259.011.150,00	Rp 185.914.214,29	Rp 73.096.935,71	39,32
	Beban Amortisasi	Rp 25.200.000,00	Rp -	Rp 25.200.000,00	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.364.066.493,00	Rp 8.969.844.959,29	Rp 3.394.221.533,71	37,84
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (12.364.066.493,00)	Rp (8.969.844.959,29)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (343.750,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (343.750,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (12.364.066.493,00)	Rp (8.970.188.709,29)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (12.364.066.493,00)	Rp (8.970.188.709,29)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS SOSIAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	618.273.366,67	-
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(12.364.066.493,00)	(8.970.188.709,29)
3	RK PPKD/RK SKPD	12.484.461.293,00	9.402.955.945,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	177.425.791,68
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	15.650.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(11.034.250,00)	(7.569.660,72)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	727.633.916,67	618.273.366,67

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	350.000.000,00	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	350.000.000,00	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	350.000.000,00	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.514.758.573,00	4.326.784.048,00	95,84	4.750.174.274,00
	Belanja Barang	7.174.181.457,00	6.640.921.090,00	92,57	5.528.781.606,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	11.688.940.030,00	10.967.705.138,00	93,83	10.278.955.880,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	88.300.770,00	80.325.000,00	90,97	17.250.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	95.000.000,00	93.906.000,00	98,85	-
	Jumlah Belanja Modal	183.300.770,00	174.231.000,00	95,05	17.250.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	11.872.240.800,00	11.141.936.138,00	93,85	10.296.205.880,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	11.872.240.800,00	11.141.936.138,00	93,85	10.296.205.880,00
	SURPLUS / DEFISIT	(11.522.240.800,00)	(11.141.936.138,00)	96,70	(10.296.205.880,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(11.522.240.800,00)	(11.141.936.138,00)	96,70	(10.296.205.880,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS TENAGA KERJA
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	169.566.633,33	168.544.400,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	169.566.633,33	168.544.400,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	1.911.424.100,00	1.831.099.100,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	5.790.000,00	5.790.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(1.782.853.850,00)	(1.722.878.350,00)
	Jumlah Aset Tetap	134.360.250,00	114.010.750,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	505.224.050,00	411.318.050,00
	Akumulasi Amortisasi	(322.649.740,63)	(261.791.637,50)
	Aset Lain-Lain	167.302.000,00	299.687.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	349.876.309,38	449.213.412,50
	JUMLAH ASET	653.803.192,71	731.768.562,50

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	121.566,00	45.003,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	121.566,00	45.003,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	121.566,00	45.003,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	653.681.626,71	731.723.559,50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	653.803.192,71	731.768.562,50

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS TENAGA KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.326.784.048,00	Rp 4.750.174.274,00	Rp (423.390.226,00)	-8,91
	Beban Persediaan	Rp 777.754.350,00	Rp 914.047.300,00	Rp (136.292.950,00)	-14,91
	Beban Jasa	Rp 5.118.187.583,67	Rp 4.129.139.444,50	Rp 989.048.139,17	23,95
	Beban Pemeliharaan	Rp 116.189.986,00	Rp 140.385.200,00	Rp (24.195.214,00)	-17,23
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 627.843.500,00	Rp 235.700.000,00	Rp 392.143.500,00	166,37
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 72.387.000,00	Rp 57.714.500,00	Rp 14.672.500,00	25,42
	Beban Amortisasi	Rp 60.858.103,13	Rp 62.120.137,50	Rp (1.262.034,38)	-2,03
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 11.100.004.570,80	Rp 10.289.280.856,00	Rp 810.723.714,80	7,88
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (11.100.004.570,80)	Rp (10.289.280.856,00)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (132.385.000,00)	Rp (200.028.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (132.385.000,00)	Rp (200.028.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (11.232.389.570,80)	Rp (10.489.308.856,00)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (11.232.389.570,80)	Rp (10.489.308.856,00)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS TENAGA KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	731.723.559,50	676.551.285,50
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(11.232.389.570,80)	(10.489.308.856,00)
3	RK PPKD/RK SKPD	11.141.936.138,00	10.296.205.880,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	(217.400.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	(5.000.000,00)
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	12.411.500,00	470.675.250,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	653.681.626,71	731.723.559,50

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.328.835.060,00	6.076.483.930,00	96,01	5.439.942.362,00
	Belanja Barang	12.595.462.210,00	11.692.126.475,00	92,83	8.282.264.380,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	18.924.297.270,00	17.768.610.405,00	93,89	13.722.206.742,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	343.856.800,00	314.430.400,00	91,44	130.079.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	90.000.000,00	88.034.100,00	97,82	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	433.856.800,00	402.464.500,00	92,76	130.079.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	19.358.154.070,00	18.171.074.905,00	93,87	13.852.285.742,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	19.358.154.070,00	18.171.074.905,00	93,87	13.852.285.742,00
	SURPLUS / DEFISIT	(19.358.154.070,00)	(18.171.074.905,00)	93,87	(13.852.285.742,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(19.358.154.070,00)	(18.171.074.905,00)	93,87	(13.852.285.742,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	250.000,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	103.241.719,08	101.067.099,17
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	154.273.593,00	172.781.116,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	257.515.312,08	274.098.215,17
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	4.435.698.824,15	4.160.655.674,15
	Gedung dan Bangunan	645.033.000,00	645.033.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	3.999.380,62	3.999.380,62
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(4.146.311.969,15)	(3.983.468.968,31)
	Jumlah Aset Tetap	938.419.235,61	826.219.086,26
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	120.674.100,00	32.640.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(54.648.525,00)	(32.640.000,00)
	Aset Lain-Lain	22.403.350,00	350.287.982,33
	Jumlah Aset Lainnya	88.428.925,00	350.287.982,33
	JUMLAH ASET	1.284.363.472,70	1.450.605.283,76

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	418.993,00	546.291,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	418.993,00	546.291,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	418.993,00	546.291,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.283.944.479,70	1.450.058.992,76
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.284.363.472,70	1.450.605.283,76

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 121.497.700,00	Rp 211.377.874,00	Rp (89.880.174,00)	-42,52
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 121.497.700,00	Rp 211.377.874,00	Rp (89.880.174,00)	-42,52
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 121.497.700,00	Rp 211.377.874,00	Rp (89.880.174,00)	-42,52
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.076.483.930,00	Rp 5.439.942.362,00	Rp 636.541.568,00	11,70
	Beban Persediaan	Rp 2.908.589.223,00	Rp 2.425.963.408,56	Rp 482.625.814,44	19,89
	Beban Jasa	Rp 8.231.792.321,09	Rp 5.402.674.806,16	Rp 2.829.117.514,93	52,37
	Beban Pemeliharaan	Rp 193.632.000,00	Rp 149.692.500,00	Rp 43.939.500,00	29,35
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 495.816.236,00	Rp 570.728.716,00	Rp (74.912.480,00)	-13,13
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 173.781.679,17	Rp 256.362.837,02	Rp (82.581.157,85)	-32,21
	Beban Amortisasi	Rp 22.008.525,00	Rp -	Rp 22.008.525,00	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 18.102.103.914,26	Rp 14.245.364.629,74	Rp 3.856.739.284,52	27,07
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (17.980.606.214,26)	Rp (14.033.986.755,74)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (327.884.632,33)	Rp (132.745.026,46)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (327.884.632,33)	Rp (132.745.026,46)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (18.308.490.846,59)	Rp (14.166.731.782,20)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (18.308.490.846,59)	Rp (14.166.731.782,20)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	1.450.058.992,76	-
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(18.308.490.846,59)	(14.166.731.782,20)
3	RK PPKD/RK SKPD	18.170.824.905,00	13.852.535.742,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	1.254.137.217,83
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(39.387.250,00)	408.577.250,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	10.938.678,52	101.540.565,13
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	1.283.944.479,70	1.450.058.992,76

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	307.520.000,00	371.486.250,00	120,80	312.492.500,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	307.520.000,00	371.486.250,00	120,80	312.492.500,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	307.520.000,00	371.486.250,00	120,80	312.492.500,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.631.579.113,00	8.166.309.940,00	94,61	7.884.428.665,00
	Belanja Barang	4.283.657.049,00	3.868.425.167,00	90,31	3.564.333.548,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	12.915.236.162,00	12.034.735.107,00	93,18	11.448.762.213,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	133.022.000,00	129.347.390,00	97,24	28.284.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	159.802.456,00	159.036.330,00	99,52	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	6.120.000,00
	Belanja Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Jumlah Belanja Modal	312.824.456,00	308.383.720,00	98,58	34.404.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	13.228.060.618,00	12.343.118.827,00	93,31	11.483.166.213,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER	-	-	-	-
	TRANSFER	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer				
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	13.228.060.618,00	12.343.118.827,00	93,31	11.483.166.213,00
	SURPLUS / DEFISIT	(12.920.540.618,00)	(11.971.632.577,00)	92,66	(11.170.673.713,00)
IV	PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-		-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(12.920.540.618,00)	(11.971.632.577,00)	92,66	(11.170.673.713,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	16.023.241,67	12.298.155,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	842.049.837,00	664.630.862,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	858.073.078,67	676.929.017,83
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	14.252.840.000,00	14.252.840.000,00
	Peralatan dan Mesin	4.738.182.276,41	4.549.834.886,41
	Gedung dan Bangunan	12.597.534.586,10	12.438.498.256,10
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.149.277.550,00	4.149.277.550,00
	Aset Tetap Lainnya	270.975.000,00	270.975.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(9.719.217.707,31)	(9.351.298.795,52)
	Jumlah Aset Tetap	26.289.591.705,20	26.310.126.896,99
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	71.975.455,00	51.975.455,00
	Akumulasi Amortisasi	(56.975.455,00)	(51.975.455,00)
	Aset Lain-Lain	286.226.500,00	675.148.332,58
	Jumlah Aset Lainnya	301.226.500,00	675.148.332,58
	JUMLAH ASET	27.448.891.283,87	27.662.204.247,40

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	5.820.965,00	6.338.496,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.820.965,00	6.338.496,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.820.965,00	6.338.496,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	27.443.070.318,87	27.655.865.751,40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	27.448.891.283,87	27.662.204.247,40

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 371.486.250,00	Rp 312.492.500,00	Rp 58.993.750,00	18,88
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 371.486.250,00	Rp 312.492.500,00	Rp 58.993.750,00	18,88
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 371.486.250,00	Rp 312.492.500,00	Rp 58.993.750,00	18,88
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.166.309.940,00	Rp 7.884.428.665,00	Rp 281.881.275,00	3,58
	Beban Persediaan	Rp 1.551.037.736,00	Rp 1.338.823.673,00	Rp 212.214.063,00	15,85
	Beban Jasa	Rp 1.800.290.312,16	Rp 1.876.089.398,67	Rp (75.799.086,51)	-4,04
	Beban Pemeliharaan	Rp 222.809.060,00	Rp 248.987.602,00	Rp (26.178.542,00)	-10,51
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 300.040.903,00	Rp 164.669.935,00	Rp 135.370.968,00	82,21
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 507.215.584,87	Rp 551.689.488,15	Rp (44.473.903,28)	-8,06
	Beban Amortisasi	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp 5.000.000,00	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.552.703.536,03	Rp 12.064.688.761,82	Rp 488.014.774,21	4,04
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (12.181.217.286,03)	Rp (11.752.196.261,82)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (388.921.832,58)	Rp (8.950.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (388.921.832,58)	Rp (8.950.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (12.570.139.118,61)	Rp (11.761.146.261,82)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (12.570.139.118,61)	Rp (11.761.146.261,82)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	27.655.865.751,40	27.555.836.422,22
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(12.570.139.118,61)	(11.761.146.261,82)
3	RK PPKD/RK SKPD	11.971.632.577,00	11.170.673.713,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	192.364.436,00	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	54.050.000,00	23.235.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	139.296.673,08	667.266.878,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	27.443.070.318,87	27.655.865.751,40

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	2.675.000.000,00	3.233.347.664,00	120,87	2.823.713.906,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.675.000.000,00	3.233.347.664,00	120,87	2.823.713.906,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.675.000.000,00	3.233.347.664,00	120,87	2.823.713.906,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	12.774.691.075,00	12.407.920.084,00	97,13	12.486.538.585,00
	Belanja Barang	35.572.703.574,00	31.407.281.533,00	88,29	30.802.376.309,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	48.347.394.649,00	43.815.201.617,00	90,63	43.288.914.894,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	12.013.405.083,00	11.691.899.620,00	97,32	4.950.400.466,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	246.600.000,00	242.449.441,00	98,32	197.954.900,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	198.849.600,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	12.260.005.083,00	11.934.349.061,00	97,34	5.347.204.966,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	60.607.399.732,00	55.749.550.678,00	91,98	48.636.119.860,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	60.607.399.732,00	55.749.550.678,00	91,98	48.636.119.860,00
	SURPLUS / DEFISIT	(57.932.399.732,00)	(52.516.203.014,00)	90,65	(45.812.405.954,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(57.932.399.732,00)	(52.516.203.014,00)	90,65	(45.812.405.954,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	800.000,00
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	27.737.500,00	45.812.500,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(16.748.820,00)	(16.578.665,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	484.188.858,34	589.850.537,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	262.358.550,00	198.844.440,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	757.536.088,34	818.728.812,50
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	21.755.801.960,00	21.755.801.960,00
	Peralatan dan Mesin	54.030.695.758,76	37.071.492.007,76
	Gedung dan Bangunan	12.125.210.204,00	11.937.610.263,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.522.787.791,00	5.522.787.791,00
	Aset Tetap Lainnya	8.800.000,00	8.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	49.225.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(41.233.316.440,53)	(32.479.348.303,53)
	Jumlah Aset Tetap	52.209.979.273,23	43.866.368.718,23
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	349.472.000,00	349.472.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(218.076.000,00)	(152.378.000,00)
	Aset Lain-Lain	1.730.596.106,60	3.489.553.029,28
	Jumlah Aset Lainnya	1.861.992.106,60	3.686.647.029,28
	JUMLAH ASET	54.829.507.468,17	48.371.744.560,01

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	21.229.922,00	5.857.550,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	247.133.550,00	314.689.320,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	268.363.472,00	320.546.870,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	268.363.472,00	320.546.870,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	54.561.143.996,17	48.051.197.690,01
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	54.829.507.468,17	48.371.744.560,01

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	-	-	
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 3.214.665.164,00	Rp 2.837.978.406,00	Rp 376.686.758,00	13,27
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	-	-	
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	-	-	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 3.214.665.164,00	Rp 2.837.978.406,00	Rp 376.686.758,00	13,27
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	-	-	
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	-	-	
	Dana Alokasi Umum	Rp -	-	-	
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	-	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	-	-	
	Dana Penyesuaian	Rp -	-	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	-	-	
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	-	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 4.000.319.228,00	-	-	
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	-	-	
	Pendapatan Lainnya	Rp -	-	-	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 4.000.319.228,00	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 7.214.984.392,00	Rp 2.837.978.406,00	Rp 376.686.758,00	13,27
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 12.407.920.084,00	Rp 12.486.538.585,00	Rp (78.618.501,00)	-0,63
	Beban Persediaan	Rp 7.514.361.007,00	Rp 7.148.641.744,00	Rp 365.719.263,00	5,12
	Beban Jasa	Rp 19.680.622.028,16	Rp 18.883.553.597,00	Rp 797.068.431,16	4,22
	Beban Pemeliharaan	Rp 4.029.459.286,00	Rp 4.401.192.579,00	Rp (371.733.293,00)	-8,45
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 340.988.258,00	Rp 208.602.117,00	Rp 132.386.141,00	63,46
	Beban Bunga	Rp -	-	-	
	Beban Subsidi	Rp -	-	-	
	Beban Hibah	Rp -	-	-	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	-	-	
	Beban Penyusutan	Rp 4.669.685.715,95	Rp 2.642.226.376,37	Rp 2.027.459.339,58	76,73
	Beban Amortisasi	Rp 65.698.000,00	Rp 65.698.000,00	Rp -	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 170.155,00	Rp 2.503.850,00	Rp (2.333.695,00)	-93,20
	Beban Transfer	Rp -	-	-	
	Beban Lain-lain	Rp -	-	-	
	JUMLAH BEBAN	Rp 48.708.904.534,11	Rp 45.838.956.848,37	Rp 2.869.947.685,74	6,26
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (41.493.920.142,11)	Rp (43.000.978.442,37)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	-	-	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	-	-	
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	-	-	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	-	-	
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (1.808.181.922,68)	Rp (6.505.552.705,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (1.808.181.922,68)	Rp (6.505.552.705,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (43.302.102.064,79)	Rp (49.506.531.147,37)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (43.302.102.064,79)	Rp (49.506.531.147,37)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	48.051.197.690,01	47.195.957.604,48
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(43.302.102.064,79)	(49.506.531.147,37)
3	RK PPKD/RK SKPD	52.515.403.014,00	45.812.555.954,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	607.500,00	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	157.614.875,00	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	1.222.705.403,00	78.775.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(4.084.282.421,05)	4.470.440.278,90
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	54.561.143.996,17	48.051.197.690,01

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.763.432.676,00	6.329.319.464,00	93,58	6.094.500.138,00
	Belanja Barang	3.287.375.119,00	3.111.524.466,00	94,65	3.470.304.341,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	10.050.807.795,00	9.440.843.930,00	93,93	9.564.804.479,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.279.166.855,00	1.210.414.000,00	94,63	428.998.400,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.919.410,00	3.250.000,00	82,92	30.760.000,00
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	1.283.086.265,00	1.213.664.000,00	94,59	459.758.400,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	11.333.894.060,00	10.654.507.930,00	94,01	10.024.562.879,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	11.333.894.060,00	10.654.507.930,00	94,01	10.024.562.879,00
	SURPLUS / DEFISIT	(11.333.894.060,00)	(10.654.507.930,00)	94,01	(10.024.562.879,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(11.333.894.060,00)	(10.654.507.930,00)	94,01	(10.024.562.879,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	91.992.693,33	86.854.043,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	186.856.180,00	779.414.335,89
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	278.848.873,33	866.268.379,22
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	9.800.105.200,00	8.586.441.200,00
	Gedung dan Bangunan	41.036.000,00	41.036.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	186.635.000,00	186.635.000,00
	Aset Tetap Lainnya	48.674.800,00	48.674.800,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(8.737.398.501,00)	(8.117.262.199,85)
	Jumlah Aset Tetap	1.339.052.499,00	745.524.800,15
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	384.974.250,00	384.974.250,00
	Akumulasi Amortisasi	(324.474.250,00)	(278.810.500,00)
	Aset Lain-Lain	363.020.573,00	595.810.748,00
	Jumlah Aset Lainnya	423.520.573,00	701.974.498,00
	JUMLAH ASET	2.041.421.945,33	2.313.767.677,37

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	310.184,00	502.212,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	310.184,00	502.212,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	310.184,00	502.212,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.041.111.761,33	2.313.265.465,37
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.041.421.945,33	2.313.767.677,37

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	-	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.329.319.464,00	Rp 6.215.751.964,00	Rp 113.567.500,00	1,83
	Beban Persediaan	Rp 1.810.793.650,89	Rp 1.687.804.465,00	Rp 122.989.185,89	7,29
	Beban Jasa	Rp 1.301.980.913,00	Rp 1.235.793.532,50	Rp 66.187.380,50	5,36
	Beban Pemeliharaan	Rp 310.004.050,00	Rp 351.955.650,00	Rp (41.951.600,00)	-11,92
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 275.973.330,00	Rp 302.071.272,00	Rp (26.097.942,00)	-8,64
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 525.408.694,00	Rp 327.271.276,14	Rp 198.137.417,86	60,54
	Beban Amortisasi	Rp 45.663.750,00	Rp 61.829.487,50	Rp (16.165.737,50)	-26,15
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 10.599.143.851,89	Rp 10.182.477.647,14	Rp 416.666.204,75	4,09
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (10.599.143.851,89)	Rp (10.182.477.647,14)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (232.790.175,00)	Rp (202.301.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (232.790.175,00)	Rp (202.301.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (10.831.934.026,89)	Rp (10.384.778.647,14)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (10.831.934.026,89)	Rp (10.384.778.647,14)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	2.313.265.465,37	2.206.238.344,01
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(10.831.934.026,89)	(10.384.778.647,14)
3	RK PPKD/RK SKPD	10.654.507.930,00	9.662.585.750,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	(14.408.000,00)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	(270.650.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(94.727.607,15)	1.114.278.018,50
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	2.041.111.761,33	2.313.265.465,37

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.581.550.000,00	1.613.719.700,00	102,03	1.620.789.100,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.581.550.000,00	1.613.719.700,00	102,03	1.620.789.100,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA				
	PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.581.550.000,00	1.613.719.700,00	102,03	1.620.789.100,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	9.006.658.845,00	8.640.327.952,00	95,93	9.426.092.550,00
	Belanja Barang	20.285.962.970,00	18.818.766.043,00	92,77	18.270.220.052,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	29.292.621.815,00	27.459.093.995,00	93,74	27.696.312.602,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.807.578.590,00	1.594.591.270,00	88,22	435.400.240,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.637.463.122,00	16.317.545.154,00	83,09	2.676.486.324,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	21.445.041.712,00	17.912.136.424,00	83,53	3.111.886.564,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	50.737.663.527,00	45.371.230.419,00	89,42	30.808.199.166,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	50.737.663.527,00	45.371.230.419,00	89,42	30.808.199.166,00
	SURPLUS / DEFISIT	(49.156.113.527,00)	(43.757.510.719,00)	89,02	(29.187.410.066,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(49.156.113.527,00)	(43.757.510.719,00)	89,02	(29.187.410.066,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PERHUBUNGAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	4.700.000,00	3.950.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.504.500,00)	(3.245.000,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	165.541.666,67	160.070.333,34
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	14.148.000,00	14.148.000,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(14.148.000,00)	(14.148.000,00)
	Persediaan	1.433.528.708,82	2.122.443.697,28
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	1.600.265.875,49	2.283.219.030,62
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	8.319.000.000,00	8.319.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	41.037.017.160,00	38.359.948.480,00
	Gedung dan Bangunan	14.101.060.100,00	14.101.060.100,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.994.649.732,00	57.562.040.521,00
	Aset Tetap Lainnya	3.765.000,00	3.765.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(75.310.978.072,85)	(65.559.769.101,26)
	Jumlah Aset Tetap	63.144.513.919,15	52.786.044.999,74
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	355.089.395,00	355.089.395,00
	Akumulasi Amortisasi	(344.716.722,50)	(339.530.386,25)
	Aset Lain-Lain	2.298.993.364,00	2.609.797.421,00
	Jumlah Aset Lainnya	2.309.366.036,50	2.625.356.429,75
	JUMLAH ASET	67.054.145.831,14	57.694.620.460,11

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	834.395.540,00	766.352.769,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	834.395.540,00	766.352.769,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	834.395.540,00	766.352.769,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	66.219.750.291,14	56.928.267.691,11
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	67.054.145.831,14	57.694.620.460,11

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.614.469.700,00	Rp 1.621.689.100,00	Rp (7.219.400,00)	-0,45
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.614.469.700,00	Rp 1.621.689.100,00	Rp (7.219.400,00)	-0,45
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 970.185.160,00	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 970.185.160,00	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.584.654.860,00	Rp 1.621.689.100,00	Rp (7.219.400,00)	-0,4452
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.640.327.952,00	Rp 9.426.092.550,00	Rp (785.764.598,00)	-8,34
	Beban Persediaan	Rp 3.726.338.294,86	Rp 4.532.018.127,81	Rp (805.679.832,95)	-17,78
	Beban Jasa	Rp 14.576.908.847,67	Rp 12.989.205.183,24	Rp 1.587.703.664,43	12,22
	Beban Pemeliharaan	Rp 999.176.594,00	Rp 1.195.484.872,00	Rp (196.308.278,00)	-16,42
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 200.407.288,00	Rp 174.598.736,00	Rp 25.808.552,00	14,78
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 8.709.250.253,99	Rp 7.655.167.830,52	Rp 1.054.082.423,47	13,77
	Beban Amortisasi	Rp 5.186.336,25	Rp 5.186.336,25	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 259.500,00	Rp 345.000,00	Rp (85.500,00)	-24,78
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 36.857.855.066,77	Rp 35.978.098.635,82	Rp 879.756.430,95	2,45
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (34.273.200.206,77)	Rp (34.356.409.535,82)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 443.113.555,40	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp 443.113.555,40	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (33.830.086.651,37)	Rp (34.356.409.535,82)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (33.830.086.651,37)	Rp (34.356.409.535,82)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	56.928.267.691,11	60.379.144.617,19
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(33.830.086.651,37)	(34.356.409.535,82)
3	RK PPKD/RK SKPD	43.757.510.719,00	29.187.410.066,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	(0,00)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	406.017.250,00	(99.550.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	150.000,00
	-Akumulasi Penyusutan	(1.041.958.717,60)	1.817.522.543,75
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	66.219.750.291,14	56.928.267.691,11

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97	470.250.161,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97	470.250.161,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	350.000.000,00	451.387.406,00	128,97	470.250.161,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.090.081.053,00	5.425.339.060,00	89,08	5.397.490.456,00
	Belanja Barang	6.448.779.037,00	6.192.744.030,00	96,03	5.772.589.471,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	12.538.860.090,00	11.618.083.090,00	92,66	11.170.079.927,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	287.451.505,00	263.207.000,00	91,57	613.520.250,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	189.000.000,00	188.708.918,00	99,85	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	36.750.000,00	36.746.550,00	99,99	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	513.201.505,00	488.662.468,00	95,22	613.520.250,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	13.052.061.595,00	12.106.745.558,00	92,76	11.783.600.177,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	13.052.061.595,00	12.106.745.558,00	92,76	11.783.600.177,00
	SURPLUS / DEFISIT	(12.702.061.595,00)	(11.655.358.152,00)	91,76	(11.313.350.016,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(12.702.061.595,00)	(11.655.358.152,00)	91,76	(11.313.350.016,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	24.980.900,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	(2.498.090,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	14.781.072,50	14.310.768,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	14.781.072,50	36.793.578,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	10.347.469.597,00	9.826.749.679,00
	Gedung dan Bangunan	1.080.744.408,00	1.006.158.191,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	220.487.300,00	220.487.300,00
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	33.347.214,00	-
	Akumulasi Penyusutan	(8.355.691.526,74)	(7.299.007.961,23)
	Jumlah Aset Tetap	3.326.356.992,26	3.754.387.208,77
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	1.043.676.233,00	1.006.929.683,00
	Akumulasi Amortisasi	(1.016.116.320,50)	(1.006.929.683,00)
	Aset Lain-Lain	348.480.000,10	363.732.500,10
	Jumlah Aset Lainnya	376.039.912,60	363.732.500,10
	JUMLAH ASET	3.717.177.977,36	4.154.913.287,20

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	3.717.177.977,36	4.154.913.287,20
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.717.177.977,36	4.154.913.287,20

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 426.406.506,00	Rp 495.231.061,00	Rp (68.824.555,00)	-13,90
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 426.406.506,00	Rp 495.231.061,00	Rp (68.824.555,00)	-13,90
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 426.406.506,00	Rp 495.231.061,00	Rp (68.824.555,00)	-13,90
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 5.425.339.060,00	Rp 5.397.490.456,00	Rp 27.848.604,00	0,52
	Beban Persediaan	Rp 463.678.540,00	Rp 533.339.448,00	Rp (69.660.908,00)	-13,06
	Beban Jasa	Rp 4.939.679.528,83	Rp 4.834.950.202,42	Rp 104.729.326,41	2,17
	Beban Pemeliharaan	Rp 332.456.500,00	Rp 277.799.600,00	Rp 54.656.900,00	19,67
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 349.475.726,00	Rp 226.803.195,00	Rp 122.672.531,00	54,09
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 1.001.465.698,37	Rp 961.485.807,36	Rp 39.979.891,01	4,16
	Beban Amortisasi	Rp 9.186.637,50	Rp 9.912.375,00	Rp (725.737,50)	-7,32
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 2.498.090,00	Rp (2.498.090,00)	-100,00
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.521.281.690,70	Rp 12.244.279.173,78	Rp 277.002.516,92	2,26
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (12.094.875.184,70)	Rp (11.749.048.112,78)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (15.252.500,00)	Rp (191.791.520,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (15.252.500,00)	Rp (191.791.520,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (12.110.127.684,70)	Rp (11.940.839.632,78)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (12.110.127.684,70)	Rp (11.940.839.632,78)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	4.154.913.287,20	-
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(12.110.127.684,70)	(11.940.839.632,78)
3	RK PPKD/RK SKPD	11.655.358.152,00	11.313.209.616,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	4.868.458.893,73
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	69.754.000,00	155.310.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	2.498.090,00	-
	-Akumulasi Penyusutan	(55.217.867,14)	(241.225.589,75)
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	3.717.177.977,36	4.154.913.287,20

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48	733.502.750,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48	733.502.750,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.400.000.000,00	1.322.718.707,00	94,48	733.502.750,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.464.243.479,00	6.093.015.834,00	94,26	6.399.150.937,00
	Belanja Barang	12.222.446.380,00	10.442.348.112,00	85,44	6.524.736.639,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	18.686.689.859,00	16.535.363.946,00	88,49	12.923.887.576,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	577.418.000,00	491.326.000,00	85,09	250.068.616,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	7.936.278.249,00	7.509.767.700,00	94,63	9.027.915.313,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	19.710.000,00
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	8.513.696.249,00	8.001.093.700,00	93,98	9.297.693.929,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	27.200.386.108,00	24.536.457.646,00	90,21	22.221.581.505,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	27.200.386.108,00	24.536.457.646,00	90,21	22.221.581.505,00
	SURPLUS / DEFISIT	(25.800.386.108,00)	(23.213.738.939,00)	89,97	(21.488.078.755,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(25.800.386.108,00)	(23.213.738.939,00)	89,97	(21.488.078.755,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	275.049.128,00	161.325.035,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(117.223.750,50)	(154.805.087,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	328.020.342,95	87.502.500,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	15.540.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	485.845.720,45	109.562.448,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	36.097.065.665,00	6.593.063.618,00
	Gedung dan Bangunan	89.548.790.443,05	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	4.440.000,00	4.440.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	23.992.481.800,00
	Akumulasi Penyusutan	(13.118.965.127,93)	(4.148.809.239,84)
	Jumlah Aset Tetap	112.531.330.980,12	26.441.176.178,16
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	819.692.900,00	819.692.900,00
	Akumulasi Amortisasi	(689.950.675,00)	(556.005.200,00)
	Aset Lain-Lain	848.817.503,86	1.341.696.144,86
	Jumlah Aset Lainnya	978.559.728,86	1.605.383.844,86
	JUMLAH ASET	113.995.736.429,43	28.156.122.471,02

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	67.244.641,00	66.292.850,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	67.244.641,00	66.292.850,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	67.244.641,00	66.292.850,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	113.928.491.788,43	28.089.829.621,02
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	113.995.736.429,43	28.156.122.471,02

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.436.442.800	Rp 733.502.750	Rp 702.940.050	95,83
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.436.442.800	Rp 733.502.750	Rp 702.940.050	95,83
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.436.442.800	Rp 733.502.750	Rp 702.940.050	95,83
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.093.015.834,00	Rp 6.399.150.937,00	Rp (306.135.103,00)	-4,78
	Beban Persediaan	Rp 2.884.980.374,00	Rp 2.104.120.190,00	Rp 780.860.184,00	37,11
	Beban Jasa	Rp 8.237.744.648,05	Rp 4.352.727.462,50	Rp 3.885.017.185,55	89,25
	Beban Pemeliharaan	Rp 483.953.421,00	Rp 161.641.000,00	Rp 322.312.421,00	199,40
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 444.709.801,00	Rp 187.739.736,00	Rp 256.970.065,00	136,88
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 8.701.927.154,41	Rp 932.579.192,60	Rp 7.769.347.961,81	833,10
	Beban Amortisasi	Rp 133.945.475,00	Rp 162.438.225,00	Rp (28.492.750,00)	-17,54
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 26.980.276.707,46	Rp 14.300.396.743,10	Rp 12.679.879.964,36	88,67
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (25.543.833.907,46)	Rp (13.566.893.993,10)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (492.878.641,00)	Rp (814.085.719,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (492.878.641,00)	Rp (814.085.719,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (26.036.712.548,46)	Rp (14.380.979.712,10)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (26.036.712.548,46)	Rp (14.380.979.712,10)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	28.089.829.621,02	19.135.886.647,55
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(26.036.712.548,46)	(14.380.979.712,10)
3	RK PPKD/RK SKPD	23.213.738.939,00	21.488.078.755,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	3.285.750,00
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	88.892.283.174,05	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	37.581.336,50	637.273,00
	-Akumulasi Penyusutan	(268.228.733,67)	1.842.920.907,57
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	113.928.491.788,43	28.089.829.621,02

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAHA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.483.994.121,00	4.271.631.416,00	95,26	4.565.519.900,00
	Belanja Barang	13.455.947.606,00	12.649.320.490,00	94,01	10.054.557.348,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	5.800.000.000,00	5.799.700.000,00	99,99	13.844.954.364,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	23.739.941.727,00	22.720.651.906,00	95,71	28.465.031.612,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	4.148.782.770,00	3.754.393.256,00	90,49	77.500.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	168.632.000,00	154.085.880,00	91,37	394.880.040,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	4.453.563.500,00	4.264.513.621,00	95,76	7.393.788.707,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Jumlah Belanja Modal	8.790.978.270,00	8.192.992.757,00	93,20	7.866.168.747,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	32.530.919.997,00	30.913.644.663,00	95,03	36.331.200.359,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	32.530.919.997,00	30.913.644.663,00	95,03	36.331.200.359,00
	SURPLUS / DEFISIT	(32.530.919.997,00)	(30.913.644.663,00)	95,03	(36.331.200.359,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(32.530.919.997,00)	(30.913.644.663,00)	95,03	(36.331.200.359,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PER 31 DESEMBER 2023

m Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	155.045.636,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	161.548.783,33	182.201.250,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	161.548.783,33	337.246.886,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	34.965.982.450,00	27.344.959.050,00
	Peralatan dan Mesin	2.397.922.526,00	2.243.836.646,00
	Gedung dan Bangunan	19.374.376.157,00	5.680.434.666,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	245.025.000,00	245.025.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	79.619.856,00	7.108.804.370,00
	Akumulasi Penyusutan	(3.212.774.579,39)	(1.979.694.084,55)
	Jumlah Aset Tetap	53.850.151.409,61	40.643.365.647,45
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	137.150.000,00	117.150.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(80.900.000,00)	(55.275.000,00)
	Aset Lain-Lain	39.572.500,00	39.572.500,00
	Jumlah Aset Lainnya	95.822.500,00	101.447.500,00
	JUMLAH ASET	54.107.522.692,94	41.082.060.033,45

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	3.547.445,00	1.678.361,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.547.445,00	1.678.361,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.547.445,00	1.678.361,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	54.103.975.247,94	41.080.381.672,45
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	54.107.522.692,94	41.082.060.033,45

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.271.631.416,00	Rp 4.565.519.900,00	Rp (293.888.484,00)	-6,44
	Beban Persediaan	Rp 1.575.552.950,00	Rp 3.020.374.144,00	Rp (1.444.821.194,00)	-47,84
	Beban Jasa	Rp 10.151.031.484,67	Rp 4.406.031.319,16	Rp 5.745.000.165,51	130,39
	Beban Pemeliharaan	Rp 498.586.949,00	Rp 393.389.104,00	Rp 105.197.845,00	26,74
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 446.670.657,00	Rp 1.765.396.663,00	Rp (1.318.726.006,00)	-74,70
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 5.799.700.000,00	Rp 13.844.954.364,00	Rp (8.045.254.364,00)	-58,11
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 836.073.334,54	Rp 346.956.509,66	Rp 489.116.824,88	140,97
	Beban Amortisasi	Rp 25.625.000,00	Rp 20.625.000,00	Rp 5.000.000,00	24,24
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 23.604.871.791,21	Rp 28.363.247.003,82	Rp (4.758.375.212,61)	-16,78
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (23.604.871.791,21)	Rp (28.363.247.003,82)		
	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (60.913.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (60.913.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (23.604.871.791,21)	Rp (28.424.160.003,82)		
	<u>POS LUAR BIASA</u>				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (23.604.871.791,21)	Rp (28.424.160.003,82)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	41.080.381.672,45	34.491.370.832,02
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(23.604.871.791,21)	(28.424.160.003,82)
3	RK PPKD/RK SKPD	30.758.599.027,00	36.370.584.474,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	6.266.873.500,00	(1.515.839.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(397.007.160,30)	158.425.370,25
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	54.103.975.247,94	41.080.381.672,45

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS ARSIP DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.554.714.206,00	4.053.387.740,00	88,99	2.997.745.645,00
	Belanja Barang	2.021.715.142,00	1.613.424.569,00	79,80	1.465.878.368,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	6.576.429.348,00	5.666.812.309,00	86,17	4.463.624.013,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	287.572.700,00	266.328.300,00	92,61	190.029.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	226.000.000,00	208.156.275,00	92,10	101.492.000,00
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	513.572.700,00	474.484.575,00	92,39	291.521.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	7.090.002.048,00	6.141.296.884,00	86,62	4.755.145.013,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.090.002.048,00	6.141.296.884,00	86,62	4.755.145.013,00
	SURPLUS / DEFISIT	(7.090.002.048,00)	(6.141.296.884,00)	86,62	(4.755.145.013,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(7.090.002.048,00)	(6.141.296.884,00)	86,62	(4.755.145.013,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS ARSIP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	42.728.153,33	45.203.293,75
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	11.400.000,00	59.927.875,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	54.128.153,33	105.131.168,75
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	98.000.000,00	98.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.322.834.729,00	2.034.056.429,00
	Gedung dan Bangunan	1.533.652.000,00	1.533.652.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	1.557.266.706,00	1.349.110.431,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.279.930.630,19)	(2.066.821.623,05)
	Jumlah Aset Tetap	3.231.822.804,81	2.947.997.236,95
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Aset Lain-Lain	423.046.419,00	423.046.419,00
	Jumlah Aset Lainnya	423.046.419,00	423.046.419,00
	JUMLAH ASET	3.708.997.377,14	3.476.174.824,70

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	3.708.997.377,14	3.476.174.824,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.708.997.377,14	3.476.174.824,70

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS ARSIP DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp	- Rp	-	
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	- Rp	-	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp	- Rp	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp	- Rp	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp	- Rp	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	- Rp	-	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp	- Rp	-	
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	- Rp	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	- Rp	-	
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.053.387.740,00	Rp 2.997.745.645,00	Rp 1.055.642.095,00	35,21
	Beban Persediaan	Rp 535.707.525,00	Rp 451.265.929,00	Rp 84.441.596,00	18,71
	Beban Jasa	Rp 895.681.955,42	Rp 722.372.226,09	Rp 173.309.729,33	23,99
	Beban Pemeliharaan	Rp 67.200.924,00	Rp 23.795.000,00	Rp 43.405.924,00	182,42
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 167.337.180,00	Rp 181.464.560,00	Rp (14.127.380,00)	-7,79
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 213.109.007,14	Rp 195.182.816,43	Rp 17.926.190,71	9,18
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 5.932.424.331,56	Rp 4.571.826.176,52	Rp 1.360.598.155,04	29,76
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (5.932.424.331,56)	Rp (4.571.826.176,52)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (82.611.410,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (82.611.410,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (5.932.424.331,56)	Rp (4.654.437.586,52)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (5.932.424.331,56)	Rp (4.654.437.586,52)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS ARSIP DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	3.476.174.824,70	-
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(5.932.424.331,56)	(4.654.437.586,52)
3	RK PPKD/RK SKPD	6.141.296.884,00	4.755.145.013,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	3.017.891.104,24
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	23.950.000,00	173.900.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	-	183.676.293,98
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	3.708.997.377,14	3.476.174.824,70

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.777.248.600,00	1.973.565.500,00	111,05	1.905.673.075,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.191.523	8.432.092,00	201,17	9.088.686,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.781.440.123,00	1.981.997.592,00	111,26	1.914.761.761,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.781.440.123,00	1.981.997.592,00	111,26	1.914.761.761,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.511.031.978,00	8.227.209.854,00	96,67	8.567.063.312,00
	Belanja Barang	16.421.735.667,00	15.486.923.848,00	94,31	13.640.079.094,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	24.932.767.645,00	23.714.133.702,00	95,11	22.207.142.406,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	315.802.275,00	267.804.000,00	84,80	85.151.640,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	155.520.000,00	148.043.122,00	95,19	963.297.473,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	471.322.275,00	415.847.122,00	88,23	1.048.449.113,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	25.404.089.920,00	24.129.980.824,00	94,98	23.255.591.519,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan				
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	25.404.089.920,00	24.129.980.824,00	94,98	23.255.591.519,00
	SURPLUS / DEFISIT	(23.622.649.797,00)	(22.147.983.232,00)	93,76	(21.340.829.758,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(23.622.649.797,00)	(22.147.983.232,00)	93,76	(21.340.829.758,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN NERACA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECILDAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	200,00	-
	Kas di BLUD		
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya		
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	68.973.525,00	117.948.225,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(46.460.925,00)	(71.758.437,25)
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	56.658.733,33	44.452.778,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	183.509.525,00	183.509.525,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(183.509.525,00)	(183.509.525,00)
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	79.171.533,33	90.642.566,08
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	9.272.750.000,00	9.272.750.000,00
	Peralatan dan Mesin	15.203.198.414,98	14.730.818.867,98
	Gedung dan Bangunan	161.595.309.924,00	161.595.309.924,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.574.060.725,00	1.574.060.725,00
	Aset Tetap Lainnya	364.050.825,00	364.050.825,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(44.254.533.717,79)	(40.428.019.106,02)
	Jumlah Aset Tetap	143.754.836.171,19	147.108.971.235,96
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	731.428.820,00	636.943.400,00
	Akumulasi Amortisasi	(555.266.305,00)	(426.705.225,00)
	Aset Lain-Lain	463.740.027,00	850.078.527,00
	Jumlah Aset Lainnya	639.902.542,00	1.060.316.702,00
	JUMLAH ASET	144.473.910.246,52	148.259.930.504,04

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	61.861.735,00	52.552.602,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	61.861.735,00	52.552.602,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	61.861.735,00	52.552.602,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	144.412.048.511,52	148.207.377.902,04
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	144.473.910.246,52	148.259.930.504,04

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.924.590.800	Rp 1.937.209.600	Rp (12.618.800)	-0,65
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 8.432.092	Rp 9.088.686	Rp (656.594)	-7,22
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.933.022.892	Rp 1.946.298.286	Rp (13.275.394)	-0,68
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.933.022.892	Rp 1.946.298.286	Rp (13.275.394)	-0,68
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.227.209.854,00	Rp 8.567.063.312,00	Rp (339.853.458,00)	-3,97
	Beban Persediaan	Rp 2.951.096.448,00	Rp 2.675.450.955,00	Rp 275.645.493,00	10,30
	Beban Jasa	Rp 10.970.331.433,00	Rp 9.527.172.031,67	Rp 1.443.159.401,33	15,15
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.133.608.616,00	Rp 977.965.864,00	Rp 155.642.752,00	15,91
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 291.972.684,00	Rp 244.827.510,00	Rp 47.145.174,00	19,26
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 3.739.242.586,29	Rp 3.853.696.659,48	Rp (114.454.073,19)	-2,97
	Beban Amortisasi	Rp 128.561.080,00	Rp 141.735.975,00	Rp (13.174.895,00)	-9,30
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 36.469.231,37	Rp (36.469.231,37)	-100,00
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 27.442.022.701,29	Rp 26.024.381.538,52	Rp 1.417.641.162,77	5,45
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (25.508.999.809,29)	Rp (24.078.083.252,52)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (386.338.500,00)	Rp (162.855.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (386.338.500,00)	Rp (162.855.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (25.895.338.309,29)	Rp (24.240.938.252,52)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (25.895.338.309,29)	Rp (24.240.938.252,52)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECILDAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	148.207.377.902,04	149.014.996.017,01
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(25.895.338.309,29)	(24.240.938.252,52)
3	RK PPKD/RK SKPD	22.147.983.432,00	21.340.829.758,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	14.000.000,00	(16.715.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	25.297.512,25	-
	-Akumulasi Penyusutan	(87.272.025,47)	2.109.205.379,54
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	144.412.048.511,52	148.207.377.902,04

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	31.318.939.112,00	29.705.619.815,00	94,85	30.010.588.507,00
	Belanja Barang	33.946.365.545,00	31.084.748.886,00	91,57	28.080.922.630,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	200.000.000,00	168.994.278,00	84,50	200.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	65.465.304.657,00	60.959.362.979,00	93,12	58.291.511.137,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.495.727.000,00	1.330.002.000,00	88,92	57.439.400,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	133.774.647,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	99.511.500,00	98.623.500,00	99,11	-
	Jumlah Belanja Modal	1.595.238.500,00	1.428.625.500,00	89,56	191.214.047,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	67.060.543.157,00	62.387.988.479,00	93,03	58.482.725.184,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	67.060.543.157,00	62.387.988.479,00	93,03	58.482.725.184,00
	SURPLUS / DEFISIT	(67.060.543.157,00)	(62.387.988.479,00)	93,03	(58.482.725.184,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(67.060.543.157,00)	(62.387.988.479,00)	93,03	(58.482.725.184,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SEKRETARIAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	691.036.336,25	326.455.220,67
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	161.753.412,00	280.662.637,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	852.789.748,25	607.117.857,67
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	6.164.015.740,00	6.164.015.740,00
	Peralatan dan Mesin	33.080.369.306,78	33.859.368.286,78
	Gedung dan Bangunan	58.328.132.188,22	58.328.132.188,22
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	175.060.800,00	175.060.800,00
	Aset Tetap Lainnya	500.749.922,00	500.749.922,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(52.028.871.105,10)	(51.380.091.701,88)
	Jumlah Aset Tetap	46.219.456.851,90	47.647.235.235,12
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	265.576.000,00	166.952.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(191.608.375,00)	(166.952.500,00)
	Aset Lain-Lain	3.370.269.567,00	3.370.269.567,00
	Jumlah Aset Lainnya	3.444.237.192,00	3.370.269.567,00
	JUMLAH ASET	50.516.483.792,15	51.624.622.659,79

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	112.596.611,00	110.157.727,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	112.596.611,00	110.157.727,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	112.596.611,00	110.157.727,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	50.403.887.181,15	51.514.464.932,79
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	50.516.483.792,15	51.624.622.659,79

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 29.705.619.815,00	Rp 30.010.588.507,00	Rp (304.968.692,00)	-1,02
	Beban Persediaan	Rp 10.118.108.186,00	Rp 10.209.788.859,00	Rp (91.680.673,00)	-0,90
	Beban Jasa	Rp 15.686.361.821,42	Rp 13.994.521.457,66	Rp 1.691.840.363,76	12,09
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.102.319.353,00	Rp 863.332.032,00	Rp 238.987.321,00	27,68
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 3.934.726.519,00	Rp 3.303.488.756,00	Rp 631.237.763,00	19,11
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 168.994.278,00	Rp 200.000.000,00	Rp (31.005.722,00)	-15,50
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 2.410.447.614,23	Rp 2.910.778.688,40	Rp (500.331.074,17)	-17,19
	Beban Amortisasi	Rp 24.655.875,00	Rp -	Rp 24.655.875,00	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 63.151.233.461,65	Rp 61.492.498.300,06	Rp 1.658.735.161,59	2,70
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (63.151.233.461,65)	Rp (61.492.498.300,06)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (1.553.916.980,00)	Rp (1.249.391.080,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (1.553.916.980,00)	Rp (1.249.391.080,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (64.705.150.441,65)	Rp (62.741.889.380,06)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (64.705.150.441,65)	Rp (62.741.889.380,06)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEKRETARIAT DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	51.514.464.932,79	51.634.474.798,59
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(64.705.150.441,65)	(62.741.889.380,06)
3	RK PPKD/RK SKPD	62.387.988.479,00	58.456.520.881,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(555.084.000,00)	468.275.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	1.761.668.211,01	3.697.083.633,26
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	50.403.887.181,15	51.514.464.932,79

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	48.595.697.539,00	47.291.696.677,00	97,32	44.596.468.842,00
	Belanja Barang	54.959.876.772,00	49.474.341.027,00	90,02	38.812.193.587,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	103.555.574.311,00	96.766.037.704,00	93,44	83.408.662.429,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.049.785.500,00	971.710.000,00	92,56	655.891.030,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	198.444.000,00	198.000.000,00	99,78	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	199.000.000,00	90.090.000,00	45,27	-
	Jumlah Belanja Modal	1.447.229.500,00	1.259.800.000,00	87,05	655.891.030,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	105.002.803.811,00	98.025.837.704,00	93,36	84.064.553.459,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	105.002.803.811,00	98.025.837.704,00	93,36	84.064.553.459,00
	SURPLUS / DEFISIT	(105.002.803.811,00)	(98.025.837.704,00)	93,36	(84.064.553.459,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(105.002.803.811,00)	(98.025.837.704,00)	93,36	(84.064.553.459,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SEKRETARIAT DPRD
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	44.217.212,33	43.321.623,58
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	61.703.996,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	44.217.212,33	105.025.619,58
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	2.756.775.000,00	2.756.775.000,00
	Peralatan dan Mesin	18.203.640.661,00	16.901.180.661,00
	Gedung dan Bangunan	12.468.490.134,00	12.270.490.134,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	2.261.194.720,00	2.261.194.720,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(20.672.899.988,68)	(19.451.757.853,21)
	Jumlah Aset Tetap	15.017.200.526,32	14.737.882.661,79
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	833.311.000,00	743.221.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(765.743.500,00)	(723.846.000,00)
	Aset Lain-Lain	483.941.200,00	808.347.700,00
	Jumlah Aset Lainnya	551.508.700,00	827.722.700,00
	JUMLAH ASET	15.612.926.438,65	15.670.630.981,37

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	23.951.967,00	20.568.976,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	23.951.967,00	20.568.976,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	23.951.967,00	20.568.976,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	15.588.974.471,65	15.650.062.005,37
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	15.612.926.438,65	15.670.630.981,37

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DPRD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 47.291.696.677,00	Rp 44.596.468.842,00	Rp 2.695.227.835,00	6,04
	Beban Persediaan	Rp 9.549.366.292,00	Rp 5.148.055.236,00	Rp 4.401.311.056,00	85,49
	Beban Jasa	Rp 11.544.590.863,25	Rp 10.008.469.549,59	Rp 1.536.121.313,66	15,35
	Beban Pemeliharaan	Rp 335.733.430,00	Rp 366.520.581,00	Rp (30.787.151,00)	-8,40
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 28.108.841.840,00	Rp 23.211.931.457,00	Rp 4.896.910.383,00	21,10
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 787.580.576,54	Rp 1.174.147.668,91	Rp (386.567.092,37)	-32,92
	Beban Amortisasi	Rp 41.897.500,00	Rp 81.708.250,00	Rp (39.810.750,00)	-48,72
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 97.659.707.178,79	Rp 84.587.301.584,50	Rp 13.072.405.594,29	15,45
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (97.659.707.178,79)	Rp (84.587.301.584,50)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (324.406.500,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (324.406.500,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (97.984.113.678,79)	Rp (84.587.301.584,50)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (97.984.113.678,79)	Rp (84.587.301.584,50)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEKRETARIAT DPRD
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	15.650.062.005,37	14.717.097.392,87
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(97.984.113.678,79)	(84.587.301.584,50)
3	RK PPKD/RK SKPD	98.025.837.704,00	84.064.553.459,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	330.750.000,00	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(433.561.558,93)	1.455.712.738,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	15.588.974.471,65	15.650.062.005,37

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.531.058.515,00	9.820.134.890,00	93,25	9.899.233.046,00
	Belanja Barang	5.412.369.238,00	5.093.585.058,00	94,11	3.836.926.044,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	15.943.427.753,00	14.913.719.948,00	93,54	13.736.159.090,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	793.468.055,00	761.240.300,00	95,94	158.050.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	211.593.920,00	210.348.837,00	99,41	81.752.499,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	1.005.061.975,00	971.589.137,00	96,67	239.802.499,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	16.948.489.728,00	15.885.309.085,00	93,73	13.975.961.589,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	16.948.489.728,00	15.885.309.085,00	93,73	13.975.961.589,00
	SURPLUS / DEFISIT	(16.948.489.728,00)	(15.885.309.085,00)	93,73	(13.975.961.589,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(16.948.489.728,00)	(15.885.309.085,00)	93,73	(13.975.961.589,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	2.174.807,78	2.320.577,78
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	3.310.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	2.174.807,78	5.630.577,78
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	4.072.893.768,59	3.317.504.631,59
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(3.392.078.089,66)	(3.140.448.957,36)
	Jumlah Aset Tetap	690.615.678,93	186.855.674,23
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	280.094.646,90	264.694.646,90
	Akumulasi Amortisasi	(226.118.396,90)	(202.342.146,90)
	Aset Lain-Lain	260.999.740,91	611.842.736,43
	Jumlah Aset Lainnya	314.975.990,91	674.195.236,43
	JUMLAH ASET	1.007.766.477,62	866.681.488,44

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.007.766.477,62	866.681.488,44
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.007.766.477,62	866.681.488,44

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	DID	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 24.425.000		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	24.425.000		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	24.425.000		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.820.134.890,00	Rp 9.899.233.046,00	Rp (79.098.156,00)	-0,80
	Beban Persediaan	Rp 1.679.681.750,00	Rp 1.438.645.800,00	Rp 241.035.950,00	16,75
	Beban Jasa	Rp 2.781.156.320,00	Rp 1.918.767.846,22	Rp 862.388.473,78	44,94
	Beban Pemeliharaan	Rp 130.335.677,00	Rp 198.649.445,00	Rp (68.313.768,00)	-34,39
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 490.467.081,00	Rp 313.744.374,00	Rp 176.722.707,00	56,33
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 242.301.777,30	Rp 185.710.424,91	Rp 56.591.352,39	30,47
	Beban Amortisasi	Rp 23.776.250,00	Rp 23.676.250,01	Rp 99.999,99	0,42
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 15.167.853.745,30	Rp 13.978.427.186,14	Rp 1.189.426.559,17	8,51
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (15.167.853.745,30)	Rp (13.954.002.186,14)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (350.842.995,52)	Rp (731.053.923,24)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (350.842.995,52)	Rp (731.053.923,24)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (15.518.696.740,82)	Rp (14.685.056.109,38)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (15.518.696.740,82)	Rp (14.685.056.109,38)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	866.681.488,44	313.957.358,67
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(15.518.696.740,82)	(14.685.056.109,38)
3	RK PPKD/RK SKPD	15.885.309.085,00	13.975.961.589,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(216.200.000,00)	(123.366.400,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(9.327.355,00)	1.385.185.050,14
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	1.007.766.477,62	866.681.488,44

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	193.265.398.170,00	210.047.163.097,00	108,68	193.890.140.403,00
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409,00	11.627.628.409,00	100,00	11.022.613.597,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	19.833.467.773,00	13.941.963.607,00	70,30	17.489.451.179,53
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	224.726.494.352,00	235.616.755.113,00	104,85	222.402.205.179,53
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	60.444.852.156,00	55.785.582.168,00	92,29	54.229.638.467,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	32.960.972.812,00	26.716.968.211,00	81,06	36.604.255.359,00
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	93.405.824.968,00	82.502.550.379,00	88,33	90.833.893.826,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	154.233.436.377,00	145.938.307.278,00	94,62	146.414.475.669,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Bantuan Keuangan Provinsi				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	154.233.436.377,00	145.938.307.278,00	94,62	146.414.475.669,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	247.639.261.345,00	228.440.857.657,00	92,25	237.248.369.495,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat				
	Dana BOS				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	472.365.755.697,00	464.057.612.770,00	98,24	459.650.574.674,53
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	9.066.543.574,00	8.972.089.236,00	98,96	8.393.236.918,00
	Belanja Barang	4.530.591.192,00	4.160.485.170,00	91,83	3.801.042.761,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	13.597.134.766,00	13.132.574.406,00	96,58	12.194.279.679,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah			-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	217.994.000,00	178.482.900,00	81,88	246.192.119,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	198.971.552,00	186.579.622,00	93,77	
	Jumlah Belanja Modal	416.965.552,00	365.062.522,00	87,55	246.192.119,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	14.014.100.318,00	13.497.636.928,00	96,31	12.440.471.798,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	14.014.100.318,00	13.497.636.928,00	96,31	12.440.471.798,00
	SURPLUS / DEFISIT	458.351.655.379,00	450.559.975.842,00	98,30	447.210.102.876,53
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	458.351.655.379,00	450.559.975.842,00	98,30	447.210.102.876,53

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	(0,00)	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	138.164.438.365,00	134.678.166.819,00
	Penyisihan Piutang	(71.384.856.693,64)	(58.882.194.046,77)
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.615.642.548,00	7.704.535.252,00
	Belanja Dibayar Dimuka	13.951.154,17	2.221.781,67
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	165.220.416,43	217.551.668,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(165.220.416,43)	(217.551.668,00)
	Piutang Lainnya	118.518.568,00	137.074.399,94
	Penyisihan Piutang Lainnya	(26.480.000,00)	(88.142.335,00)
	Persediaan	-	330.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	72.501.213.941,54	83.551.991.870,84
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	5.448.363.577,66	5.426.330.677,66
	Gedung dan Bangunan	167.033.430,00	167.033.430,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	91.863.000,00	91.863.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(5.203.720.371,06)	(5.255.867.884,96)
	Jumlah Aset Tetap	503.539.636,60	429.359.222,70
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	1.873.622.522,00	1.687.042.900,00
	Akumulasi Amortisasi	(1.767.257.339,25)	(1.521.742.350,00)
	Aset Lain-Lain	27.132.358.079,93	9.262.977.858,93
	Jumlah Aset Lainnya	27.238.723.262,68	9.428.278.408,93
	JUMLAH ASET	100.243.476.840,82	93.409.629.502,47

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	1.706.337.515,06	330.272.010,00
	Utang Belanja	926.106,00	1.018.509,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.707.263.621,06	331.290.519,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.707.263.621,06	331.290.519,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	98.536.213.219,75	93.078.338.983,47
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	100.243.476.840,82	93.409.629.502,47

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 213.533.434.643,00	Rp 199.763.900.648,00	Rp 13.769.533.995,00	6,89
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 11.627.628.409,00	Rp 11.022.613.597,00	Rp 605.014.812,00	5,49
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 12.547.342.270,00	Rp 16.878.565.236,94	Rp (4.331.222.966,94)	-25,66
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 237.708.405.322,00	Rp 227.665.079.481,94	Rp 10.043.325.840,06	4,41
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 61.665.229.000,00	Rp 59.967.035.635,00	Rp 1.698.193.365,00	2,83
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp 38.980.064.000,00	Rp 39.358.275.570,00	Rp (378.211.570,00)	-0,96
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 100.645.293.000,00	Rp 99.325.311.205,00	Rp 1.319.981.795,00	1,33
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	DID	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 143.849.414.574,00	Rp 144.324.705.350,00	Rp (475.290.776,00)	-0,33
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 143.849.414.574,00	Rp 144.324.705.350,00	Rp (475.290.776,00)	-0,33
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 244.494.707.574,00	Rp 243.650.016.555,00	Rp 844.691.019,00	0,35
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 482.203.112.896,00	Rp 471.315.096.036,94	Rp 10.888.016.859,06	2,31
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.972.089.236,00	Rp 8.393.236.918,00	Rp 578.852.318,00	6,90
	Beban Persediaan	Rp 808.993.450,00	Rp 880.614.076,00	Rp (71.620.626,00)	-8,13
	Beban Jasa	Rp 2.964.859.443,50	Rp 2.483.016.405,16	Rp 481.843.038,34	19,41
	Beban Pemeliharaan	Rp 153.814.750,00	Rp 217.398.500,00	Rp (63.583.750,00)	-29,25
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 221.325.751,00	Rp 205.358.969,00	Rp 15.966.782,00	7,78
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 144.411.192,40	Rp 93.055.838,40	Rp 51.355.354,00	55,19
	Beban Amortisasi	Rp 245.514.989,25	Rp 182.168.775,00	Rp 63.346.214,25	34,77
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 12.508.831.810,70	Rp 12.136.909.647,60	Rp 371.922.163,10	3,06
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 26.019.840.622,85	Rp 24.591.759.129,16	Rp 1.428.081.493,69	5,81
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 456.183.272.273,15	Rp 446.723.336.907,79		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (273.362.400,00)	Rp (553.730.613,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (273.362.400,00)	Rp (553.730.613,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 455.909.909.873,15	Rp 446.169.606.294,79		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 455.909.909.873,15	Rp 446.169.606.294,79		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	93.078.338.983,47	93.175.116.136,29
2	SURPLUS/DEFISIT LO	455.909.909.873,15	446.169.606.294,79
3	RK PPKD/RK SKPD	(450.559.975.842,00)	(447.210.102.877,00)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(52.331.251,57)	(88.304.419,20)
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(156.450.000,00)	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	120.162.750,40	240.891.208,00
	-Akumulasi Penyusutan	196.558.706,30	791.132.640,60
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	98.536.213.219,75	93.078.338.983,47

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022**

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-		-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum	553.056.036.000,00	553.049.730.500,00	100,00	519.937.401.610,00
	Dana Alokasi Khusus	175.568.107.431,00	170.482.635.757,00	97,10	161.287.016.436,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	728.624.143.431,00	723.532.366.257,00	99,30	681.224.418.046,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian	-	-		5.528.168.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	5.528.168.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
Bantuan Keuangan Provinsi	21.446.376.579,00	21.241.493.000,00	99,04	12.360.600.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	21.446.376.579,00	21.241.493.000,00	99,04	12.360.600.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer	750.070.520.010,00	744.773.859.257,00	99,29	699.113.186.046,00	
II	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah				
	Dana Darurat				
	Dana BOS				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	750.070.520.010,00	744.773.859.257,00	99,29	699.113.186.046,00
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.926.022.109,00	7.160.343.718,00	65,53	7.512.737.104,00
	Belanja Barang	5.757.819.147,00	5.307.530.475,00	92,18	4.251.739.835,17
	Belanja Bunga	500.000.000,00	170.419.912,00	34,08	234.672.144,00
	Belanja Subsidi				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Hibah				
	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	17.183.841.256,00	12.638.294.105,00	73,55	11.999.149.083,17
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	321.753.300,00	310.040.000,00	96,36	221.861.999,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	200.070.000,00	196.822.900,00	98,38	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	46.120.500,00	
Belanja Aset Lainnya					
Jumlah Belanja Modal	521.823.300,00	506.862.900,00	97,13	267.982.499,00	
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	11.128.006.211,00	3.006.837.758,00	27,02	6.050.171.068,00	
Jumlah Belanja Tak Terduga	11.128.006.211,00	3.006.837.758,00	27,02	6.050.171.068,00	
JUMLAH BELANJA	28.833.670.767,00	16.151.994.763,00	56,02	18.317.302.650,17	

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	100.000.000,00
	Jumlah Transfer	-	-	-	100.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	28.833.670.767,00	16.151.994.763,00	56,02	18.417.302.650,17
	SURPLUS / DEFISIT	721.236.849.243,00	728.621.864.494,00	101,02	680.695.883.395,83
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	100,00	308.665.364.620,64
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	251.398.198.142,00	251.398.198.142,00	100,00	308.665.364.620,64
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	9.777.623.090,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.809.000,00	855.508.220,00	35,21	855.508.220,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	32.429.809.000,00	30.855.508.220,00	95,15	10.633.131.310,00
	PEMBIAYAAN NETO	218.968.389.142,00	220.542.689.922,00	100,72	298.032.233.310,64
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	940.205.238.385,00	949.164.554.416,00	100,95	978.728.116.706,47

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	8.020.967.500,00	-
	Kas Dana Bos	357.365.066.849,00	278.068.671.727,00
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	168.299.280,00	101.770.588,92
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	26.804.900,00	11.500.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	365.581.138.529,00	278.181.942.315,92
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	55.898.592,00	52.770.586,00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	55.898.592,00	52.770.586,00
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	70.302.688.408,00	78.105.263.630,50
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	70.302.688.408,00	78.105.263.630,50
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	70.358.587.000,00	78.158.034.216,50
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	10.144.789.481,00	10.035.756.581,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	226.000.000,00	226.000.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(9.507.301.619,46)	(9.651.490.052,87)
	Jumlah Aset Tetap	863.487.861,54	610.266.528,13
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	30.000.000.000,00	-
	Jumlah Dana Cadangan	30.000.000.000,00	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	657.107.500,00	519.907.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(538.531.000,00)	(448.317.125,00)
	Aset Lain-Lain	395.136.989,00	528.212.241,00
	Jumlah Aset Lainnya	513.713.489,00	599.802.616,00
	JUMLAH ASET	467.316.926.879,54	357.550.045.676,55

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	61.632.238,01	92.533.016,65
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	855.508.220,00	855.508.220,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	39.186,00	38.686,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.380.011.807,00	1.380.011.807,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.297.191.451,01	2.328.091.729,65
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	855.508.218,70	1.711.016.438,70
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	855.508.218,70	1.711.016.438,70
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.152.699.669,71	4.039.108.168,35
III	EKUITAS		
	EKUITAS	464.164.227.209,83	353.510.937.508,20
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	467.316.926.879,54	357.550.045.676,55

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp 553.049.730.500	Rp 519.937.401.610	Rp 33.112.328.890	6,37
	Dana Alokasi Khusus	Rp 170.482.635.757	Rp 161.287.016.436	Rp 9.195.619.321	5,70
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 723.532.366.257	Rp 681.224.418.046	Rp 42.307.948.211	6,21
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp 5.528.168.000	Rp (5.528.168.000)	-100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp 5.528.168.000	Rp (5.528.168.000)	-100,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp 21.241.493.000	Rp 12.360.600.000	Rp 8.880.893.000	71,85
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 21.241.493.000	Rp 12.360.600.000	Rp 8.880.893.000	71,85
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 744.773.859.257	Rp 699.113.186.046	Rp 45.660.673.211	6,53
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 744.773.859.257	Rp 699.113.186.046	Rp 45.660.673.211	6,53
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 7.160.343.718,00	Rp 7.512.737.104,00	Rp (352.393.386,00)	-4,69
	Beban Persediaan	Rp 1.653.923.050,00	Rp 1.657.004.103,00	Rp (3.081.053,00)	-0,19
	Beban Jasa	Rp 2.699.691.358,92	Rp 2.196.511.214,28	Rp 503.180.144,64	22,91
	Beban Pemeliharaan	Rp 159.147.855,00	Rp 158.439.800,00	Rp 708.055,00	0,45
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 575.735.120,00	Rp 388.452.535,00	Rp 187.282.585,00	48,21
	Beban Bunga	Rp 139.519.133,36	Rp 198.166.004,18	Rp (58.646.870,82)	-29,59
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 238.082.030,51	Rp 380.755.289,08	Rp (142.673.258,57)	-37,47
	Beban Amortisasi	Rp 90.213.875,00	Rp 55.913.875,00	Rp 34.300.000,00	61,34
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp (100.000.000,00)	-100,00
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.716.656.140,80	Rp 12.647.979.924,54	Rp 68.676.216,25	0,54
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 732.057.203.116,20	Rp 686.465.206.121,46	Rp -	-
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (545.455.252,00)	Rp (599.499.467,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (545.455.252,00)	Rp (599.499.467,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 731.511.747.864,20	Rp 685.865.706.654,46		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp 1.626.517.480,00	Rp 5.570.083.787,00		
	Beban Luar Biasa	Rp (1.626.517.480,00)	Rp (5.570.083.787,00)		
	POS LUAR BIASA	Rp (1.626.517.480,00)	Rp (5.570.083.787,00)		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 729.885.230.384,20	Rp 680.295.622.867,46		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	353.510.937.508,20	269.235.103.715,10
2	SURPLUS/DEFISIT LO	729.885.230.384,20	680.295.622.867,46
3	RK PPKD/RK SKPD	(610.448.993.652,00)	(596.404.407.966,49)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI UTANG	-	(60.087.009,00)
8	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(157.614.875,00)	(194.051.245,00)
9	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(1.208.155.403,00)	(588.273.286,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	382.270.463,93	1.391.203.205,13
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	(7.799.447.216,50)	(164.172.773,00)
14	EKUITAS AKHIR	464.164.227.209,83	353.510.937.508,20

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.318.846.632,00	5.824.514.799,00	92,18	6.060.465.577,00
	Belanja Barang	6.121.093.620,00	4.884.741.157,00	79,80	4.289.726.140,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	12.439.940.252,00	10.709.255.956,00	86,09	10.350.191.717,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	157.479.000,00	148.950.000,00	94,58	19.652.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	157.479.000,00	148.950.000,00	94,58	19.652.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	12.597.419.252,00	10.858.205.956,00	86,19	10.369.843.717,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	12.597.419.252,00	10.858.205.956,00	86,19	10.369.843.717,00
	SURPLUS / DEFISIT	(12.597.419.252,00)	(10.858.205.956,00)	86,19	(10.369.843.717,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(12.597.419.252,00)	(10.858.205.956,00)	86,19	(10.369.843.717,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	3.723.500,00	3.352.970,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	3.723.500,00	3.352.970,83
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.396.481.604,00	2.247.531.604,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.231.321.354,00)	(2.131.224.729,00)
	Jumlah Aset Tetap	165.160.250,00	116.306.875,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	378.260.500,00	378.260.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(378.260.500,00)	(378.260.500,00)
	Aset Lain-Lain	95.187.000,00	424.577.813,00
	Jumlah Aset Lainnya	95.187.000,00	424.577.813,00
	JUMLAH ASET	264.070.750,00	544.237.658,83

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	39.186,00	46.234,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	39.186,00	46.234,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	39.186,00	46.234,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	264.031.564,00	544.191.424,83
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	264.070.750,00	544.237.658,83

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 5.824.514.799,00	Rp 6.060.465.577,00	Rp (235.950.778,00)	-3,89
	Beban Persediaan	Rp 1.191.982.500,00	Rp 1.095.433.530,00	Rp 96.548.970,00	8,81
	Beban Jasa	Rp 2.814.932.589,83	Rp 2.627.304.627,17	Rp 187.627.962,66	7,14
	Beban Pemeliharaan	Rp 99.175.900,00	Rp 100.087.550,00	Rp (911.650,00)	-0,91
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 778.272.590,00	Rp 466.936.644,00	Rp 311.335.946,00	66,68
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 90.141.600,00	Rp 68.423.137,50	Rp 21.718.462,50	31,74
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 10.799.019.978,83	Rp 10.418.651.065,67	Rp 380.368.913,16	3,65
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (10.799.019.978,83)	Rp (10.418.651.065,67)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (329.390.813,00)	Rp (291.388.600,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (329.390.813,00)	Rp (291.388.600,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (11.128.410.791,83)	Rp (10.710.039.665,67)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (11.128.410.791,83)	Rp (10.710.039.665,67)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2022	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	544.191.424,83	163.791.773,00
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(11.128.410.791,83)	(10.710.039.665,67)
3	RK PPKD/RK SKPD	10.858.205.956,00	10.369.843.717,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(9.955.025,00)	720.595.600,50
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	264.031.564,00	544.191.424,83

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.686.280.682,00	8.492.661.799,00	97,77	7.964.474.408,00
	Belanja Barang	4.533.787.407,00	3.378.095.317,00	74,51	1.778.381.680,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	13.220.068.089,00	11.870.757.116,00	89,79	9.742.856.088,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	591.950.810,00	451.511.513,00	76,28	187.350.305,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	121.809.773,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	591.950.810,00	451.511.513,00	76,28	309.160.078,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	13.812.018.899,00	12.322.268.629,00	89,21	10.052.016.166,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	13.812.018.899,00	12.322.268.629,00	89,21	10.052.016.166,00
	SURPLUS / DEFISIT	(13.812.018.899,00)	(12.322.268.629,00)	89,21	(10.052.016.166,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(13.812.018.899,00)	(12.322.268.629,00)	89,21	(10.052.016.166,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA INSPEKTORAT KOTA
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	14.564.575,00	15.270.946,67
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	1.899.881,00	1.378.300,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	16.464.456,00	16.649.246,67
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.676.844.190,00	2.100.531.301,00
	Gedung dan Bangunan	4.542.127.425,00	4.542.127.425,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.700.452.247,11)	(2.436.771.820,37)
	Jumlah Aset Tetap	4.518.519.367,89	4.205.886.905,63
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	49.700.000,00	49.700.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(49.700.000,00)	(49.700.000,00)
	Aset Lain-Lain	47.942.000,00	47.942.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	47.942.000,00	47.942.000,00
	JUMLAH ASET	4.582.925.823,89	4.270.478.152,30

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	3.226.727,00	2.752.677,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.226.727,00	2.752.677,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.226.727,00	2.752.677,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	4.579.699.096,89	4.267.725.475,30
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.582.925.823,89	4.270.478.152,30

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL INSPEKTORAT KOTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.492.661.799,00	Rp 7.964.474.408,00	Rp 528.187.391,00	6,63
	Beban Persediaan	Rp 437.792.038,00	Rp 553.080.423,00	Rp (115.288.385,00)	-20,84
	Beban Jasa	Rp 1.406.271.781,67	Rp 884.164.972,00	Rp 522.106.809,67	59,05
	Beban Pemeliharaan	Rp 108.121.749,00	Rp 91.976.000,00	Rp 16.145.749,00	17,55
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 1.301.767.213,00	Rp 261.068.287,00	Rp 1.040.698.926,00	398,63
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 283.401.641,02	Rp 257.223.808,41	Rp 26.177.832,61	10,18
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.030.016.221,69	Rp 10.011.987.898,41	Rp 2.018.028.323,28	20,16
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (12.030.016.221,69)	Rp (10.011.987.898,41)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (335.168.550,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (335.168.550,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (12.030.016.221,69)	Rp (10.347.156.448,41)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (12.030.016.221,69)	Rp (10.347.156.448,41)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INSPEKTORAT KOTA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	4.267.725.475,30	4.192.443.047,71
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(12.030.016.221,69)	(10.347.156.448,41)
3	RK PPKD/RK SKPD	12.322.268.629,00	10.052.016.166,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	(12.440.000,00)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	19.721.214,28	382.862.710,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	4.579.699.096,89	4.267.725.475,30

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CIMAHI UTARA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana BOS Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN				
II	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Bantuan Keuangan Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA	9.761.450.075,00 18.502.881.950,00 - - - - - - 28.264.332.025,00 - 417.465.000,00 - - - - 417.465.000,00 - - - - - - 28.681.797.025,00	9.340.873.190,00 17.879.455.936,00 - - - - - - 27.220.329.126,00 - 380.731.000,00 - - - - 380.731.000,00 - - - - - - 27.601.060.126,00	95,69 96,63 - - - - - 96,31 - 91,20 - - - 91,20 - - - - - - 96,23	9.608.102.943,00 19.290.301.669,00 - - - - - - 28.898.404.612,00 - 48.285.000,00 - - - - 48.285.000,00 - - - - - - 28.946.689.612,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	28.681.797.025,00	27.601.060.126,00	96,23	28.946.689.612,00
	SURPLUS / DEFISIT	(28.681.797.025,00)	(27.601.060.126,00)	96,23	(28.946.689.612,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(28.681.797.025,00)	(27.601.060.126,00)	96,23	(28.946.689.612,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI UTARA
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	12.799.762,50	11.812.975,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	12.799.762,50	11.812.975,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	10.479.245.000,00	12.194.245.000,00
	Peralatan dan Mesin	5.625.449.646,11	5.244.718.646,11
	Gedung dan Bangunan	6.539.117.500,00	6.539.117.500,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.558.364,00	49.558.364,00
	Aset Tetap Lainnya	7.792.489,00	7.792.489,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(7.415.417.385,73)	(7.093.526.780,71)
	Jumlah Aset Tetap	15.285.745.613,38	16.941.905.218,40
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	71.193.750,00	71.193.750,00
	Akumulasi Amortisasi	(71.193.750,00)	(71.193.750,00)
	Aset Lain-Lain	902.654.634,44	902.654.634,44
	Jumlah Aset Lainnya	902.654.634,44	902.654.634,44
	JUMLAH ASET	16.201.200.010,32	17.856.372.827,84

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	5.132.450,00	5.465.448,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.132.450,00	5.465.448,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.132.450,00	5.465.448,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	16.196.067.560,32	17.850.907.379,84
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16.201.200.010,32	17.856.372.827,84

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.340.873.190,00	Rp 9.608.102.943,00	Rp (267.229.753,00)	-2,78
	Beban Persediaan	Rp 4.242.067.847,00	Rp 8.951.945.530,00	Rp (4.709.877.683,00)	-52,61
	Beban Jasa	Rp 12.972.331.136,50	Rp 9.629.998.129,00	Rp 3.342.333.007,50	34,71
	Beban Pemeliharaan	Rp 447.172.167,00	Rp 595.370.513,00	Rp (148.198.346,00)	-24,89
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 216.565.000,00	Rp 111.910.000,00	Rp 104.655.000,00	93,52
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 454.923.939,11	Rp 428.734.224,81	Rp 26.189.714,30	6,11
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 27.673.933.279,61	Rp 29.326.061.339,81	Rp (1.652.128.060,20)	-5,63
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (27.673.933.279,61)	Rp (29.326.061.339,81)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (323.888.001,49)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (323.888.001,49)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (27.673.933.279,61)	Rp (29.649.949.341,30)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (27.673.933.279,61)	Rp (29.649.949.341,30)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI UTARA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	17.850.907.379,84	17.334.847.148,65
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(27.673.933.279,61)	(29.649.949.341,30)
3	RK PPKD/RK SKPD	27.601.060.126,00	28.946.591.006,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(1.715.000.000,00)	27.720.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	133.033.334,09	1.191.698.566,49
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	16.196.067.560,32	17.850.907.379,84

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CIMAHI TENGAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	12.581.590.061,00	12.328.923.349,00	97,99	12.907.166.913,00
	Belanja Barang	25.367.889.278,00	24.628.641.815,00	97,09	26.450.773.201,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	37.949.479.339,00	36.957.565.164,00	97,39	39.357.940.114,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	882.903.000,00	802.423.200,00	90,88	177.190.670,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	99.337.807,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	882.903.000,00	802.423.200,00	90,88	276.528.477,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	38.832.382.339,00	37.759.988.364,00	97,24	39.634.468.591,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	38.832.382.339,00	37.759.988.364,00	97,24	39.634.468.591,00
	SURPLUS / DEFISIT	(38.832.382.339,00)	(37.759.988.364,00)	97,24	(39.634.468.591,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(38.832.382.339,00)	(37.759.988.364,00)	97,24	(39.634.468.591,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI TENGAH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	19.799.796,67	17.965.050,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	19.799.796,67	17.965.050,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	10.039.095.128,00	10.506.345.128,00
	Peralatan dan Mesin	9.581.812.579,28	8.779.389.379,28
	Gedung dan Bangunan	10.749.085.581,00	11.789.085.581,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21.263.637,00	21.263.637,00
	Aset Tetap Lainnya	3.896.246,00	3.896.246,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(11.759.987.378,30)	(11.264.006.216,01)
	Jumlah Aset Tetap	18.635.165.792,98	19.835.973.755,27
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	173.664.500,00	173.664.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(167.416.500,00)	(161.168.500,00)
	Aset Lain-Lain	618.216.850,00	618.216.850,00
	Jumlah Aset Lainnya	624.464.850,00	630.712.850,00
	JUMLAH ASET	19.279.430.439,65	20.484.651.655,27

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	13.165.486,00	12.682.529,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	13.165.486,00	12.682.529,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	13.165.486,00	12.682.529,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	19.266.264.953,65	20.471.969.126,27
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	19.279.430.439,65	20.484.651.655,27

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2021	20.471.969.126,27	20.291.681.078,80
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(37.800.949.401,45)	(40.501.509.325,84)
3	RK PPKD/RK SKPD	37.759.988.364,00	39.634.468.591,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(1.507.250.000,00)	17.720.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	342.506.864,83	1.029.608.782,31
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	19.266.264.953,65	20.471.969.126,27

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CIMAHI SELATAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	12.573.923.085,00	12.017.123.565,00	95,57	12.132.635.605,00
	Belanja Barang	22.963.762.409,00	22.478.021.325,00	97,88	23.632.562.365,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	35.537.685.494,00	34.495.144.890,00	97,07	35.765.197.970,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	641.643.000,00	571.555.000,00	89,08	122.253.450,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	122.920.000,00	120.319.565,00	97,88	186.172.155,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	764.563.000,00	691.874.565,00	90,49	308.425.605,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	36.302.248.494,00	35.187.019.455,00	96,93	36.073.623.575,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	36.302.248.494,00	35.187.019.455,00	96,93	36.073.623.575,00
	SURPLUS / DEFISIT	(36.302.248.494,00)	(35.187.019.455,00)	96,93	(36.073.623.575,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(36.302.248.494,00)	(35.187.019.455,00)	96,93	(36.073.623.575,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	9.092.058,33	7.659.976,67
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	9.092.058,33	7.659.976,67
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	13.463.905.000,00	15.227.905.000,00
	Peralatan dan Mesin	8.163.433.659,00	7.591.878.659,00
	Gedung dan Bangunan	6.888.244.521,00	6.767.924.956,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	189.574.684,75	189.574.684,75
	Aset Tetap Lainnya	9.812.492,00	9.812.492,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(9.628.113.618,75)	(9.032.145.397,22)
	Jumlah Aset Tetap	19.086.856.738,00	20.754.950.394,53
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	100.595.000,00	100.595.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(100.595.000,00)	(89.595.000,00)
	Aset Lain-Lain	540.454.338,30	958.649.338,30
	Jumlah Aset Lainnya	540.454.338,30	969.649.338,30
	JUMLAH ASET	19.636.403.134,63	21.732.259.709,50

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	8.755.896,00	5.868.793,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8.755.896,00	5.868.793,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	8.755.896,00	5.868.793,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	19.627.647.238,63	21.726.390.916,50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	19.636.403.134,63	21.732.259.709,50

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI SELATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 12.017.123.565,00	Rp 12.132.635.605,00	Rp (115.512.040,00)	-0,95
	Beban Persediaan	Rp 5.448.418.100,00	Rp 11.345.329.276,00	Rp (5.896.911.176,00)	-51,98
	Beban Jasa	Rp 16.288.097.527,34	Rp 11.497.841.253,00	Rp 4.790.256.274,34	41,66
	Beban Pemeliharaan	Rp 579.172.719,00	Rp 663.480.775,00	Rp (84.308.056,00)	-12,71
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 163.788.000,00	Rp 170.576.321,00	Rp (6.788.321,00)	-3,98
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 583.375.759,05	Rp 504.357.192,57	Rp 79.018.566,48	15,67
	Beban Amortisasi	Rp 11.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 35.090.975.670,39	Rp 36.325.220.422,57	Rp (1.234.244.752,18)	-3,40
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (35.090.975.670,39)	Rp (36.325.220.422,57)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (418.195.000,00)	Rp (501.563.150,11)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (418.195.000,00)	Rp (501.563.150,11)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (35.509.170.670,39)	Rp (36.826.783.572,68)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (35.509.170.670,39)	Rp (36.826.783.572,68)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	21.726.390.916,50	20.656.061.452,20
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(35.509.170.670,39)	(36.826.783.572,68)
3	RK PPKD/RK SKPD	35.187.019.455,00	36.073.623.575,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(1.764.000.000,00)	49.815.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(12.592.462,48)	1.773.674.461,98
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	19.627.647.238,63	21.726.390.916,50

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana BOS	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	5.929.623.075,00	5.233.510.424,00	88,26	3.417.491.664,00
	Belanja Barang	6.985.193.100,00	6.129.446.661,00	87,75	3.588.036.640,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Belanja Hibah	20.999.192.600,00	20.999.192.600,00	100,00	1.819.026.450,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	33.914.008.775,00	32.362.149.685,00	95,42	8.824.554.754,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	162.855.590,00	150.114.523,00	92,18	72.616.250,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	162.855.590,00	150.114.523,00	92,18	72.616.250,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	34.076.864.365,00	32.512.264.208,00	95,41	8.897.171.004,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER				
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	34.076.864.365,00	32.512.264.208,00	95,41	8.897.171.004,00
	SURPLUS / DEFISIT	(34.076.864.365,00)	(32.512.264.208,00)	95,41	(8.897.171.004,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(34.076.864.365,00)	(32.512.264.208,00)	95,41	(8.897.171.004,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	41.875.895,84	35.561.250,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	21.260.476,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	63.136.371,84	35.561.250,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	2.075.500.000,00	2.075.500.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.155.725.119,00	1.002.110.596,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	3.446.000,00	3.446.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(996.808.440,40)	(932.884.850,70)
	Jumlah Aset Tetap	2.237.862.678,60	2.148.171.745,30
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	47.492.500,00	47.492.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(35.619.375,00)	(23.746.250,00)
	Aset Lain-Lain	96.728.500,00	96.728.500,00
	Jumlah Aset Lainnya	108.601.625,00	120.474.750,00
	JUMLAH ASET	2.409.600.675,44	2.304.207.745,30

No.	Uraian	2023	2022
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	38.686,00	71.870,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	38.686,00	71.870,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	38.686,00	71.870,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.409.561.989,44	2.304.135.875,30
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.409.600.675,44	2.304.207.745,30

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 5.233.510.424,00	Rp 3.417.491.664,00	Rp 1.816.018.760,00	53,14
	Beban Persediaan	Rp 2.628.614.824,00	Rp 903.776.500,00	Rp 1.724.838.324,00	190,85
	Beban Jasa	Rp 2.537.624.626,16	Rp 2.237.246.551,33	Rp 300.378.074,83	13,43
	Beban Pemeliharaan	Rp 182.559.310,00	Rp 51.366.531,00	Rp 131.192.779,00	255,41
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 749.539.595,00	Rp 392.047.952,00	Rp 357.491.643,00	91,19
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 20.999.192.600,00	Rp 1.819.026.450,00	Rp 19.180.166.150,00	1054,42
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 58.936.089,70	Rp 27.874.415,10	Rp 31.061.674,60	111,43
	Beban Amortisasi	Rp 11.873.125,00	Rp 11.873.125,00	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 32.401.850.593,86	Rp 8.860.703.188,43	Rp 23.541.147.405,43	265,68
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (32.401.850.593,86)	Rp (8.860.703.188,43)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (87.405.200,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (87.405.200,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (32.401.850.593,86)	Rp (8.948.108.388,43)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (32.401.850.593,86)	Rp (8.948.108.388,43)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN PARTAI POLITIK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2022	2.304.135.875,30	2.164.867.611,03
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(32.401.850.593,86)	(8.948.108.388,43)
3	RK PPKD/RK SKPD	32.512.264.208,00	8.897.171.004,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	-	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	173.900.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(4.987.500,00)	16.305.648,70
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	2.409.561.989,44	2.304.135.875,30



Alamat :

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Jalan Raden Demang

Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang

Telepon (022) 6654274, 6641931, 6641963 Fax. (022) 6654274

Website: www.cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat